



## BUPATI SITUBONDO

### PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO  
NOMOR 66 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Situbondo melalui pengkajian dan pemetaan permasalahan kemiskinan yang menjadi faktor determinan kemiskinan Kabupaten Situbondo, diperlukan perumusan strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tepat, efektif, efisien, melalui perencanaan dan penganggaran program kegiatan kemiskinan yang terarah, terpadu dan berkelanjutan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten /Kota, Pemerintah Daerah melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten berwenang untuk menyusun dan menetapkan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang terintegrasi dengan Dokumen Perencanaan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 6);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025-2029.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk percepatan penanggulangan

kemiskinan di Daerah.

6. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahunan.
7. Rencana Aksi Tahunan adalah rencana kerja pembangunan Daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Laporan Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disebut LP2KD adalah laporan yang disusun TKPKD setiap tahunnya sebagai sarana monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan daerah.
9. Penduduk Miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kabupaten Situbondo yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) dan/atau Kartu Keluarga (KK).
10. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

#### Pasal 2

- (1) RPKD dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Aksi Tahunan untuk setiap jangka waktu 1 (satu) tahun, khususnya strategi dan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Rencana Aksi Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya;
  - b. kebijakan dan strategi tahun berjalan;
  - c. matriks target keberhasilan; dan
  - d. lokasi prioritas.

#### Pasal 3

RKPD bertujuan untuk mewujudkan perencanaan penanggulangan kemiskinan yang sinergis, terpadu, tepat sasaran dan berkelanjutan serta dapat berkontribusi secara maksimal terhadap upaya percepatan penurunan kemiskinan di Daerah.

### BAB II SISTEMATIKA

#### Pasal 4

- (1) Dokumen RPKD Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - BAB I : PENDAHULUAN
  - BAB II : KONDISI UMUM DAERAH
  - BAB III : PROFIL KEMISKINAN DAERAH
  - BAB IV : PRIORITAS PROGRAM
  - BAB V : PRIORITAS WILAYAH

## BAB VI : PENUTUP

- (2) Uraian secara rinci Dokumen RPKD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 5

- (1) TKPKD melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD Tahun 2025-2029.
- (2) Pemantauan dan evaluasi kemiskinan dilakukan dengan menyusun LP2KD setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pemantauan dan evaluasi kemiskinan ekstrem dilakukan dengan menyusun Laporan Kemiskinan Ekstrem setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (4) Kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Gubernur melalui Wakil Gubernur selaku Ketua TKPK Provinsi Jawa Timur.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
Pada tanggal 16 Desember 2024  
BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo  
Pada tanggal 16 Desember 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN



SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.  
Penata (III/c)

19850725 201503 1 001

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kemiskinan kini telah menjadi isu global dan nasional. Persoalan kemiskinan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat jika dilihat dari penyebabnya, secara umum dapat dibedakan menjadi dua yakni kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Dalam konteks struktur dapat difahami bahwa kemiskinan terjadi dikarenakan penguasaan sumber-sumber ekonomi tidak merata di masyarakat sehingga menjadi hambatan struktural dan memicu kesenjangan secara ekonomi. Selain dalam konteks ekonomi, kemiskinan juga berkaitan dengan kemampuan dalam memenuhi hak-hak dasar, antara lain terpenuhinya kebutuhan pangan, Pendidikan, Kesehatan, pekerjaan, perumahan, air bersih, dan lainnya.

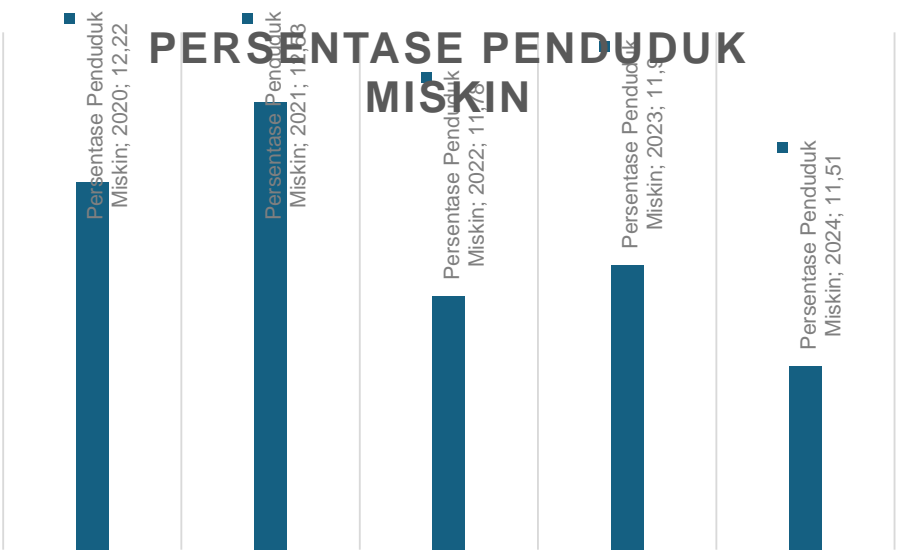
Sedangkan terkait dengan kemiskinan kultural, saat ini juga menjadi kenyataan yang masih berkembang dan tanpa disadari telah melembaga dalam masyarakat. Kemiskinan dalam konteks kultural (budaya) bukan hanya terkait dengan masalah kelangkaan sumber-sumber ekonomi, ketidakadilan distribusi sarana produksi atau dominasi akses modal finansial oleh golongan tertentu saja tetapi menyangkut sikap mental, pola perilaku, dan pilihan sikap yang berasal dari state of mind (pola pikir dan sikap mental) yang tak mampu berjalan beriringan dengan semangat perubahan, kemajuan dan peningkatan status serta kualitas kehidupan. Pengaruh nilai-nilai budaya terhadap kemiskinan di sampaikan oleh Koentjaraningrat (1983), bahwa budaya yang akhirnya menjadi penyebab kemiskinan dikarenakan mentalitas yang berkembang dalam masyarakat Indonesia secara umum, karakternya pasrah dengan keadaannya (*nrimo ing pandum*) dan menganggap bahwa kondisi miskin yang sedang di alami dikarenakan faktor keturunan yang tidak bisa diubah (*takdir*).

Terkait hal tersebut, maka dalam proses penyusunan kebijakan penanggulangan kemiskinan selain dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan orang miskin, mengurangi beban pengeluaran dan memberikan lingkungan permukiman yang layak harus pula menyertakan nilai-nilai sosial budaya yang berkembang di masyarakat. Pemerintah bersama stakeholder perlu membuat masyarakat bisa menyadari bahwa sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat sangat mempengaruhi pola pikir dan menghambat kemajuan (adanya kemiskinan kultural). Oleh karena itu berbagai kebijakan, strategi, program, dan kegiatan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang diarahkan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin juga memperhatikan aspek sosial budaya masyarakat.

Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam penanggulangan kemiskinan antara lain: a) terbatasnya cakupan dan belum meratanya pelayanan bantuan sosial; b) masih adanya ketimpangan tingkat kesejahteraan masyarakat antar daerah; c) akses masyarakat terhadap

kebutuhan dasar belum maksimal, dan terdapat perbedaan akses antar kelompok pendapatan; d) globalisasi yang berdampak pada gejolak ekonomi sehingga menimbulkan kerentanan di dalam masyarakat terutama masyarakat miskin. Kendatipun demikian tentu permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan berbeda antara daerah yang satu dengan daerah lainnya.

Kompleksitas penanggulangan kemiskinan juga dirasakan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo. Berbagai arah kebijakan dan strategi untuk penanganan kemiskinan juga telah memperhatikan pendekatan struktural maupun kultural dan membuka ruang kolaborasi antara pemerintah daerah dengan stakeholder pembangunan, namun capaian kinerja penurunan persentase masyarakat miskin selama lima tahun terakhir masih mengalami trend yang flukatif. Hal tersebut sebagaimana yang dapat dilihat pada grafis di bawah ini:



Gambar 1. 1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Situbondo 2020 – 2029

Sumber: BPS Jawa Timur, 2024

Angka persentase penduduk miskin terus mengalami peningkatan 2021. Hal tersebut tentu tidak bisa dihindarkan dari faktor adanya pandemic covid-19 yang tidak hanya memberikan pengaruh pada aspek Kesehatan, namun juga memberikan pengaruh pada seluruh kehidupan sosial masyarakat, sehingga angka pengangguran dan ketimpangan mengalami peningkatan dan pertumbuhan ekonomi juga mengalami kontraksi. Tahun 2022 sebagai tahun transisi pandemic covid-19 menuju endemi, persentase penduduk miskin di Kabupaten Situbondo dapat ditekan kembali dari 11,78%, tahun 2023 kembali menunjukkan peningkatan dan di tahun 2024 turun menjadi 11,51. Kesimpulan dari angka kemiskinan situbondo yaitu mengalami trend penurunan tetapi masih dibawah rata rata jatim dan angkanya relatif fluktuaktif.

Mengingat kompleksitas penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Situbondo, untuk efektifitas penurunan persentase angka kemiskinan sebagai tujuan utama dari pembangunan suatu daerah, maka diperlukan adanya dokumen perencanaan penanggulangan kemiskinan jangka menengah yakni Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) sebagaimana yang

dimandatkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 53 tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.

Selanjutnya di dalam penyusunan RPKD juga harus selaras dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo tahun 2025 – 2029. Adanya dokumen RPKD Kabupaten Situbondo tahun 2025-2029 dengan pendekatan konseptual dan scenario serta intervensi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan diharapkan dapat mengurai persoalan kemiskinan yang kompleks menjadi lebih mudah, sehingga kemiskinan di Kabupaten Situbondo pada periodisasi tertentu memiliki trend positif.

Sebagai dokumen rencana kerja daerah yang bertujuan untuk mengintegrasikan dan menyeleraskan program, kegiatan dan sub kegiatan multi sectoral, maka di dalam RPKD Kabupaten Situbondo tahun 2025-2029 tertuang sasaran, indikator dan target tahunan yang harus dicapai. Dengan demikian maka dapat dijadikan panduan bagi perangkat daerah dan stakeholder terkait dalam rangka mendukung upaya akselerasi penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Situbondo

## 1.2 Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- e. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan sebagai arah Implementasi Program–Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- f. Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
- g. Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan.
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 53 tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari adanya dokumen RPKD Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029 yakni: (a) Sebagai referensi dalam memberikan arah dan pedoman bagi pemerintah daerah untuk menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai arus utama (mainstreaming) dalam penyusunan program kerja pembangunan sehingga dapat mengakselerasi upaya penanggulangan kemiskinan selama lima tahun ke depan; dan (b) Sebagai pedoman dalam mengkoordinasikan dan mensinergikan peran perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Situbondo, Instansi vertikal dan stakeholder pembangunan dalam menentukan target dan sasaran lokasi yang harus dicapai.

Sedangkan tujuan dari disusunnya Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah adalah:

- a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kondisi kemiskinan di Kabupaten Situbondo secara umum yang kemudian akan dipetakan berdasarkan karakteristiknya;
- b. Memberikan arah kebijakan dan tujuan penanggulangan kemiskinan yang ingin dicapai 5 (lima) tahun kedepan;
- c. Meningkatkan komitmen pemerintah Kabupaten Situbondo, masyarakat, media massa, organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam kolaborasi untuk akselerasi penurunan kemiskinan di tahun 2025-2029; dan
- d. Menjadi salah satu tolok ukur dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika dokumen Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, terdiri dari:

1. BAB I. PENDAHULUAN, memuat mengenai latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan dan sasaran penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Situbondo.
2. BAB II. KONDISI UMUM DAERAH, memuat aspek geografis dan demografis, aspek kesejahteraan masyarakat meliputi fokus kesejahteraan, pemerataan ekonomi dan fokus pada aspek kesejahteraan sosial serta sosial budaya masyarakat.
3. BAB III. PROFIL KEMISKINAN DAERAH, memuat mengenai kondisi umum kemiskinan daerah, capaian indikator kemiskinan pada *sustainable development goal's*, permasalahan umum kemiskinan dan aspek manajerial penanggulangan kemiskinan.
4. BAB IV. PRIORITAS PROGRAM, memuat tinjauan kebijakan penanggulangan kemiskinan secara Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Situbondo, analisis akar masalah (determinan) kemiskinan, kondisi fiskal, rumusan strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan serta rumusan prioritas sasaran dan program intervensi.

5. BAB V PRIORITAS WILAYAH, memuat berkaitan dengan prioritas intervensi kemiskinan berbasis kewilayahan dengan dasar data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang dirilis oleh Pemerintah Pusat, proses pemetaan ini dilakukan dengan melakukan *overlaying* data kemiskinan ekstrem dengan sektor-sektor yang memiliki daya ungkit tinggi ke dalam peta kewilayahan Kabupaten Situbondo sehingga memunculkan beberapa wilayah prioritas Intervensi berdasarkan sektor-sektor.
6. BAB VI. PENUTUP, memuat mengenai harapan dukungan dan komitmen pemerintah Kabupaten Situbondo dalam implementasi Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029.

BAB II

KONDISI UMUM DAERAH

2.1 Aspek Geografi

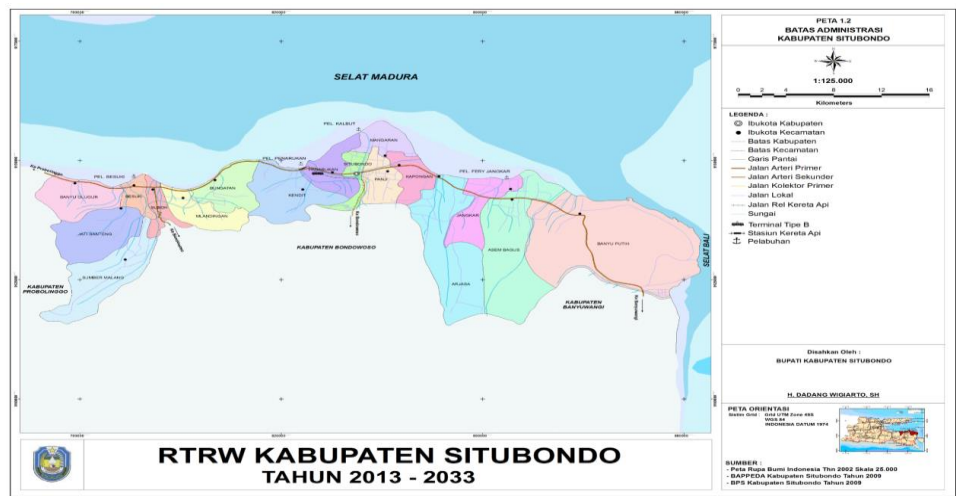
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kabupaten Situbondo, yang terletak di Jawa Timur, memiliki karakteristik wilayah yang beragam. Kabupaten ini berada di ketinggian antara 0 hingga 1.250 meter di atas permukaan laut, dengan iklim yang diklasifikasikan sebagai daerah kering menurut Klasifikasi Iklim Schmidt dan Fergusson. Temperatur rata-rata di Situbondo berkisar antara 24,7°C hingga 30°C, dengan curah hujan tahunan antara 994 mm hingga 1.503 mm. Dari segi demografi, pada tahun 2022, jumlah penduduk Kabupaten Situbondo mencapai sekitar 691.260 jiwa. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa terdapat 339.230 laki-laki dan 352.030 perempuan.

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Situbondo merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang dikenal dengan Wisata Pantai Pasir Putihnya. Kabupaten Situbondo memiliki luas sebesar 1.638,50 km<sup>2</sup> atau 163.850 Ha yang bentuknya memanjang dari Barat ke Timur sepanjang Pantai Selat Madura ± 140 Km dengan lebar rata-rata ± 11 Km. Secara astronomis, Kabupaten Situbondo terletak ujung Timur pulau Jawa bagian Utara dengan posisi di antara 7o 35' - 7o 44' Lintang Selatan dan 113o 30' - 114o 42' Bujur Timur. Sementara itu, secara administrasi, batas wilayah Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Selat Madura
- 2) Sebelah Timur : Selat Bali
- 3) Sebelah Selatan : Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi
- 4) Sebelah Barat : Kabupaten Probolinggo



Gambar 2. 1 Peta Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2033  
Sumber: BPS Kabupaten Situbondo, 2024

Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa dengan luas wilayah Kabupaten Situbondo yang mencapai 1.638,50 km<sup>2</sup> km<sup>2</sup> secara

administrasi pemerintahan terbagi menjadi 17 Kecamatan dan 132 Desa, 4 Kelurahan serta 682 Dusun. Diantara tujuh kecamatan tersebut, Kecamatan Banyuputih merupakan kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar di Kabupaten Situbondo yakni mencapai 481,67 km<sup>2</sup>. Hal tersebut disebabkan oleh luasnya hutan jati di perbatasan antara Kecamatan Banyuputih dan wilayah Banyuwangi Utara. Sedangkan luas wilayah kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Besuki yaitu 26,41 km<sup>2</sup>. Secara rinci pembagian administrasi dan luas wilayah di Kabupaten Situbondo dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Situbondo

No	Kecamatan	Jumlah					Luas (Ha)
		Desa	Kelurahan	Dusun/ Lingkungan	RW	RT	
1	Sumbermalang	9	-	32	58	161	12.947
2	Jatibanteng	8	-	35	86	192	6.608
3	Banyuglugur	7	-	28	39	106	7.266
4	Besuki	10	-	45	120	314	2.641
5	Suboh	8	-	31	61	169	3.084
6	Mlandingan	7	-	34	52	127	3.961
7	Bungatan	7	-	39	59	141	6.607
8	Kendit	7	-	37	94	193	11.414
9	Panarukan	8	-	52	84	245	5.438
10	Situbondo	4	2	27	66	242	2.781
11	Panji	10	2	53	90	270	4.699
12	Mangaran	6	-	45	78	170	3.570
13	Kapongan	10	-	55	98	252	4.455
14	Arjasa	8	-	59	90	214	21.638
15	Jangkar	8	-	44	70	179	6.700
16	Asembagus	10	-	36	66	193	11.874
17	Banyuputih	5	-	30	56	175	48.167
Jumlah		132	4	682	1.265	3.343	163.850

Sumber: BPS Kabupaten Situbondo, 2024

Merujuk pada tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 17 kecamatan yang ada, hanya dua kecamatan yang memiliki wilayah administrasi kelurahan yakni Kecamatan Situbondo dan Kecamatan Panji. Sedangkan untuk kecamatan Besuki, Kecamatan Panji, Kecamatan Kapongan dan Kecamatan Asembagus merupakan kecamatan yang memiliki jumlah pemerintahan desa terbanyak di Kabupaten Situbondo yakni terdiri dari 10 Desa. Selanjutnya terkait dengan sebaran wilayah Rukun Warga (RW) dan

Rukun Tetangga (RT) mulai tahun 2022 terdapat perubahan jumlah jika dibandingkan berdasarkan data pembagian wilayah tahun 2020. Pada tahun 2022 jumlah RW sebanyak 1.259 mengalami penurunan dari tahun 2020 yang mencapai 1.265 wilayah. Hal tersebut dikarenakan terdapat penggabungan wilayah antar RW di beberapa desa. Sedangkan untuk jumlah RT dengan adanya pengurangan jumlah rumah tangga dalam satu RT, maka pada tahun 2022 dengan jumlah RT yang mencapai 3.351 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020 yang hanya berjumlah 3.343 RT yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Situbondo.

#### 2.1.1.2 Kondisi Topografi

Kabupaten Situbondo berada pada ketinggian 0 – 1.250 m di atas permukaan air laut. Keadaan tanah menurut teksturnya, pada umumnya tergolong sedang 96,26%, tergolong halus 2,75% dan tergolong kasar 0,99%. Drainase tanah tergolong tidak tergenang 99,42%, kadang-kadang tergenang 0,05% dan selalu tergenang 0,53%. Jenis tanah daerah ini berjenis antara lain alluvial, Regosol, gleysol, rendzina, grumosol, mediteran, latosol, serta andosol. Ditinjau dari pola penggunaan tanahnya, diketahui penggunaan tanah terbesar adalah untuk hutan yaitu seluas 73.407,5 Ha (44,80%), berikutnya adalah untuk sawah eksisting yaitu seluas 36.011,29 Ha (18,53%), diikuti dengan pertanian tanah kering seluas 27.962,13 Ha (17,07). Secara umum Kabupaten Situbondo merupakan dataran rendah, dengan ketinggian 0-1.250 m di atas permukaan laut, dengan kemiringan antara 0°-45°, dan memiliki tanah kering yang tererosi seluas 42.804 Ha (26,12%). Sebagian luas tanah di Kabupaten Situbondo mempunyai drainase yang baik yaitu seluas 1.629,03 Km<sup>2</sup> (99,42%) tidak pernah tergenang, sedang sisanya seluas 0,78 Km<sup>2</sup> (0,05%) kadang-kadang tergenang dan seluas 8,69 Km<sup>2</sup> (0,53%) selalu tergenang. Ditinjau dari potensi dan kondisi wilayahnya, Kabupaten Situbondo dapat dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu: Wilayah utara merupakan pantai dan laut yang sangat potensial untuk pengembangan komoditi perikanan, baik budi daya maupun penangkapan ikan; Wilayah tengah bertopografi datar dan mempunyai potensi untuk sektor pertanian; dan Wilayah selatan yang memiliki topografi miring mempunyai potensi untuk pengembangan tanaman perkebunan dan kehutanan.

#### 2.1.1.3 Kondisi Geologi

Kabupaten Situbondo merupakan kabupaten di Jawa Timur yang berada pada ketinggian 0 – 1.250 m di atas permukaan air laut. Secara umum tekstur tanah yang tergolong sedang mencapai 96,26%, tergolong halus 2,75% dan yang tergolong kasar 0,99%. Sedangkan untuk drainase tanah yang tergolong tidak tergenang seluas 99,42%, kadang-kadang tergenang 0,05% dan drainase yang selalu tergenang hanya 0,53%. Adapun Jenis tanah di Kabupaten Situbondo antara lain alluvial, regosol, gleysol, rendzina, grumosol, mediteran, latosol serta andosol. Jika dilihat dari struktur Geologi, Kabupaten Situbondo berada pada Aluvium dengan luas 48.983 Ha, Vulkan Zaman Quarter Muda seluas 19.787 Ha, Vulkan Zaman Quarter Tua seluas 72.752 Ha, dan Leusita yang luasnya mencapai 22.328 Ha.

2.1.1.4 Kondisi Klimatologi

Iklim adalah rata-rata cuaca dimana cuaca merupakan keadaan atmosfer pada suatu saat di waktu tertentu. Kabupaten Situbondo beriklim tropis basah dan kering yang mempunyai dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau di wilayah Kabupaten Situbondo biasanya berlangsung pada periode Mei sampai November dengan puncaknya yakni periode Juli sampai September. Musim penghujan di wilayah Situbondo normalnya berlangsung pada periode bulan Desember sampai Maret, rata-rata curah hujan biasanya di atas 150 mm per bulan. Kondisi iklim di Kabupaten Situbondo apabila ditinjau dari kondisi curah hujan di tahun 2023, maksimum mencapai 15.179 mm dengan jumlah hari hujan selama 25 hari yang terjadi di bulan Januari. Secara rinci kondisi klimatologi di Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada tabel berikut, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2 Suhu, Jumlah Curah Hujan, dan Jumlah Hari Hujan, 2023

Bulan	Suhu (°C)			Jumlah Curah Hujan (mm/tahun)	Jumlah Hari Hujan (Hari)
	Minimum	Rata-Rata	Maksimum		
Januari	21,00	27,20	34,20	242,2	15
Februari	22,80	26,40	32,20	397,6	24
Maret	22,00	27,40	33,30	199,7	13
April	21,20	27,20	33,40	106,2	16
Mei	22,00	27,40	37,50	11,4	8
Juni	22,00	26,80	31,80	43,4	5
Juli	22,00	25,70	32,30	252,5	16
Agustus	21,00	25,80	30,30	12,2	9
September	21,90	26,20	31,20	6,6	5
Oktober	22,80	27,90	33,50	-	-
November	24,30	28,50	34,00	48,2	5
Desember	24,00	28,60	34,20	9,6	8

Sumber: BPS Kabupaten Situbondo, 2024

2.1.1.5 Penggunaan Lahan

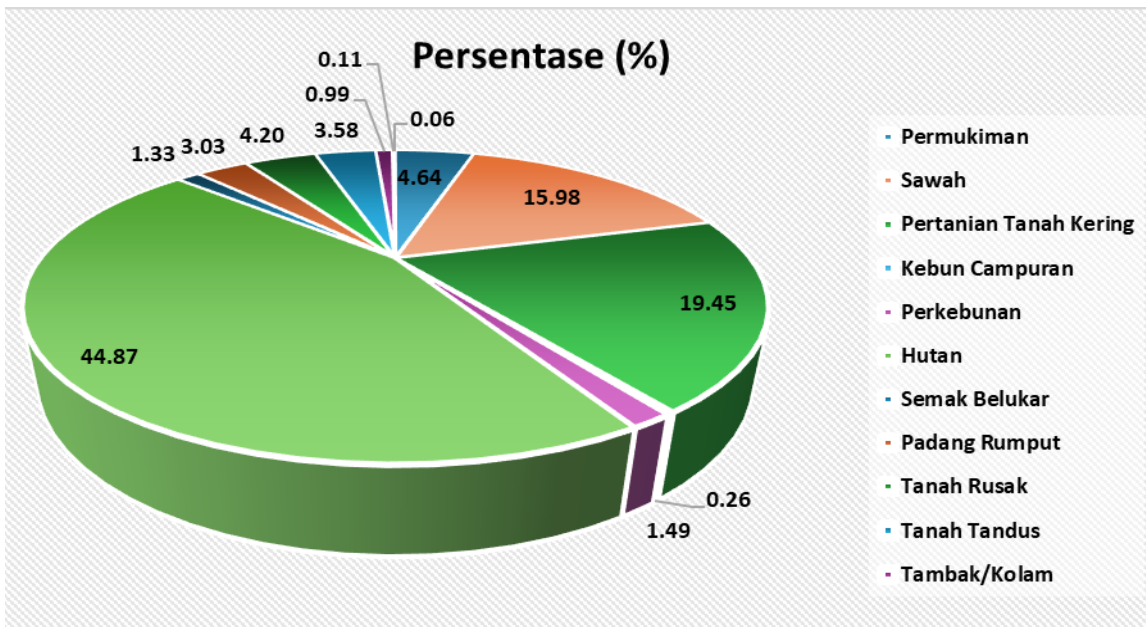
Luas wilayah Kabupaten Situbondo mencapai 1.638,50 km2 atau 163.850 Ha yang sebagian besar wilayahnya merupakan daerah kawasan hutan. Apabila ditinjau dari pola penggunaan tanahnya, penggunaan lahan terbesar adalah untuk hutan yakni mencapai 73.512,77 Ha atau setara dengan 44,87% dari total wilayah Kabupaten Situbondo. Kemudian, terdapat pertanian tanah kering seluas 37.480,59 Ha atau setara 23,47%. Setelah itu, persawahan mencapai 26.191,00 Ha atau 15,98%. Sementara itu, lahan yang digunakan atau dimanfaatkan untuk kawasan terbangun

(permukiman) hanya mencapai 4,64%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa luasan wilayah di Kabupaten Situbondo masih sangat berpeluang untuk pengembangan potensi melalui berbagai kegiatan investasi. Secara ringkas, penggunaan lahan di Kabupaten Situbondo didominasi oleh lahan tidak terbangun, seperti hutan, sawah, pertanian tanah kering, kolam, rawa, dan lainnya. Adapun data dan komposisi sebaran luasan penggunaan lahan di Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada sebagai berikut berikut:

Tabel 2.3 Sebaran dan Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Situbondo Tahun 2023

Jenis Penggunaan	Luas (Ha) Indikatif	Persentase (%)
Permukiman	7.598.23	4.64
Sawah	26.191.00	15.98
Pertanian Tanah Kering	31.876.43	19.45
Kebun Campuran	428.32	0.26
Perkebunan	2.433.98	1.49
Hutan	73.512.50	44.87
Semak Belukar	2.174.02	1.33
Padang Rumput	4.970.40	3.03
Tanah Rusak	6.879.86	4.20
Tanah Tandus	5.873.03	3.58
Tambak/Kolam	1.629.29	0.99
Rawa	182.00	0.11
Lain-Lain	100.95	0.06

Sumber: BPS Kabupaten Situbondo, 2024



**Gambar 2. 2 Penggunaan Lahan Kabupaten Situbondo**  
Sumber: BPS Kabupaten Situbondo, 2024

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Bencana merupakan peristiwa atau kejadian yang menyebabkan kerusakan serius, penderitaan dan gangguan pada kehidupan manusia, infrastruktur dan lingkungan. Bencana sendiri dapat muncul dari berbagai macam sumber baik yang bersifat alami maupun yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Oleh karena itu diperlukan pemetaan wilayah rawan bencana untuk mengetahui area yang memiliki potensi atau risiko tinggi mengalami bencana. Wilayah rawan bencana sendiri merupakan area yang memiliki potensi tinggi untuk mengalami berbagai jenis bencana alam atau bencana lainnya dan menjadi penting mengingat keselamatan manusia, melindungi infrastruktur, dan menjaga lingkungan. Dengan mengetahui lokasi-lokasi yang berisiko tinggi mengalami bencana seperti gempa bumi, banjir atau tanah longsor, kita dapat mengambil langkah-langkah preventif yang esensial. Ketika bencana terjadi, informasi tentang wilayah rawan bencana sangat membantu dalam merespons secara cepat dan efektif, serta dalam proses pemulihan dan rekonstruksi yang berfokus pada pembangunan yang lebih aman di masa depan. Selain itu, perlindungan terhadap lingkungan, seperti pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan restorasi ekosistem, juga dapat membantu mengurangi risiko bencana.

Pentingnya memahami wilayah rawan bencana sangat terkait dengan kemiskinan masyarakat, karena bencana seringkali memperburuk kondisi hidup manusia yang sudah berada dalam situasi sulit. Masyarakat rentan kerap memiliki tempat tinggal di area yang lebih rawan bencana, seperti dataran rendah yang rentan terhadap banjir atau lereng bukit yang rawan tanah longsor, dan seringkali memiliki infrastruktur yang kurang memadai, meningkatkan risiko kerusakan parah saat bencana terjadi. Selain itu, mereka umumnya memiliki sumber daya terbatas untuk berinvestasi dalam mitigasi risiko seperti membangun rumah tahan bencana atau membeli asuransi. Akibatnya, mereka lebih rentan terhadap dampak bencana dan menghadapi kesulitan besar dalam proses pemulihan, dengan akses terbatas ke layanan bantuan dan cadangan ekonomi yang tidak mencukupi untuk

memperbaiki atau mengganti aset yang rusak. Oleh karena itu, perencanaan tata ruang dan pembangunan infrastruktur harus mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat untuk mengurangi kerentanan ini. Pendekatan terpadu yang mencakup mitigasi risiko, peningkatan kapasitas, dan dukungan pemulihan sangat penting untuk membantu masyarakat miskin menghadapi dan pulih dari bencana, serta meningkatkan ketahanan mereka secara keseluruhan.

#### 2.1.3.1 Wilayah Bencana Banjir Bandang

Banjir bandang adalah banjir besar yang terjadi secara tiba-tiba karena meluapnya debit yang melebihi kapasitas aliran sungai oleh konsentrasi cepat hujan dengan intensitas tinggi serta sering membawa aliran debris bersamanya atau runtuhnya bendungan alam, yang terbentuk dari material longsoran gelincir pada area hulu sungai. Berdasarkan potensi luas bahaya dan kelas bahaya bencana banjir bandang di Kabupaten Situbondo pada tiap-tiap kecamatan, kelas bahaya tersebut terdiri dari kelas rendah, sedang, dan tinggi. Berdasarkan luas bahaya dan kelas bahaya berpengaruh besar terhadap seluruh kecamatan tersebut, maka dihasilkan luas bencana banjir bandang di Kabupaten Situbondo total luas bahaya adalah 20.970,45 Ha yang berada pada kelas Tinggi. Adapun kecamatan dengan luas bahaya tertinggi adalah Kecamatan Banyuputih dengan luas 3.089,61 Ha. Secara umum potensi penduduk terpapar bencana banjir bandang jurang lebih 106.845 jiwa. Level kelas kerentanan sosial bencana banjir bandang di Kabupaten Situbondo termasuk dalam kategori sedang. Pada level Kecamatan, Kecamatan yang memiliki jumlah potensi penduduk terpapar tertinggi bahaya banjir bandang adalah Kecamatan Arjasa, yaitu 12.156 jiwa. Jumlah potensi penduduk kategori kelompok rentan dapat menggambarkan rasio jumlah penduduk kelompok rentan dan dapat digunakan sebagai acuan dalam merencanakan pemenuhan kebutuhan dasar logistik dalam rencana kontijensi banjir bandang.

#### 2.1.3.2 Wilayah Bencana Banjir

Analisis bahaya banjir yang masuk ke dalam area rawan banjir merupakan wilayah dengan topografi datar dan berada di sekitar sungai. Penentuan kelas bahaya banjir dianalisis berdasarkan nilai ketinggian genangan. Dikutip dari Modul Penyusunan Kajian Risiko Bencana Banjir BNPB Tahun 2019, wilayah dengan ketinggian genangan kurang dari sama dengan 75 cm termasuk dalam kategori bahaya rendah; Wilayah dengan ketinggian genangan 75 - 150 cm termasuk dalam kategori bahaya sedang; dan wilayah dengan ketinggian genangan di atas 150 cm termasuk dalam kategori bahaya tinggi (BNPB, 2019). Berdasarkan luas bahaya dan kelas bahaya berpengaruh besar terhadap seluruh kecamatan tersebut, maka dihasilkan luas bencana banjir di Kabupaten Situbondo total luas bahaya adalah 6.337,62 Ha yang berada pada kelas Tinggi. Adapun kecamatan dengan luas bahaya tertinggi adalah Kecamatan Banyuputih dengan luas 1.320,21 Ha. Secara umum potensi penduduk terpapar bencana banjir kurang lebih 66,633 jiwa. Level kelas kerentanan sosial bencana banjir di Kabupaten Situbondo termasuk dalam kategori sedang. Pada level Kecamatan, Kecamatan yang memiliki jumlah potensi penduduk terpapar

tertinggi bahaya banjir adalah Kecamatan Panarukan, yaitu 20,792 jiwa. Jumlah potensi penduduk kategori kelompok rentan dapat menggambarkan rasio jumlah penduduk kelompok rentan dan dapat digunakan sebagai acuan dalam merencanakan pemenuhan kebutuhan dasar logistik dalam rencana kontijensi banjir.

#### 2.1.3.3 Wilayah Bencana Tanah Longsor

Tanah longsor adalah gerakan massa baik tanah, batuan, atau percampuran keduanya menuruni lereng akibat gaya gravitasi. Tanah longsor terjadi ketika lereng tidak mampu menyangga beban yang berada di atasnya. Penyebabnya bisa bermacam-macam diantaranya hujan deras, aktivitas vulkanik, gempabumi, erosi sungai, perubahan ketinggian muka air, aktivitas manusia, atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Hasil pengkajian bahaya terhadap bencana tanah longsor, maka diperoleh potensi luas bahaya di Kabupaten Situbondo untuk 17 kecamatan. Luas bahaya tanah longsor di Kabupaten Situbondo adalah 84.321,27 ha yang berada pada kelas Tinggi. Kecamatan dengan luas bahaya tertinggi adalah Kecamatan Asembagus yaitu seluas 14.634,00 ha dari total luas bahaya keseluruhan. Kajian kerentanan untuk bencana tanah longsor di Kabupaten Situbondo didapatkan dari potensi penduduk terpapar dan kelompok rentan serta potensi kerugian, baik fisik, ekonomi, dan kerusakan lingkungan. Potensi jumlah penduduk terpapar dan potensi kerugian ini dianalisis dan kemudian ditampilkan dalam bentuk kelas kerentanan bencana tanah longsor. Secara umum potensi penduduk terpapar bencana tanah longsor kurang lebih 77,605 jiwa. Level kelas kerentanan sosial bencana tanah longsor di Kabupaten Situbondo termasuk dalam kategori sedang. Pada level Kecamatan, Kecamatan yang memiliki jumlah potensi penduduk terpapar tertinggi tanah longsor adalah Kecamatan Sumbermalang, yaitu 18,033 jiwa. Jumlah potensi penduduk kategori kelompok rentan dapat menggambarkan rasio jumlah penduduk kelompok rentan dan dapat digunakan sebagai acuan dalam merencanakan pemenuhan kebutuhan dasar logistik dalam rencana kontijensi tanah longsor. Jika dilihat pada tabel di atas maka hampir seluruh wilayah di Kabupaten Situbondo memiliki tingkat risiko yang Tinggi. Sedangkan sebaran secara spasial, risiko tinggi untuk bencana tanah longsor di Kecamatan Arjasa, Kecamatan Asembagus, Kecamatan Banyugluyur, Kecamatan Banyuputih, Kecamatan Besuki, Kecamatan Bungatan, Kecamatan Jatibanteng, Kecamatan Kendit, Kecamatan Mlandingan, Kecamatan Sumbermalang.

#### 2.1.3.4 Wilayah Rawan Gempa Bumi

Gempabumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunungapi atau runtuhnya batuan (BNPB, Definisi dan Jenis bencana, <http://www.bnpb.go.id>). Kondisi geografis Kabupaten Situbondo yang sebagian berbukit, lembah dan dilewati sungai menjadikan beberapa kawasan di kabupaten ini masuk dalam kawasan yang memiliki potensi bencana seperti gempabumi. Hal ini bisa dilihat dari segi geografis Kabupaten Situbondo memiliki potensi bencana gempabumi. Secara umum potensi penduduk terpapar bencana Gempabumi kurang lebih 666,741

jiwa. Level kelas kerentanan sosial bencana Gempabumi di Kabupaten Situbondo termasuk dalam kategori sedang. Pada level Kecamatan, Kecamatan yang memiliki jumlah potensi penduduk terpapar tertinggi bahaya Gempabumi adalah Kecamatan Besuki, yaitu 63,963 jiwa. Jumlah potensi penduduk kategori kelompok rentan dapat menggambarkan rasio jumlah penduduk kelompok rentan dan dapat digunakan sebagai acuan dalam merencanakan pemenuhan kebutuhan dasar logistik dalam rencana kontijensi Gempabumi.

#### 2.1.3.5 Wilayah Rawan Kekeringan

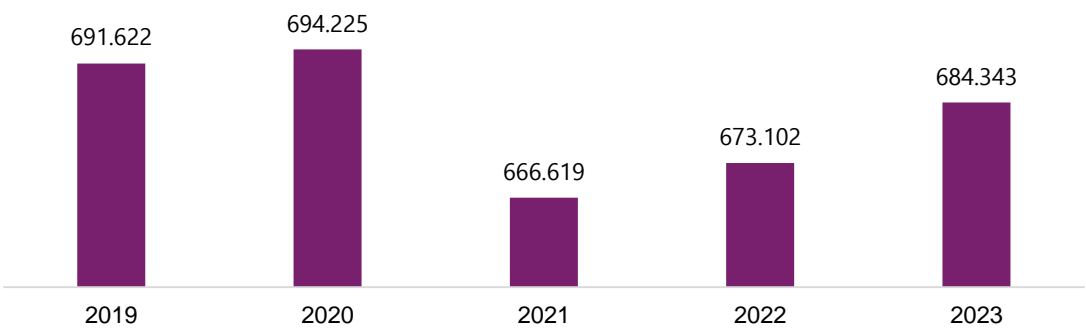
Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh dibawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. Kondisi ini bermula saat berkurangnya curah hujan di bawah normal dalam periode waktu yang lama sehingga kebutuhan air dalam tanah tidak tercukupi dan membuat tanaman tidak dapat tumbuh dengan normal. Jenis kekeringan yang dikaji dalam dokumen ini adalah kekeringan meteorologis yang merupakan indikasi awal terjadinya bencana kekeringan, sehingga perlu dilakukan analisis untuk mengetahui tingkat kekeringan tersebut. Adapun metode analisis indeks kekeringan yang dilakukan adalah *Standardized Precipitation Index* (SPI). Nilai SPI dihitung menggunakan metode statistik probabilistik distribusi gamma.

Curah Hujan merupakan salah satu variabel yang dapat digunakan sebagai masukan pada parameter perubahan iklim. Data curah hujan dapat digunakan sebagai masukan untuk perhitungan indeks kekeringan klimatologi dengan menggunakan persamaan SPI (*Standardize Precipitation Index*). Pada kajian ini pemetaan data curah hujan dilakukan dengan pemanfaatan data satelit CHIRPS yang telah ter-interpolasi sesuai dengan lokasi stasiun curah hujan. Untuk melihat pola curah hujan yang ada, data stasiun mingguan (5 hari) diolah secara spasial seperti yang ditunjukkan pada gambar-gambar berikut. Rentang waktu yang digunakan adalah rentang tiap dekade, selama 4 dekade dimulai dari tahun 1982 sampai dengan sekarang. Hasil pengkajian bahaya terhadap bencana Kekeringan di Kabupaten Situbondo untuk 17 kecamatan. Berdasarkan luas bahaya dan kelas bahaya berpengaruh besar terhadap seluruh kecamatan tersebut, maka dihasilkan luas bencana Kekeringan di Kabupaten Situbondo total luas bahaya adalah 165.504,70 Ha yang berada pada kelas Tinggi. Adapun kecamatan yang memiliki potensi bahaya Kekeringan terbesar adalah Kecamatan Banyuputih dengan luas 39.100,99 Ha. Secara umum potensi penduduk terpapar bencana Kekeringan kurang lebih 106.845 jiwa. Level kelas kerentanan sosial bencana banjir bandang di Kabupaten Situbondo termasuk dalam kategori sedang. Pada level Kecamatan, Kecamatan yang memiliki jumlah potensi penduduk terpapar kategori kelompok rentan sedang berada di Kecamatan Banyugluyur, Besuki, Panarukan, Panji, dan Situbondo. Kondisi kerentanan ini dapat menggambarkan rasio jumlah penduduk kelompok rentan dan dapat digunakan sebagai acuan dalam merencanakan pemenuhan kebutuhan dasar logistik dalam rencana kontijensi Kekeringan.

2.2 Aspek Demografi

2.2.1 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Situbondo dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang cukup fluktuatif dengan jumlah penduduk sebesar 684.343 jiwa pada tahun 2023 dan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 673.102 jiwa. Berikut ini untuk lebih jelas merupakan data jumlah penduduk Kabupaten Situbondo dalam 5 tahun terakhir (2019 – 2023):

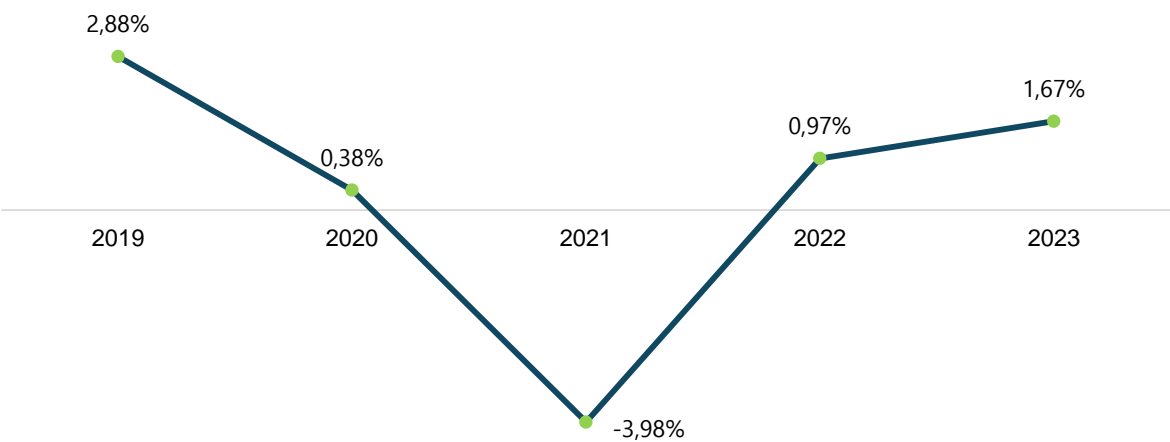


Gambar 2. 3 Jumlah Penduduk Kabupaten Situbondo Tahun 2019 – 2023  
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, Tahun 2024

Jumlah penduduk Kabupaten Situbondo tahun 2021 merupakan jumlah penduduk terendah jika dibandingkan dengan jumlah penduduk sepanjang tahun 2019 hingga tahun 2023 yang trendnya fluktuatif pada setiap tahunnya. Secara komposisi penduduk Kabupaten Situbondo pada tahun 2023 yang berjenis kelamin Perempuan yakni 349.645 jiwa atau lebih banyak jika dibandingkan yang berjenis kelamin Laki Laki yang hanya berjumlah 334.698 jiwa. Jika dilihat dari sebaran wilayahnya, jumlah penduduk terbesar di Kabupaten Situbondo berada di Kecamatan Panji dengan jumlah penduduk sebesar 67.000 jiwa dan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Jatibanteng yakni 22.713 jiwa.

2.2.2 Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk merupakan perubahan populasi sewaktu-waktu dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan “per waktu unit” untuk pengukuran. Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan persentase pertambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Berikut ini merupakan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Situbondo dalam 5 tahun terakhir (2019 – 2023):



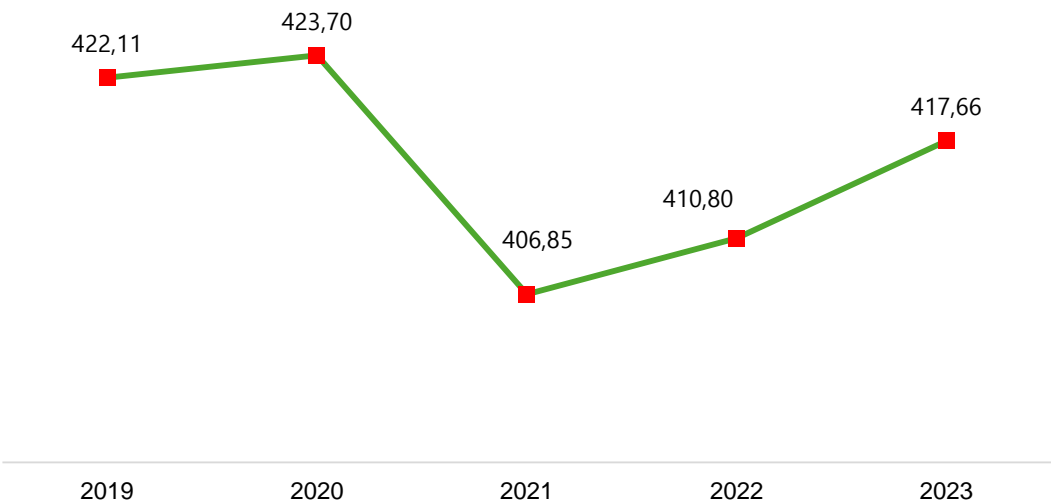
Gambar 2. 4 Laju Petumbuhan Penduduk Kabupaten Situbondo Tahun 2019 – 2023

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, Tahun 2024

Laju pertumbuhan Kabupaten Situbondo pada 5 tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang cukup fluktuatif dengan penurunan cukup signifikan terjadi pada tahun 2021 atau mencapai angka -3,98%. Kemudian meningkat menjadi 0,97% pada tahun 2022 dan 1,67% pada tahun 2023. Kemudian apabila dilihat berdasarkan sebaran kecamatan, laju pertumbuhan penduduk per Tahun 2020–2023 tertinggi terjadi pada Kecamatan Panji sebesar 2,32%, sedangkan kecamatan yang terendah adalah kecamatan Asembagus yakni 1,07%.

2.2.3 Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah ukuran yang menggambarkan seberapa banyak orang tinggal di suatu area tertentu, biasanya dinyatakan sebagai jumlah penduduk per unit luas, seperti per kilometer persegi. Kepadatan ini memberikan wawasan penting mengenai distribusi populasi dan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Berikut ini adalah perkembangan kepadatan penduduk Kabupaten Situbondo selama 5 tahun terakhir (2019 – 2023):



### Gambar 2.5 Kepadatan Penduduk Kabupaten Situbondo Tahun 2019 – 2023

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, Tahun 2024

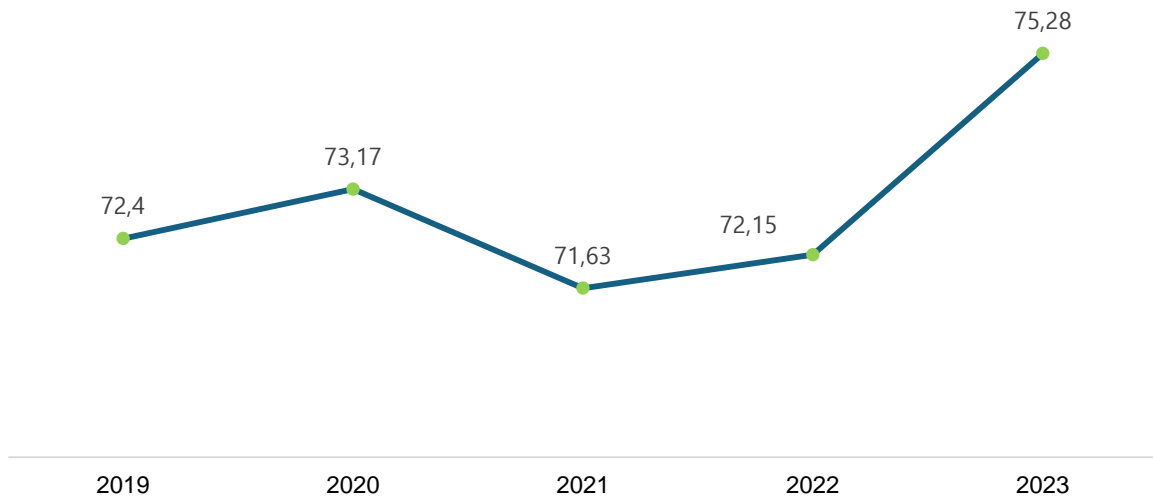
Kepadatan penduduk Kabupaten Situbondo pada 5 tahun terakhir (2019 – 2023) menunjukkan perkembangan yang selaras dengan jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk dengan penurunan cukup signifikan terjadi pada tahun 2021 atau sebesar 406,85 jiwa/ Km<sup>2</sup>. Kemudian meningkat kembali pada tahun 2022 menjadi 410,80 jiwa/ Km<sup>2</sup> dan 417,66 jiwa/ Km<sup>2</sup> pada tahun 2023. Hal ini menjadi penting mengingat Kawasan yang kurang padat sering kali memiliki akses terbatas ke layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi, serta peluang ekonomi yang terbatas. Isolasi ekonomi dan kurangnya investasi di daerah-daerah ini dapat memperburuk kondisi kemiskinan, menghambat perkembangan keterampilan, dan mengurangi akses ke pekerjaan yang layak.

Selain itu, urbanisasi atau pergeseran penduduk dari pedesaan ke perkotaan, sering menyebabkan pertumbuhan kepadatan di kota-kota besar, yang dapat meningkatkan kemiskinan di kawasan kumuh jika tidak diimbangi dengan perencanaan yang baik. Untuk mengatasi masalah ini, perencanaan tata ruang yang efektif dan pembangunan infrastruktur yang memadai sangat penting. Menyediakan perumahan terjangkau, meningkatkan infrastruktur dasar, dan memperluas akses ke pendidikan dan pelatihan dapat membantu mengurangi dampak kemiskinan, baik di daerah dengan kepadatan tinggi maupun rendah. Dengan memahami dan mengelola keterkaitan antara kepadatan penduduk dan kemiskinan, kita dapat merancang kebijakan dan strategi yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas hidup dan mempromosikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

#### 2.2.4 Komposisi Sosial Masyarakat

##### 2.2.4.1 Ketenagakerjaan (TPAK)

Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah ukuran yang menunjukkan proporsi penduduk yang terlibat dalam aktivitas ekonomi, baik sebagai pekerja maupun pencari kerja, dari total populasi yang mampu bekerja. Indikator ini penting untuk memahami dinamika pasar tenaga kerja dan kesehatan ekonomi suatu daerah. Secara keseluruhan, tingkat partisipasi angkatan kerja memberikan gambaran tentang seberapa besar potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan dalam masyarakat dan mencerminkan kesejahteraan ekonomi serta sosial masyarakat.



Gambar 2. 6 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja  
Kabupaten Situbondo Tahun 2019 – 2023  
Sumber: Dinas Ketenagakerjaan, Tahun 2024

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Situbondo menunjukkan perkembangan yang cukup fluktuatif dengan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar 75,28 dan capaian terendah terjadi pada tahun 2021 mencapai angka 71,63. Tingkat partisipasi yang rendah seringkali mencerminkan adanya masalah struktural dalam pasar tenaga kerja, seperti kurangnya peluang kerja atau ketidakcocokan antara keterampilan yang dimiliki dan yang dibutuhkan di pasar. Hal ini dapat memperburuk kemiskinan, karena individu yang tidak aktif dalam angkatan kerja cenderung mengalami kesulitan dalam memperoleh pendapatan yang memadai dan dapat menghambat kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup. Sebaliknya, tingkat partisipasi angkatan kerja yang tinggi menunjukkan bahwa lebih banyak orang terlibat dalam aktivitas ekonomi, yang dapat membantu mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan rumah tangga dan menyediakan akses yang lebih baik ke peluang ekonomi. Faktor-faktor seperti pendidikan, pelatihan keterampilan, dan kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan tenaga kerja juga memainkan peran penting dalam meningkatkan partisipasi angkatan kerja dan, pada gilirannya, mengurangi kemiskinan. Dengan mendorong lebih banyak individu untuk bergabung dan tetap aktif dalam pasar kerja, masyarakat dapat memperluas basis pendapatan, mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial dan secara keseluruhan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat.

#### 2.2.4.2 Pendidikan

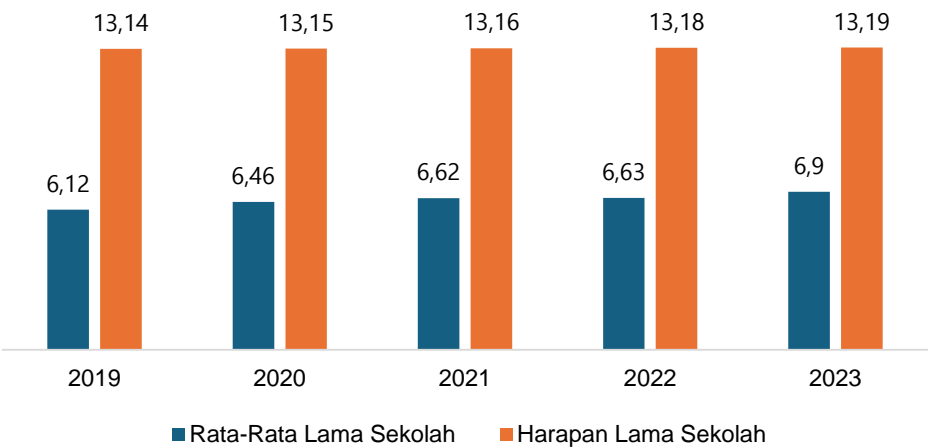
Pendidikan merupakan pondasi utama dalam pembentukan individu dan masyarakat yang bukan hanya bertujuan untuk memperoleh pengetahuan akademik tetapi juga berkaitan dengan pengembangan keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang dapat membentuk karakter seseorang. Pendidikan adalah kunci utama dalam mengurangi rantai kemiskinan, berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan individu dengan peluang yang lebih baik dan kehidupan yang lebih sejahtera. Dengan memberikan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan

untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, pendidikan meningkatkan peluang seseorang untuk memasuki pasar kerja dengan keterampilan yang lebih relevan. Hal ini tidak hanya meningkatkan produktivitas individu tetapi juga mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial karena mereka nantinya dapat menghasilkan pendapatan yang memadai dan mengelola keuangan mereka dengan lebih baik.

Selain itu, pendidikan juga mampu mendukung pembangunan sosial dan ekonomi dengan mendorong keterlibatan dalam aktivitas produktif dan berwirausaha. Pentingnya pendidikan juga terlihat dalam kemampuannya untuk memutus siklus kemiskinan antargenerasi seperti orang tua yang terdidik lebih cenderung memastikan anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang sama baiknya. Tak kalah penting, pendidikan berkontribusi pada kesehatan dan kesejahteraan yang lebih baik karena individu yang terdidik memiliki akses yang lebih baik keberbagai akses kehidupan. Dengan demikian, investasi dalam pendidikan bukan hanya investasi untuk individu tetapi juga untuk masyarakat secara keseluruhan sehingga dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih adil dan sejahtera bagi semua.

*A Rata-Rata Lama Sekolah + Harapan Lama Sekolah*

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan dua indikator penting untuk menilai kualitas pendidikan di suatu daerah dan berdampak pada pembangunan manusia. RLS menggambarkan jumlah rata-rata tahun pendidikan yang telah ditempuh oleh penduduk usia dewasa yang biasanya diukur pada penduduk usia 25 tahun ke atas. Sedangkan HLS digunakan untuk mengukur jumlah tahun pendidikan yang diharapkan dapat ditempuh oleh anak-anak yang baru masuk ke sistem pendidikan saat ini hingga mencapai usia dewasa sehingga kemudian dapat memberikan indikasi tentang potensi akses dan kesetaraan pendidikan di masa depan, memperhitungkan perbaikan dalam kebijakan pendidikan, perubahan dalam kurikulum, serta pengaruh sosial dan ekonomi. Kedua indikator ini saling berkaitan dimana RLS menunjukkan pencapaian pendidikan yang telah terjadi, sementara HLS memberikan gambaran tentang potensi pendidikan di masa depan. Berikut ini merupakan RLS dan HLS Kabupaten Situbondo selama 5 tahun terakhir (2019 – 2023):

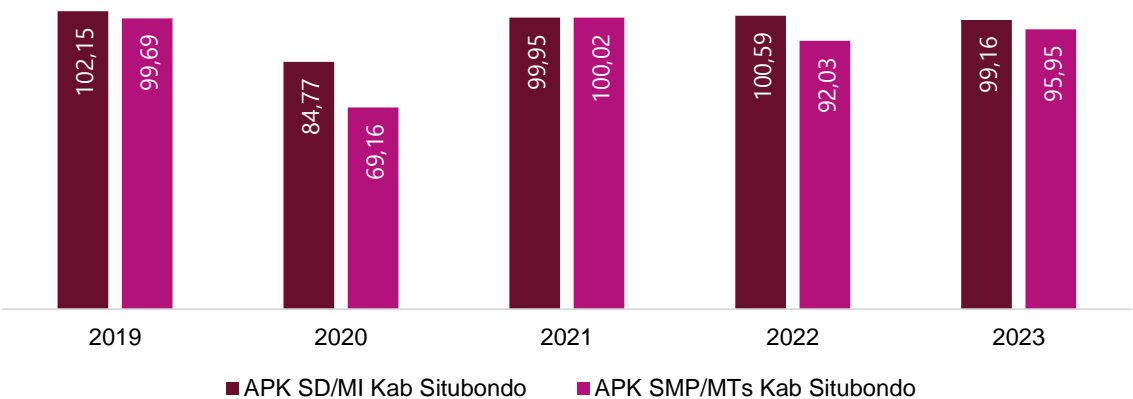


Gambar 2. 7 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS)  
Kabupaten Situbondo Tahun 2019 – 2023  
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2024

Rata-rata lama sekolah dan Harapan lama sekolah Kabupaten Situbondo selama 5 tahun terakhir (2019 – 2023) menunjukkan perkembangan yang semakin meningkat pada setiap tahunnya. RLS Kabupaten Situbondo pada tahun 2023 sebesar 6,9 tahun meningkat dari tahun sebelumnya (2022) yaitu sebesar 6,63 tahun. Hal serupa pada HLS Kabupaten Situbondo meningkat dari tahun 2022 sebesar 13,18 menjadi 13,19 pada tahun 2023. Kemudian, dengan memantau dan menganalisis kedua indikator ini pemerintah dan lembaga terkait dapat merancang kebijakan pendidikan yang lebih efektif seperti memperbaiki kualitas pendidikan dasar dan menengah, serta meningkatkan akses ke pendidikan tinggi. Investasi dalam pendidikan berdasarkan pemahaman yang mendalam tentang RLS dan HLS, dapat membantu menciptakan peluang ekonomi yang lebih baik dan berkontribusi secara signifikan dalam upaya penganggulangan kemiskinan, memutus siklus kemiskinan, dan membangun masa depan yang lebih baik untuk generasi mendatang.

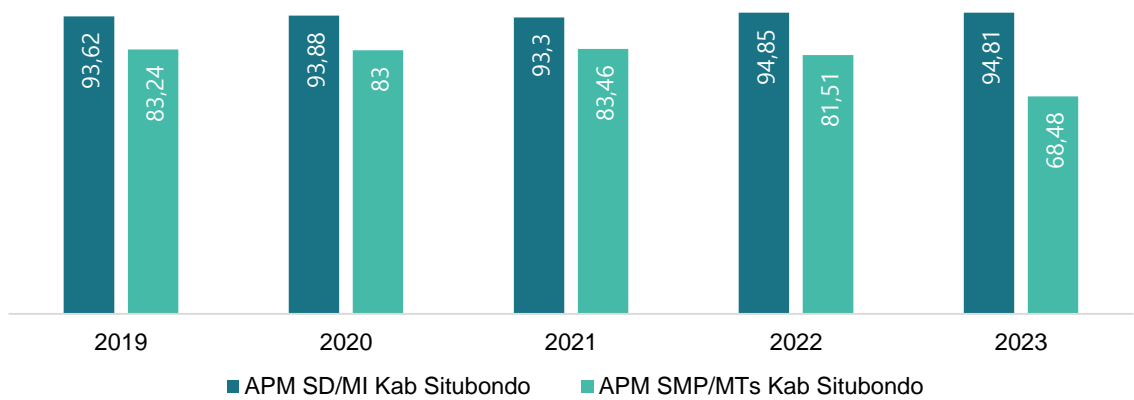
#### *B Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)*

Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) adalah dua indikator kunci yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan di berbagai jenjang. APM mengukur persentase anak-anak atau pelajar dalam kelompok usia tertentu yang benar-benar terdaftar di jenjang pendidikan yang sesuai. Misalnya, APM untuk pendidikan dasar menghitung persentase anak usia 7-12 tahun yang terdaftar di sekolah dasar. Indikator ini memberikan gambaran tentang sejauh mana kelompok usia yang ditargetkan berpartisipasi dalam pendidikan pada jenjang yang seharusnya mereka tempuh, mencerminkan aksesibilitas dan keberhasilan program pendidikan untuk usia tersebut. Sedangkan APK mengukur persentase total siswa yang terdaftar di suatu jenjang pendidikan dibandingkan dengan total populasi usia yang dapat mengikuti jenjang tersebut, tanpa memandang usia. Misalnya, APK untuk pendidikan dasar menghitung persentase semua siswa yang terdaftar di sekolah dasar dibandingkan dengan total populasi anak usia sekolah dasar. APK memberikan gambaran tentang tingkat partisipasi di seluruh jenjang pendidikan, termasuk mereka yang mungkin lebih tua atau lebih muda dari kelompok usia yang biasanya mendaftar di jenjang tersebut. Berikut ini merupakan APK dan APM Kabupaten Situbondo tahun 2019 – 2023:



Gambar 2. 8 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI dan SMP/MTs  
Kabupaten Situbondo Tahun 2019 – 2023  
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2024

APK Kabupaten Situbondo pada jenjang pendidikan SD/MI menunjukkan perkembangan yang cukup fluktuatif dengan trend yang semakin meningkat pada 5 tahun terakhir (2019 – 2023). Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2019 dan 2022 dengan capaian angka di atas 100% sedangkan capaian terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 84,77% dan pada tahun 2023 memiliki angka capaian sebesar 99,16%. Kemudian untuk APK pada jenjang pendidikan SMP/MTs Kabupaten Situbondo memiliki trend yang cukup fluktuatif pula namun dengan kecenderungan yang semakin meningkat. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2021 mencapai angka di atas 100% atau sebesar 100,59% dan terendah pada tahun 2020 atau sebesar 69,16%. APK memiliki peran yang signifikan dalam upaya penurunan kemiskinan karena indikator ini mencerminkan sejauh mana populasi usia tertentu berpartisipasi dalam sistem pendidikan tanpa memandang usia spesifiknya. APK yang tinggi menunjukkan bahwa sistem pendidikan dapat menjangkau berbagai kelompok usia, termasuk masyarakat yang mungkin lebih tua atau lebih muda dari kelompok usia ideal. Dengan demikian, APK yang tinggi mencerminkan akses pendidikan yang lebih luas dan inklusif, memberikan kesempatan bagi individu dari latar belakang ekonomi yang kurang beruntung untuk memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk upaya meningkatkan pendapatan. Peningkatan APK membantu meningkatkan keterampilan tenaga kerja, membuka peluang kerja yang lebih baik, dan mendukung individu dalam mencapai pendapatan yang lebih tinggi, yang berkontribusi pada pengurangan kemiskinan.



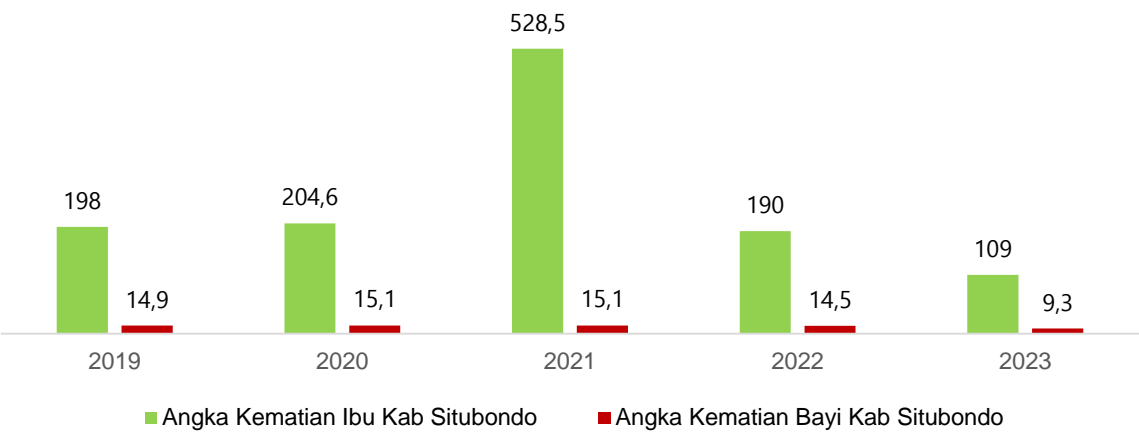
Gambar 2. 9 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Situbondo Tahun 2019 – 2023  
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2024

APM Kabupaten Situbondo pada jenjang pendidikan SD/MI memiliki tren yang cenderung semakin meningkat pada 5 tahun terakhir (2019 – 2023) dengan capaian pada tahun 2023 sebesar 94,81%. Sedangkan pada APM jenjang pendidikan SPM/MTs memiliki tren yang semakin menurun hingga pada tahun 2023 memiliki capaian sebesar 68,48%. Disamping itu, APM memiliki keterkaitan dengan upaya penurunan kemiskinan dan menjadi hal penting yang perlu diperhatikan karena indikator ini mencerminkan sejauh mana anak-anak dalam kelompok usia tertentu terdaftar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan usia mereka. APM yang semakin meningkat menunjukkan bahwa sebagian besar anak-anak dari kelompok usia ditargetkan memperoleh akses ke pendidikan dasar yang merupakan langkah awal penting untuk memutus siklus kemiskinan.

2.2.4.3 Kesehatan

*A Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)*

Kedua indikator kesehatan yang saling terkait dan memberikan gambaran mendalam tentang kualitas sistem kesehatan dan perawatan maternal serta neonatal di suatu wilayah adalah AKI dan AKB. Keterkaitan antara AKI dan AKB sangat erat karena keduanya mencerminkan kondisi kesehatan ibu dan anak serta efektivitas layanan kesehatan. AKI mengukur jumlah wanita yang meninggal dunia akibat komplikasi kehamilan atau persalinan per 100.000 kelahiran hidup dalam satu tahun. Sedangkan AKB mengukur jumlah bayi yang meninggal sebelum usia satu tahun per 1.000 kelahiran hidup dalam satu tahun. Berikut ini merupakan AKI dan AKB Kabupaten Situbondo dalam 5 tahun terakhir (2019 – 2023):

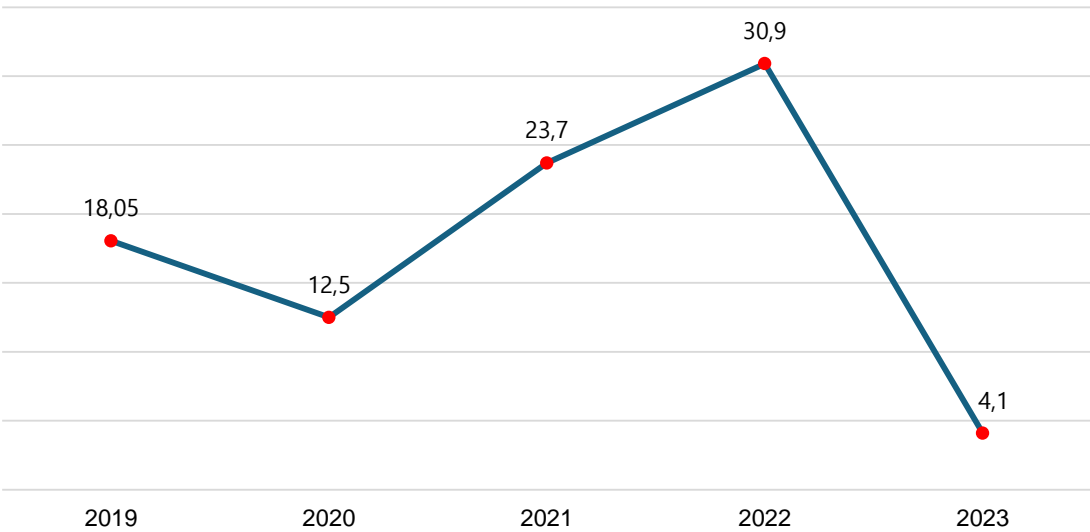


Gambar 2. 10 Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Situbondo Tahun 2019 – 2023  
Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2024

Angka kematian Ibu (AKI) Kabupaten Situbondo menunjukkan perkembangan yang cukup fluktuatif namun cenderung menurun pada dua tahun terakhir. pada tahun 2021 terjadi peningkatan cukup signifikan hingga menyentuh angka 528,5 dan menurun menjadi 190 pada tahun 2022 dan terus menurun pada tahun 2023 atau menjadi 109. Sedangkan pada Angka Kematian Bayi (AKB) menunjukkan penurunan pula hingga tahun 2023 dengan angka sebesar 9,3. AKI dan AKB memiliki kaitan dengan kemiskinan, karena kedua indikator ini mencerminkan dampak faktor sosial dan ekonomi terhadap kesehatan ibu dan anak. Oleh karena itu diperlukan upaya menurunkan AKI dan AKB melalui intervensi untuk mengatasi kemiskinan seperti meningkatkan akses ke kesehatan, menyediakan pendidikan yang layak dan memperbaiki kondisi hidup masyarakat. Dengan mengatasi faktor-faktor ini kemudian dapat mengurangi kematian ibu dan bayi serta berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

*B Prevalensi Stunting*

Prevalensi stunting, yaitu kondisi di mana anak-anak mengalami gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis, merupakan indikator penting dalam menilai kesehatan dan kesejahteraan anak-anak di suatu negara. Stunting mempengaruhi tinggi badan anak-anak di bawah usia lima tahun, yang merupakan tanda dari malnutrisi jangka panjang dan kurangnya asupan gizi yang memadai. Memantau prevalensi stunting sangat penting karena dampaknya yang luas dan mendalam terhadap perkembangan fisik dan kognitif anak. Anak-anak yang mengalami stunting sering kali mengalami keterlambatan dalam perkembangan motorik dan kognitif, yang dapat mempengaruhi kemampuan belajar mereka di masa depan dan potensi kesuksesan akademis.



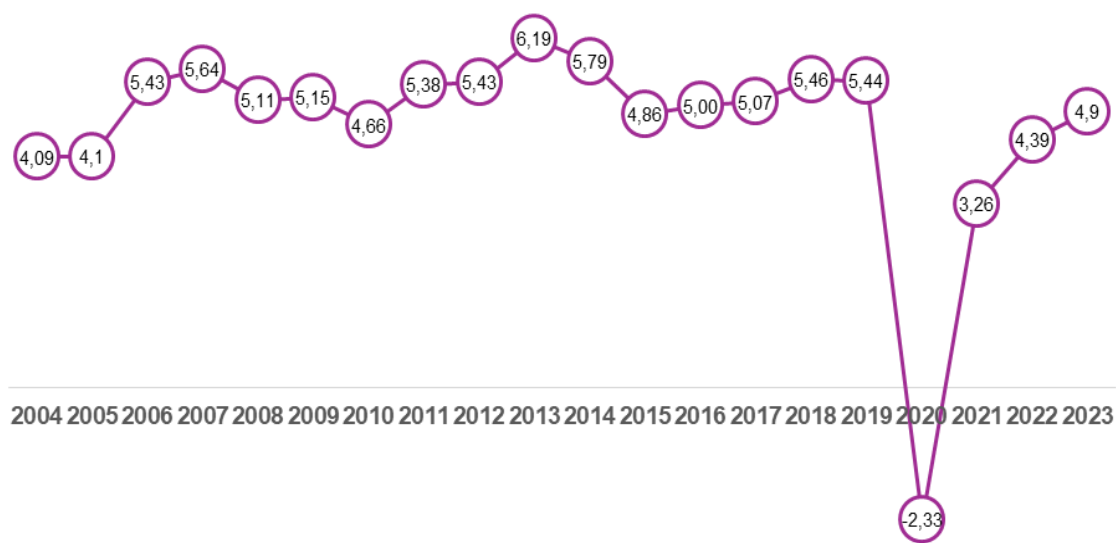
Gambar 2. 11 Prevalensi Stunting Kabupaten Situbondo  
Tahun 2019 – 2023  
Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2024

Angka prevalensi stunting Kabupaten Situbondo pada tahun 2019 – 2020 dihitung berdasarkan bulan timbang sedangkan untuk tahun 2021 – 2022 berdasarkan SSGI dan 2023 berdasarkan perhitungan SKI. Selain itu stunting dapat meningkatkan risiko penyakit dan masalah kesehatan lainnya sehingga berdampak pada penambahan beban ekonomi bagi keluarga miskin. Biaya perawatan kesehatan yang tinggi dan kehilangan produktivitas akibat penyakit dapat memperburuk kondisi ekonomi keluarga dan menghambat upaya masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya. Dengan menurunkan prevalensi stunting Kabupaten Situbondo dapat membuat kemajuan signifikan dalam mengurangi kemiskinan. Program yang fokus pada peningkatan gizi, akses layanan kesehatan yang berkualitas, dan perbaikan kondisi sanitasi dapat membantu anak-anak menjadi lebih sehat yang berdampak positif pada pendidikan dan kualitas kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Oleh karena itu, upaya untuk mengurangi stunting tidak hanya penting untuk kesehatan anak tetapi juga krusial dalam strategi jangka panjang untuk penurunan kemiskinan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Situbondo.

2.3 Pertumbuhan Ekonomi

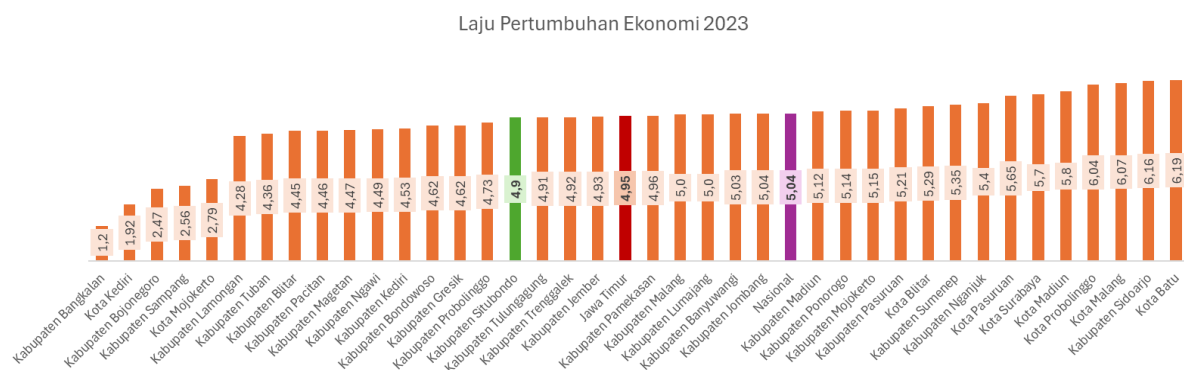
Aspek perekonomian memainkan peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan daerah, di mana aspek ini dapat dilihat melalui berbagai indikator makro ekonomi seperti laju pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi hingga Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita. Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi, yang berpotensi menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Tingkat inflasi yang terkendali juga penting karena inflasi yang tinggi dapat menggerus daya beli masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan rendah, sehingga memperburuk kondisi kemiskinan. Selain itu, PDRB per kapita yang tinggi mencerminkan tingkat kesejahteraan ekonomi yang lebih baik di suatu daerah, menunjukkan

bahwa pendapatan yang diperoleh masyarakat cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Oleh karena itu, peningkatan indikator-indikator perekonomian daerah ini menjadi faktor kunci dalam upaya mengurangi kemiskinan dengan menciptakan kondisi yang lebih stabil dan menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif.



Gambar 2. 12 Laju Pertumbuhan Kabupaten Situbondo

Dalam rentang tahun 2004-2023, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Situbondo mengalami tren yang cukup fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Meskipun demikian, apabila dicermati secara spesifik dalam rentang waktu 3 tahun terakhir pasca terjadinya pandemi (2021-2023), laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Situbondo telah mencapai kondisi yang semakin baik dengan peningkatan konsisten setiap tahunnya. Peningkatan ini menunjukkan bahwa perekonomian di Kabupaten Situbondo sedang bergerak ke arah yang lebih baik, dengan berbagai sektor ekonomi yang mulai bangkit dan berkembang. Konsistensi dalam pertumbuhan ekonomi ini juga dapat menjadi indikator bahwa Kabupaten Situbondo memiliki potensi untuk memperluas basis ekonominya dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja di masa depan. Dengan kondisi ini, peluang penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dan peningkatan pendapatan masyarakat dapat terealisasi dalam lima tahun mendatang, mengingat dinamika ekonomi yang terus membaik dan terbuka terhadap investasi serta pengembangan sektor-sektor baru.



Gambar 2. 13 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Situbondo dan Jawa Timur Tahun 2023

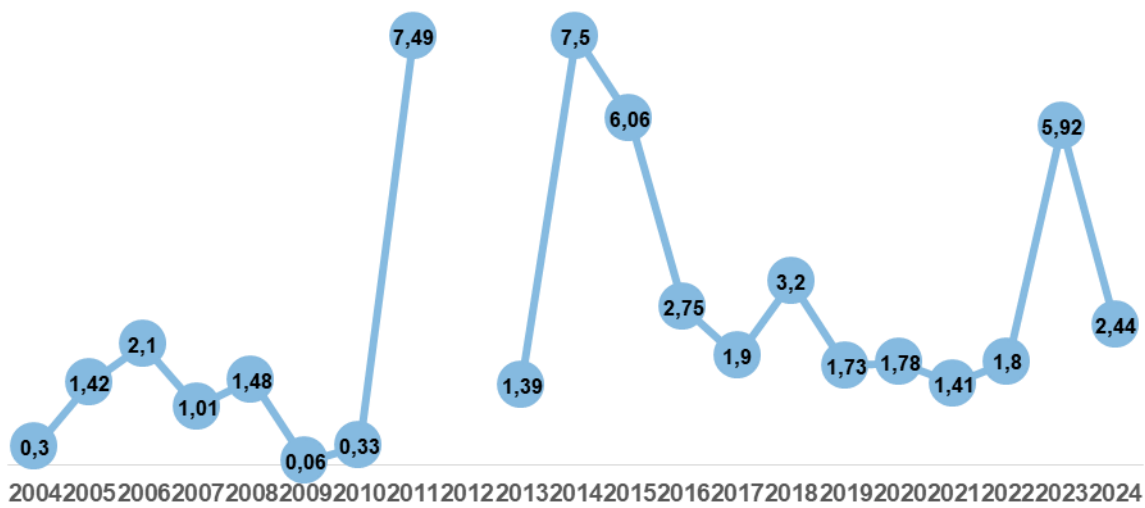
Sedangkan apabila dibandingkan dengan capaian Provinsi dan Nasional, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Situbondo di tahun 2023 yang sebesar 4,9% masih berada di bawah rata-rata keduanya, dengan capaian rata-rata provinsi sebesar 4,95% dan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,04%. Hal ini menandakan bahwa meskipun perekonomian Kabupaten Situbondo sedang bergerak ke arah yang lebih baik dengan berbagai sektor ekonomi yang mulai bangkit dan berkembang, ada kebutuhan untuk mempercepat laju pertumbuhan agar dapat sejajar atau melampaui capaian regional dan nasional. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun ke depan dan mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan, intervensi kebijakan yang diperlukan antara lain memperkuat produktivitas sektor-sektor unggulan yang sedang berkembang, meningkatkan infrastruktur ekonomi, dan mendorong investasi, baik dari dalam maupun luar negeri. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan vokasional, serta pemberian insentif bagi usaha kecil dan menengah, sangat penting untuk memperluas basis ekonomi dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara berkelanjutan.

2.3.1 Inflasi

Di sisi lain, Tingkat inflasi yang terkendali juga sangat penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan, karena inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan rendah. Di Kabupaten Situbondo, menjaga inflasi tetap terkendali menjadi prioritas untuk memastikan harga kebutuhan pokok tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Jika inflasi dibiarkan naik tanpa kendali, masyarakat miskin akan lebih terpukul karena mereka menghabiskan sebagian besar pendapatan mereka untuk kebutuhan dasar seperti makanan, transportasi, dan energi.

Tingkat inflasi di Kabupaten Situbondo dilihat melalui capaian inflasi di daerah dengan karakteristik yang identik dan memiliki kedekatan geografis dengannya, yaitu Kabupaten Banyuwangi. Hal ini dikarenakan, tidak semua daerah di Provinsi Jawa Timur menjadi sampel perhitungan tingkat inflasi yang dilakukan oleh Banda Pusta Statistik, sehingga perlu menjadikan

capaian inflasi salah satu dari 8 Kabupaten/Kota yang menjadi sampel perhitungan inflasi di Jawa Timur sebagai tolok ukur pengendalian inflasi Kabupaten Situbondo.



Gambar 2. 14 Inflasi Tahun ke Tahun Kabupaten Situbondo (Per Bulan Januari)

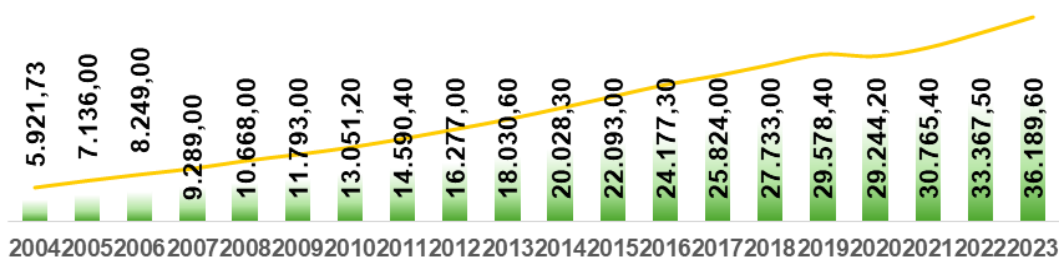
Selama 20 tahun terakhir (2004-2024), tingkat inflasi dari tahun ke tahun (Year of Year) Kabupaten Situbondo mengalami fluktuasi yang dinamis dengan kecenderungan meningkat. Tren semacam ini sangat lumrah terjadi, mengingat inflasi di tingkat nasional pun cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Dinamika fluktuasi tingkat inflasi di Kabupaten Situbondo sejatinya juga dapat menjadi cerminan bahwa Kabupaten Situbondo sejauh ini berhasil mengendalikan inflasinya dengan baik sehingga tidak mengalami inflasi berlebihan serta juga tidak mengalami deflasi yang berlebihan.

Jika melihat dari tren pengendalian inflasinya, upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Situbondo perlu fokus pada strategi yang sejalan dengan program nasional untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Salah satu caranya adalah dengan menjaga stabilitas harga melalui kebijakan pengendalian inflasi yang efektif. Ini bisa dilakukan dengan meningkatkan efisiensi distribusi barang dan jasa agar harga kebutuhan pokok tetap terjangkau, serta mendukung produksi lokal untuk mengurangi ketergantungan pada produk impor yang rentan terhadap fluktuasi harga global. Selain itu, pemberian subsidi atau bantuan langsung kepada masyarakat berpenghasilan rendah juga dapat menjadi langkah strategis untuk meringankan beban pengeluaran mereka. Dengan mengurangi tekanan biaya hidup, daya beli masyarakat dapat terjaga, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Situbondo secara signifikan.

2.3.2 PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku

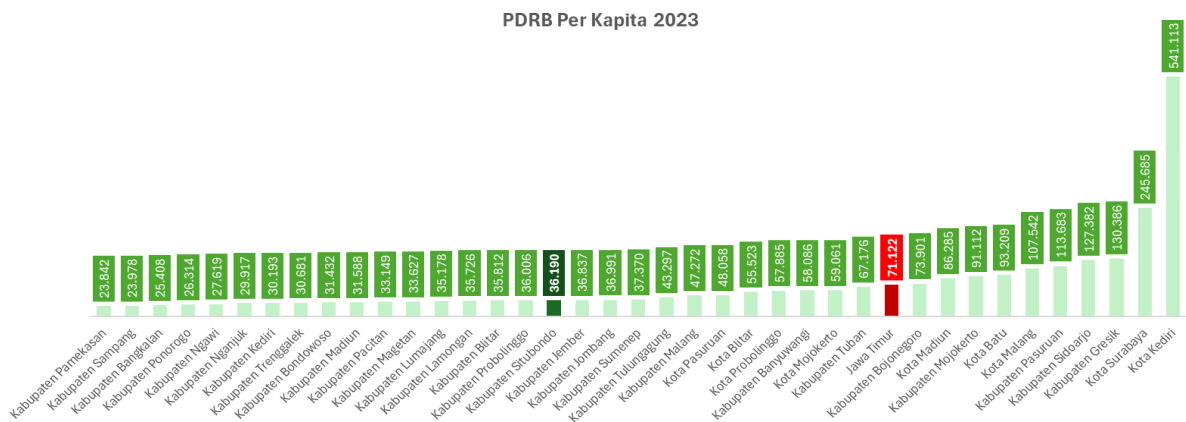
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang tinggi mencerminkan tingkat kesejahteraan ekonomi yang lebih baik di suatu daerah karena menunjukkan bahwa pendapatan rata-rata yang diperoleh masyarakat cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup

mereka. Di Kabupaten Situbondo, indikator PDRB per kapita juga menjadi salah satu fokus utama dalam pertimbangan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Upaya yang dilahirkan dari pertimbangan ini dapat dilakukan dengan mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi unggulan yang berpotensi tinggi, seperti pertanian, pariwisata, dan industri kecil-menengah, yang merupakan tulang punggung perekonomian daerah. Dengan meningkatkan produktivitas dan pendapatan dari sektor-sektor ini, diharapkan pendapatan per kapita masyarakat juga akan meningkat. Selain itu, memperluas kesempatan kerja dan akses terhadap pendidikan serta pelatihan keterampilan juga penting untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat berpartisipasi dan merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, peningkatan PDRB per kapita dapat berkontribusi langsung terhadap pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Situbondo.



Gambar 2. 15 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Situbondo (Ribu Rupiah)

Dari tahun 2004 sampai tahun 2023, PDRB Per Kapita Kabupaten Situbondo mengalami tren capaian yang positif berupa kenaikan yang cukup konsisten dari tahun ke tahun. Di tahun 2004, PDRB per kapita Kabupaten Situbondo masih berkisar di angka Rp. 5 juta rupiah/ tahun, sebelum mengalami kenaikan gradual hingga mencapai kisaran Rp. 36 juta di tahun 2023. Kenaikan ini mencerminkan bahwa ekonomi Kabupaten Situbondo berkembang dan masyarakatnya semakin mampu memenuhi kebutuhan pokok serta menikmati kualitas hidup yang lebih baik. Tren peningkatan ini juga menunjukkan bahwa upaya untuk memperkuat sektor-sektor ekonomi lokal seperti pertanian, pariwisata, dan industri kecil-menengah mungkin telah memberikan hasil yang signifikan, dengan meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.



Gambar 2. 16 PDRB Perkapita Kabupaten Situbondo dan Jawa Timur  
(Ribu Rupiah)

Meskipun PDRB per kapita Kabupaten Situbondo mengalami tren peningkatan yang konsisten selama periode 2004-2023, dengan capaian sebesar Rp. 36.190.000 pada tahun 2023, angka ini masih berada di bawah PDRB per kapita Provinsi Jawa Timur yang mencapai Rp. 71.122.000. Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun ekonomi Kabupaten Situbondo berkembang dan masyarakatnya mulai mampu memenuhi kebutuhan pokok serta menikmati kualitas hidup yang lebih baik, tingkat kesejahteraan ekonomi di daerah ini masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata provinsi. Hal ini dapat berdampak pada upaya penanggulangan kemiskinan, di mana diperlukan strategi lebih lanjut untuk mendorong peningkatan pendapatan secara lebih merata di seluruh sektor ekonomi lokal. Untuk mengatasi kesenjangan ini, Kabupaten Situbondo perlu terus memperkuat sektor-sektor ekonomi potensial, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan produktivitas serta daya saing lokal. Dengan demikian, manfaat dari pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan lebih luas dan berkontribusi lebih signifikan dalam pengurangan kemiskinan di masa depan.

### BAB III

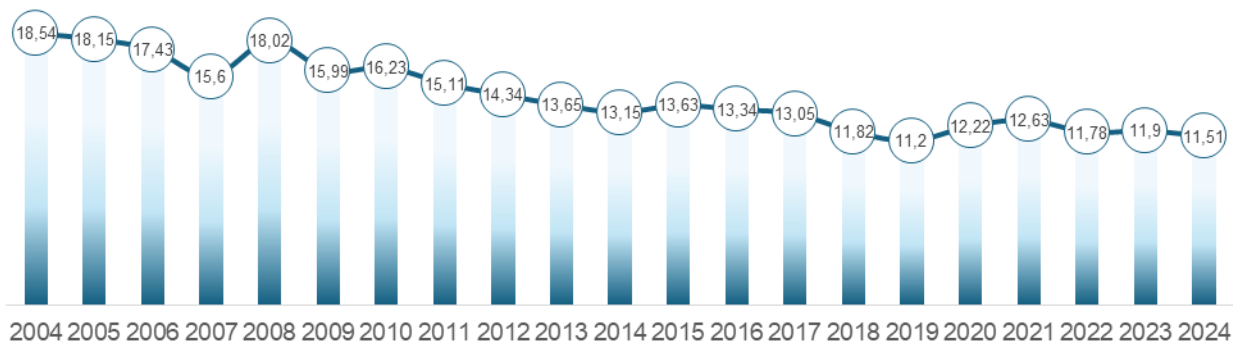
## PROFIL KEMISKINAN DAERAH

### 3.1 Kondisi Umum Kemiskinan Daerah

Secara umum, Kabupaten Situbondo menghadapi tantangan cukup signifikan yang berkaitan dengan kondisi kemiskinan daerah serta memerlukan adanya perhatian khusus dalam meninjau kondisi ini sebagai langkah awal penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025-2029. Selama 20 tahun terakhir, indikator-indikator umum kemiskinan seperti persentase penduduk miskin, jumlah penduduk miskin, tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan, serta garis kemiskinan menunjukkan bahwa masalah kemiskinan di Kabupaten Situbondo memiliki urgensi yang tinggi untuk segera ditangani. Persentase penduduk miskin yang masih cukup tinggi dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Jawa Timur, serta jumlah penduduk miskin yang tidak menunjukkan penurunan signifikan, mengindikasikan bahwa upaya-upaya sebelumnya belum sepenuhnya efektif dalam menanggulangi masalah ini. Selain itu, tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan yang mengukur kesenjangan pendapatan dan distribusi kesejahteraan menunjukkan bahwa banyak warga Situbondo yang hidup di bawah garis kemiskinan dan mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kondisi ini memperkuat pentingnya tinjauan mendalam terhadap indikator-indikator tersebut sebagai langkah awal dalam merumuskan strategi yang lebih efektif dan terarah untuk menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan dalam lima tahun ke depan.

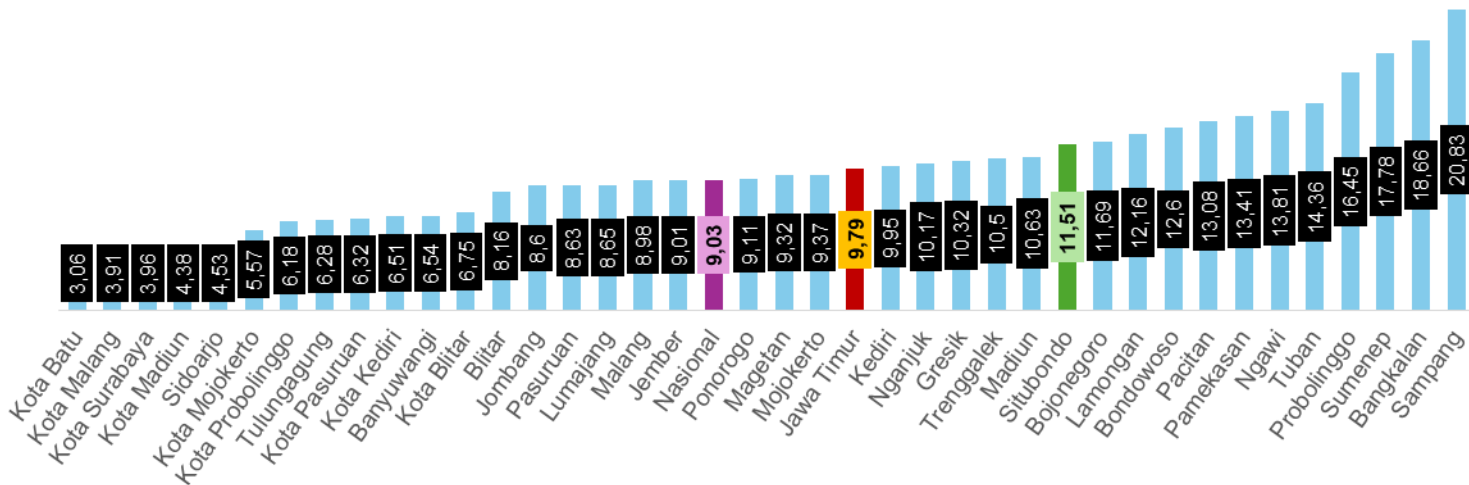
#### 3.1.1 Persentase Penduduk Miskin

Indikator persentase penduduk miskin merupakan alat penting dalam menilai tingkat kemiskinan di suatu wilayah, termasuk Kabupaten Situbondo. Indikator ini mencerminkan proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Dengan memahami persentase ini, pemerintah dan pembuat kebijakan dapat mengidentifikasi daerah-daerah yang paling membutuhkan intervensi dan merancang program yang lebih efektif untuk mengatasi kesenjangan sosial-ekonomi. Selain itu, indikator ini juga berfungsi sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi keberhasilan program pengentasan kemiskinan dan menyesuaikan strategi yang ada agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di Situbondo, seperti di banyak wilayah lainnya, tren perubahan dalam persentase penduduk miskin dapat memberikan wawasan tentang dampak dari kebijakan ekonomi, sosial, dan pembangunan yang diterapkan selama periode tertentu.



Gambar 3. 1 Persentase Pendduk Miskin Kabupaten Situbondo

Kabupaten Situbondo telah menunjukkan kemajuan yang berarti dalam mengurangi tingkat kemiskinan selama dua dekade terakhir. Pada tahun 2004, persentase penduduk miskin di kabupaten ini mencapai 18,54%, sebuah angka yang mencerminkan tantangan penanggulangan kemiskinan yang signifikan. Namun, dengan upaya yang terus-menerus dari pemerintah daerah dan berbagai program pengentasan kemiskinan, angka ini berhasil ditekan hingga mencapai 11,51% pada tahun 2024. Penurunan ini tidak hanya menunjukkan efektivitas kebijakan sosial dan ekonomi setempat, tetapi juga partisipasi aktif komunitas dalam meningkatkan kualitas hidup mereka. Program peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja menjadi faktor kunci dalam tren penurunan ini.



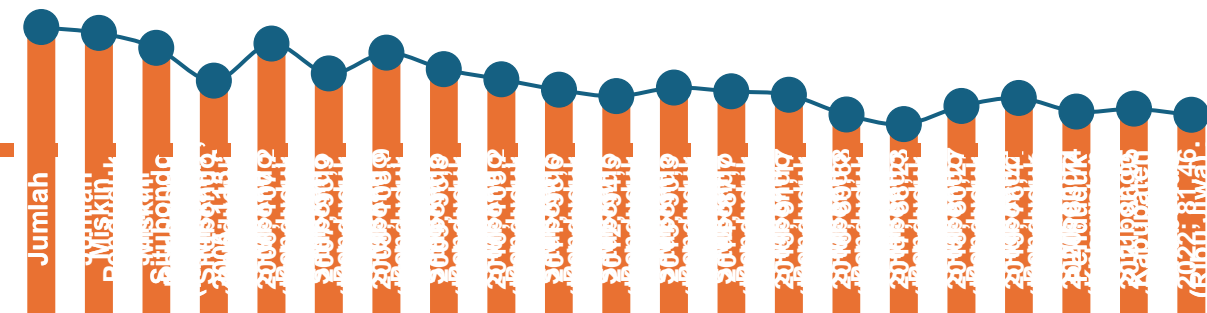
Gambar 3. 2 Persentase Pendduk Miskin Kabupaten Situbondo dan Jawa Timur

Meskipun demikian, persentase penduduk miskin Kabupaten Situbondo yang mencapai 11,51% pada tahun 2024 masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan persentase kemiskinan di Provinsi Jawa Timur yang berada di angka 9,79% dan rata-rata nasional yang sebesar 9,03%. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada tantangan yang harus dihadapi oleh Kabupaten Situbondo dalam upayanya untuk mencapai angka kemiskinan yang lebih rendah. Dibutuhkan strategi yang lebih terintegrasi dan inovatif untuk menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan investasi di sektor-sektor yang dapat menciptakan lapangan kerja baru serta penguatan program-program

pemberdayaan masyarakat lokal menjadi langkah penting untuk mempercepat pengurangan angka kemiskinan di masa mendatang.

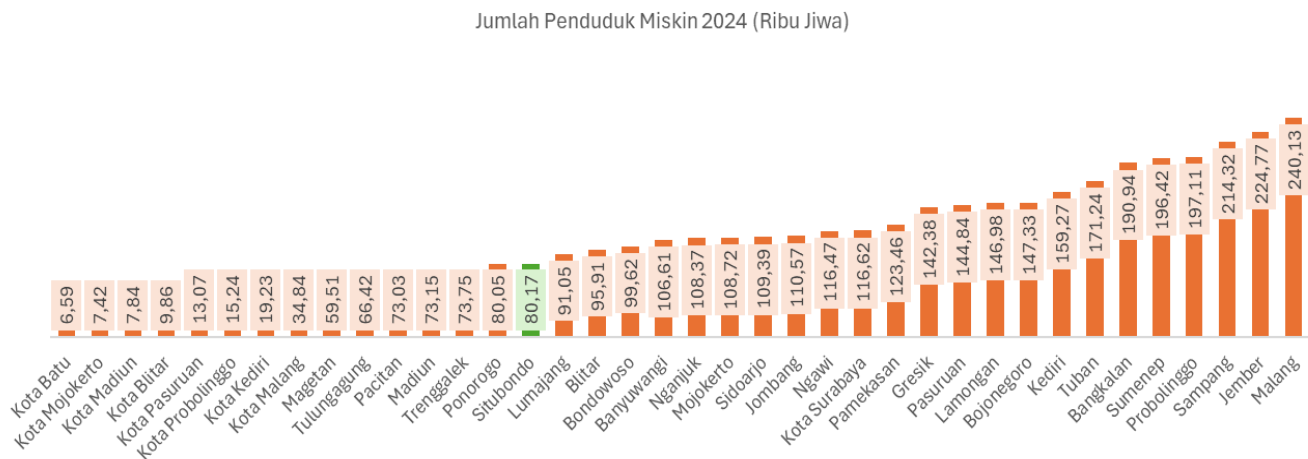
3.1.2 Jumlah Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin merupakan salah satu tolok ukur dalam menilai tingkat kemiskinan di suatu wilayah, termasuk Kabupaten Situbondo. Angka ini menggambarkan jumlah individu yang hidup di bawah garis kemiskinan, memberikan gambaran konkret tentang seberapa luas masalah kemiskinan di daerah tersebut. Namun, untuk memahami tingkat kemiskinan secara lebih komprehensif, penting untuk mempertimbangkan variabel jumlah penduduk total. Sebuah wilayah dengan jumlah penduduk miskin yang besar mungkin memiliki persentase kemiskinan yang rendah jika populasinya sangat besar, dan sebaliknya. Oleh karena itu, analisis yang efektif harus memperhitungkan baik jumlah absolut penduduk miskin maupun proporsi mereka terhadap total populasi. Hal ini membantu pemerintah dan pembuat kebijakan dalam merancang intervensi yang tepat sasaran, memastikan bahwa sumber daya dialokasikan secara efisien untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Di Situbondo, memahami dinamika ini memungkinkan pendekatan yang lebih berdampak dalam program pengentasan kemiskinan dan pembangunan sosial.



Gambar 3. 3 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Situbondo (Ribuan Jiwa)

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Situbondo menunjukkan tren penurunan yang positif dari tahun 2004 hingga 2024. Pada tahun 2004, jumlah penduduk miskin masih mencapai 115.500 jiwa, namun angka ini berhasil diturunkan hingga menjadi 80.170 jiwa pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan adanya progres dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Situbondo, yang didukung oleh program-program pemerintah dan kebijakan lokal yang berfokus pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meskipun begitu, meski ada penurunan jumlah penduduk miskin, tingkat kemiskinan di Kabupaten Situbondo masih memiliki urgensi yang tinggi untuk ditangani secara lebih efektif, mengingat bahwa angka kemiskinan ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata provinsi Jawa Timur dan nasional.



Gambar 3. 4 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Situbondo dan Jawa Timur

Meskipun jumlah penduduk miskin di Kabupaten Situbondo mengalami penurunan dari tahun ke tahun hingga mencapai 80.170 jiwa pada tahun 2024, angka ini masih menempatkan Situbondo di posisi ke-24 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur dengan jumlah penduduk miskin terbanyak. Posisi ini tepat berada di bawah Kabupaten Lumajang dan di atas Kabupaten Ponorogo, menunjukkan bahwa kemiskinan di Situbondo masih menjadi tantangan signifikan dibandingkan dengan banyak daerah lainnya di provinsi Jawa Timur. Kondisi ini menegaskan bahwa meskipun ada kemajuan dalam mengurangi jumlah penduduk miskin, upaya yang lebih intensif dan terfokus masih sangat diperlukan. Hal ini bertujuan agar penurunan jumlah penduduk miskin dapat lebih cepat dan sejalan dengan target-target pembangunan sosial-ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

3.1.3 Tingkat Kedalaman Kemiskinan

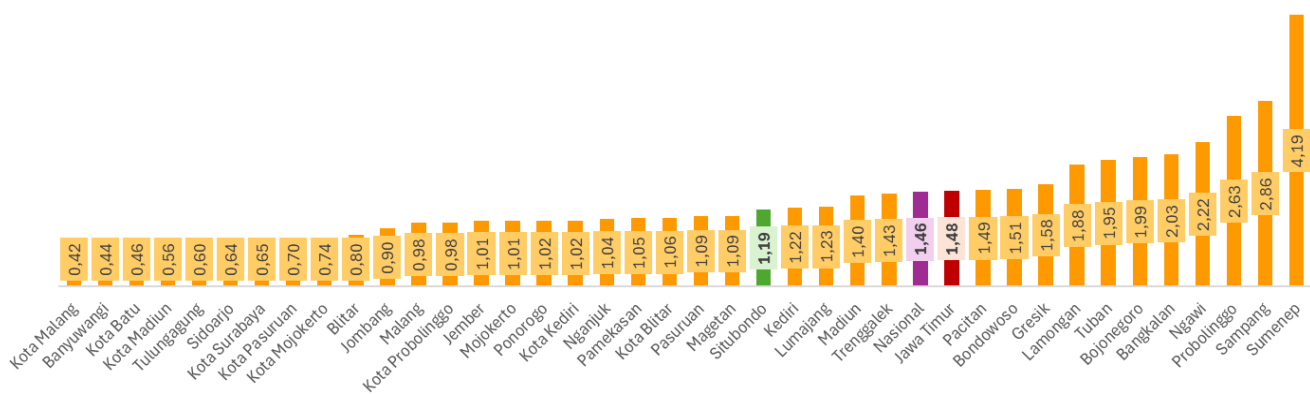
Sebagai upaya memotret kondisi kemiskinan Kabupaten Situbondo secara lebih komprehensif, identifikasi tingkat kedalaman kemiskinan menjadi salah satu pertimbangan penting. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) adalah indikator yang esensial dalam menilai kondisi kemiskinan di suatu wilayah secara lebih mendalam, termasuk di Kabupaten Situbondo. Indeks ini mengukur seberapa jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin berada di bawah garis kemiskinan, sehingga memberikan gambaran tentang kondisi kemiskinan dan kebutuhan untuk intervensi kebijakan. Dalam konteks penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah selama lima tahun ke depan, hasil identifikasi Kedalaman Kemiskinan menjadi alat strategis untuk menentukan prioritas dan alokasi sumber daya yang lebih tepat. Dengan memahami kedalaman kemiskinan melalui P1, pemerintah daerah dapat merancang program bantuan yang lebih terarah, seperti pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta dukungan finansial langsung yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, hasil identifikasi Kedalaman Kemiskinan tidak hanya membantu dalam memetakan kondisi kemiskinan secara lebih akurat tetapi juga menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.



Gambar 3. 5 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Situbondo

Selama 20 tahun terakhir, tren Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Situbondo menunjukkan fluktuasi yang signifikan namun cenderung menurun secara keseluruhan. Pada tahun 2004, indeks ini berada di angka 2,78 dan mencapai puncaknya pada tahun 2006 dengan nilai 3,73. Setelah itu, terjadi beberapa penurunan dan kenaikan, seperti pada tahun 2008 dengan angka 3,51 dan penurunan bertahap hingga tahun 2013 mencapai 2,09. Dalam lima tahun terakhir, tren ini semakin menurun, dengan penurunan tajam dari 1,91 pada tahun 2020 menjadi 1,19 pada tahun 2024. Fluktuasi ini mencerminkan respons terhadap berbagai kebijakan sosial-ekonomi yang diterapkan, serta tantangan eksternal yang dihadapi selama periode tersebut, namun secara keseluruhan, terdapat progres yang menunjukkan efektivitas strategi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Situbondo dalam beberapa tahun terakhir.

Indeks Kedalaman Kemiskinan 2024 (P1)



Gambar 3. 6 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Situbondo dan Jawa Timur

Sedangkan secara komparatif, pada tahun 2024, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Situbondo yang mencapai 1,19, berhasil menempatkannya relatif lebih baik dibandingkan beberapa kabupaten/kota lain di Jawa Timur. Situbondo memiliki P1 yang lebih rendah dari rata-rata provinsi Jawa Timur, yang berada di angka 1,46, dan juga lebih baik dari rata-rata nasional yang sebesar 1,48. Dalam konteks Jawa Timur, Situbondo berada di antara kabupaten/kota dengan indeks yang lebih rendah,

menunjukkan keberhasilan dalam upaya pengentasan kemiskinan dibandingkan wilayah lain seperti Sumenep dan Sampang yang memiliki P1 tertinggi. Posisi ini pada akhirnya juga dapat mencerminkan efektivitas strategi dan kebijakan yang diterapkan di Situbondo dalam mengurangi kedalaman kemiskinan.

3.1.4 Tingkat Keparahan Kemiskinan

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) adalah indikator penting yang memberikan gambaran lebih komprehensif tentang kondisi kemiskinan di suatu wilayah, termasuk Kabupaten Situbondo. Indikator ini mengukur distribusi kemiskinan dengan memperhitungkan ketimpangan di antara penduduk miskin, sehingga tidak hanya menunjukkan seberapa jauh mereka berada di bawah garis kemiskinan, tetapi juga seberapa berat ketimpangan di antara mereka. Dalam konteks penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah selama lima tahun ke depan, Identifikasi Keparahan Kemiskinan menjadi alat strategis untuk merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran. Dengan memahami keparahan kemiskinan melalui Identifikasi Keparahan Kemiskinan, pemerintah daerah dapat mengembangkan program yang tidak hanya mengentaskan kemiskinan, tetapi juga mengurangi ketimpangan di antara penduduk miskin melalui intervensi yang lebih spesifik, seperti peningkatan akses terhadap layanan dasar dan pemberdayaan ekonomi. Oleh karena itu, P2 berfungsi sebagai dasar dalam menyusun kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan adil.



Gambar 3. 7 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Situbondo

Selama 2 dekade terakhir, tren Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Situbondo menunjukkan penurunan yang konsisten, meskipun mengalami beberapa fluktuasi. Pada tahun 2004, Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Situbondo berada di angka 0,64 dan mencapai puncaknya di tahun 2006 dengan 1,07. Setelah itu, terjadi penurunan signifikan, meskipun sempat naik kembali pada tahun 2008 mencapai 1,01. Sejak tahun 2012, Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Situbondo terus menunjukkan penurunan stabil, dengan angka 0,56 pada tahun 2013 dan kemudian turun menjadi 0,39 pada tahun 2016. Tren penurunan ini berlanjut hingga tahun 2024, mencapai titik terendah di 0,18. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan kebijakan dan program pengentasan kemiskinan

yang diterapkan di Situbondo, menandakan berkurangnya ketimpangan di antara penduduk miskin dan peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan.

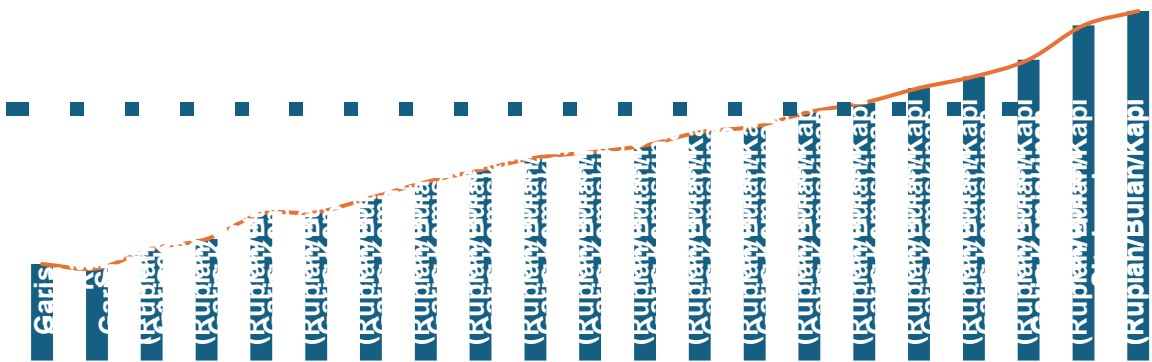


Gambar 3. 8 Indeks Keparahkan Kemiskinan (P2) Kabupaten Situbondo dan Jawa Timur

Pada tahun 2024, Indeks Keparahkan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Situbondo mencapai 0,18, menunjukkan posisi yang cukup baik dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Jawa Timur. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata provinsi Jawa Timur yang berada di angka 0,33 dan juga di bawah rata-rata nasional yang sebesar 0,35. Situbondo berhasil mempertahankan indeks yang lebih rendah dari banyak daerah lain, seperti Sumenep yang memiliki P2 tertinggi sebesar 1,53. Capaian ini mencerminkan efektivitas program dan kebijakan pengentasan kemiskinan di Situbondo, menegaskan keberhasilan dalam mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

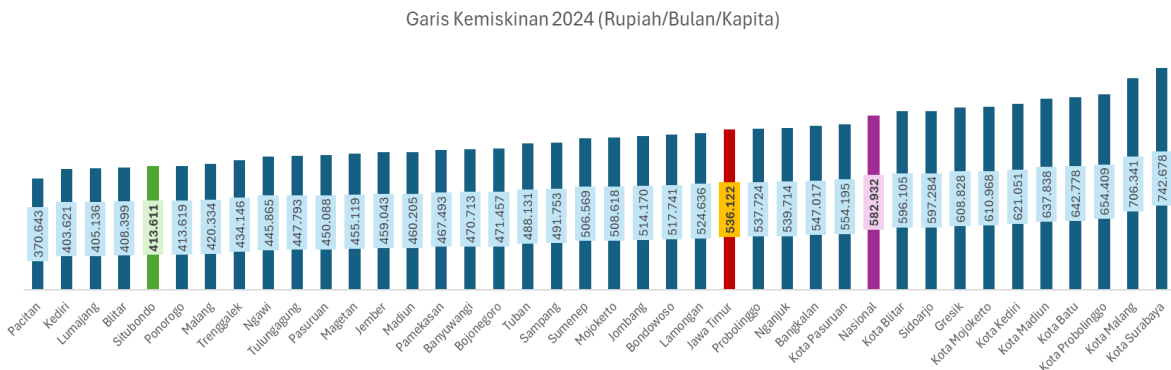
3.1.5 Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan daerah merupakan salah satu tolok ukur penting untuk memahami kondisi kemiskinan secara lebih komprehensif di suatu wilayah, termasuk di Kabupaten Situbondo. Garis kemiskinan ini menggambarkan batas minimum pendapatan yang diperlukan oleh individu atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, sandang, papan, dan kebutuhan hidup lainnya. Dengan menganalisis garis kemiskinan, pemerintah dapat lebih akurat mengidentifikasi kelompok masyarakat yang berada di bawah atau di sekitar batas ini, sehingga strategi dan intervensi yang tepat dapat disusun dalam Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) untuk lima tahun ke depan. Pemahaman yang mendalam tentang garis kemiskinan di Kabupaten Situbondo sangat penting untuk merancang kebijakan yang lebih efektif dan terarah, guna mengurangi jumlah penduduk miskin, meningkatkan kesejahteraan, dan mencapai target pembangunan berkelanjutan.



Gambar 3. 9 Garis Kemiskinan Kabupaten Situbondo (Rupiah/Bulan/Kapita)

Selama periode 2004 hingga 2024, Garis Kemiskinan di Kabupaten Situbondo menunjukkan tren kenaikan yang konsisten. Pada tahun 2004, garis kemiskinan berada di angka 114.362, kemudian mengalami penurunan sedikit pada tahun 2005 menjadi 109.096. Namun, sejak 2006, garis kemiskinan terus meningkat, mencapai 132.613 pada tahun 2007 dan 192.862 pada tahun 2010. Pertumbuhan ini terus berlanjut, dengan garis kemiskinan mencapai 240.085 pada 2012 dan naik lebih lanjut hingga 305.280 pada 2018. Pada tahun 2024, garis kemiskinan mencapai 413.611. Kenaikan ini mencerminkan peningkatan biaya hidup dan kebutuhan dasar masyarakat, yang mengharuskan penyesuaian kontinu untuk menentukan intervensi kebijakan yang efektif dalam mengurangi kemiskinan di Situbondo.



Gambar 3. 10 Garis Kemiskinan Kabupaten Situbondo dan Jawa Timur

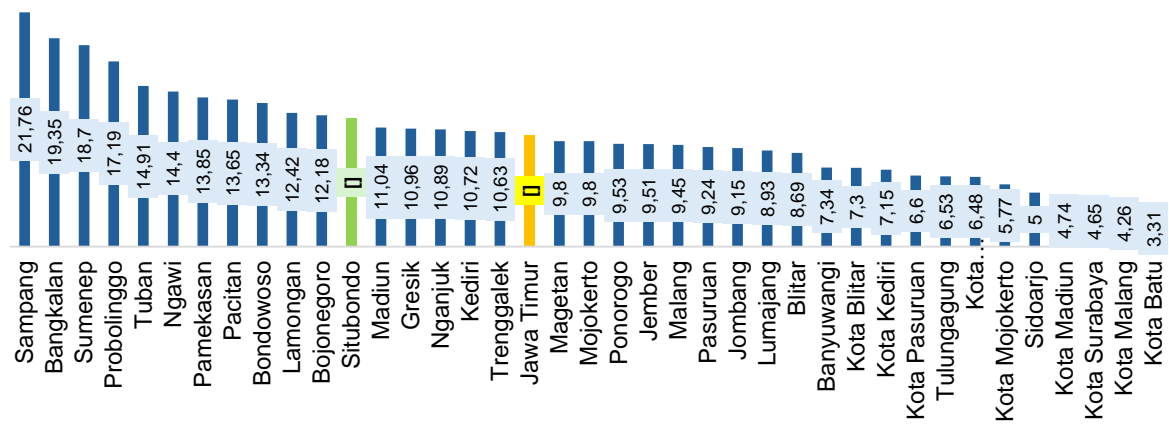
Pada tahun 2024, Garis Kemiskinan di Kabupaten Situbondo mencapai 413.611 rupiah per bulan per kapita, yang berada di bawah rata-rata provinsi Jawa Timur sebesar 438.950 rupiah. Posisi ini juga lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional yang sebesar 532.932 rupiah. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Jawa Timur, Situbondo memiliki garis kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan banyak wilayah lainnya, seperti Kota Surabaya yang mencapai 726.878 rupiah. Posisi ini menunjukkan bahwa tantangan dalam meningkatkan standar hidup dan daya beli masyarakat tetap menjadi prioritas, terutama dalam menyesuaikan kebijakan untuk mengatasi inflasi dan kenaikan biaya hidup secara efektif.

3.2 Analisis Karakterisrik Masalah Kemiskinan

3.2.1 Persentase Penduduk Miskin

A. Posisi Relatif

Berdasarkan data di bawah dapat diketahui bahwa kondisi persentase penduduk miskin Kabupaten Situbondo berada di atas Provinsi Jawa Timur. Posisi Kabupaten Situbondo berada pada urutan ke 12 dari 38 Kabupaten/ Kota di Jawa Timur. Persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023 sebesar 10,35% sedangkan Kabupaten Situbondo memiliki angka sebesar 11,90% pada tahun 2023. Oleh karena itu diperlukan perhatian khusus mengingat Kabupaten Situbondo masih berada di atas daerah lain seperti Madiun, Gresik, Nganjuk, Kediri dan Trenggalek. Berikut untuk lebih jelas meupakan gambar perbandingan persentase penduduk miskin Kabupaten Situbondo dengan daerah lain di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023:

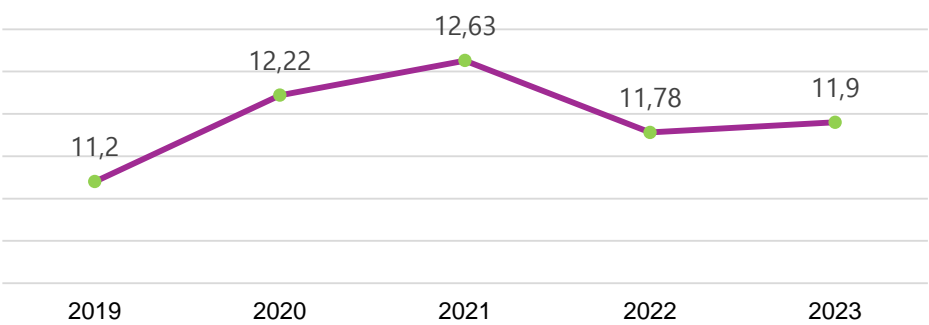


Gambar 3. 11 Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Situbondo di Jawa Timur Tahun 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Tahun 2024

B. Perkembangan Time Series

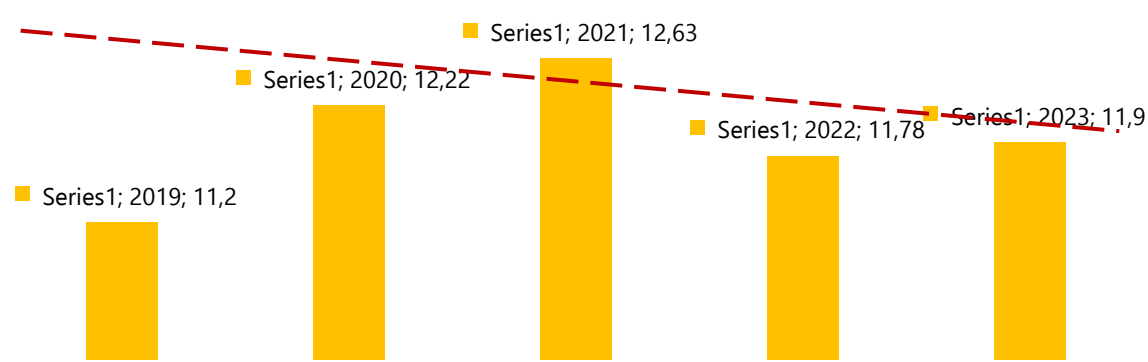
Persentase penduduk miskin merupakan indikator penting yang menggambarkan proporsi populasi yang hidup di bawah garis kemiskinan dalam suatu wilayah. Pengukuran ini biasanya didasarkan pada kriteria pendapatan atau konsumsi yang ditetapkan untuk menentukan apakah seseorang atau keluarga dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, tempat tinggal dan kesehatan. Kondisi persentase penduduk miskin Kabupaten Situbondo pada 5 tahun terakhir (2019 – 2023) menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dengan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 12,63%. Kemudian pada tahun 2022 angka tersebut dapat ditekan untuk menurun atau menjadi 11,78% pada tahun 2022. Namun kembakli meningkat pada tahun 2023 atau menjadi 11,90%. Berikut ini merupakan grafik perkembangan persentase penduduk miskin Kabupaten Situbondo pada tahun 2019 – 2023:



Gambar 3. 12 Perkembangan Antar Waktu Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Situbondo Tahun 2019 - 2023  
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Situbondo Tahun 2024

C. Efektivitas

Sejalan dengan kecenderungan penurunan persentase penduduk miskin, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Situbondo juga menunjukkan kecenderungan yang sama dan ada kenaikan di tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo dengan melibatkan beberapa Perangkat Daerah (PD) serta dukungan program penanggulangan kemiskinan yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo cukup efektif untuk menutunkan kemiskinan di Kabupaten Situbondo.

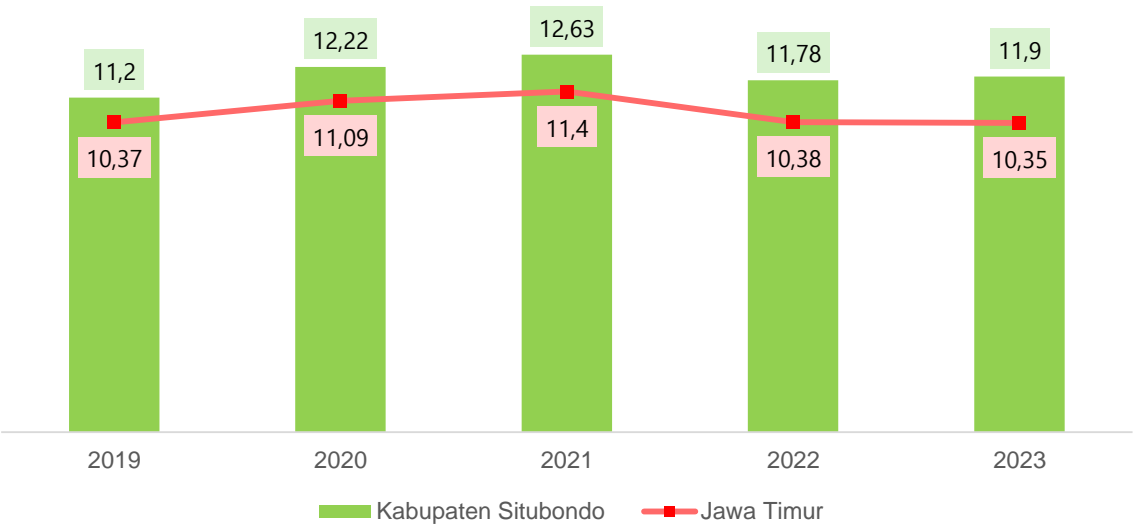


Gambar 3. 13 Analisis Efektivitas Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Situbondo Tahun 2019 - 2023  
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Situbondo Tahun 2024

D. Relevansi

Melihat berdasarkan hasil relevansi persentase penduduk miskin antara Kabupaten Situbondo dengan Provinsi Jawa Timur pada 5 tahun terakhir (2019 – 2023) menunjukkan bahwa capaian persentase penduduk miskin Kabupaten Situbondo tahun 2019 – 2023 relevan dengan capaian persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Timur. Kenaikan atau penurunan persentase penduduk miskin di Kabupaten Situbondo sejalan dengan kenaikan atau penurunan persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa capaian tingkat persentase penduduk miskin di Kabupaten Situbondo relevan dengan Provinsi Jawa Timur. Berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam penanggulangan kemiskinan

diharapkan mampu untuk saling melengkapi dan memperluas *coverage* sasaran program. Berikut ini untuk lebih jelas mengenai relevansi antara Kabupaten Situbondo dengan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 – 2023:

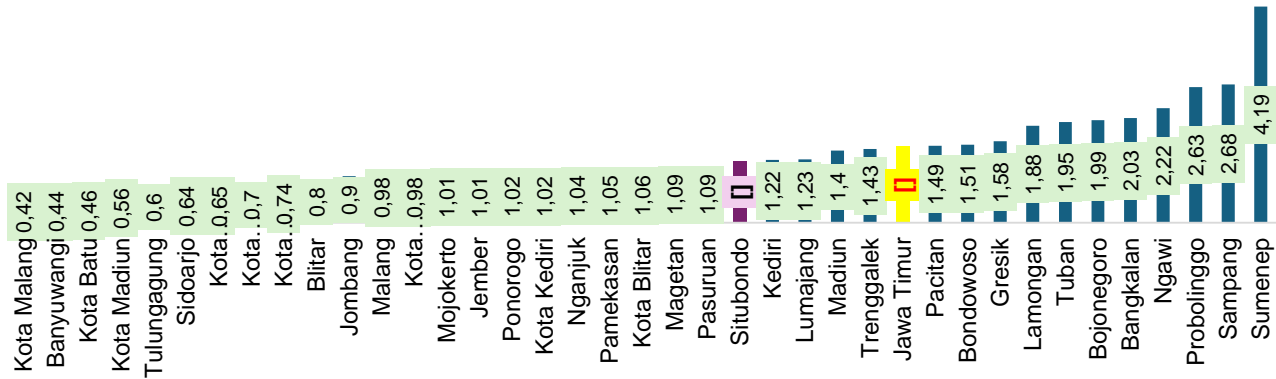


Gambar 3. 14 Relevansi Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Situbondo dan Jawa Timur Tahun 2019 - 2023  
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Situbondo Tahun 2024

3.2.2 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

A. Posisi Relatif

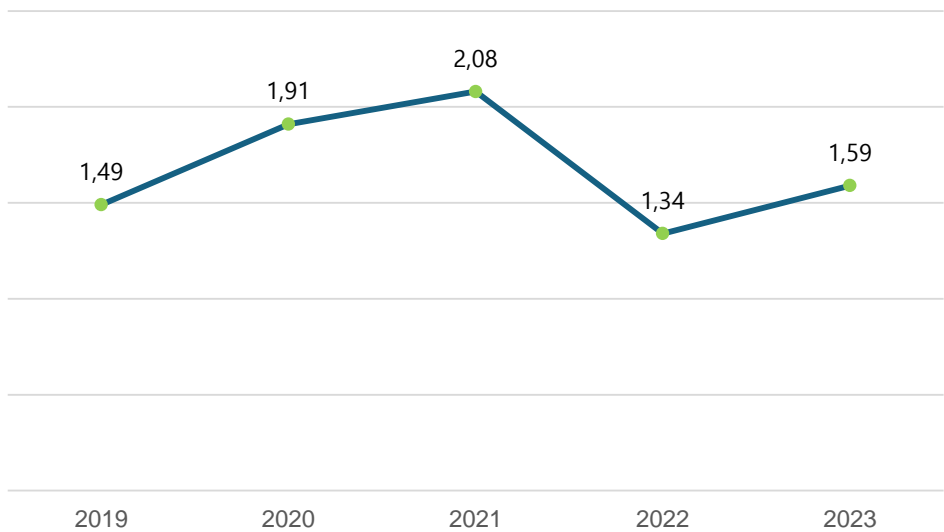
Diketahui bahwa posisi tingkat kedalaman kemiskinan Kabupaten Situbondo berada di bawah tingkat kedalaman kemiskinan Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2023 Kabupaten memiliki tingkat kedalaman kemiskinan sebesar 1,19 sedangkan Provinsi Jawa Timur memiliki tingkat kedalaman kemiskinan sebesar 1,48. Sehingga dapat diketahui pula bahwa Kabupaten Situbondo memiliki capaian tingkat kedalaman kemiskinan di atas daerah lain seperti Kediri, Lumajang, Madiun, dan Trenggalek. Berikut ini untuk lebih jelas mengenai posisi relatif tingkat kedalaman kemiskinan Kabupaten Situbondo dengan daerah lain di Provinsi Jawa Timur:



Gambar 3. 15 Posisi Relatif Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Situbondo di Jawa Timur Tahun 2023  
Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Tahun 2024

B. Perkembangan Time Series

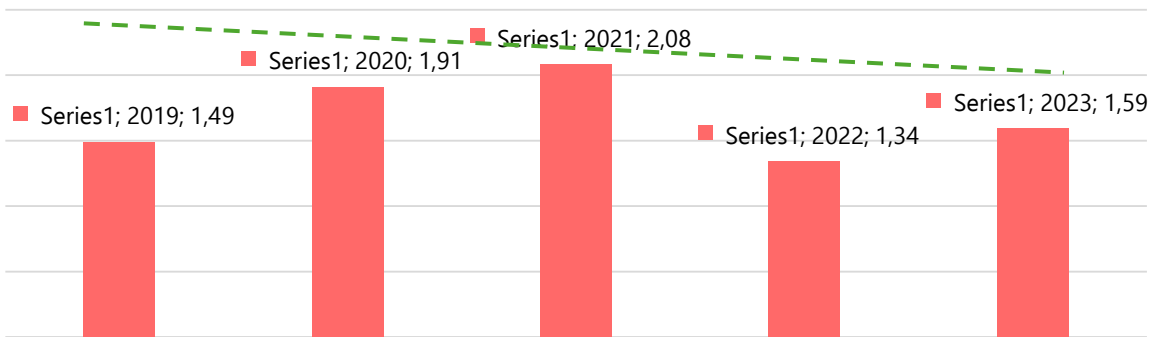
Tingkat kedalaman kemiskinan merupakan ukuran yang menggambarkan seberapa parah kondisi kemiskinan yang dialami oleh masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kabupaten Situbondo pada 5 tahun terakhir menunjukkan tingkat kedalaman kemiskinan yang dengan perkembangan yang cukup fluktuatif. Tingkat kedalaman kemiskinan Kabupaten Situbondo memiliki capaian tertinggi pada tahun 2021 yaitu sebesar 2,08 kemudian angka tersebut dapat ditekan sehingga pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 1,34. Namun pada tahun 2023 tingkat kedalaman kemiskinan Kabupaten Situbondo kembali meningkat menjadi 1,59. Berikut ini untuk lebih jelas grafik perkembangan *time series* Kabupaten Situbondo dalam 5 tahun terakhir (2019 – 2023):



Gambar 3. 16 Perkembangan Antar Waktu Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Situbondo Tahun 2019 - 2023  
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Situbondo Tahun 2024

C. Efektivitas

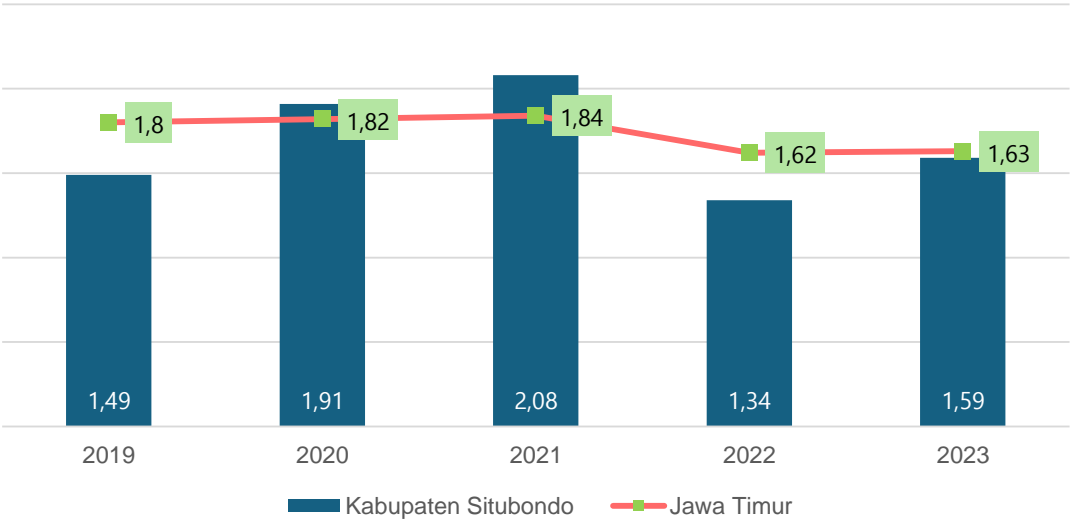
Sejalan dengan kecenderungan penurunan tingkat kedalaman kemiskinan, penduduk miskin di Kabupaten Situbondo juga menunjukkan kecenderungan yang sama dan ada kenaikan di tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo dengan melibatkan beberapa Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Situbondo saling terkait dan memberikan pengaruh positif.



Gambar 3. 17 Analisis Efektivitas Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Situbondo Tahun 2019 - 2023  
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Situbondo Tahun 2024

D. Relevansi

Relevansi perkembangan tingkat kedalaman kemiskinan di Kabupaten Situbondo dan Provinsi Jawa timur pada 5 tahun terakhir (2019 – 2023) menunjukkan adanya persamaan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan grafik di bawah bahwa pada tahun 2021 baik pada Kabupaten Situbondo maupun Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan sedangkan pada tahun berikutnya menunjukkan adanya kecenderungan mengalami penurunan. Berikut ini untuk lebih jelas mengenai relevansi antara Kabupaten Situbondo dengan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 – 2023:

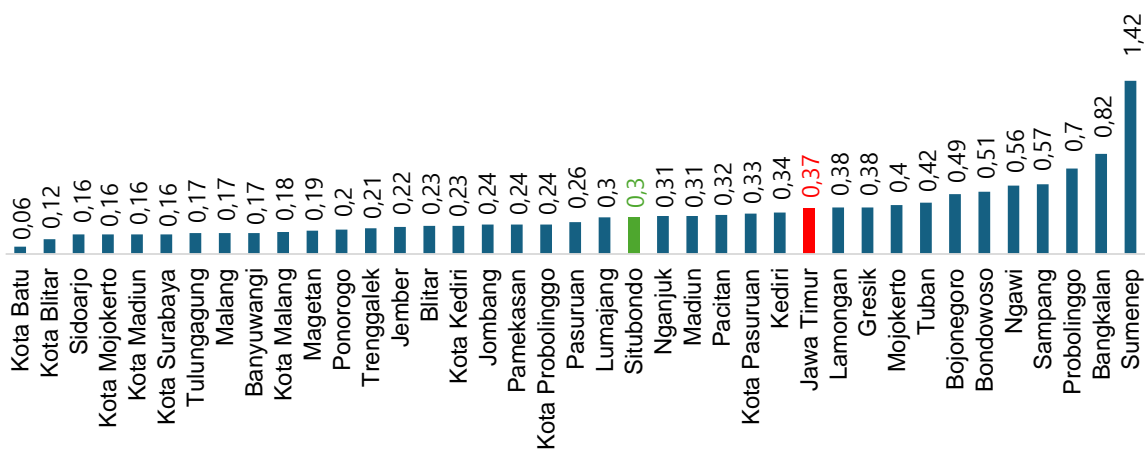


Gambar 3. 18 Relevansi Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Situbondo dan Jawa Timur Tahun 2019 - 2023  
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Situbondo Tahun 2024

3.2.3 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

A. Posisi Relatif

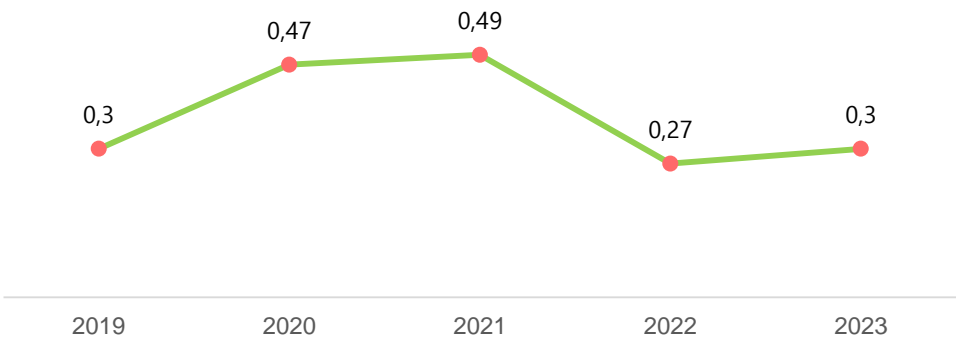
Selaras dengan indeks kedalaman kemiskinan, pada tingkat keparahan kemiskinan Kabupaten Situbondo memiliki capaian lebih baik dari Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2023 diketahui Kabupaten Situbondo memiliki capaian sebesar 03 sedangkan Provinsi Jawa Timur memiliki capaian sebesar 0,37. Sehingga posisi Kabupaten Situbondo lebih tinggi dari beberapa daerah lain seperti Nganjuk, Madiun, Pacitan, Kota Pasuruan dan Kediri. Berikut ini adalah grafik posisi relatif Kabupaten Situbondo dengan daerah lain di Provinsi Jawa Timur:



Gambar 3. 19 Posisi Relatif Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Situbondo di Jawa Timur Tahun 2023  
Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Tahun 2024

B. Perkembangan Time Series

Tingkat keparahan kemiskinan merupakan ukuran yang menggambarkan intensitas kemiskinan di antara populasi yang hidup di bawah garis kemiskinan. Berbeda dengan persentase penduduk miskin dan tingkat kedalaman kemiskinan yang berfokus pada seberapa banyak orang yang hidup dalam kemiskinan dan seberapa jauh mereka dari garis kemiskinan, tingkat keparahan kemiskinan mengevaluasi seberapa berat kondisi kemiskinan yang dialami masyarakat secara keseluruhan. Perkembangan tingkat keparahan kemiskinan Kabupaten Situbondo pada 5 tahun terakhir (2019 – 2023) menunjukkan perkembangan yang cukup fluktuatif dengan angka tertinggi terjadi pada tahun 2021 atau sebesar 0,49. Kemudian angka ini dapat ditekan menjadi 0,27 pada tahun 2022 namun pada tahun 2023 terjadi sedikit peningkatan atau menjadi 0,3.

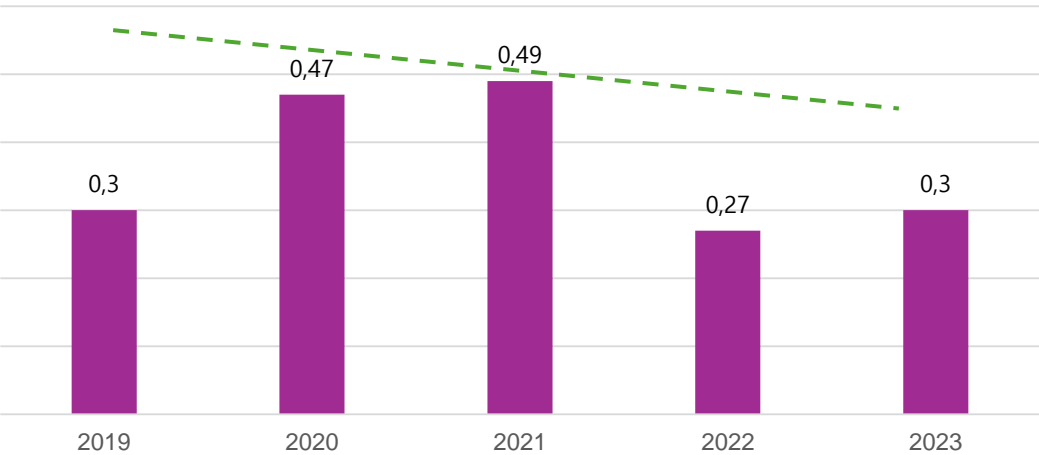


Gambar 3. 20 Perkembangan Antar Waktu Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Situbondo Tahun 2019 - 2023  
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Situbondo Tahun 2024

C. Efektivitas

Berkaitan dengan kecenderungan penurunan tingkat keparahan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur, tingkat keparahan kemiskinan di Kabupaten Situbondo juga menunjukkan kecenderungan yang sama dan terjadi kenaikan di tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo dengan melibatkan beberapa Perangkat Daerah (PD)

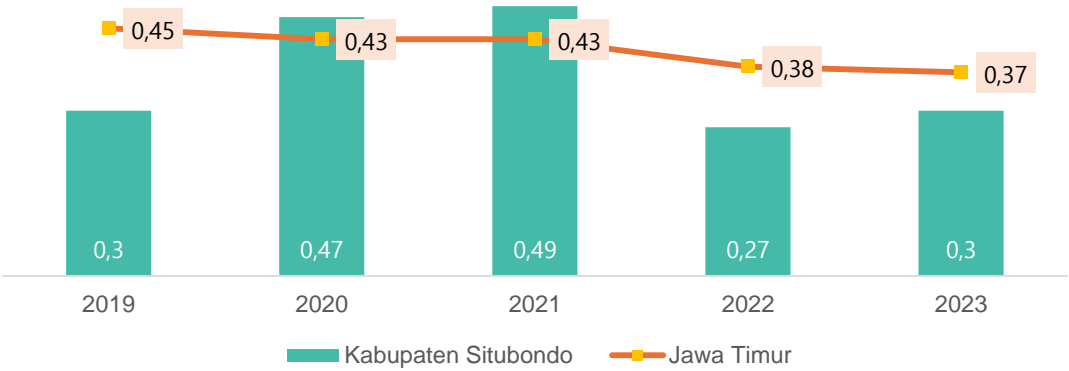
di Kabupaten Situbondo saling terkait dan memberikan pengaruh positif. Berikut ini adalah grafik efektivitas Kabupaten Situbondo selama 5 tahun terakhir:



Gambar 3. 21 Analisis Efektivitas Tingkat Keparahen Kemiskinan Kabupaten Situbondo Tahun 2019 - 2023  
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Situbondo Tahun 2024

D. Relevansi

Relevansi perkembangan tingkat keparahan kemiskinan di Kabupaten Situbondo dan Provinsi Jawa timur pada 5 tahun terakhir (2019 – 2023) menunjukkan adanya persamaan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan grafik di bawah bahwa pada tahun 2021 baik pada Kabupaten Situbondo maupun Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan sedangkan pada tahun berikutnya menunjukkan adanya kecenderungan mengalami penurunan. Berikut ini untuk lebih jelas mengenai relevansi antara Kabupaten Situbondo dengan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 – 2023:



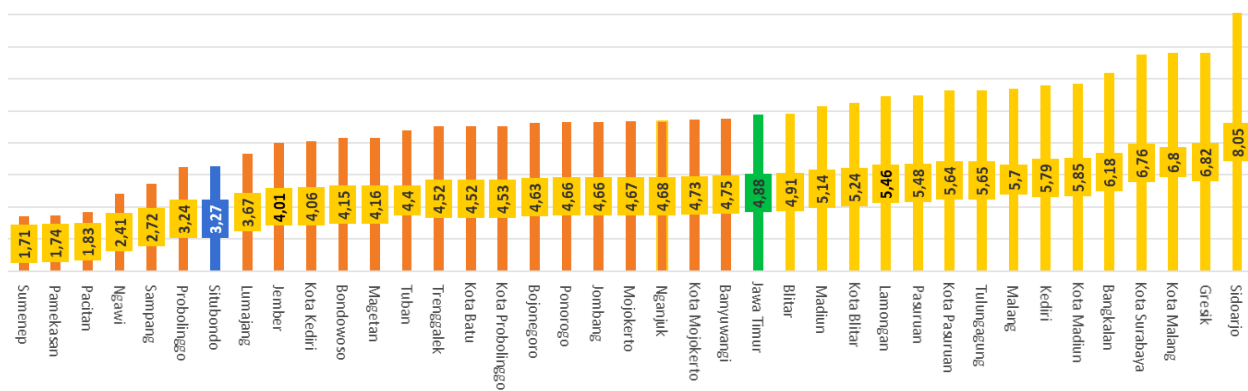
Gambar 3. 22 Relevansi Tingkat Keparahen Kemiskinan Kabupaten Situbondo dan Jawa Timur Tahun 2019 - 2023  
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Situbondo Tahun 2024

3.3 Analisis Karakteristik Masalah Ketenagakerjaan

3.3.1 Tingkat Pengangguran Terbuka

A. Posisi Relatif

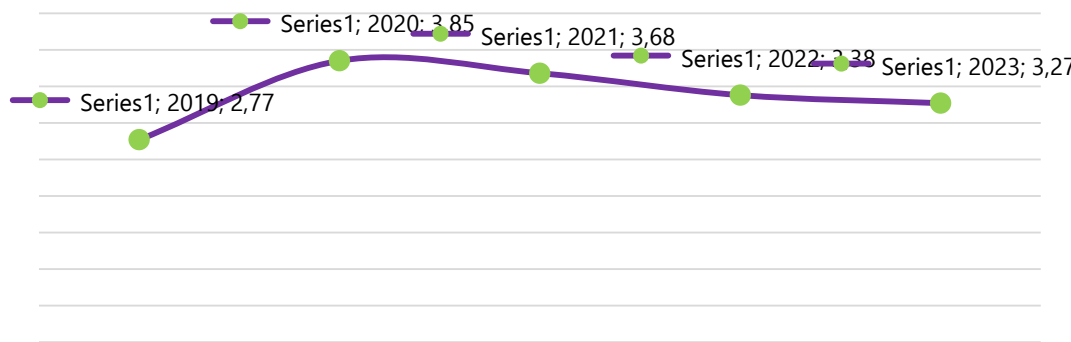
Kabupaten Situbondo memiliki posisi relatif yang lebih baik apabila dibandingkan dengan keadaan di Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2023 Kabupaten Situbondo memiliki posisi yang baik yaitu berada pada urutan ke 7 dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur dengan capaian sebesar 3,37. Sedangkan itu Provinsi Jawa Timur memiliki capaian sebesar 4,88 pada tahun 2023. Berikut ini adalah posisi relatif Kabupaten Situbondo apabila dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Jawa Timur:



Gambar 3. 23 Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Situbondo di Jawa Timur Tahun 2023  
Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Tahun 2024

B. Perkembangan Time Series

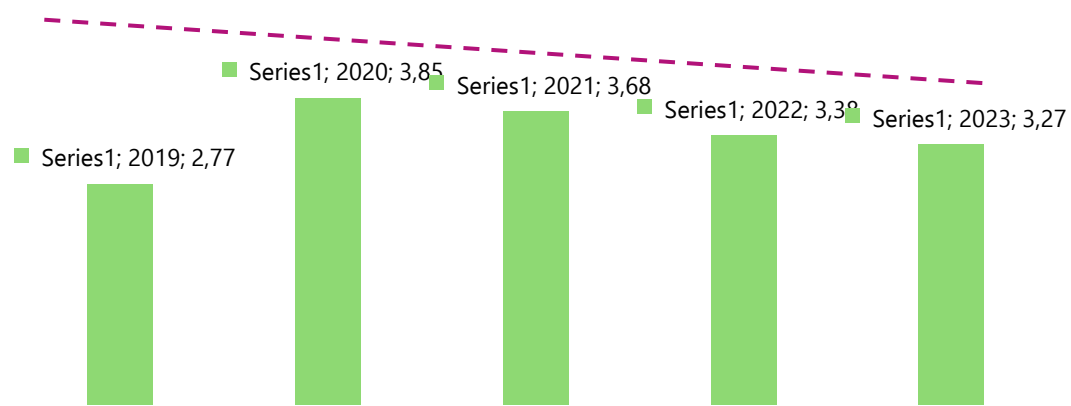
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan serta tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mempersiapkan usaha. Perhitungan TPT adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja mencakup penduduk usia produktif yaitu yang berusia 15 tahun hingga 64 tahun yakni penduduk yang digolongkan mampu memproduksi barang dan jasa. Penduduk dengan usia produktif diharapkan dapat menanggung penduduk dengan usia tidak produktif. Berdasarkan grafik di abwah dapat dilihat bahwa tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Situbondo dalam 5 tahun terakhir (2019 – 2023) mengalami tren yang cenderung menurun. Tingkat pengangguran terbuka tertinggi di Kabupaten Situbondo terjadi pada tahun 2020 dengan angka sebesar 3,85 dan kemudian semakin menurun dan mencapai angka 3,27 pada tahun 2023.



Gambar 3. 24 Perkembangan Antar Waktu Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Situbondo Tahun 2019 - 2023  
Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Situbondo Tahun 2024

C. Efektivitas

Kabupaten Situbondo memiliki kecenderungan mengalami penurunan pada tingkat pengangguran terbuka, hal ini selaras dengan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur yang juga menunjukkan kecenderungan yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai program penanggulangan kemiskinan yang berkaitan dengan upaya mengurangi jumlah pengangguran dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo berjalan dengan baik dan memberikan pengaruh positif. Berikut ini adalah grafik efektivitas Kabupaten Situbondo selama 5 tahun terakhir:

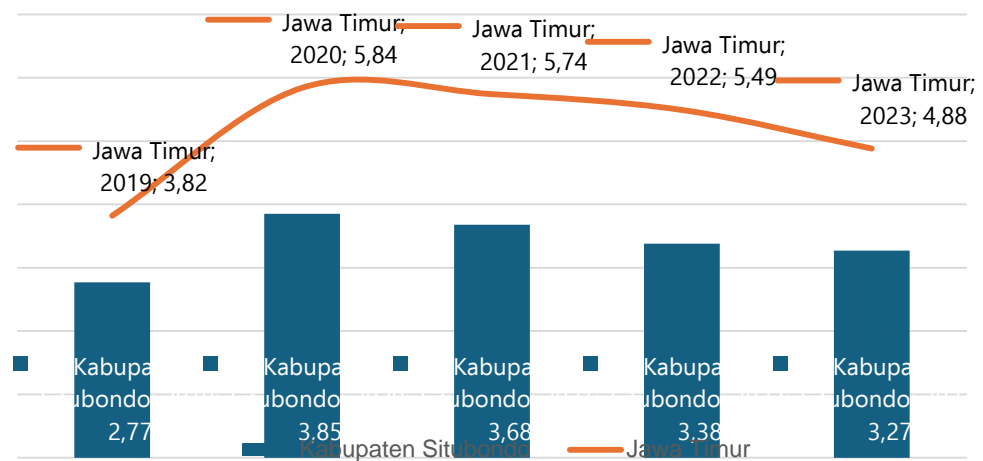


Gambar 3. 25 Analisis Efektivitas Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Situbondo Tahun 2019 - 2023  
Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Situbondo Tahun 2024

D. Relevansi

Relevansi perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Situbondo dan Provinsi Jawa timur pada 5 tahun terakhir (2019 – 2023) menjukkan adanya persamaan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan grafik di bawah bahwa pada tahun 2020 baik pada Kabupaten Situbondo maupun Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan sedangkan pada

tahun berikutnya menunjukkan adanya kecenderungan mengalami penurunan. Berikut ini untuk lebih jelas mengenai relevansi antara Kabupaten Situbondo dengan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 – 2023:

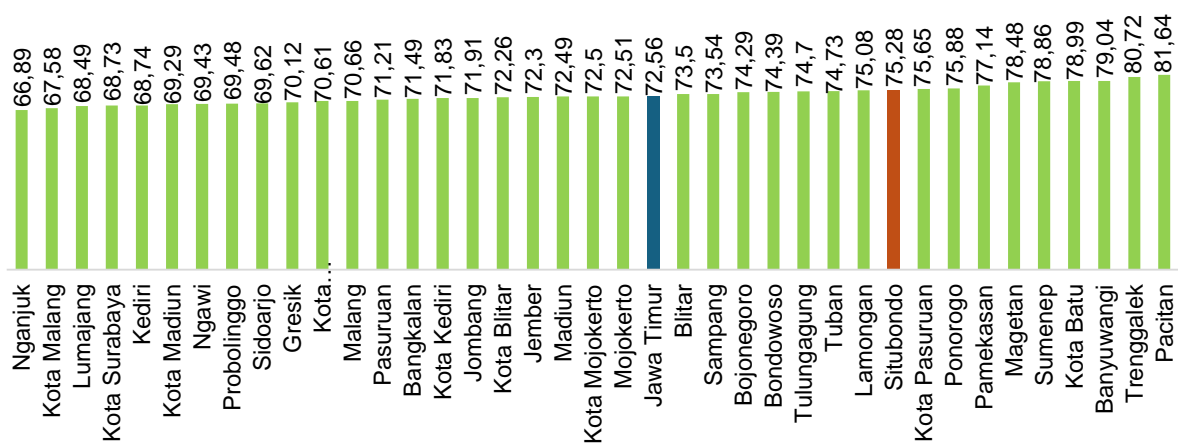


Gambar 3. 26 Relevansi Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Situbondo dan Jawa Timur Tahun 2019 - 2023  
Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Situbondo Tahun 2024

3.3.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

A. Posisi Relatif

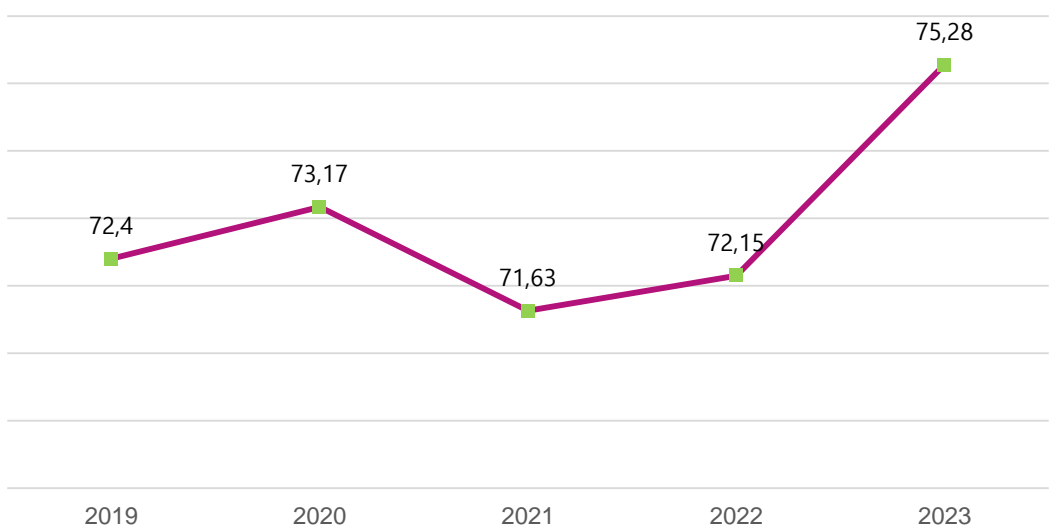
Berdasarkan posisi relatif Kabupaten Situbondo pada grafik di bawah menunjukkan bahwa Kabupaten Situbondo berada di atas Provinsi Jawa Timur dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 75,28 pada tahun 2023 sedangkan Provinsi Jawa Timur memiliki angka capaian sebesar 72,56. Hal ini menunjukkan bahwa posisi Kabupaten Situbondo lebih baik dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dengan tingkat partisipasi angkatan kerja yang lebih tinggi. Berikut ini untuk lebih jelas berkaitan dengan posisi relatif Kabupaten Situbondo apabila dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Jawa Timur:



Gambar 3. 27 Posisi Relatif Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Situbondo di Jawa Timur Tahun 2023  
Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Tahun 2024

B. Perkembangan Time Series

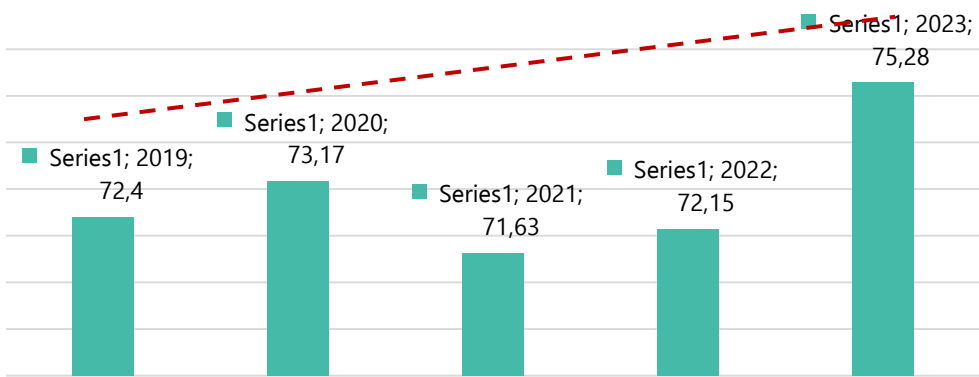
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah indikator penting yang menggambarkan proporsi penduduk usia kerja yang aktif terlibat dalam pasar tenaga kerja, baik yang sedang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. TPAK memberikan gambaran mengenai tingkat keterlibatan penduduk dalam aktivitas ekonomi dalam dinamika pasar tenaga kerja di suatu daerah. Apabila melihat perkembangan tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Situbondo pada 5 tahun terakhir (2019 – 2023) menunjukkan tren yang fluktuatif namun memiliki kecenderungan meningkat. Pada tahun 2021 nilai TPAK Kabupaten Situbondo memiliki capaian terendah yaitu sebesar 71,63. Namun pada tahun 2023 terjadi peningkatan cukup signifikan hingga menyentuh angka 75,28. Berikut ini untuk lebih jelas mengenai tren TPAK Kabupaten Situbondo pada tahun 2019 – 2023:



Gambar 3. 28 Perkembangan Antar Waktu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Situbondo Tahun 2019 - 2023  
Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Situbondo Tahun 2024

C. Efektivitas

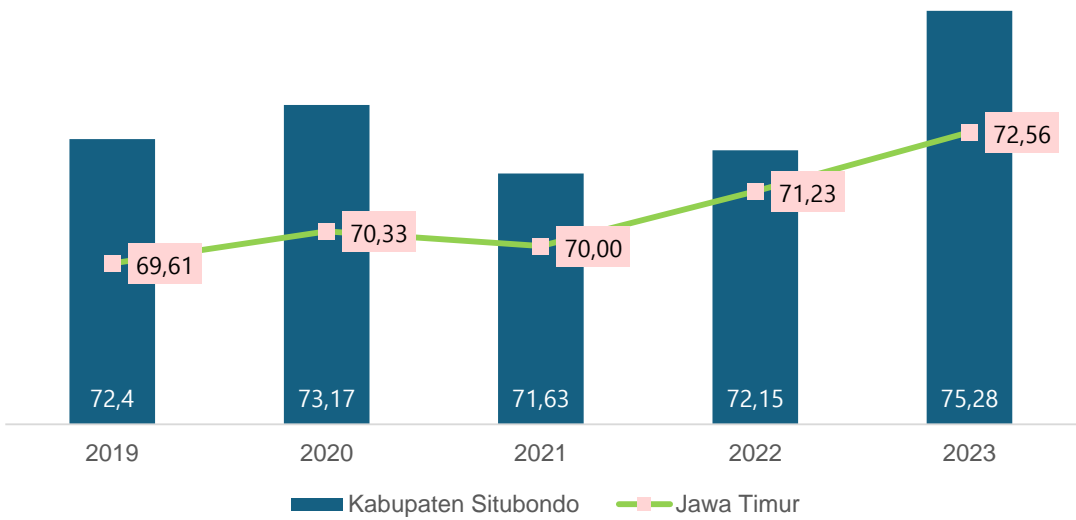
Kabupaten Situbondo memiliki kecenderungan mengalami peningkatan pada tingkat partisipasi angkatan kerja, hal ini selaras dengan tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Jawa Timur yang juga menunjukkan kecenderungan yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo menunjukkan pengaruh positif namun masih perlu ditingkatkan pada tahun berikutnya agar pengangguran di Kabupaten Situbondo bisa ditekan dan semakin menurun pada tahun-tahun berikutnya.



Gambar 3. 29 Analisis Efektivitas Tingkat Pasrtisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Situbondo Tahun 2019 - 2023  
Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Situbondo Tahun 2024

D. Relevansi

Relevansi perkembangan tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Situbondo dan Provinsi Jawa timur pada 5 tahun terakhir (2019 – 2023) menunjukkan adanya persamaan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan grafik di bawah bahwa pada tahun 2021 baik pada Kabupaten Situbondo maupun Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan dan mengalami peningkatan cukup signifikan pada tahun 2023. Berikut ini untuk lebih jelas mengenai relevansi antara Kabupaten Situbondo dengan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 – 2023:



Gambar 3. 30 Relevansi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Situbondo dan Jawa Timur Tahun 2019 - 2023  
Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Situbondo Tahun 2024

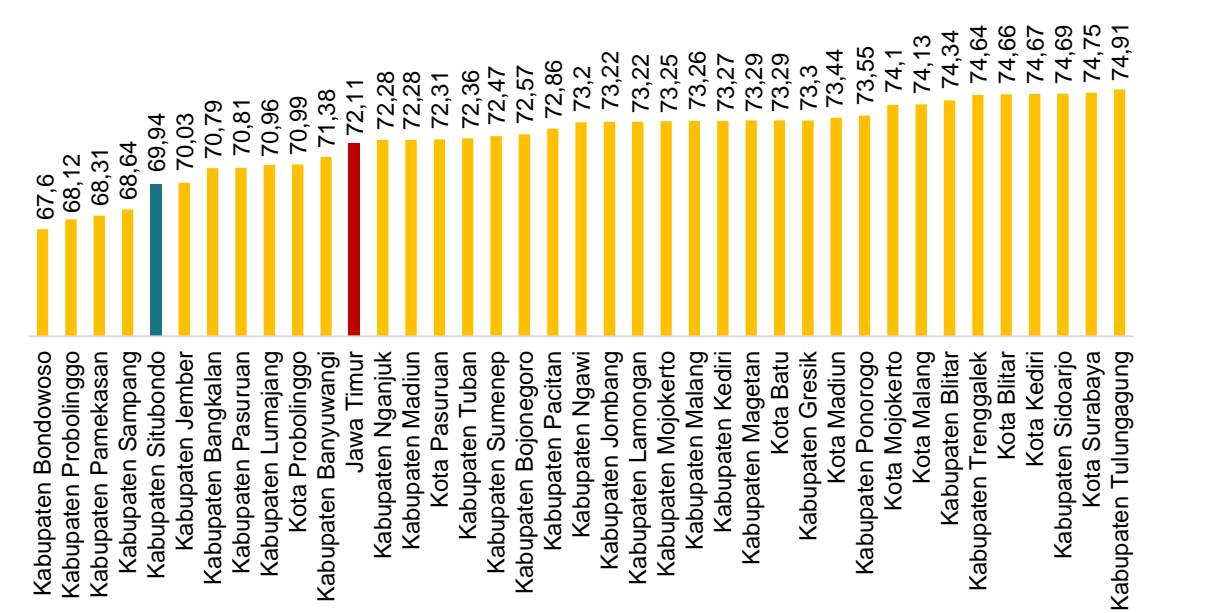
3.4 Analisis Karakteristik Masalah Bidang Kesehatan

3.4.1 Angka Harapan Hidup

A. Posisi Relatif

Kabupaten Situbondo memiliki posisi relatif angka harapan hidup di bawah Provinsi Jawa Timur atau dengan angka sebesar 69,94 tahun sedangkan Provinsi Jawa Timur memiliki angka sebesar 72,11 tahun.

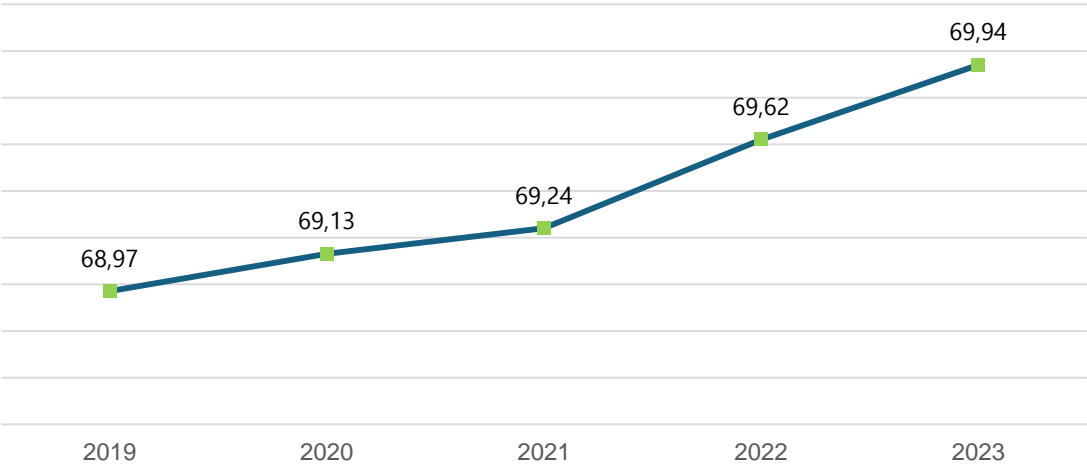
Apabila dibandingkan dengan daerah lain yang berada di Provinsi Jawa Timur maka posisi Kabupaten Situbondo memiliki urutan ke 5 terendah dari 38 Kabupaten/ Kota lainnya. Berikut ini untuk lebih jelas merupakan grafik posisi relatif angka harapan hidup Kabupaten Situbondo dengan daerah lain di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023:



Gambar 3. 31 Posisi Relatif Angka Harapan Hidup Kabupaten Situbondo di Jawa Timur Tahun 2023  
Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Tahun 2024

B. Perkembangan Time Series

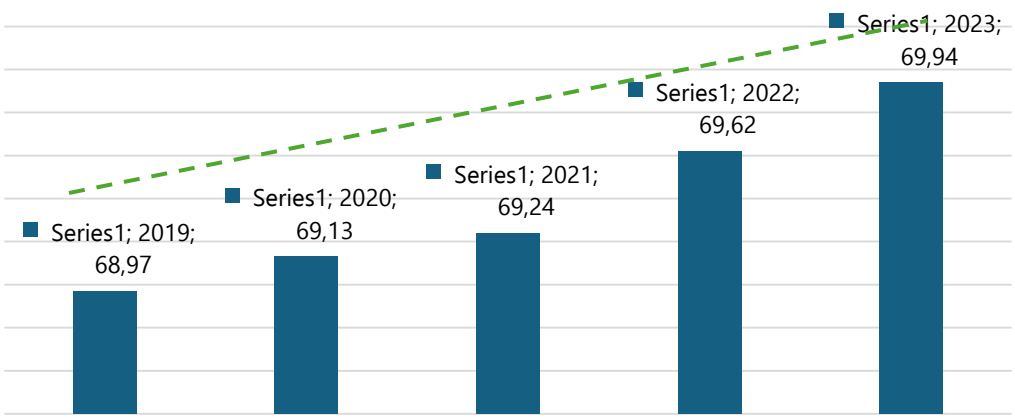
Angka Harapan Hidup (AHH) adalah indikator statistik yang menggambarkan rata-rata usia yang diharapkan seseorang dapat hidup. Angka ini merupakan ukuran penting dalam menilai kesehatan dan kualitas hidup di suatu daerah dan sering digunakan untuk memantau perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat. berikutnya apabila melihat pada tren AHH Kabupaten Situbondo menunjukkan perkembangan yang semakin meningkat pada setiap tahunnya. Hal ini terlihat bahwa pada tahun 2023 merupakan capaian tertinggi dengan angka sebesar 69,94 tahun. Meskipun demikian, upaya peningkatan AHH di Kabupaten Situbondo perlu ditingkatkan meningkat capaian ini masih rendah apabila dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Timur. Berikut ini untuk lebih jelas mengenai perkembangan AHH Kabupaten Situbondo pada 5 tahun terakhir (2019 – 2023):



Gambar 3. 32 Perkembangan Antar Waktu Angka Harapan Hidup Kabupaten Situbondo Tahun 2019 - 2023  
Sumber: Dinas Kesehatan Situbondo Tahun 2024

C. Efektivitas

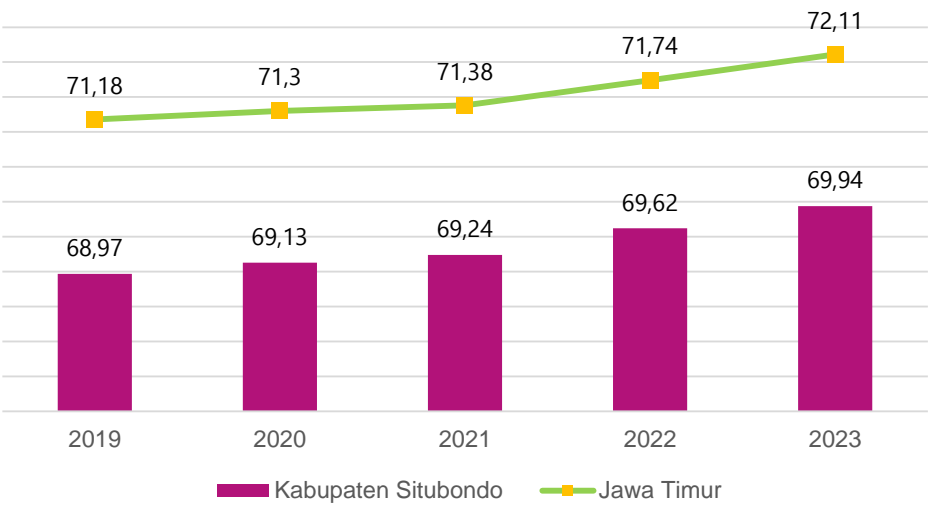
Kabupaten Situbondo memiliki kecenderungan mengalami peningkatan pada angka harapan hidup, hal ini selaras dengan angka harapan hidup di Provinsi Jawa Timur yang juga menunjukkan kecenderungan yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo menunjukkan pengaruh positif namun masih perlu ditingkatkan pada tahun berikutnya agar kesehatan masyarakat di Kabupaten Situbondo semakin meningkat pada tahun berikutnya.



Gambar 3. 33 Analisis Efektivitas Angka Harapan Hidup Kabupaten Situbondo Tahun 2019 - 2023  
Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Situbondo Tahun 2024

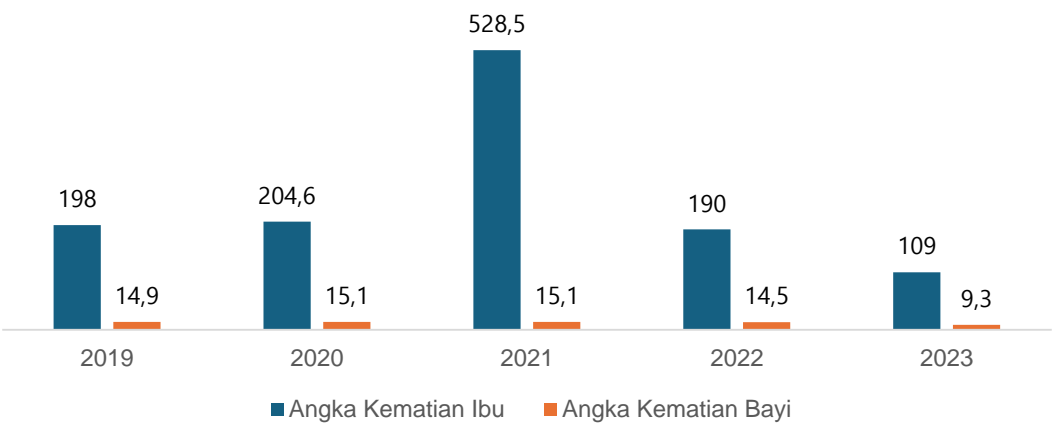
D. Relevansi

Relevansi perkembangan angka harapan hidup di Kabupaten Situbondo dan Provinsi Jawa timur pada 5 tahun terakhir (2019 – 2023) menunjukkan adanya persamaan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan grafik di bawah bahwa pada tahun 2021 hingga tahun 2023 terjadi peningkatan dan terjadi capaian tertinggi pada tahun 2023. Berikut ini untuk lebih jelas mengenai relevansi antara Kabupaten Situbondo dengan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 – 2023:



Gambar 3. 34 Relevansi Angka Harapan Hidup Kabupaten Situbondo dan Jawa Timur Tahun 2019 - 2023  
Sumber: Dinas Kesehatan Situbondo Tahun 2024

Mendukung pernyataan di atas mengenai angka harapan hidup yang rendah di Kabupaten Situbondo diikuti dengan cukup tingginya angka kematian ibu dan angka kematian bayi. meskipun pada angka kematian ibu dan angka kematian bayi memiliki tren yang semakin menurun, namun hal ini perlu menjadi perhatian mengingat AKI dan AKB turut memberikan pengaruh pada angka harapan hidup di Kabupaten Situbondo. Tercatat pada tahun 2023 angka kematian ibu di Kabupaten Situbondo sebesar 109 dan angka kematian bayi sebesar 9,3 pada tahun 2023. Berikut ini untuk lebih jelas dan terperinci mengenai angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Kabupaten Situbondo pada kurun waktu 5 tahun terakhir (2019 -2023):



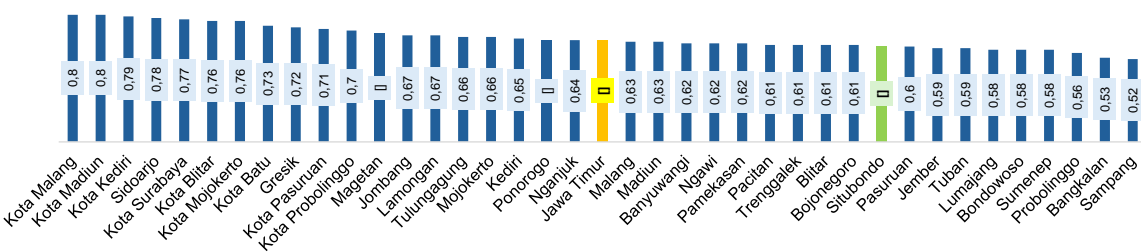
Gambar 3. 35 Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Situbondo Tahun 2023  
Sumber: Dinas Kesehatan Situbondo Tahun 2024

3. 5 Analisis Karakteristik Masalah Bidang Pendidikan

3.5.1 Indeks Pendidikan

A. Posisi Relatif

Kabupaten Situbondo memiliki indeks pendidikan yang relatif di bawah rata-rata jika dibandingkan dengan Kabuoaten/Kota lain di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data di bawah dapat diketahui bahwa indeks pendidikan Kabupaten Situbondo berada di bawah Provinsi Jawa Timur. Posisi Kabupaten Situbondo berada pada urutan ke 30 dari 38 Kabupaten/ Kota di Jawa Timur. Berikut untuk lebih jelas merupakan gambar perbandingan indeks pendidikan Kabupaten Situbondo dengan daerah lain



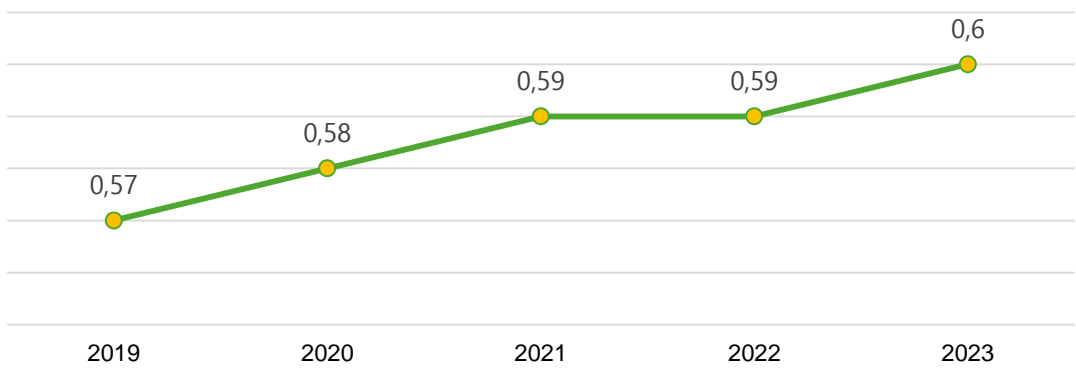
di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023:

Gambar 3. 36 Indeks Pendidikan Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2023  
Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Tahun 2024

Pada tabel di atas indeks pendidikan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023 sebesar 0,64 sedangkan Kabupaten Situbondo memiliki angka sebesar 0,60 pada tahun 2023. Angka tersebut termasuk rendah apabila dibandingkan dengan nilai indeks pendidikan Kabupaten/Kota lainnya yang ada di Jawa Timur. Kabupaten Situbondo masih menjadi 10 besar Kabupaten/Kota yang memiliki indeks pendidikan terendah di Jawa Timur sehingga memerlukan perhatian khusus dalam peningkatan indeks pendidikan.

B. Perkembangan Time Series

Indeks pendidikan adalah pencerminan dari hasil pembangunan di bidang pendidikan. Indeks pendidikan merupakan salah satu komponen pengukur pendidikan yang digunakan untuk mengukur dimensi pengetahuan sebagai variabel pembangunan manusia. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan adalah Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), dan Angka Melek Huruf.

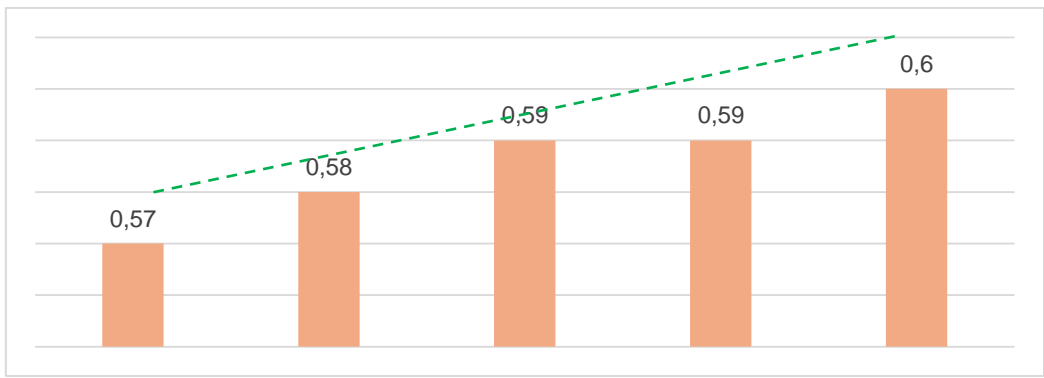


Gambar 3. 37 Perkembangan Antar Waktu Persentase Indeks Pendidikan Kabupaten Situbondo 2019 - 2023  
Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur,, Tahun 2024

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa indeks pendidikan Kabupaten Situbondo dalam 5 tahun terakhir (2019 – 2023) mengalami tren yang cenderung naik tetapi tidak signifikan. Nilai indeks pendidikan terendah di Kabupaten Situbondo terjadi pada tahun 2019 dengan angka sebesar 0,57 dan kemudian naik hanya 0,03 poin pada 2023.

C. Efektivitas

Kabupaten Situbondo memiliki kecenderungan mengalami peningkatan pada indeks pendidikan, hal ini selaras dengan indeks pendidikan di Provinsi Jawa Timur yang juga menunjukkan kecenderungan yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai program peningkatan pendidikan yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kualitas pendidikan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo serta berjalan dengan baik dan memberikan pengaruh positif. Berikut ini adalah grafik efektivitas Kabupaten Situbondo selama 5 tahun terakhir:

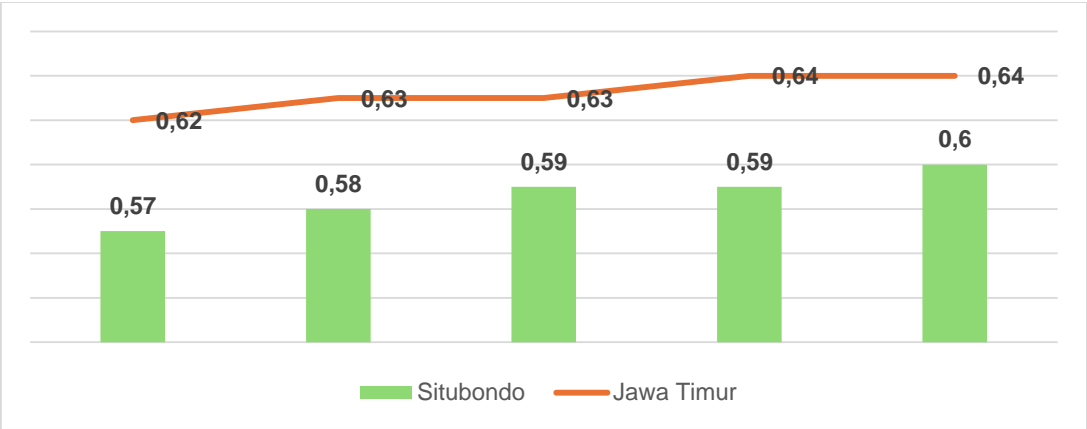


Gambar 3. 38 Analisis Efektivitas Indeks Pendidikan Kabupaten Situbondo 2019 - 2023  
Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa timur, Tahun 2024

D. Relevansi

Relevansi perkembangan indeks pendidikan di Kabupaten Situbondo dan Provinsi Jawa Timur pada 5 tahun terakhir (2019 – 2023) menunjukkan adanya keselarasan. Berdasarkan data, Kabupaten Situbondo mengalami kecenderungan peningkatan pada indeks pendidikan, sejalan dengan tren yang juga terjadi di Provinsi Jawa Timur. Hal ini mencerminkan bahwa

berbagai program peningkatan kualitas pendidikan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif. Berikut ini adalah grafik perkembangan indeks pendidikan di Kabupaten Situbondo selama 5 tahun terakhir:

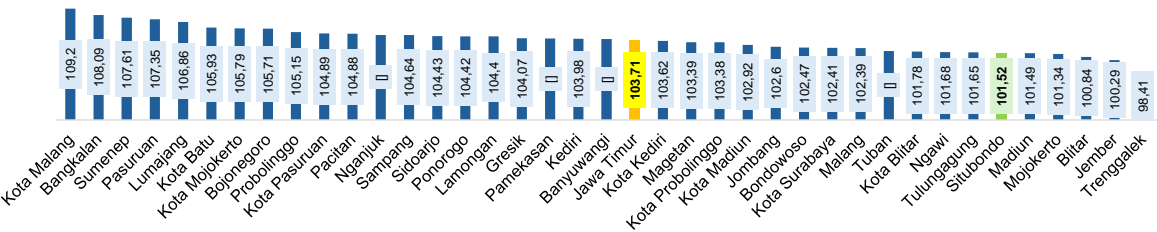


Gambar 3. 39 Relevansi Indeks Pendidikan Kabupaten Situbondo dan Jawa Timur Tahun 2019 - 2023  
Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur,, Tahun 2024

3.5.2 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI

A. Posisi Relatif

Kabupaten Situbondo memiliki Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI yang relatif di bawah rata-rata jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data di bawah, dapat diketahui bahwa APK Kabupaten Situbondo berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur. Posisi Kabupaten Situbondo berada pada urutan ke-33 dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada tahun 2023. Berikut untuk lebih jelas merupakan gambar perbandingan APK SD/MI Kabupaten Situbondo dengan daerah lain di Provinsi Jawa Timur tahun 2023:



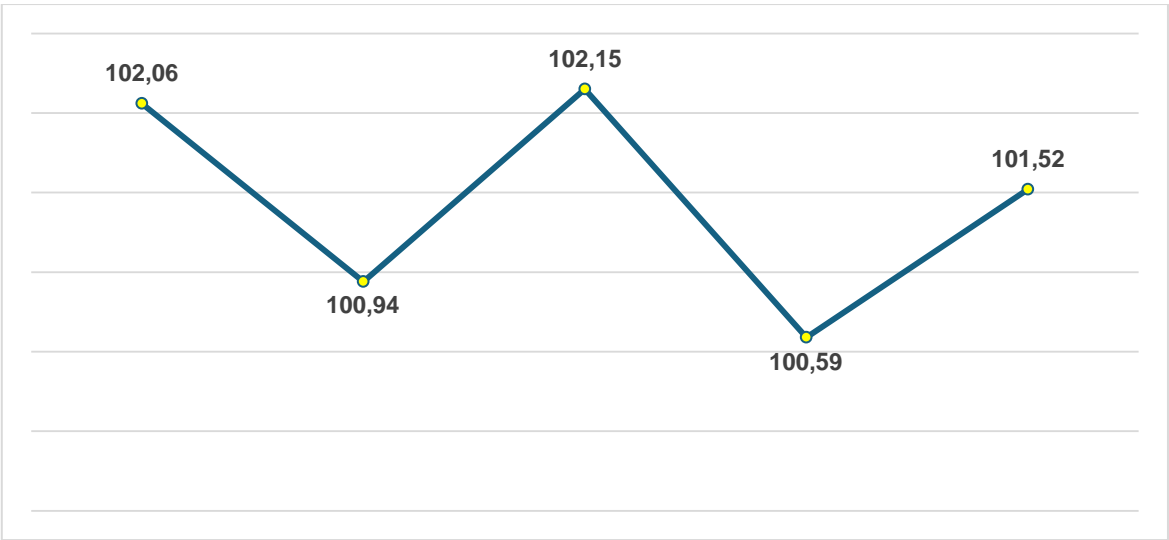
Gambar 3. 40 Angka Partisipasi Kasar Tingkat SD/MI Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2023  
Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Tahun 2024

Pada tabel di atas, APK SD/MI Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023 tercatat sebesar 103,71, sementara Kabupaten Situbondo memiliki APK sebesar 101,52. Angka ini termasuk rendah apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Jawa Timur. Kabupaten Situbondo masih menjadi salah satu dari 10 besar Kabupaten/Kota dengan APK SD/MI

terendah di Jawa Timur, sehingga memerlukan perhatian khusus dalam peningkatan akses dan partisipasi pendidikan.

B. Perkembangan Time Series

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi pendidikan pada jenjang tertentu. APK menunjukkan persentase jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu, tanpa memperhatikan usia resmi, terhadap jumlah penduduk dalam kelompok usia yang seharusnya berada di jenjang tersebut. APK yang tinggi mencerminkan akses pendidikan yang lebih luas dan kemampuan daerah untuk memberikan pendidikan kepada lebih banyak penduduk, meskipun tidak selalu mencerminkan kualitas pendidikan di wilayah tersebut.



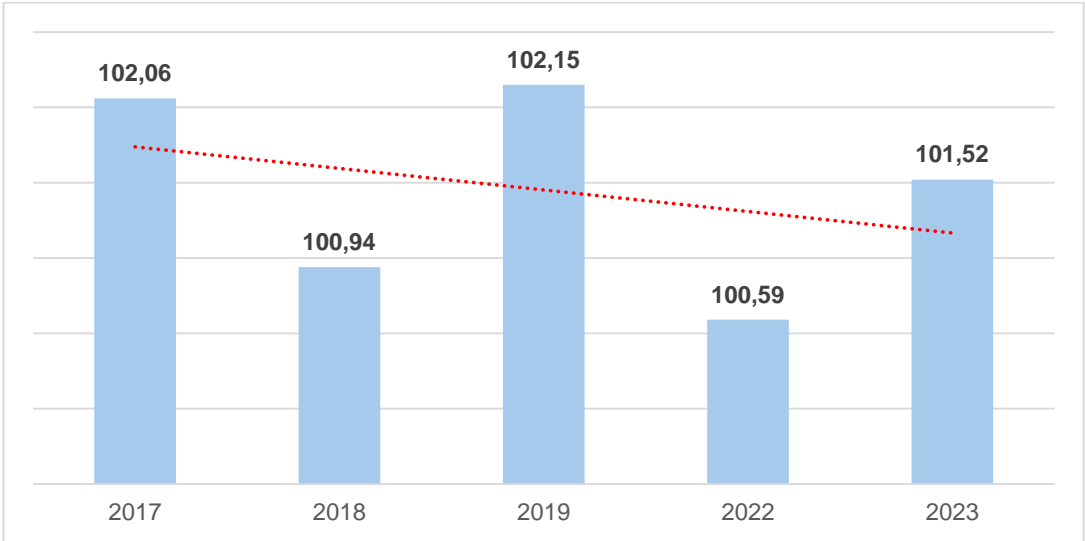
Gambar 3. 41 Perkembangan Antar Waktu Persentase Angka Partisipasi Kasar Tingkat SD/MI Kabupaten Situbondo 2017 - 2023  
Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Tahun 2024

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Kabupaten Situbondo dalam 5 tahun terakhir mulai 2017 – 2023 (tidak ada data pada 2020-2021) mengalami tren yang fluktuatif. Nilai APK terendah di Kabupaten Situbondo terjadi pada tahun 2022 dengan angka sebesar 100,59, sementara nilai tertinggi terjadi pada tahun 2017 dengan angka sebesar 102,06. Pada tahun 2023, APK Kabupaten Situbondo tercatat sebesar 101,52, menunjukkan sedikit kenaikan dari tahun sebelumnya.

C. Efektivitas

Selaras dengan fluktuasi Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SD/MI di Kabupaten Situbondo, terdapat penurunan APK pada beberapa tahun terakhir, dengan titik terendah terjadi pada tahun 2022. Namun, angka tersebut kembali meningkat pada tahun 2023. Ini mencerminkan bahwa berbagai upaya peningkatan akses pendidikan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo, bersama keterlibatan beberapa Perangkat Daerah (PD), telah memberikan hasil positif dalam meningkatkan

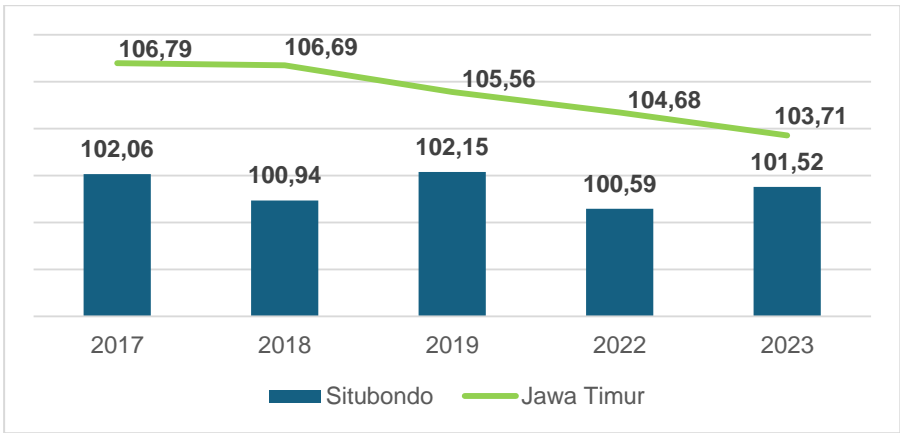
partisipasi pendidikan, meskipun perlu langkah lebih lanjut untuk mempertahankan tren peningkatan tersebut:



Gambar 3. 42 Analisis Efektivitas Angka Partisipasi Kasar Tingkat SD/MI Kabupaten Situbondo 2017 - 2023  
Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Tahun 2024

D. Relevansi

Relevansi perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI di Kabupaten Situbondo dan Provinsi Jawa Timur pada 5 tahun terakhir (2017 – 2023) menunjukkan adanya fluktuasi. Berdasarkan data, APK Kabupaten Situbondo mengalami perubahan yang tidak konsisten, namun tetap mengikuti pola yang mirip dengan tren di Provinsi Jawa Timur. Hal ini mencerminkan bahwa berbagai program peningkatan akses pendidikan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo telah memberikan dampak positif, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan yang lebih konsisten. Berikut ini adalah grafik perkembangan APK di Kabupaten Situbondo selama 5 tahun terakhir:

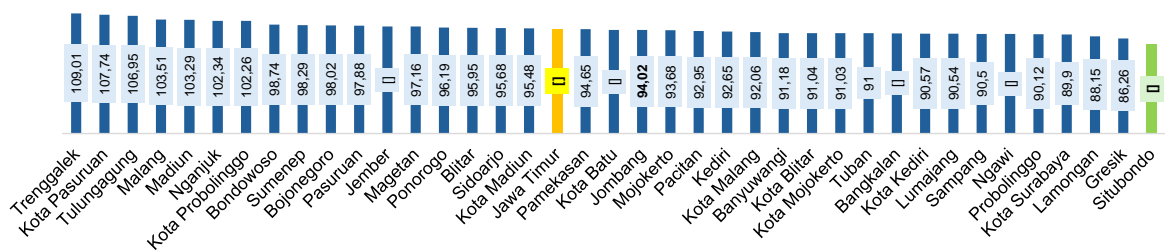


Gambar 3. 43 Relevansi Angka Partisipasi Kasar Tingkat SD/MI Kabupaten Situbondo dan Jawa Timur Tahun 2017 - 2023  
Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur,, Tahun 2024

3.5.3 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs

A. Posisi Relatif

Kabupaten Situbondo memiliki Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk tingkat SMP/MTs yang relatif di bawah rata-rata dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data, APK Kabupaten Situbondo pada tahun 2023 tercatat sebesar 81,21, menempatkannya pada urutan ke-38 dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Angka ini jauh di bawah rata-rata APK Provinsi Jawa Timur yang mencapai 94,74. Berikut adalah grafik perbandingan APK SMP/MTs antara Kabupaten Situbondo dan daerah lain di Provinsi Jawa Timur pada tahun



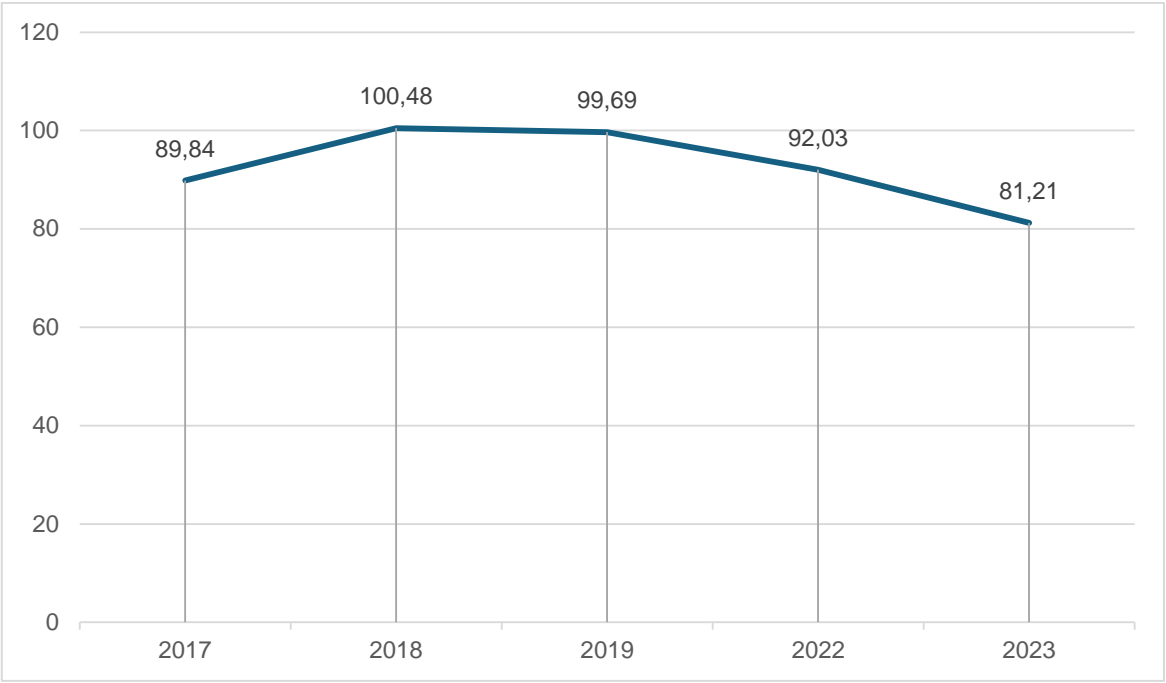
2023 untuk memberikan gambaran yang lebih jelas:

Gambar 3. 44 Angka Partisipasi Kasar Tingkat SMP/MTs Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2023  
Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Tahun 2024

Grafik ini menunjukkan bahwa Kabupaten Situbondo termasuk dalam kelompok dengan APK SMP/MTs terendah di Jawa Timur, menandakan perlunya perhatian khusus dalam upaya peningkatan akses dan partisipasi pendidikan di daerah tersebut.

B. Perkembangan Time Series

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi pendidikan pada jenjang tertentu. APK menunjukkan persentase jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu, tanpa memperhatikan usia resmi, terhadap jumlah penduduk dalam kelompok usia yang seharusnya berada di jenjang tersebut. APK yang tinggi mencerminkan akses pendidikan yang lebih luas dan kemampuan daerah untuk memberikan pendidikan kepada lebih banyak penduduk, meskipun tidak selalu mencerminkan kualitas pendidikan di wilayah tersebut.

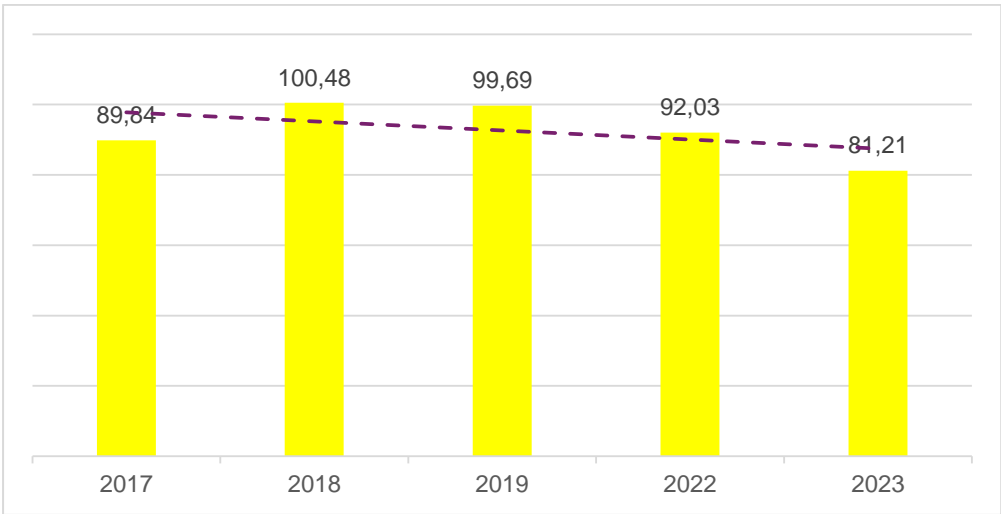


Gambar 3. 45 Perkembangan Antar Waktu Persentase Angka Partisipasi Kasar Tingkat SMP/MTs Kabupaten Situbondo Tahun 2017 - 2023  
Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Tahun 2024

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SMP/MTs Kabupaten Situbondo dalam 5 tahun terakhir (2017 – 2023) mengalami tren yang fluktuatif. Nilai APK terendah di Kabupaten Situbondo terjadi pada tahun 2023 dengan angka sebesar 81,21, sementara nilai tertinggi tercatat pada tahun 2018 dengan angka sebesar 100,48. Pada tahun 2022, APK Kabupaten Situbondo tercatat sebesar 92,03, menunjukkan penurunan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

C. Efektivitas

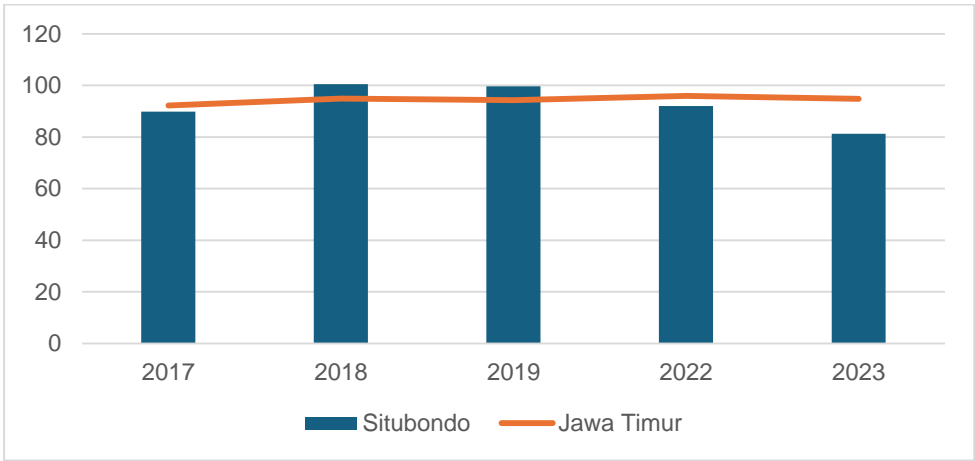
Sejalan dengan fluktuasi Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SMP/MTs di Kabupaten Situbondo, terlihat adanya penurunan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Nilai APK tertinggi terjadi pada tahun 2018 dengan angka sebesar 100,48, sementara nilai terendah tercatat pada tahun 2023 dengan angka sebesar 81,21. Meskipun APK meningkat pada tahun 2022 menjadi 92,03, namun angka tersebut menurun kembali pada tahun 2023. Hal ini mencerminkan bahwa upaya peningkatan akses pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo dan keterlibatan berbagai Perangkat Daerah (PD) belum sepenuhnya konsisten dalam meningkatkan partisipasi pendidikan.



Gambar 3. 46 Analisis Efektivitas Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Kabupaten Situbondo 2017 - 2023  
Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Tahun 2024

D. Relevansi

Relevansi perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SMP/MTs di Kabupaten Situbondo dan Provinsi Jawa Timur selama 5 tahun terakhir (2017 – 2023) menunjukkan adanya fluktuasi. Berdasarkan data, APK Kabupaten Situbondo mengalami perubahan yang tidak konsisten, dengan angka tertinggi pada tahun 2018 sebesar 100,48 dan angka terendah pada tahun 2023 sebesar 81,21. Sementara itu, APK Provinsi Jawa Timur menunjukkan tren yang lebih stabil, dengan angka tertinggi pada tahun 2019 sebesar 94,24 dan angka 94,74 pada tahun 2023. Berikut ini adalah grafik perkembangan APK tingkat SMP/MTs di Kabupaten Situbondo dan Provinsi Jawa Timur selama 5 tahun terakhir:



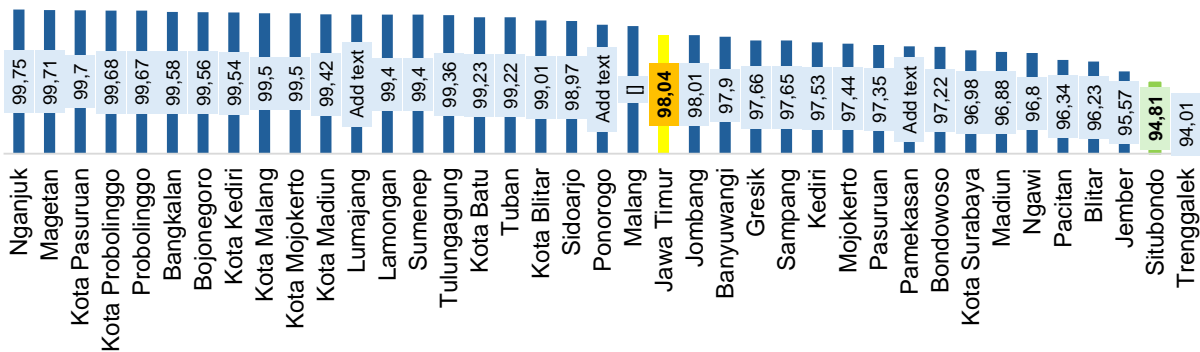
Gambar 3. 47 Relevansi Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Kabupaten Situbondo dan Jawa Timur Tahun 2017 - 2023  
Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Tahun 2024

3.5.3 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI

A. Posisi Relatif

Kabupaten Situbondo memiliki Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SD/MI yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data, APM Kabupaten Situbondo pada tahun 2023 tercatat sebesar 94,81, menempatkannya pada urutan ke-37

dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Angka ini berada di bawah rata-rata APM Provinsi Jawa Timur yang mencapai 98,04. Berikut adalah grafik perbandingan APM tingkat SD/MI antara Kabupaten Situbondo dan daerah lain di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023 untuk memberikan gambaran yang lebih jelas:

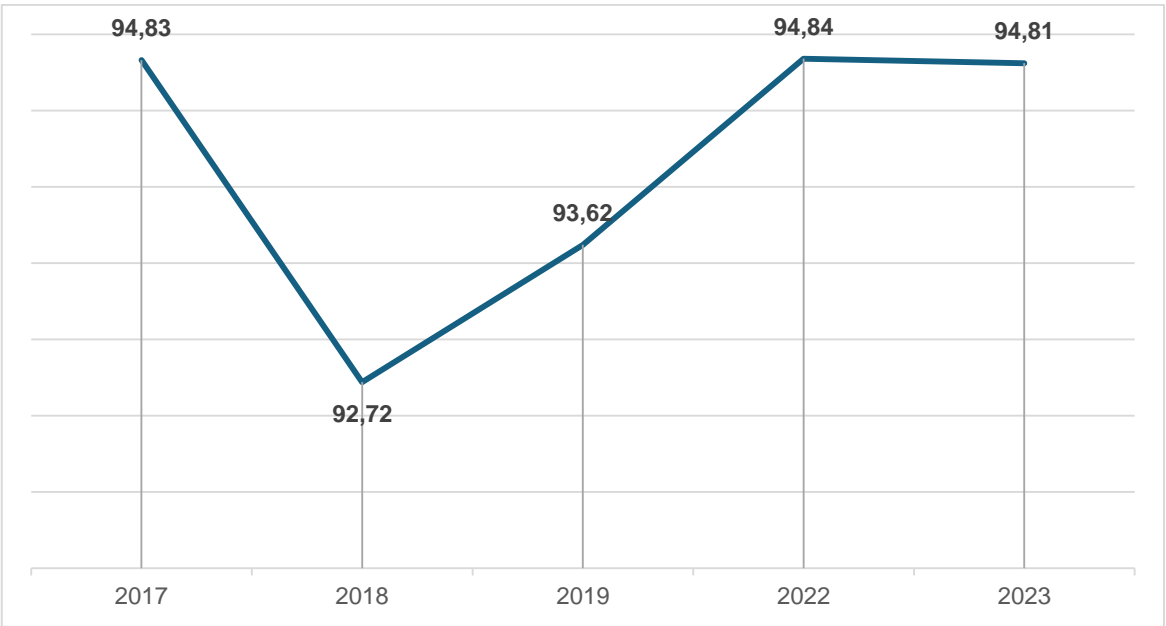


Gambar 3. 48 Angka Partisipasi Murni Tingkat SD/MI Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2023  
Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Tahun 2024

Grafik ini menunjukkan bahwa Kabupaten Situbondo termasuk dalam kelompok dengan APM SD/MI terendah di Jawa Timur, sehingga memerlukan perhatian khusus dalam upaya peningkatan akses dan partisipasi pendidikan di daerah tersebut.

B. Perkembangan Time Series

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi pendidikan pada jenjang tertentu dengan memperhitungkan usia resmi. APM menunjukkan persentase jumlah siswa yang terdaftar pada jenjang pendidikan tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk dalam kelompok usia yang sesuai untuk jenjang tersebut. APM yang tinggi mencerminkan akses pendidikan yang lebih baik dan kemampuan daerah untuk memberikan pendidikan kepada lebih banyak penduduk sesuai dengan usia yang tepat, serta mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa anak-anak di usia sekolah benar-benar terdaftar dan mengikuti pendidikan.

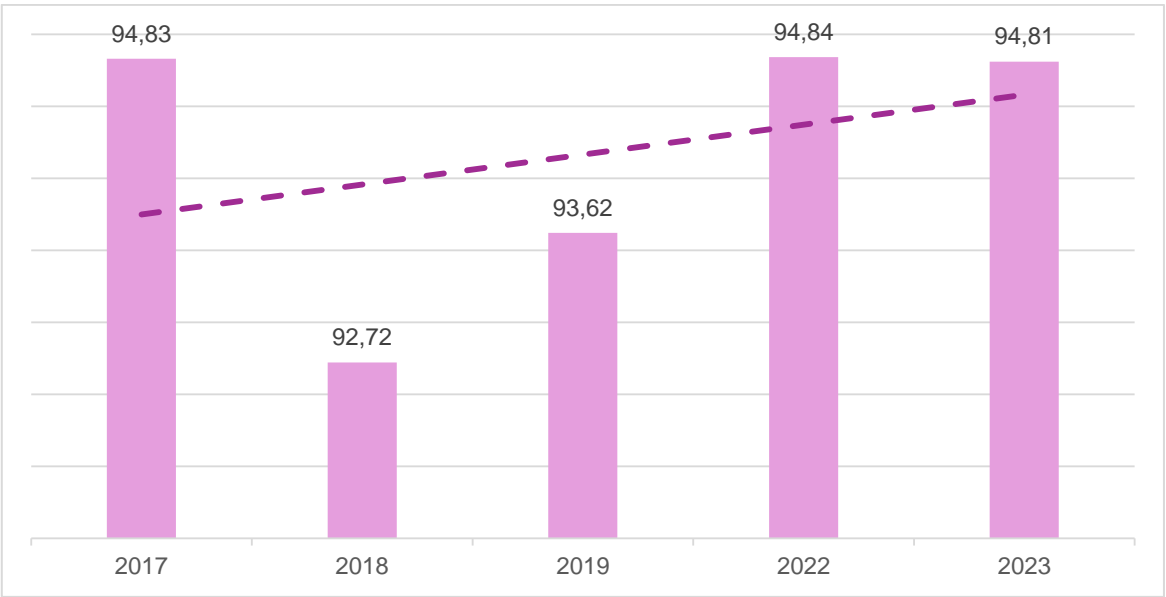


Gambar 3. 49 Perkembangan Antar Waktu Persentase Angka Partisipasi Murni Tingkat SD/MI Kabupaten Situbondo 2017 - 2023  
Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Tahun 2024

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SD/MI Kabupaten Situbondo dalam 5 tahun terakhir (2017 – 2023) menunjukkan tren yang relatif stabil dengan sedikit fluktuasi. Nilai APM tertinggi tercatat pada tahun 2022 dengan angka sebesar 94,84, sementara nilai terendah terjadi pada tahun 2018 dengan angka sebesar 92,72. Pada tahun 2023, APM Kabupaten Situbondo tercatat sebesar 94,81, yang menunjukkan stabilitas dalam partisipasi pendidikan tingkat SD/MI di daerah tersebut meskipun terdapat fluktuasi ringan dalam periode tersebut.

C. Efektivitas

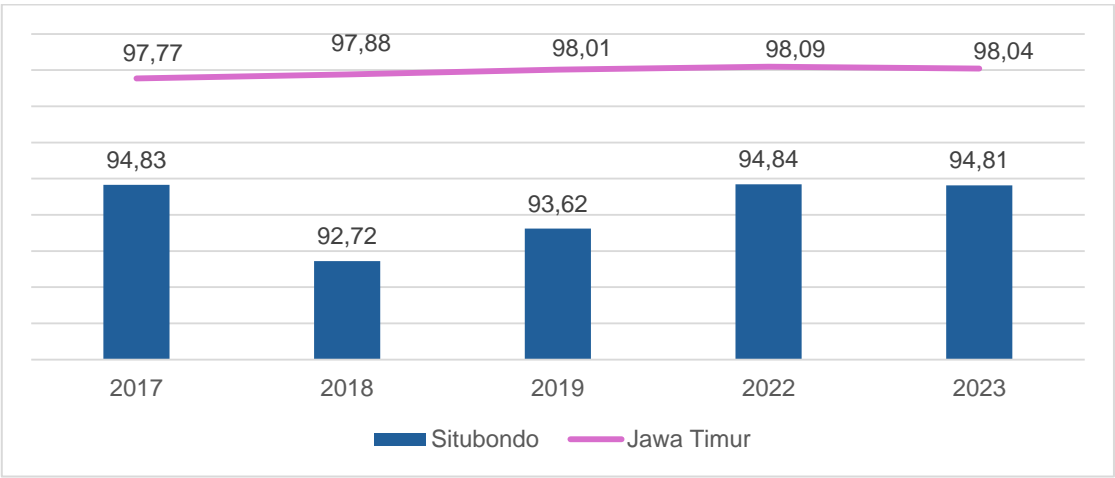
Sejalan dengan fluktuasi Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SD/MI di Kabupaten Situbondo, terlihat adanya perubahan dalam beberapa tahun terakhir. Nilai APM tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan angka sebesar 94,84, sementara nilai terendah tercatat pada tahun 2018 dengan angka sebesar 92,72. Meskipun APM meningkat pada tahun 2023 menjadi 94,81, angka tersebut masih menunjukkan sedikit penurunan dibandingkan dengan tahun 2022. Hal ini mencerminkan bahwa upaya peningkatan akses pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo dan keterlibatan berbagai Perangkat Daerah (PD) telah memberikan dampak positif, namun perlu adanya upaya lebih lanjut untuk memastikan konsistensi dalam meningkatkan partisipasi pendidikan.



Gambar 3. 50 Analisis Efektivitas Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Kabupaten Situbondo 2017 - 2023  
Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur,, Tahun 2024

D. Relevansi

Relevansi perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SD/MI di Kabupaten Situbondo dan Provinsi Jawa Timur selama 5 tahun terakhir (2017 – 2023) menunjukkan adanya fluktuasi. Berdasarkan data, APM Kabupaten Situbondo mengalami perubahan yang relatif stabil, dengan angka tertinggi pada tahun 2022 sebesar 94,84 dan angka terendah pada tahun 2018 sebesar 92,72. Sementara itu, APM Provinsi Jawa Timur menunjukkan tren yang lebih konsisten dan stabil, dengan angka tertinggi pada tahun 2019 sebesar 98,01 dan angka 98,04 pada tahun 2023. Berikut ini adalah grafik perkembangan APM tingkat SD/MI di Kabupaten Situbondo dan Provinsi Jawa Timur selama 5 tahun terakhir:



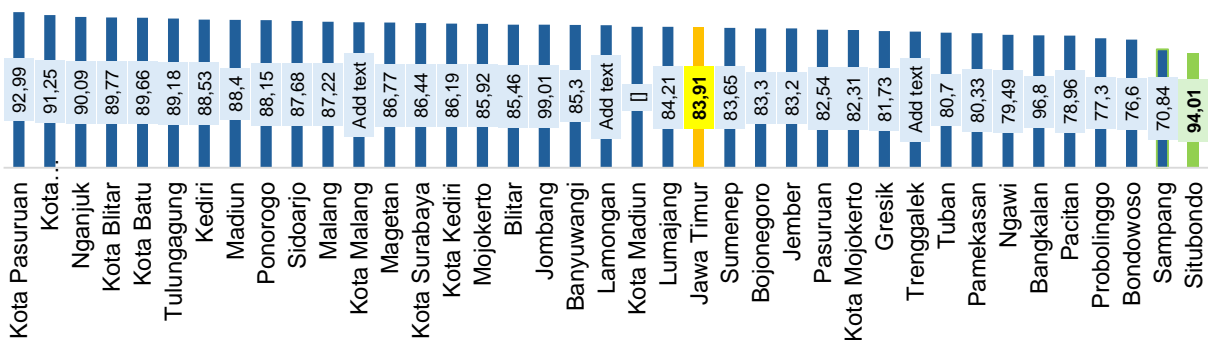
Gambar 3. 51 Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Kabupaten Situbondo dan Jawa Timur Tahun 2017 - 2023  
Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Tahun 2024

3.5.3 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs

A. Posisi Relatif

Kabupaten Situbondo memiliki Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SMP/MTs yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data, APM Kabupaten Situbondo

pada tahun 2023 tercatat sebesar 68,48, menempatkannya pada urutan terakhir yaitu ke-38 dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Angka ini berada di bawah rata-rata APM Provinsi Jawa Timur yang mencapai 83,91. Berikut adalah grafik perbandingan APM tingkat SMP/MTs antara Kabupaten Situbondo dan daerah lain di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023 untuk memberikan gambaran yang lebih jelas:

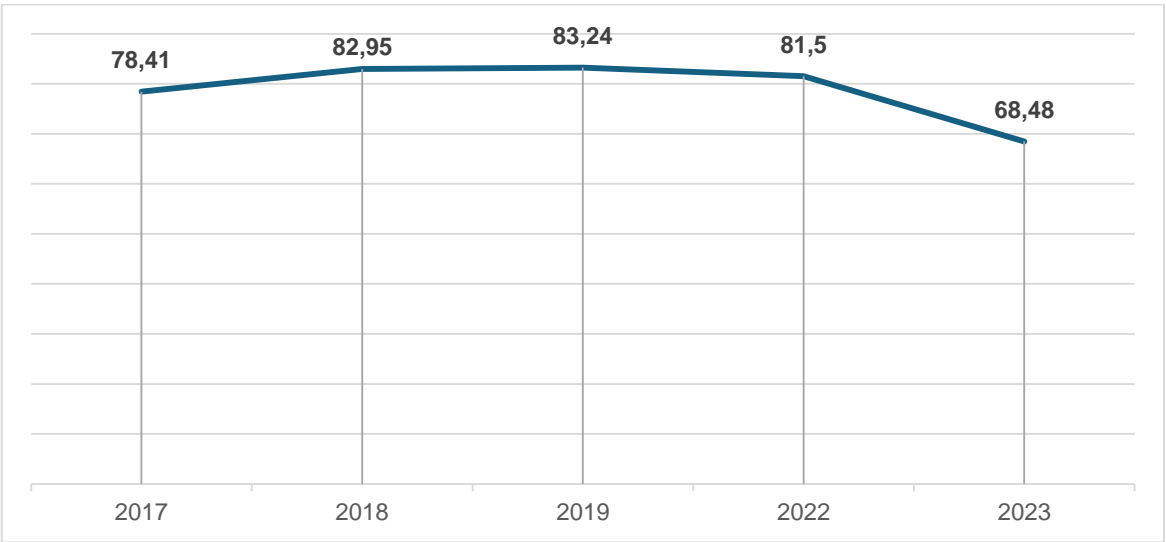


Gambar 3. 52 Angka Partisipasi Murni Tingkat SMP/MTs Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2023  
Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Tahun 2024

Grafik di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Situbondo termasuk dalam kelompok dengan APM tingkat SMP/MTs terendah di Jawa Timur, sehingga memerlukan perhatian khusus dalam upaya peningkatan akses dan partisipasi pendidikan di daerah tersebut.

B. Perkembangan Time Series

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi pendidikan pada jenjang tertentu dengan memperhitungkan usia resmi. APM menunjukkan persentase jumlah siswa yang terdaftar pada jenjang pendidikan tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk dalam kelompok usia yang sesuai untuk jenjang tersebut. APM yang tinggi mencerminkan akses pendidikan yang lebih baik dan kemampuan daerah untuk memberikan pendidikan kepada lebih banyak penduduk sesuai dengan usia yang tepat, serta mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa anak-anak di usia sekolah benar-benar terdaftar dan mengikuti pendidikan.

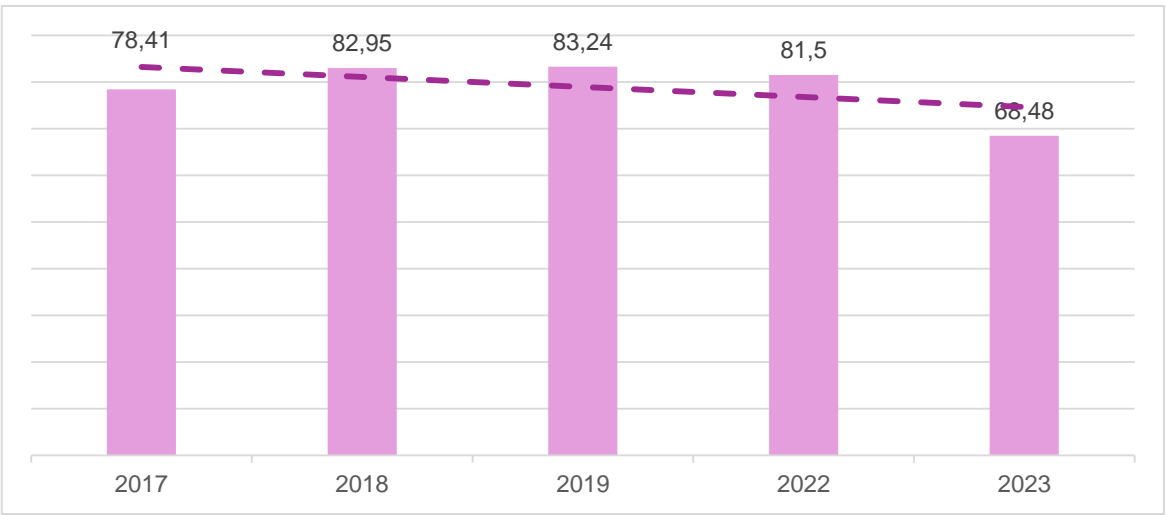


Gambar 3. 53 Perkembangan Antar Waktu Persentase Angka Partisipasi Murni Tingkat SMP/MTs Kabupaten Situbondo Tahun 2017 - 2023  
Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Tahun 2024

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SMP/MTs Kabupaten Situbondo dalam 5 tahun terakhir (2017 – 2023) menunjukkan tren yang fluktuatif. Nilai APM tertinggi tercatat pada tahun 2019 dengan angka sebesar 83,24, sementara nilai terendah terjadi pada tahun 2023 dengan angka sebesar 68,48. Meskipun terdapat peningkatan pada tahun 2022 dengan angka 81,5, APM Kabupaten Situbondo mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2023.

C. Efektivitas

Berdasarkan grafik di bawah ini, dapat dilihat bahwa Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SMP/MTs Kabupaten Situbondo dalam 5 tahun terakhir (2017 – 2023) menunjukkan tren yang fluktuatif. Nilai APM tertinggi tercatat pada tahun 2019 dengan angka sebesar 83,24, sementara nilai terendah terjadi pada tahun 2023 dengan angka sebesar 68,48. Meskipun terdapat sedikit peningkatan pada tahun 2022 dengan angka 81,5, APM Kabupaten Situbondo mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan partisipasi pendidikan di tingkat SMP/MTs perlu diperkuat untuk mencapai stabilitas dan peningkatan yang lebih konsisten.

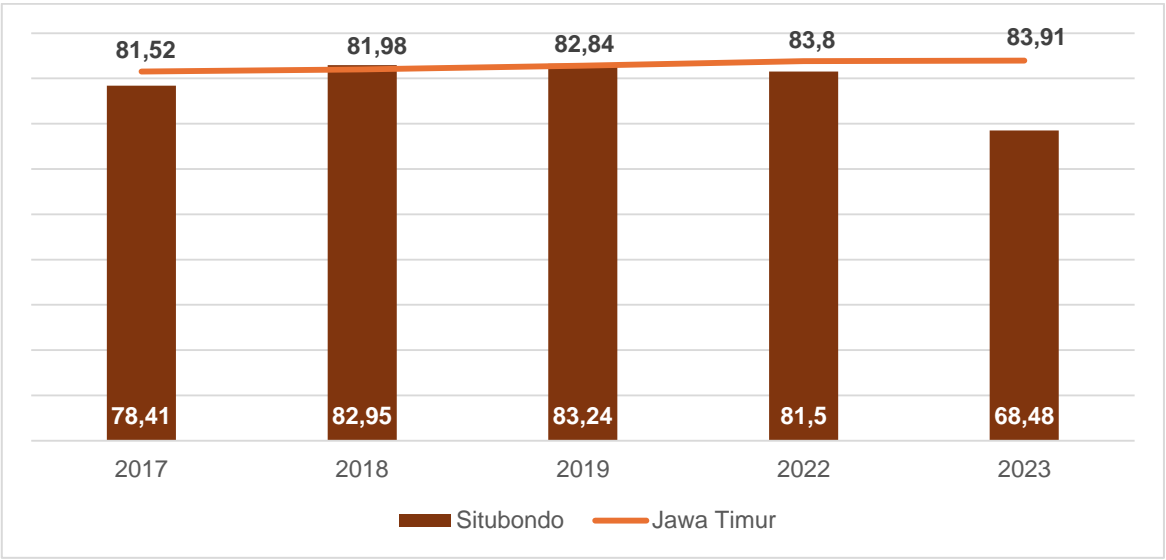


Gambar 3. 54 Analisis Efektivitas Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Kabupaten Situbondo 2017 - 2023  
Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Tahun 2024

D. Relevansi

Relevansi perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SMP/MTs di Kabupaten Situbondo dan Provinsi Jawa Timur selama 5 tahun terakhir (2017 – 2023) menunjukkan adanya fluktuasi. Berdasarkan data, APM Kabupaten Situbondo mengalami perubahan yang signifikan, dengan angka tertinggi pada tahun 2019 sebesar 83,24 dan angka terendah pada tahun 2023 sebesar 68,48. Sementara itu, APM Provinsi Jawa Timur menunjukkan tren yang lebih konsisten dan stabil, dengan angka tertinggi pada tahun 2019 sebesar 98,01

dan angka 98,04 pada tahun 2023. Berikut ini adalah grafik perkembangan APM tingkat SMP/MTs di Kabupaten Situbondo dan Provinsi Jawa Timur selama 5 tahun terakhir:

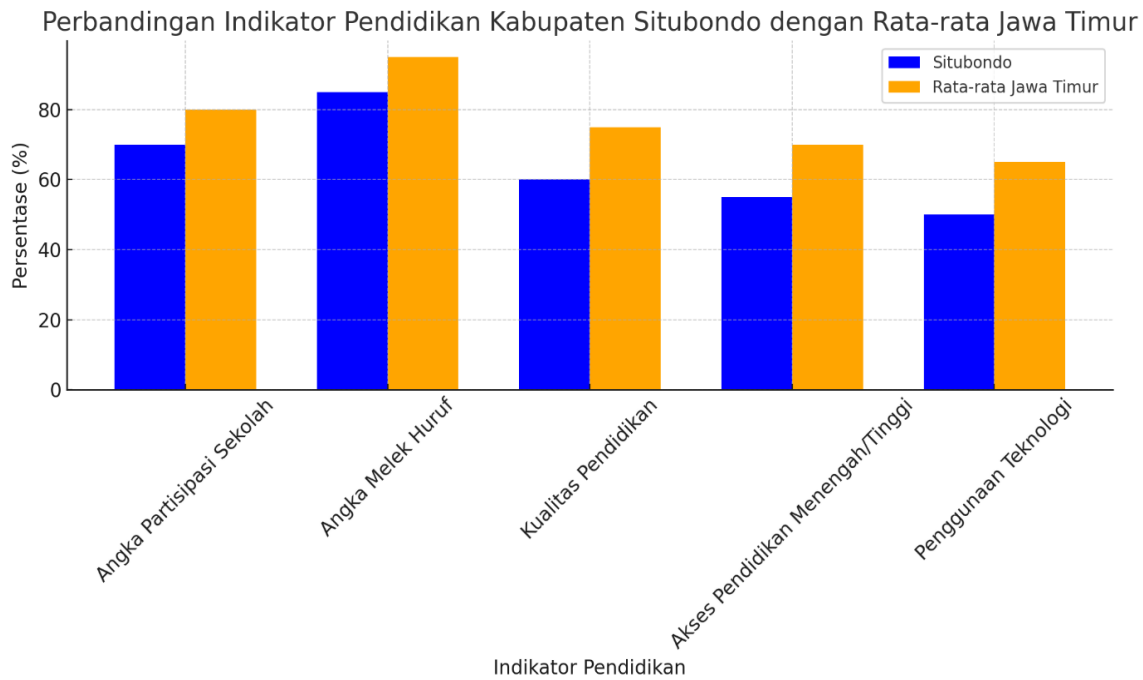


Gambar 3. 55 Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Kabupaten Situbondo dan Jawa Timur Tahun 2017 - 2023  
Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Tahun 2024

A. Posisi Relatif

Dalam konteks pendidikan, Kabupaten Situbondo memiliki posisi yang unik jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan sumber-sumber terkait lainnya, Kabupaten Situbondo menunjukkan sejumlah indikator yang perlu dianalisis secara mendalam untuk memahami tantangan dan peluang di sektor pendidikan.

Ketika membandingkan angka-angka pendidikan, seperti tingkat melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan akses terhadap pendidikan menengah/tinggi, Kabupaten Situbondo sering kali berada di posisi yang relatif tertinggal dibandingkan beberapa kabupaten/kota lain yang lebih maju di Jawa Timur, seperti Surabaya, Malang, dan Sidoarjo. Meskipun demikian, terdapat peningkatan signifikan dalam beberapa indikator pendidikan selama beberapa tahun terakhir, yang menunjukkan adanya upaya perbaikan dan perkembangan. Berikut adalah grafik yang menunjukkan perbandingan indikator Pendidikan kabupaten situbondo dengan rata rata Jawa Timur.



Grafik tersebut memberikan gambaran yang jelas tentang perbandingan indikator-indikator pendidikan antara Kabupaten Situbondo dengan rata-rata di Provinsi Jawa Timur. Dari data yang ditampilkan, terlihat bahwa Kabupaten Situbondo secara umum masih berada di bawah rata-rata provinsi dalam hampir semua aspek yang diukur, yang mencerminkan tantangan yang signifikan dalam sektor pendidikan di daerah ini.

Indikator pertama, Angka Partisipasi Sekolah, menunjukkan bahwa persentase partisipasi anak-anak di Situbondo dalam pendidikan formal lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata di Jawa Timur. Ini menandakan bahwa masih ada banyak anak di Situbondo yang belum terlibat secara optimal dalam proses pendidikan, baik karena faktor ekonomi, geografis, atau kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan.

Selanjutnya, Angka Melek Huruf di Situbondo meskipun mendekati angka rata-rata Jawa Timur, masih menunjukkan sedikit kekurangan. Ini berarti bahwa meskipun mayoritas penduduk Situbondo sudah bisa membaca dan menulis, kemampuan literasi mereka masih belum sepenuhnya sebanding dengan standar provinsi. Ini dapat berdampak pada kemampuan masyarakat dalam mengakses informasi dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan sosial-ekonomi.

Kualitas Pendidikan di Situbondo juga tercatat lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata provinsi, menunjukkan adanya kendala dalam penyediaan pendidikan yang berkualitas. Rendahnya kualitas ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya sumber daya pendidikan seperti fasilitas sekolah yang memadai, kualitas tenaga pengajar, serta program pengajaran yang efektif.

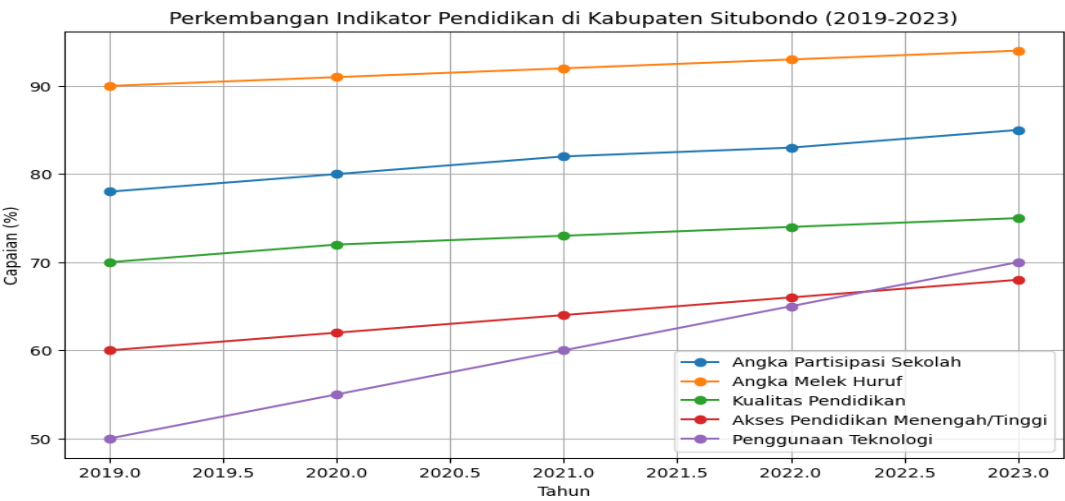
Akses terhadap Pendidikan Menengah/Tinggi di Situbondo juga masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata di Jawa Timur, yang mengindikasikan adanya kesulitan yang dihadapi oleh siswa di Situbondo untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Faktor-faktor seperti keterbatasan ekonomi, infrastruktur yang kurang memadai, dan mungkin juga kurangnya institusi pendidikan menengah dan tinggi yang terjangkau di daerah ini, dapat menjadi hambatan bagi siswa untuk melanjutkan studi mereka.

Selain itu, Penggunaan Teknologi dalam pendidikan di Situbondo juga tertinggal cukup jauh dibandingkan dengan rata-rata Jawa Timur. Rendahnya penggunaan teknologi ini sangat memprihatinkan mengingat peran penting teknologi dalam proses belajar-mengajar di era digital saat ini. Kurangnya akses dan pemanfaatan teknologi dapat menghambat proses belajar siswa, mengurangi efektivitas pengajaran, dan menempatkan siswa Situbondo pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan daerah lain yang lebih maju dalam hal ini.

Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan bahwa Kabupaten Situbondo menghadapi berbagai tantangan dalam sektor pendidikan, dari partisipasi sekolah yang rendah, literasi yang masih kurang, kualitas pendidikan yang belum memadai, hingga akses terbatas ke pendidikan tinggi dan rendahnya pemanfaatan teknologi. Situasi ini menekankan perlunya intervensi yang lebih intensif dan strategis untuk memperbaiki kondisi pendidikan di Situbondo, sehingga dapat sejajar dengan daerah lain di Jawa Timur dan mendukung perkembangan sosial-ekonomi masyarakat di masa mendatang.

B. Perkembangan Time Series

Data capaian Kabupaten Situbondo selama periode 2019 hingga 2023 memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan berbagai sektor di wilayah ini. Dengan menganalisis data time series, kita dapat mengidentifikasi tren, pola, dan perubahan yang signifikan yang terjadi selama lima tahun terakhir. Data ini menjadi dasar penting untuk memahami dinamika pertumbuhan, sekaligus mengevaluasi kinerja dan merumuskan strategi ke depan.



Dalam analisis perkembangan time series untuk capaian pendidikan di Kabupaten Situbondo dari tahun 2019 hingga 2023, terlihat bahwa meskipun ada upaya peningkatan, tantangan-tantangan dalam sektor pendidikan masih tetap ada. Berdasarkan indikator-indikator utama yang telah diulas sebelumnya, perkembangan pendidikan di Situbondo menunjukkan dinamika yang kompleks.

Pertama, jika dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah, Kabupaten Situbondo mengalami fluktuasi sepanjang periode 2019-2023. Meski terdapat beberapa peningkatan dalam partisipasi pendidikan di beberapa tahun, angka tersebut masih belum konsisten meningkat setiap tahunnya dan masih tertinggal dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Timur.

Hal ini mengindikasikan bahwa faktor-faktor penghambat, seperti akses geografis dan kondisi ekonomi, mungkin masih belum sepenuhnya teratasi di kabupaten ini.

Dalam hal Angka Melek Huruf, Situbondo juga menunjukkan perkembangan yang positif namun tetap di bawah rata-rata provinsi. Setiap tahun ada peningkatan jumlah penduduk yang melek huruf, namun pertumbuhan ini masih belum cukup cepat untuk mengejar ketertinggalan dari standar yang ada di Jawa Timur. Ini bisa disebabkan oleh kurangnya program pendidikan orang dewasa atau pelatihan literasi yang intensif di daerah ini.

Kualitas Pendidikan di Situbondo juga menunjukkan beberapa peningkatan selama periode ini, namun peningkatan tersebut belum cukup signifikan. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan fasilitas pendidikan dan kualitas pengajaran, hasilnya masih berada di bawah standar provinsi. Ini mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih inovatif dan efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan, seperti pelatihan guru yang lebih komprehensif atau pembaruan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

Akses terhadap Pendidikan Menengah/Tinggi di Situbondo selama tahun 2019-2023 menunjukkan peningkatan, namun tetap berada di bawah rata-rata Jawa Timur. Meskipun ada peningkatan jumlah siswa yang melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah dan tinggi, banyak siswa yang masih menghadapi hambatan untuk melanjutkan pendidikan mereka, baik karena keterbatasan ekonomi, infrastruktur, atau minimnya institusi pendidikan yang memadai di daerah ini.

Penggunaan Teknologi dalam pendidikan di Situbondo mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah adanya dorongan untuk digitalisasi pendidikan akibat pandemi COVID-19. Namun, penggunaan teknologi ini masih jauh dari optimal dibandingkan dengan rata-rata di provinsi Jawa Timur. Hambatan seperti akses internet yang terbatas dan kurangnya keterampilan teknologi di kalangan siswa dan guru menjadi faktor penghambat utama.

Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa peningkatan dalam indikator-indikator pendidikan di Kabupaten Situbondo selama periode 2019-2023, kemajuan tersebut masih belum cukup untuk mencapai atau bahkan mendekati rata-rata provinsi Jawa Timur. Grafik perbandingan indikator pendidikan yang ditampilkan sebelumnya menegaskan bahwa Situbondo masih memerlukan perhatian khusus dan strategi yang lebih efektif untuk mempercepat kemajuan di sektor pendidikan, sehingga tidak hanya mampu mengejar ketertinggalan, tetapi juga membangun pondasi yang kuat untuk peningkatan pendidikan di masa depan.

### C. Efektivitas

Efektivitas program-program pembangunan di Kabupaten Situbondo selama periode 2019 hingga 2023 dapat dilihat dari kemampuan pemerintah dan berbagai pihak terkait dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam berbagai sektor. Analisis data time series menunjukkan bagaimana pelaksanaan kebijakan dan program tersebut memberikan hasil yang nyata dalam jangka waktu lima tahun, serta

bagaimana capaian ini sejalan dengan rencana pembangunan daerah. Misalnya, di sektor ekonomi, efektivitas dapat diukur dari pertumbuhan PDRB, penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di sektor pendidikan, efektivitas terlihat dari peningkatan angka partisipasi sekolah, perbaikan infrastruktur pendidikan, serta kualitas tenaga pendidik.

Efektivitas juga mencakup kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada, baik dalam hal anggaran, tenaga kerja, maupun waktu. Program-program yang dirancang dengan baik dan didukung oleh alokasi anggaran yang tepat waktu dan sesuai kebutuhan terbukti mampu memberikan dampak yang lebih signifikan. Selain itu, efektivitas juga tercermin dari sejauh mana program-program tersebut dapat bertahan dalam jangka panjang, atau dengan kata lain, keberlanjutan dari hasil-hasil yang telah dicapai. Program yang efektif adalah program yang tidak hanya mencapai target jangka pendek tetapi juga memiliki dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Selain itu, efektivitas juga ditentukan oleh tingkat adaptasi program terhadap perubahan kondisi dan tantangan eksternal, seperti pandemi COVID-19 yang telah mengubah banyak aspek kehidupan selama periode tersebut. Kemampuan pemerintah daerah untuk merespons dengan cepat dan menyesuaikan program-programnya agar tetap relevan dan bermanfaat di tengah situasi yang dinamis adalah indikator lain dari efektivitas. Evaluasi berkelanjutan dan penyesuaian kebijakan secara berkala menjadi penting untuk memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan tetap on track dan mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, efektivitas pembangunan di Situbondo selama lima tahun terakhir dapat dilihat dari sejauh mana program-program yang dijalankan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Efektivitas ini bukan hanya soal pencapaian target, tetapi juga tentang bagaimana program tersebut memberikan dampak yang positif dan bertahan lama, serta bagaimana pemerintah daerah dapat terus berinovasi dan beradaptasi untuk menghadapi tantangan di masa depan.

#### D. Relevansi

Relevansi capaian Kabupaten Situbondo dalam konteks perkembangan Jawa Timur selama periode 2019 hingga 2023 merupakan aspek penting yang harus dianalisis untuk memahami posisi dan kontribusi daerah ini terhadap pembangunan provinsi secara keseluruhan. Dengan membandingkan data capaian Kabupaten Situbondo dengan data capaian Jawa Timur, kita dapat mengidentifikasi sejauh mana program-program yang dilaksanakan di tingkat kabupaten selaras dengan tren dan target yang ditetapkan di tingkat provinsi. Analisis ini juga membantu dalam menilai apakah kebijakan daerah telah berhasil mengatasi tantangan lokal sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan provinsi.

Relevansi ini dapat dilihat dari berbagai sektor, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Misalnya, dalam sektor ekonomi, jika pertumbuhan ekonomi Kabupaten Situbondo sejalan atau bahkan melampaui

pertumbuhan ekonomi Jawa Timur, maka dapat dikatakan bahwa strategi ekonomi di kabupaten ini relevan dan efektif dalam mendukung visi pembangunan provinsi. Begitu pula dalam sektor pendidikan dan kesehatan, relevansi ditunjukkan oleh indikator-indikator seperti angka partisipasi sekolah dan kualitas layanan kesehatan, yang jika mendekati atau melebihi rata-rata provinsi, menunjukkan bahwa Kabupaten Situbondo mampu mengikuti, dan bahkan memimpin, tren pembangunan regional.

Namun, relevansi ini tidak hanya diukur dari kesesuaian angka capaian, tetapi juga dari kemampuan Kabupaten Situbondo untuk menyesuaikan prioritas pembangunan dengan kebutuhan dan potensi lokal sambil tetap berkontribusi terhadap tujuan provinsi. Sebagai contoh, jika Jawa Timur menargetkan peningkatan sektor pariwisata, dan Situbondo, dengan potensi wisata alamnya, berhasil meningkatkan kunjungan wisatawan secara signifikan, maka program pariwisata daerah dapat dianggap relevan dalam konteks pembangunan provinsi.

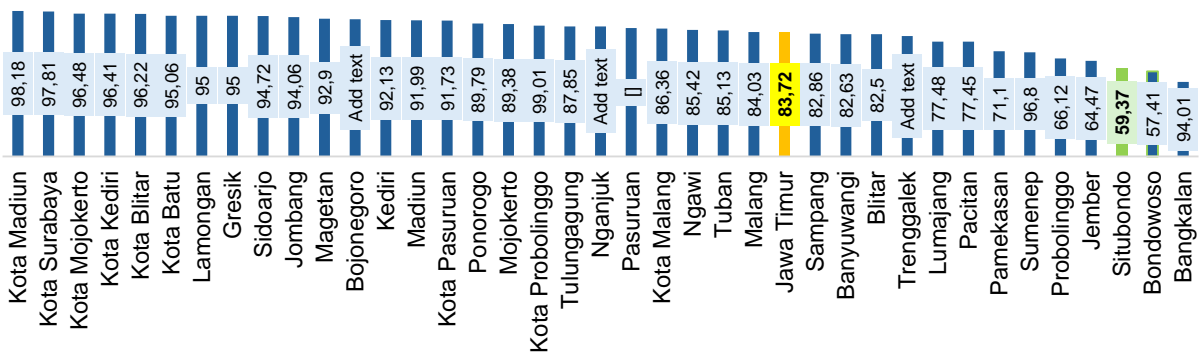
Selain itu, relevansi juga mencakup bagaimana Kabupaten Situbondo belajar dari capaian Jawa Timur untuk memperbaiki dan mengoptimalkan program-programnya sendiri. Analisis perbandingan ini memberikan wawasan yang dapat digunakan untuk menyesuaikan strategi pembangunan lokal agar lebih efektif dan selaras dengan arah kebijakan provinsi. Dengan demikian, relevansi capaian Kabupaten Situbondo tidak hanya dilihat dari sisi keselarasan data, tetapi juga dari bagaimana daerah ini berkontribusi terhadap, dan mengambil manfaat dari, dinamika pembangunan di tingkat provinsi.

3.6 Analisis Karakteristik Masalah Bidang Infrastruktur Dasar

3.6.1 Persentase Rumah Tangga memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak (%)

A. Posisi Relatif

Kabupaten Situbondo memiliki persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data, persentase rumah tangga dengan akses terhadap sanitasi layak di Kabupaten Situbondo pada tahun 2023 tercatat sebesar 59,37%, menempatkannya pada urutan ke-36 dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Angka ini berada di bawah rata-rata persentase sanitasi layak Provinsi Jawa Timur yang mencapai 83,72%. Berikut adalah grafik perbandingan persentase rumah tangga dengan akses terhadap sanitasi layak antara Kabupaten Situbondo dan daerah lain di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023 untuk memberikan gambaran yang lebih jelas:



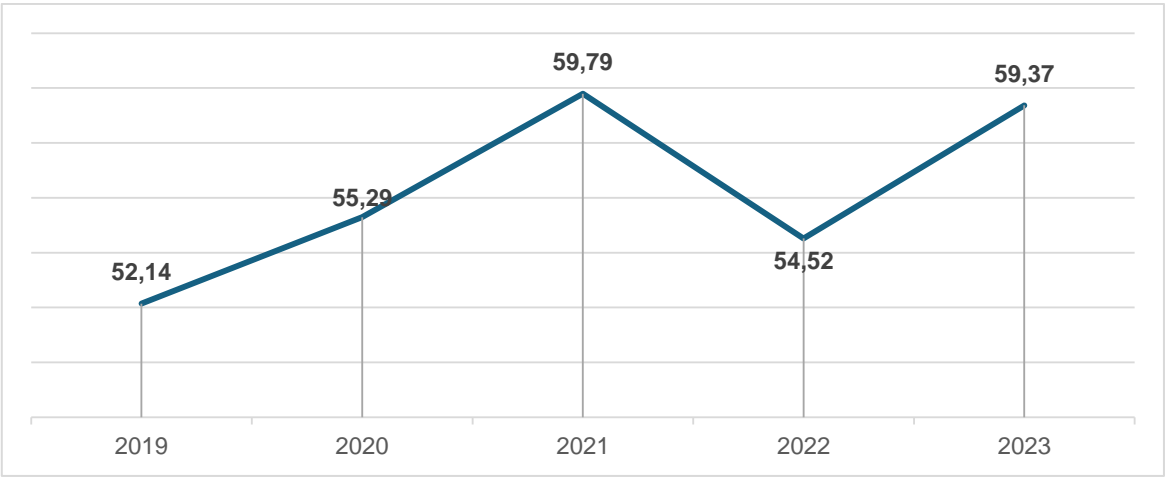
Gambar 3. 56 Persentase Rumah Tangga memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak (%) Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Tahun 2024

Grafik di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Situbondo memiliki Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak sebesar 59,37%, yang merupakan angka terendah di antara Kabupaten/Kota lain di Jawa Timur pada tahun 2023.

B. Perkembangan Time Series

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak adalah indikator yang mengukur proporsi rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi yang memadai dan aman. Sanitasi layak mencakup akses ke sistem pembuangan air limbah yang bersih dan tertutup, seperti toilet atau jamban yang terhubung ke saluran pembuangan yang aman, septic tank, atau instalasi pengolahan air limbah.



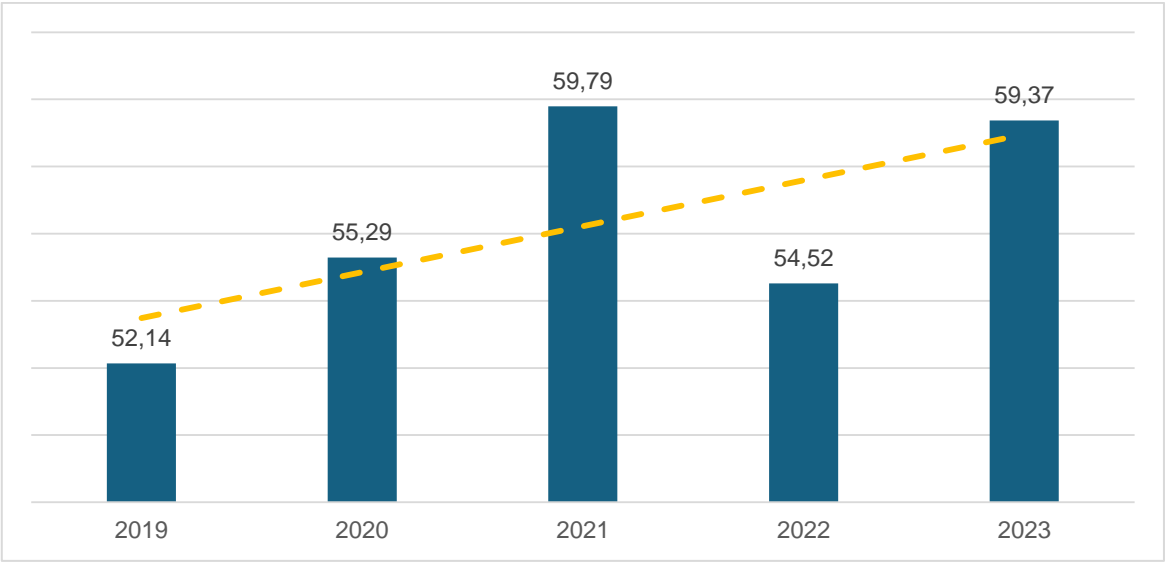
Gambar 3. 57 Persentase Rumah Tangga memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak (%) Kabupaten Situbondo 2019 - 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Tahun 2024

Berdasarkan grafik di atas, Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak di Kabupaten Situbondo menunjukkan fluktuasi dalam lima tahun terakhir (2019 – 2023). Nilai tertinggi tercatat pada tahun 2021 dengan angka sebesar 59,79%, sementara nilai terendah terjadi pada tahun 2019 dengan angka sebesar 52,14%. Meskipun ada peningkatan pada tahun 2020 dan 2021, angka ini mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 54,52%, sebelum kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi 59,37%.

C. Efektivitas

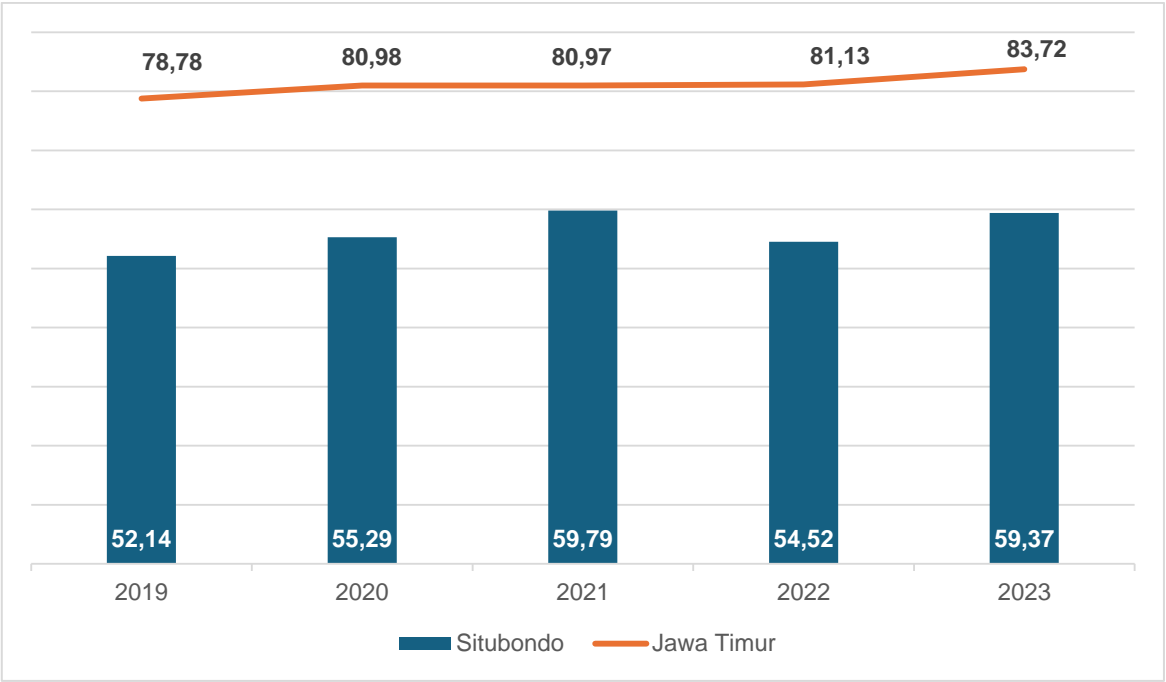
Berdasarkan grafik di bawah ini, dapat dilihat bahwa persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak di Kabupaten Situbondo dalam 5 tahun terakhir (2019 – 2023) menunjukkan tren yang fluktuatif. Nilai tertinggi tercatat pada tahun 2021 dengan angka sebesar 59,79%, sementara nilai terendah terjadi pada tahun 2019 dengan angka sebesar 52,14%. Meskipun ada peningkatan signifikan pada tahun 2021, persentase ini menurun menjadi 54,52% pada tahun 2022, sebelum kembali meningkat menjadi 59,37% pada tahun 2023.



Gambar 3. 58 Efektivitas Persentase Rumah Tangga memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak (%) Kabupaten Situbondo 2019 - 2023  
Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Tahun 2024

D. Relevansi

Relevansi perkembangan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak di Kabupaten Situbondo dan Provinsi Jawa Timur selama 5 tahun terakhir (2019 – 2023) menunjukkan adanya fluktuasi. Berdasarkan data, persentase di Kabupaten Situbondo mengalami perubahan yang signifikan, dengan angka tertinggi pada tahun 2021 sebesar 59,79% dan angka terendah pada tahun 2019 sebesar 52,14%. Sementara itu, persentase di Provinsi Jawa Timur menunjukkan tren yang lebih konsisten dan stabil, dengan angka tertinggi pada tahun 2023 sebesar 83,72% dan angka 78,78% pada tahun 2019. Berikut ini adalah grafik perkembangan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak di Kabupaten Situbondo dan Provinsi Jawa Timur selama 5 tahun terakhir:

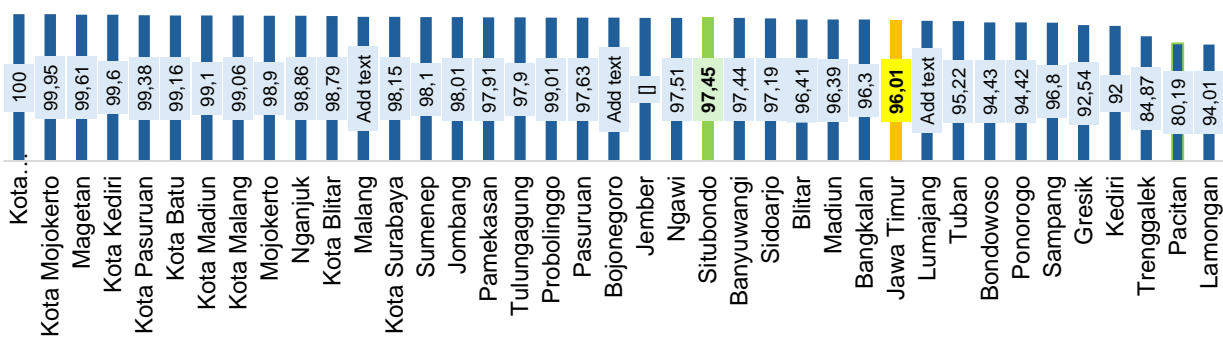


Gambar 3. 59 Relevansi Persentase Rumah Tangga memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak (%) Kabupaten Situbondo dan Jawa Timur Tahun 2019 - 2023  
Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Tahun 2024

3.6.2 Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak (%)

A. Posisi Relatif

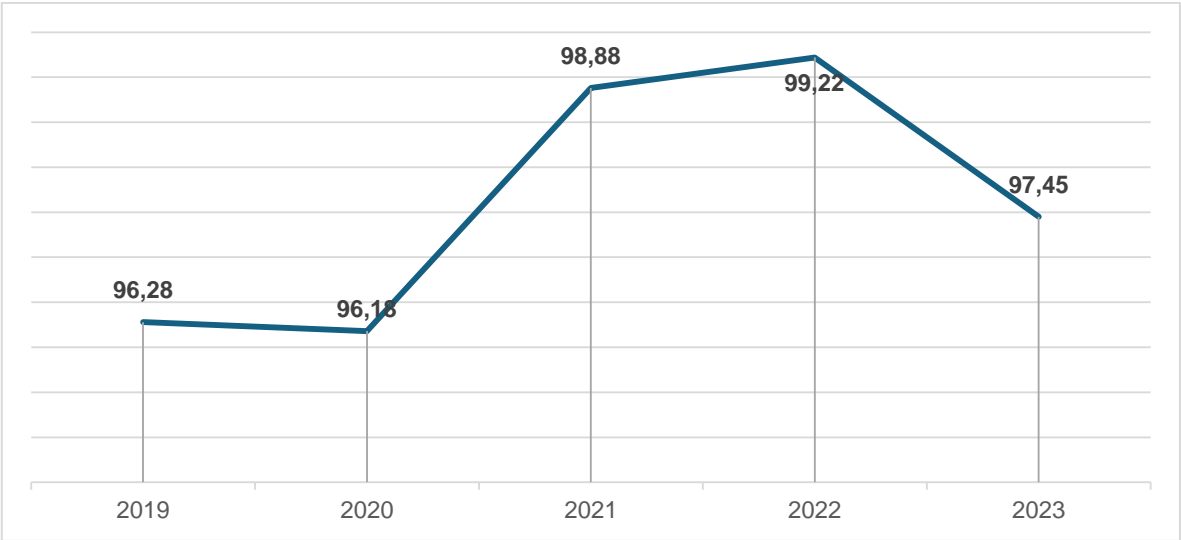
Kabupaten Situbondo memiliki persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak yang berada di tingkat menengah jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data, persentase rumah tangga dengan akses terhadap air minum layak di Kabupaten Situbondo pada tahun 2023 tercatat sebesar 97,45%, menempatkannya pada urutan ke-24 dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Angka ini sedikit di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur yang mencapai 96,01%. Berikut adalah grafik perbandingan persentase rumah tangga dengan akses terhadap air minum layak antara Kabupaten Situbondo dan daerah lain di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023 untuk memberikan gambaran yang lebih jelas:



Gambar 3. 60 Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak (%) Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2023  
Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Tahun 2024

B. Perkembangan Time Series

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa banyak rumah tangga dalam suatu wilayah yang memiliki akses ke sumber air bersih yang aman untuk diminum. Akses terhadap air minum layak mencakup sumber-sumber air seperti air ledeng, sumur bor, atau mata air terlindung yang memenuhi standar kualitas kesehatan. Sumber air ini harus dapat diakses dengan mudah, aman dari kontaminasi, dan tersedia dalam jumlah yang cukup untuk kebutuhan dasar sehari-hari. Indikator ini penting untuk mengevaluasi tingkat kesejahteraan dan kesehatan masyarakat dalam suatu wilayah.

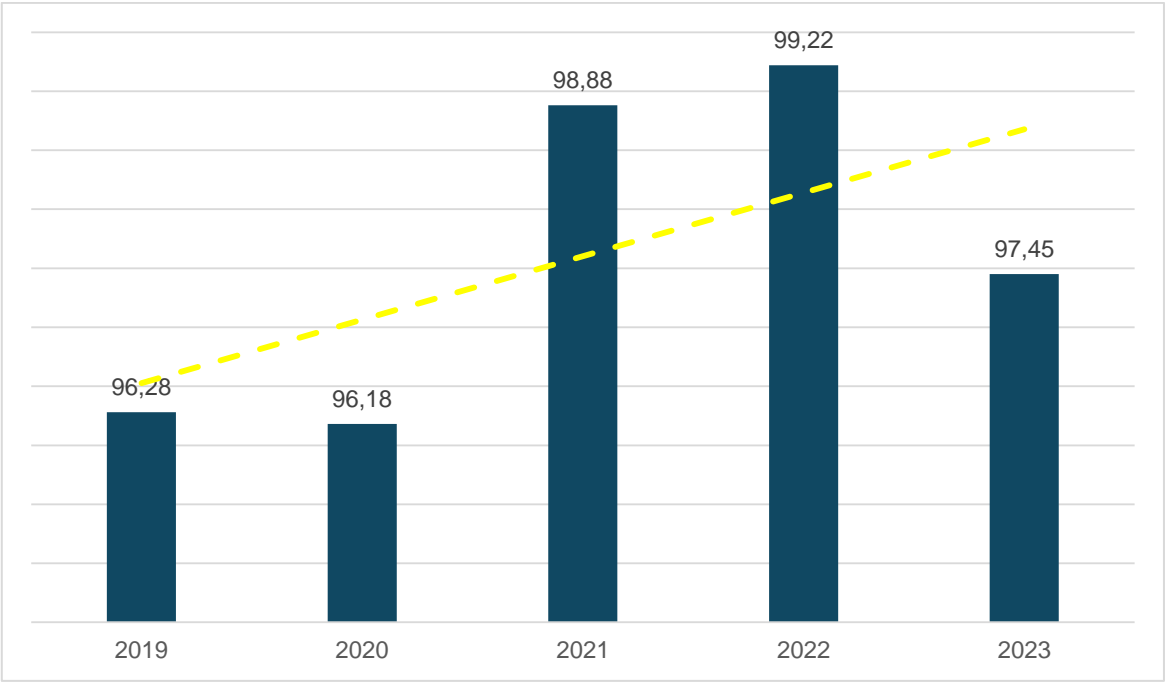


Gambar 3. 61 Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak (%) Kabupaten Situbondo 2019 - 2023  
Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Tahun 2024

Berdasarkan grafik di atas, Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak di Kabupaten Situbondo menunjukkan tren yang berfluktuasi dalam lima tahun terakhir (2019 – 2023). Nilai tertinggi tercatat pada tahun 2022 dengan angka sebesar 99,22%, sementara nilai terendah terjadi pada tahun 2020 dengan angka sebesar 96,18%. Meskipun terjadi peningkatan signifikan pada tahun 2021 dan 2022, persentase ini mengalami sedikit penurunan pada tahun 2023 menjadi 97,45%.

C. Efektivitas

Berdasarkan grafik di bawah ini, dapat dilihat bahwa persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak di Kabupaten Situbondo dalam 5 tahun terakhir (2019 – 2023) menunjukkan tren yang fluktuatif. Nilai tertinggi tercatat pada tahun 2022 dengan angka sebesar 99,22%, sementara nilai terendah terjadi pada tahun 2020 dengan angka sebesar 96,18%. Meskipun ada peningkatan signifikan pada tahun 2021 dan 2022, persentase ini mengalami sedikit penurunan pada tahun 2023 menjadi 97,45%.



Gambar 3. 62 Efektivitas Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak (%) Kabupaten Situbondo 2019 - 2023  
Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Tahun 2024

D. Relevansi

Relevansi perkembangan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak di Kabupaten Situbondo dan Provinsi Jawa Timur selama 5 tahun terakhir (2019 – 2023) menunjukkan adanya fluktuasi. Berdasarkan data, persentase di Kabupaten Situbondo mengalami perubahan yang signifikan, dengan angka tertinggi pada tahun 2022 sebesar 99,22% dan angka terendah pada tahun 2020 sebesar 96,18%. Sementara itu, persentase di Provinsi Jawa Timur menunjukkan tren yang lebih konsisten, dengan angka tertinggi pada tahun 2023 sebesar 96,01% dan angka terendah pada tahun 2019 sebesar 94,39%. Berikut ini



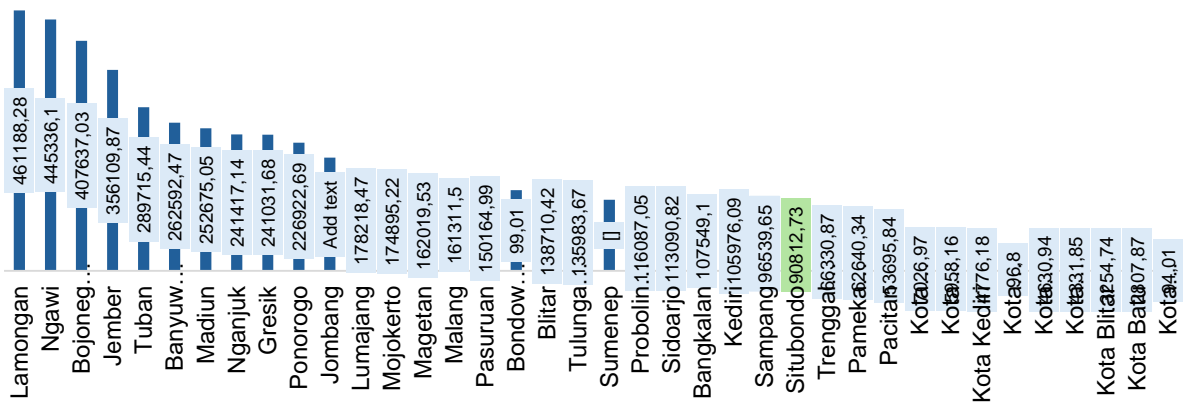
adalah grafik perkembangan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak di Kabupaten Situbondo dan Provinsi Jawa Timur selama 5 tahun terakhir:

Gambar 3. 63 Relevansi Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak (%) Kabupaten Situbondo dan Jawa Timur Tahun 2019 - 2023  
Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Tahun 2024

3.7 Analisis Karakteristik Masalah Bidang Ketahanan Pangan  
3.7.1 Produksi Beras (ton)

A. Posisi Relatif

Kabupaten Situbondo memiliki persentase produksi beras yang cukup rendah jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data, produksi beras di Tahun 2023 tercatat hanya 90812,73 ton yang mana hanya 1,67% dari total seluruh produksi beras di Provinsi Jatim pada 2023 yaitu sebnayak 5607131,53 ton. Hal ini menempatkan Kabupaten Situbondo menjadi urutan ke-26 dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur dalam produksi beras. Berikut adalah grafik perbandingan produksi beras antara Kabupaten Situbondo dan daerah lain di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023 untuk memberikan gambaran yang lebih jelas:

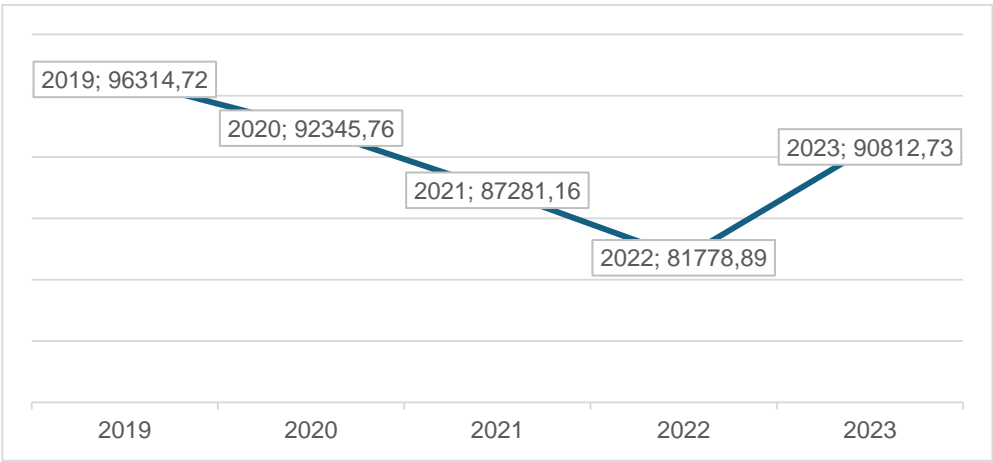


Gambar 3. 64 Persentase Produksi Beras (ton) Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2023  
Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Tahun 2024

Cukup dimengerti akan hasil produksi beras yang kurang apabila dibandingkan dengan daerah lain dikarenakan letak geografis Kabupaten Situbondo yang kurang cocok untuk dijadikan sawah tempat menanam padi.

B. Perkembangan Time Series

Produksi beras merujuk pada jumlah beras yang dihasilkan dari hasil penggilingan gabah kering panen (GKP) menjadi beras siap konsumsi. Produksi beras dihitung berdasarkan konversi dari produksi gabah kering giling (GKG), yang merupakan hasil dari proses pengeringan gabah yang sebelumnya dipanen sebagai GKP. BPS mengukur produksi beras melalui survei dan pengumpulan data pertanian, termasuk luas panen, produktivitas, dan faktor konversi dari gabah menjadi beras.

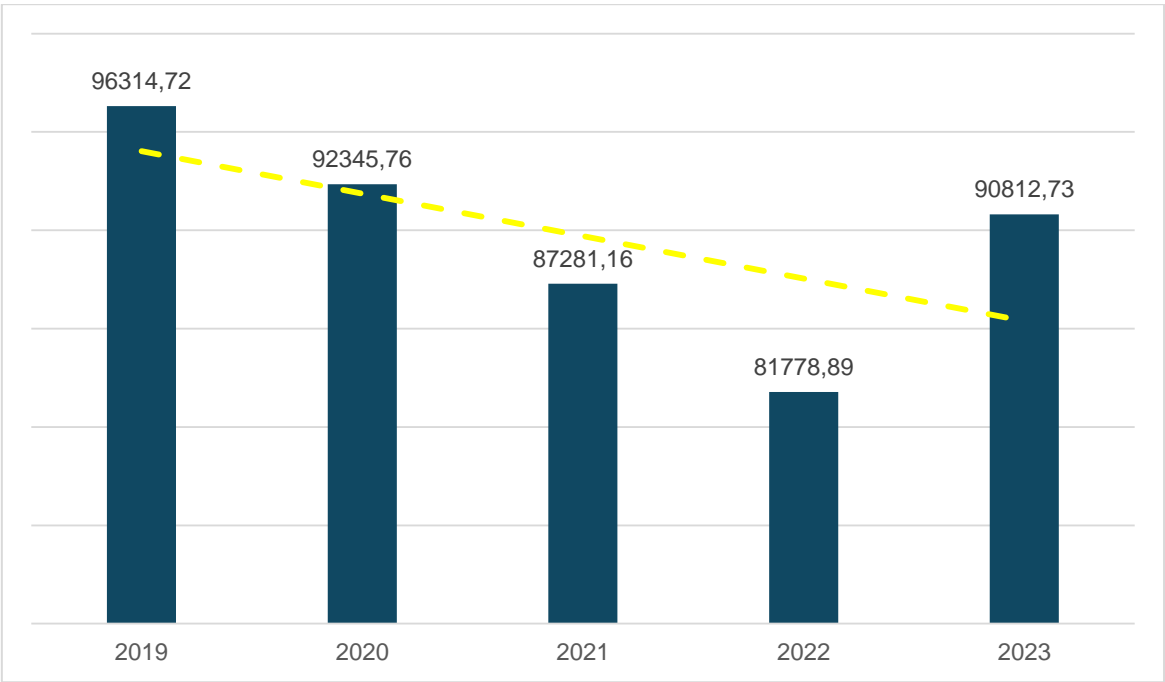


Gambar 3. 65 Persentase Produksi Beras (ton) Kabupaten Situbondo 2019 - 2023  
Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Tahun 2024

Berdasarkan grafik di bawah ini, Persentase Produksi Beras (ton) di Kabupaten Situbondo dalam lima tahun terakhir (2019 – 2023) menunjukkan tren yang berfluktuasi. Nilai tertinggi tercatat pada tahun 2019 dengan angka sebesar 96.314,72 ton, sementara nilai terendah terjadi pada tahun 2022 dengan angka sebesar 81.778,89 ton. Meskipun terjadi penurunan produksi dari tahun 2019 hingga 2022, produksi beras kembali meningkat pada tahun 2023 dengan angka sebesar 90.812,73 ton.

C. Efektivitas

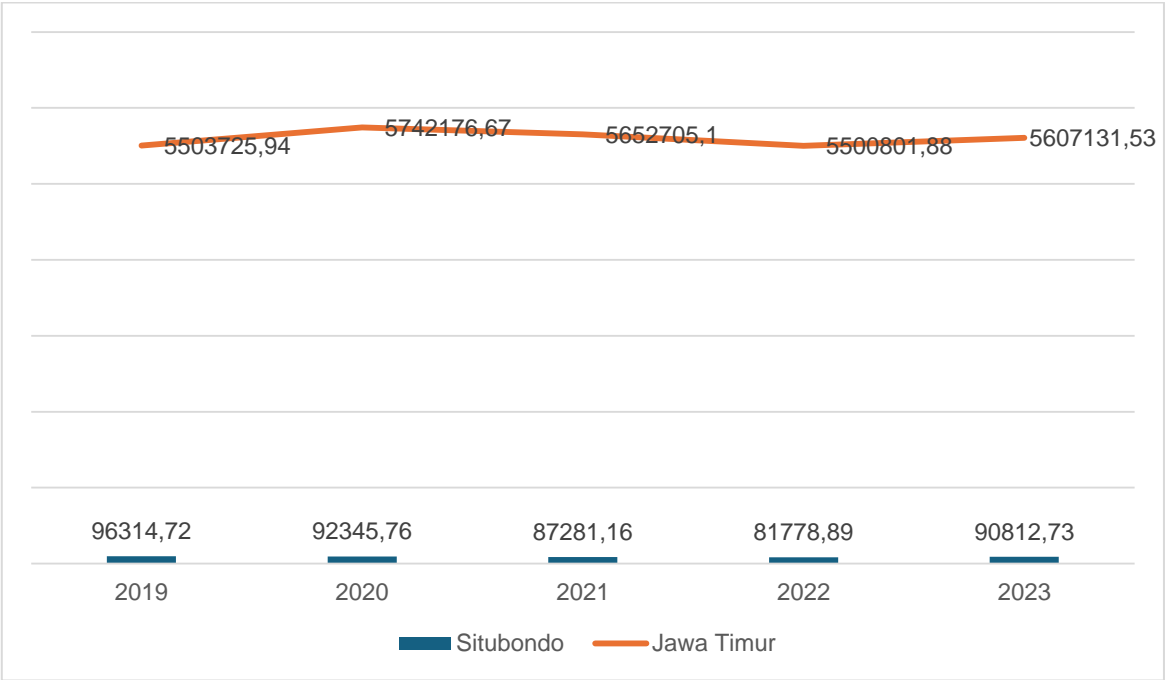
Berdasarkan grafik di bawah ini, dapat dilihat bahwa produksi beras (ton) di Kabupaten Situbondo dalam 5 tahun terakhir (2019 – 2023) menunjukkan tren yang fluktuatif. Nilai tertinggi tercatat pada tahun 2019 dengan angka sebesar 96.314,72 ton, sementara nilai terendah terjadi pada tahun 2022 dengan angka sebesar 81.778,89 ton. Meskipun terjadi penurunan produksi pada tahun 2021 dan 2022, terdapat peningkatan yang signifikan pada tahun 2023 dengan produksi mencapai 90.812,73 ton. Grafik ini mencerminkan perubahan yang dinamis dalam produksi beras di Kabupaten Situbondo selama periode lima tahun tersebut.



Gambar 3. 66 Efektivitas Produksi Beras (ton) Kabupaten Situbondo 2019 - 2023  
Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Tahun 2024

D. Relevansi

Relevansi perkembangan produksi beras di Kabupaten Situbondo dan Provinsi Jawa Timur selama 5 tahun terakhir (2019 – 2023) menunjukkan adanya fluktuasi. Berdasarkan data, produksi beras di Kabupaten Situbondo mengalami perubahan yang signifikan, dengan angka tertinggi pada tahun 2019 sebesar 96.314,72 ton dan angka terendah pada tahun 2022 sebesar 81.778,89 ton. Pada tahun 2023, produksi beras di Kabupaten Situbondo meningkat menjadi 90.812,73 ton. Sementara itu, produksi beras di Provinsi Jawa Timur menunjukkan tren yang lebih stabil, dengan angka tertinggi tercatat pada tahun 2020 sebesar 5.742.176,67 ton, dan angka terendah pada tahun 2022 sebesar 5.500.801,88 ton. Pada tahun 2023, produksi beras di Provinsi Jawa Timur kembali meningkat menjadi 5.607.131,53 ton. Berikut ini adalah grafik perkembangan produksi beras di Kabupaten Situbondo dan Provinsi Jawa Timur selama 5 tahun terakhir:



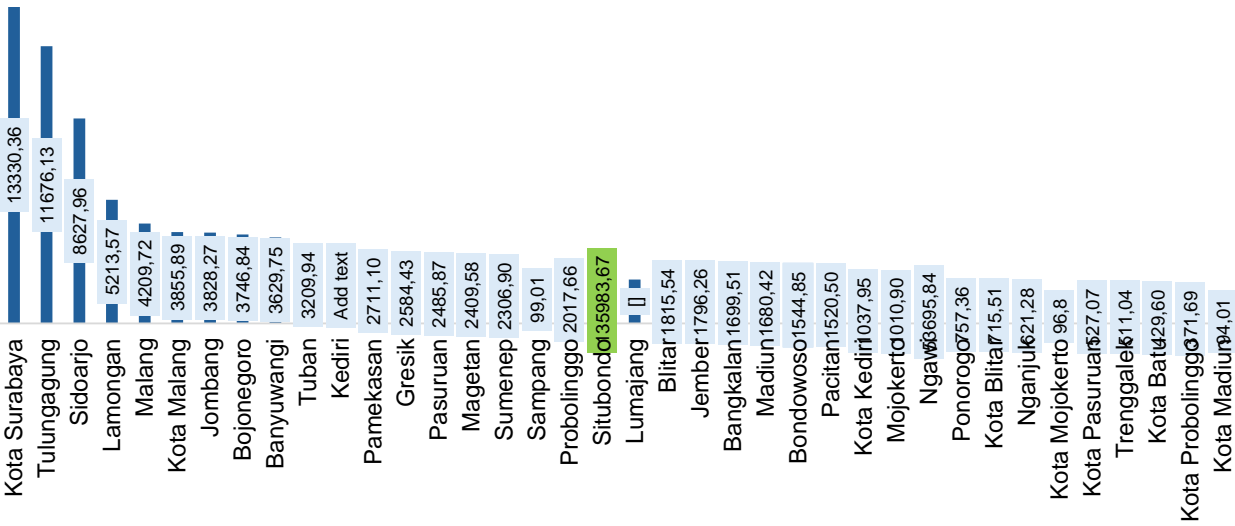
Gambar 3. 67 Relevansi Produksi Beras (ton) Kabupaten Situbondo dan Jawa Timur Tahun 2019 - 2023  
Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Tahun 2024

3.7.2 Produksi Daging Sapi Ternak

A. Posisi Relatif

Kabupaten Situbondo memiliki persentase produksi beras yang cukup baik jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data, produksi beras di Tahun 2023 tercatat sebanyak 197.627 kg yang menyumbang 1,92% dari total seluruh produksi daging sapi ternak di Provinsi Jatim pada 2023 yaitu sebanyak 10.271.172 kg. Hal ini menempatkan Kabupaten Situbondo menjadi urutan ke-19 dari

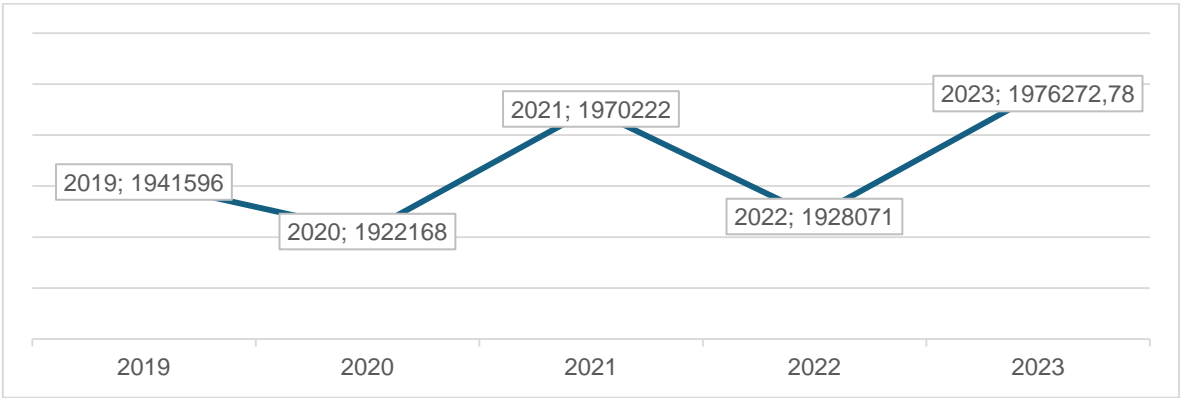
38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur dalam produksi daging sapi ternak. Berikut adalah grafik perbandingan produksi daging sapi ternak antara Kabupaten Situbondo dan daerah lain di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023 untuk memberikan gambaran yang lebih jelas:



Gambar 3. 68 Persentase Daging Sapi Ternak (ton) Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2023  
Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Tahun 2024

B. Perkembangan Time Series

Produksi daging sapi ternak mengacu pada jumlah daging yang diperoleh dari pemotongan sapi dalam jangka waktu tertentu, baik di rumah potong hewan (RPH) maupun di lokasi pemotongan lainnya. Perhitungan produksi ini dilakukan dalam satuan ton atau kilogram, hanya mencakup berat daging bersih setelah proses pemotongan, tanpa menghitung bagian-bagian seperti kulit, tulang, dan organ dalam.



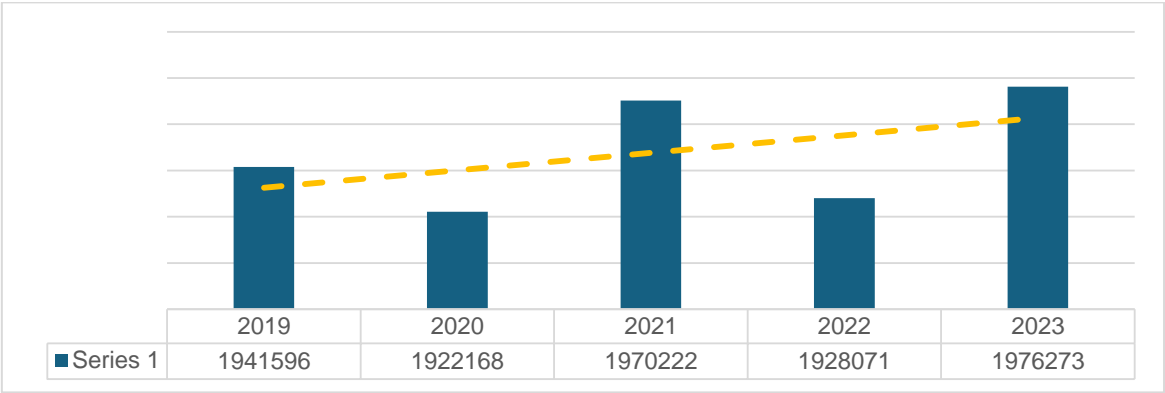
Gambar 3. 69 Persentase Produksi Daging Sapi Ternak (kg) Kabupaten Situbondo 2019 - 2023  
Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Tahun 2024

Berdasarkan grafik di bawah ini, Persentase Produksi Daging Sapi Ternak (kg) di Kabupaten Situbondo dalam lima tahun terakhir (2019 – 2023) menunjukkan tren yang berfluktuasi. Nilai tertinggi tercatat pada tahun 2023 dengan angka sebesar 1.976.272,78 kg, sementara nilai terendah terjadi pada tahun 2020 dengan angka sebesar 1.922.168 kg. Meskipun terdapat

penurunan produksi pada tahun 2020 dan 2022, produksi daging sapi mengalami peningkatan kembali pada tahun 2023.

C. Efektivitas

Berdasarkan grafik di bawah ini, dapat dilihat bahwa Persentase Produksi Daging Sapi Ternak (kg) di Kabupaten Situbondo dalam 5 tahun terakhir (2019 – 2023) menunjukkan tren yang fluktuatif. Nilai produksi tertinggi tercatat pada tahun 2023 dengan angka sebesar 1.976.272,78 kg, sementara nilai terendah terjadi pada tahun 2020 dengan angka sebesar 1.922.168 kg. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2020 dan 2022, produksi daging sapi ternak kembali meningkat pada tahun 2023. Data tersebut menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam periode tersebut.

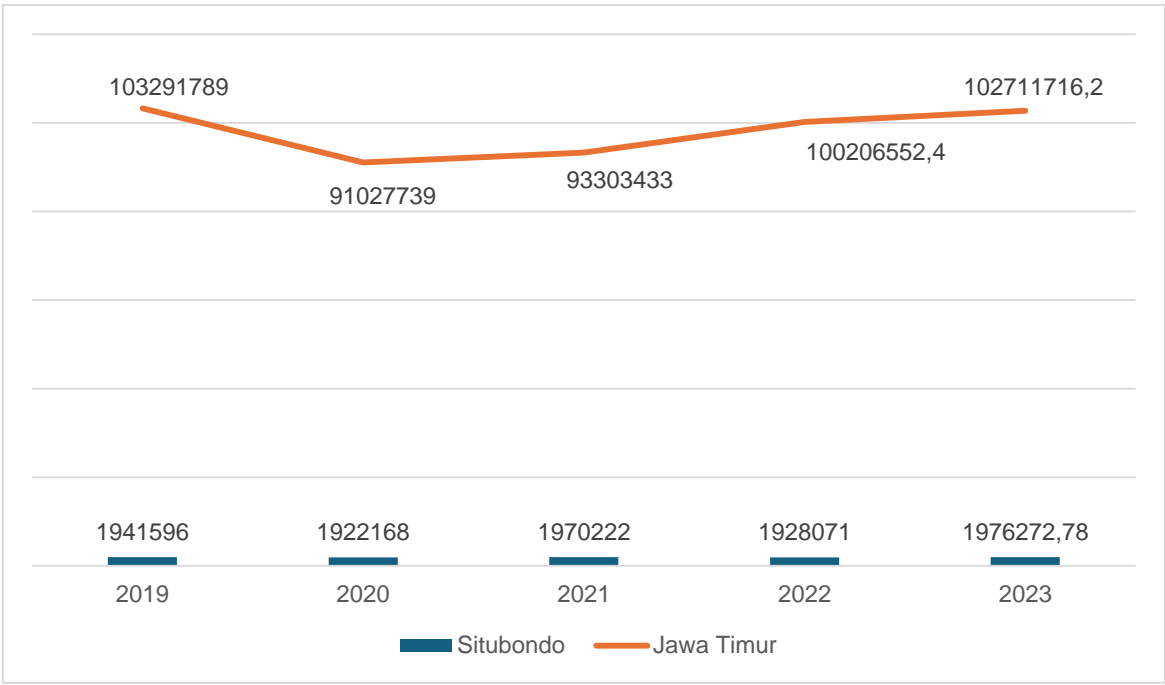


Gambar 3. 70 Efektivitas Produksi Daging Sapi Ternak Kabupaten Situbondo 2019 - 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Tahun 2024

D. Relevansi

Relevansi perkembangan produksi daging sapi ternak di Kabupaten Situbondo dan Provinsi Jawa Timur selama 5 tahun terakhir (2019 – 2023) menunjukkan adanya fluktuasi. Berdasarkan data, produksi daging sapi di Kabupaten Situbondo mengalami perubahan yang signifikan, dengan angka tertinggi pada tahun 2023 sebesar 1.976.272,78 kg dan angka terendah pada tahun 2020 sebesar 1.922.168 kg. Pada tahun 2021 dan 2023, terjadi peningkatan produksi yang mencapai lebih dari 1.970.000 kg. Sementara itu, produksi daging sapi di Provinsi Jawa Timur menunjukkan tren yang lebih stabil. Angka tertinggi tercatat pada tahun 2019 sebesar 103.291.789 kg, dan produksi menurun pada tahun 2020 menjadi 91.027.739 kg. Namun, sejak itu, angka produksi terus meningkat hingga mencapai 102.711.716,2 kg pada tahun 2023. Berikut ini adalah grafik perkembangan produksi daging sapi ternak di Kabupaten Situbondo dan Provinsi Jawa Timur selama 5 tahun terakhir:



Gambar 3. 71 Relevansi Produksi Daging Sapi Ternak Kabupaten Situbondo dan Jawa Timur Tahun 2019 - 2023  
Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Tahun 2024

3.8 Kemiskinan Ekstrem

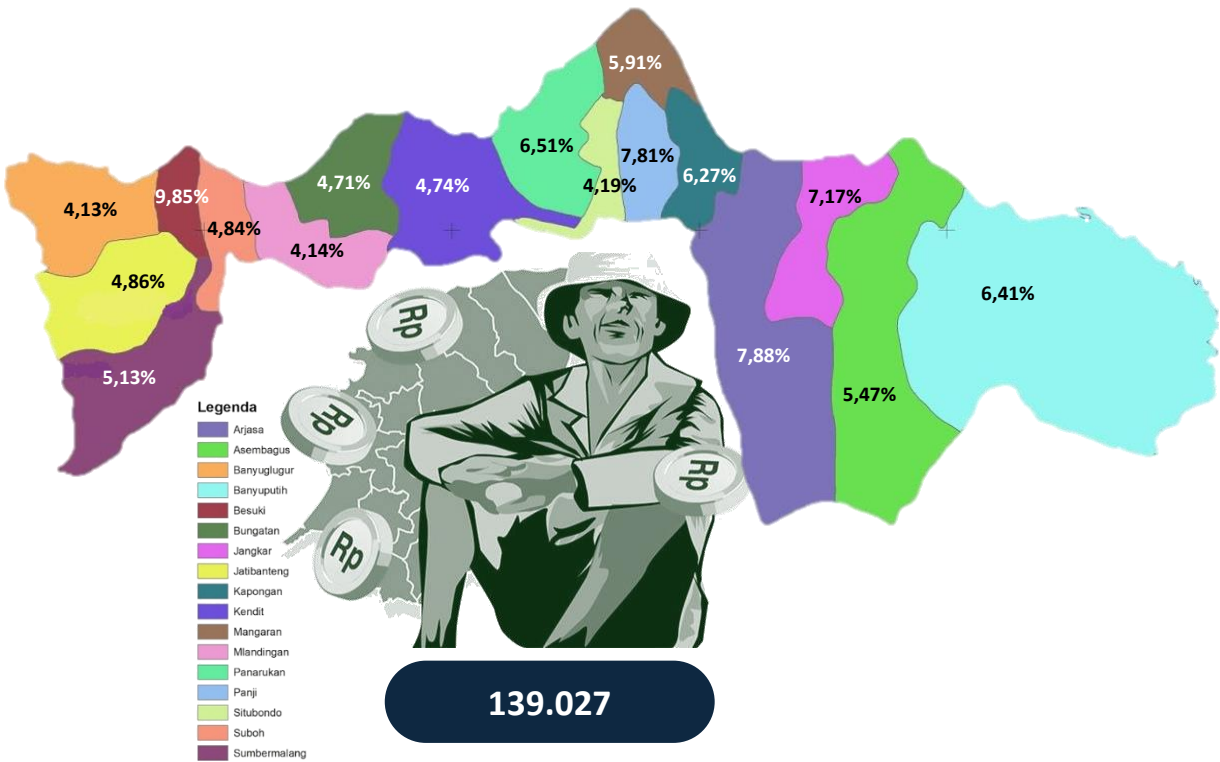
Kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) diukur dengan menggunakan konsep kemampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan penduduk dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi, bisa disimpulkan bahwa penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Penduduk miskin ekstrem merupakan bagian dari penduduk miskin, karena mereka hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial. Berdasarkan Bank Dunia, penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (*Purchasing Power Parity*), atau setara dengan Rp. 10.739/ orang/ hari atau Rp. 322.170/ orang/ bulan. Dengan kata lain, penduduk miskin ekstrem mempunyai pengeluaran lebih rendah dari penduduk miskin umum. Seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika biaya kebutuhan hidup sehari-harinya berada di bawah garis kemiskinan eskترم;

setara dengan USD 1,9 PPP (*Purchasing Power Parity*). PPP ditentukan menggunakan "*absolute poverty measure*" yang konsisten antar negara dan antar waktu. Atau dengan kata lain, seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika pengeluarannya di bawah Rp. 10.739/ orang/ hari atau Rp. 322.170/ orang/ bulan (BPS,2021). Sehingga misalnya dalam 1 keluarga terdiri dari 4 orang (ayah, ibu, dan 2 anak), memiliki kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya setara atau di bawah Rp. 1.288.680 per keluarga per bulan (BPS, 2021).

Program penghapusan kemiskinan ekstrem memerlukan data terkini dan memiliki pemeringkatan status/ tingkat kesejahteraan bagi seluruh penduduk dilengkapi nama dan alamat. Selanjutnya, data tersebut menjadi rujukan sasaran intervensi seluruh program. Selama belum tersedianya data yang termutakhirkan dan memiliki pemeringkatan status/ tingkat kesejahteraan bagi seluruh penduduk, maka dapat menggunakan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem merupakan data yang diperoleh dari Kemenko PMK (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia).

Berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang telah diperoleh dapat diketahui bahwa pada tahun 2024 kondisi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Situbondo tercatat sebanyak 139.027 keluarga yang tersebar pada 17 kecamatan.



Gambar 3. 72 Persebaran Keluarga Miskin (Ekstrem) di Kabupaten Situbondo Berdasarkan Kecamatan  
Sumber : Data P3KE Kabupaten Situbondo, 2024 (diolah)

Diantara 17 kecamatan di Kabupaten Situbondo, sebagian besar keluarga miskin ektrem terdapat di Kecamatan Besuki yang mencapai 13.690 keluarga atau sebesar 9,85%. Selain di Kecamatan Besuki, sebagian besar keluarga juga terdapat di Kecamatan Arjasa yang tercatat sebanyak 10.960

keluarga atau sebesar 7,88%, Kecamatan Panji sebanyak 10.853 keluarga atau sebesar 7,81% dan Kecamatan Jangkar sebanyak 9.973 keluarga atau sebesar 7,17%. Sedangkan untuk kecamatan lainnya rata-rata memiliki proporsi berada dibawah 7%, persebaran terendah terdapat di Kecamatan Banyuglugur sebesar 4,13% atau sebanyak 5.738 keluarga. Untuk mengetahui secara lebih jelas terkait dengan persebaran keluarga miskin ekstrem di Kabupaten Situbondo secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 1 Persebaran Keluarga Miskin (Ekstrem) di Kabupaten Situbondo Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Keluarga	Proporsi (%)
1	Arjasa	10.960	7,88%
2	Asembagus	7.600	5,47%
3	Banyuglugur	5.738	4,13%
4	Banyuputih	8.915	6,41%
5	Besuki	13.690	9,85%
6	Bungatan	6.547	4,71%
7	Jangkar	9.973	7,17%
8	Jatibanteng	6.760	4,86%
9	Kapongan	8.714	6,27%
10	Kendit	6.588	4,74%
11	Mangaran	8.215	5,91%
12	Mlandingan	5.751	4,14%
13	Panarukan	9.044	6,51%
14	Panji	10.853	7,81%
15	Situbondo	5.824	4,19%
16	Suboh	6.722	4,84%
17	Sumbermalang	7.133	5,13%
Total		139.027	100,00%

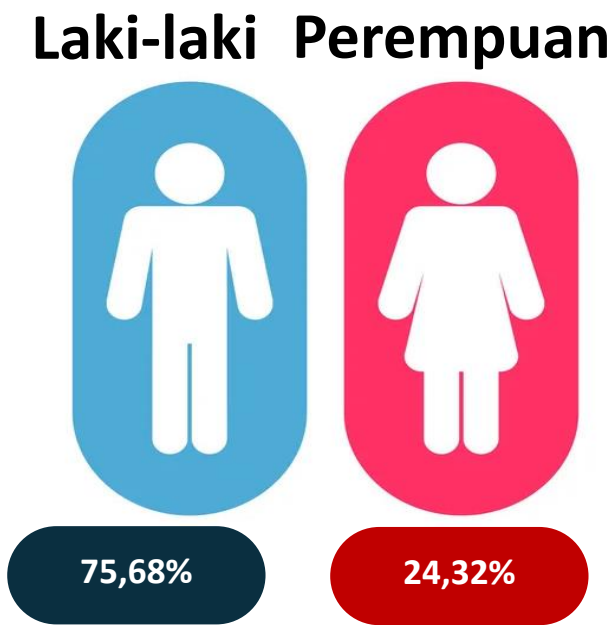
Sumber : Data P3KE Kabupaten Situbondo, 2024 (diolah)

Kondisi Keluarga Miskin (Ekstrem) di Kabupaten Situbondo pada dasarnya dapat ditinjau berdasarkan beberapa aspek. Adapun kondisi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Situbondo bila dilihat dari berbagai aspek adalah sebagai berikut :

3.8.1 Kondisi Kemiskinan Ekstrem Berdasarkan Jenis Kelamin Kepala Keluarga

Keluarga miskin (ektrem) di Kabupaten Situbondo bila diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin kepala keluarganya dapat diketahui bahwa sebagian besar kepala keluarga penduduk miskin (ektrem) di Kabupaten Situbondo berjenis kelamin laki-laki, dimana berdasarkan data tercatat sebanyak 105.215 jiwa atau sebesar 75,68%, sedangkan sisanya sebanyak 33.812 jiwa atau sebesar 24,32% memiliki jenis kelamin perempuan. Banyaknya kepala keluarga penduduk miskin (ekstrem) dengan jenis kelamin laki-laki di Kabupaten Situbondo menggambarkan bahwa adanya keterbatasan kepala keluarga dalam memperoleh pendapatan yang layak, dimana sebagian besar bekerja pada sektor informal. Sedangkan keberadaan kepala keluarga perempuan menggambarkan bahwa masih banyaknya penduduk perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga, sehingga dengan keterbatasan kemampuan yang dimiliki dan dengan beban hidup yang semakin meningkat menjadi salah satu penyebab kemiskinan yang dialami

oleh keluarga tersebut. Berikut disajikan komposisi jenis kelamin kepala keluarga miskin (ekstrem) di Kabupaten Situbondo.



Gambar 3. 73 Persentase Kepala Keluarga Miskin (Ekstrem) di Kabupaten Situbondo Berdasarkan Jenis Kelamin  
Sumber : Data P3KE Kabupaten Situbondo, 2024 (diolah)

Keberadaan keluarga miskin (ekstrem) di Kabupaten Situbondo tersebar hampir merata di setiap kecamatan, dimana dari 17 kecamatan persebarannya rata-rata setiap kecamatan mencapai 4,00% - 10,00%. Kecamatan Besuki tercatat menjadi kecamatan di Kabupaten Situbondo yang paling banyak terdapat keluarga miskin (ekstrem) dibandingkan dengan wilayah lainnya, dimana dari sebanyak 13.690 keluarga, jumlah kepala keluarga yang berjenis kelamin laki-laki mencapai 10.846 jiwa dan memiliki proporsi sebesar 79,23% dari keseluruhan jumlah keluarga yang terdapat di wilayah tersebut. Sedangkan sisanya sebanyak 2.844 jiwa atau dengan proporsi sebanyak 20,77% memiliki jenis kelamin perempuan. Berbeda dengan Kecamatan Besuki, Kecamatan Banyuglugur tercatat menjadi wilayah di Kabupaten Situbondo yang paling sedikit terdapat keluarga miskin (ekstrem), dimana dari sebanyak 5.738 keluarga, jumlah kepala keluarga yang berjenis kelamin laki-laki mencapai 4.375 jiwa dan memiliki proporsi sebesar 76,25% dari keseluruhan jumlah keluarga yang terdapat di wilayah tersebut. Sedangkan sisanya sebanyak 1.363 jiwa atau sebesar 23,75% memiliki jenis kelamin perempuan. Bila melihat persebaran kepala keluarga dengan jenis kelamin laki-laki di setiap kecamatan dapat diketahui bahwa sebagian besar terdapat di Kecamatan Besuki dengan proposi sebanyak 10,31% dari keseluruhan jumlah kepala keluarga yang berjenis kelamin laki-laki di Kabupaten Situbondo yang tercatat sebanyak 105.215 jiwa. Sedangkan persebaran kepala keluarga dengan jenis kelamin perempuan sebagian besar terdapat di Kecamatan Panji sebanyak 3.226 jiwa atau memiliki proposi sebesar 9,54% dari keseluruhan jumlah kepala keluarga yang berjenis kelamin perempuan di Kabupaten Situbondo sebanyak 33.812 jiwa. Untuk mengetahui persebaran jumlah kepala keluarga miskin (ekstrem) di

Kabupaten Situbondo berdasarkan jenis kelamin secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

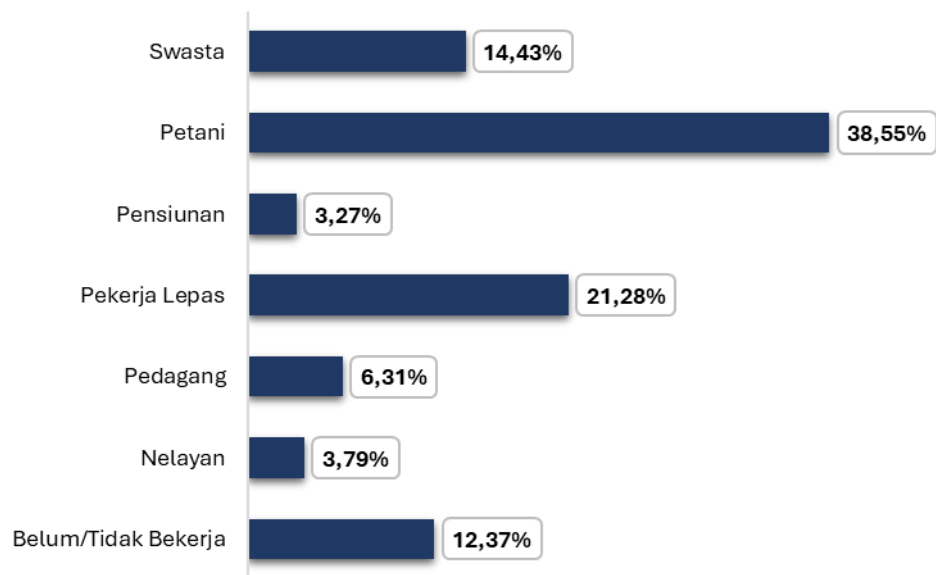
Tabel 3. 2 Persebaran Keluarga Miskin (Ekstrem) di Kabupaten Situbondo Berdasarkan Jenis Kelamin Kepala Keluarga dan Kecamatan

No	Kecamatan	Jenis Kelamin Kepala Keluarga				Jumlah Keluarga
		Laki - laki		Perempuan		
		Jumlah KK	%	Jumlah KK	%	
1	Arjasa	8.644	78,87%	2.316	21,13%	10.960
2	Asembagus	5.463	71,88%	2.137	28,12%	7.600
3	Banyuglugur	4.375	76,25%	1.363	23,75%	5.738
4	Banyuputih	7.061	79,20%	1.854	20,80%	8.915
5	Besuki	10.846	79,23%	2.844	20,77%	13.690
6	Bungatan	5.100	77,90%	1.447	22,10%	6.547
7	Jangkar	7.735	77,56%	2.238	22,44%	9.973
8	Jatibanteng	5.209	77,06%	1.551	22,94%	6.760
9	Kapongan	6.486	74,43%	2.228	25,57%	8.714
10	Kendit	4.968	75,41%	1.620	24,59%	6.588
11	Mangaran	5.916	72,01%	2.299	27,99%	8.215
12	Mlandingan	4.706	81,83%	1.045	18,17%	5.751
13	Panarukan	6.493	71,79%	2.551	28,21%	9.044
14	Panji	7.627	70,28%	3.226	29,72%	10.853
15	Situbondo	4.048	69,51%	1.776	30,49%	5.824
16	Suboh	5.090	75,72%	1.632	24,28%	6.722
17	Sumbermalang	5.448	76,38%	1.685	23,62%	7.133
Total		105.215	75,68%	33.812	24,32%	139.027

Sumber : Data P3KE Kabupaten Situbondo, 2024 (diolah)

3.8.2 Kondisi Kemiskinan Ekstrem Berdasarkan Pekerjaan Kepala Keluarga

Kondisi kemiskinan ekstrem berdasarkan pekerjaan kepala keluarga menggambarkan suatu kegiatan yang dilakukan oleh setiap penduduk miskin (kepala keluarga) demi kelangsungan hidupnya atau untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan hidup, dimana setiap kepala keluarga miskin melaksanakan pekerjaan salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarganya, karena kebutuhan pokok merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi dan tidak bisa di tunda-tunda. Melihat pada bidang pekerjaan yang saat ini dilaksanakan oleh kepala keluarga miskin (ekstrem), maka dapat terlihat bahwa sebagian besar kepala keluarga miskin (ekstrem) di Kabupaten Situbondo, yaitu sebanyak 121.826 jiwa atau sebesar 87,63% telah bekerja, sedangkan penduduk yang tidak/ belum bekerja saat ini hanya sebanyak 17.201 jiwa atau sebesar 12,37%. Adapun jenis pekerjaan yang dimiliki oleh kepala keluarga, yaitu : pegawai swasta, petani, pensiunan, pekerja lepas, wiraswasta, pedagang, dan nelayan.



Gambar 3. 74 Persentase Kepala Keluarga Miskin (Ekstrem) di Kabupaten Situbondo Berdasarkan Jenis Pekerjaan  
Sumber : Data P3KE Kabupaten Situbondo, 2024 (diolah)

Berdasarkan pada pekerjaan yang dimiliki oleh kepala keluarga miskin (ekstrem) di Kabupaten Situbondo sebagaimana yang terdapat pada gambar di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar kepala keluarga miskin (ekstrem) bekerja sebagai petani, yaitu sebesar 38,55% atau sebanyak 53.597 jiwa. Kepala keluarga miskin (ekstrem) di Kabupaten Situbondo yang bekerja sebagai pekerja lepas tercatat sebanyak 29.581 jiwa atau mencapai 21,28%, sedangkan yang bekerja sebagai pegawai swasta tercatat sebanyak 20.065 jiwa atau mencapai 14,43%. Disamping kedua jenis pekerjaan tersebut, masih terdapat sebanyak 8.776 jiwa atau sebesar 6,31% kepala keluarga miskin (ekstrem) di Kabupaten Situbondo yang bekerja sebagai pedagang, sebanyak 5.264 jiwa atau sebesar 3,79% bekerja sebagai pedagang, serta sebanyak 4.543 jiwa atau sebesar 3,27% bekerja sebagai pensiunan. Untuk mengetahui secara lebih jelas mengenai jumlah kepala keluarga miskin (ekstrem) di Kabupaten Situbondo berdasarkan jenis pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 3 Jumlah Kepala Keluarga Miskin (Ekstrem) di Kabupaten Situbondo Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Kepala Keluarga
1	Belum/ Tidak Bekerja	17.201
2	Nelayan	5.264
3	Pedagang	8.776
4	Pekerja Lepas	29.581
5	Pensiunan	4.543
6	Petani	53.597
7	Swasta	20.065
Jumlah		139.027

Sumber : Data P3KE Kabupaten Situbondo, 2024 (diolah)

Jenis pekerjaan kepala keluarga miskin (ekstrem) bila ditinjau berdasarkan persebarannya, maka dapat diperoleh informasi bahwa keberadaan kepala keluarga miskin (ekstrem) di Kabupaten Situbondo yang tidak/ belum bekerja saat ini telah tersebar di setiap kecamatan, dimana jumlah kepala keluarga miskin (ekstrem) yang tidak/ belum bekerja terbanyak terdapat pada Kecamatan Panji dengan proporsi sebesar 11,92% atau sebanyak 2.050 jiwa, sedangkan paling sedikit terdapat pada Kecamatan Sumbermalang dengan proporsi sebesar 1,69% atau sebanyak 291 jiwa. Untuk jumlah kepala keluarga miskin (ekstrem) yang bekerja sebagai Petani terbanyak terdapat pada Kecamatan Arjasa dengan proporsi sebesar 11,78% atau sebanyak 6.314 jiwa, dan yang paling sedikit terdapat pada Kecamatan Situbondo dengan proporsi sebesar 0,86% atau sebanyak 461 jiwa. Sedangkan untuk kepala keluarga miskin (ekstrem) yang bekerja sebagai pekerja lepas terbanyak terdapat pada Kecamatan Besuki dengan proporsi sebesar 14,86% atau sebanyak 4.396 jiwa, dan yang paling sedikit terdapat pada Kecamatan Jatibanteng dengan proporsi sebesar 1,65% atau sebanyak 489 jiwa. Untuk mengetahui persebaran kepala keluarga miskin (Ekstrem) di Kabupaten Situbondo berdasarkan jenis pekerjaan pada masing-masing kecamatan secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 4 Persebaran Keluarga Miskin (Ekstrem) di Kabupaten Situbondo Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Pekerjaan

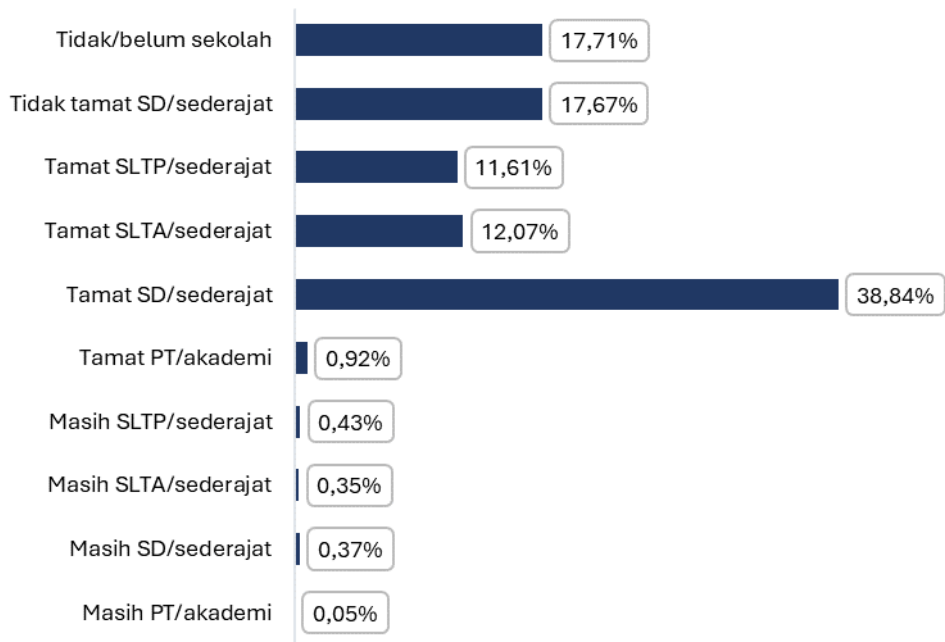
[illegible]

Sumber : Data P3KE Kabupaten Situbondo, 2024 (diolah)

### 3.8.3 Kondisi Kemiskinan Ekstrem Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kepala Keluarga

Pendidikan memiliki peran penting dalam mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang. Baik secara tidak langsung melalui perbaikan produktivitas dan efisiensi secara umum, maupun secara langsung melalui pelatihan golongan miskin dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas mereka dan pada waktunya akan meningkatkan pendapatan. Pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, pengetahuan seseorang akan bertambah yang akan bermanfaat untuk mempelajari keterampilan yang berguna di dunia kerja. Pendidikan diharapkan mampu memperbaiki kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan.

Tingkat pendidikan kepala keluarga miskin (ekstrem) di Kabupaten Situbondo sangat beragam, yaitu mulai tidak/ belum sekolah hingga tamat perguruan tinggi. Sebagian besar kepala keluarga miskin (ekstrem) di Kabupaten Situbondo memiliki tingkat pendidikan yang hanya tamat SD/ sederajat, yaitu tercatat sebanyak 53.997 jiwa atau sebesar 38,84%. Selain itu sebanyak 24.623 jiwa atau sebesar 17,71% tidak/ belum sekolah, dan sebanyak 24.561 jiwa atau sebesar 17,67% Tidak tamat SD/ sederajat. Kepala keluarga miskin (ekstrem) di Kabupaten Situbondo yang tamat Perguruan Tinggi hanya sebanyak 1.277 atau sebesar 0,92%, sedangkan masih menempuh pendidikan Perguruan Tinggi/ akademik sebanyak 63 jiwa atau sebesar 0,05%. Dengan banyaknya kepala keluarga miskin (ekstrem) yang hanya tamat SD/ sederajat menunjukkan bahwa faktor pendidikan formal turut menjadi kendala bagi penduduk untuk memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, sehingga dengan demikian pendidikan dan pengetahuan menjadi faktor penting yang perlu diperbaiki dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan meminimalkan keterbatasan kepala keluarga miskin untuk meningkatkan kualitas perekonomian keluarganya. Untuk mengetahui persentase kepala keluarga miskin (ekstrem) di Kabupaten Situbondo berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 3. 75 Persentase Kepala Keluarga Miskin (Ekstrem) di Kabupaten Situbondo Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sumber : Data P3KE Kabupaten Situbondo, 2024 (diolah)

Tabel 3. 5 Jumlah Kepala Keluarga Miskin (Ekstrem) di Kabupaten Situbondo Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Kepala Keluarga
1	Masih PT/akademi	63
2	Masih SD/ sederajat	514
3	Masih SLTA/ sederajat	482
4	Masih SLTP/ sederajat	592
5	Tamat PT/akademi	1.277
6	Tamat SD/ sederajat	53.997
7	Tamat SLTA/ sederajat	16.774
8	Tamat SLTP/ sederajat	16.144
9	Tidak tamat SD/ sederajat	24.561
10	Tidak/ belum sekolah	24.623
Jumlah		139.027

Sumber : Data P3KE Kabupaten Situbondo, 2024 (diolah)

Melihat pada persebaran kepala keluarga miskin (ekstrem) di Kabupaten Situbondo berdasarkan tingkat pendidikan selanjutnya dapat diketahui bahwa kepala keluarga yang memiliki tingkat pendidikan hanya tamat SD/ sederajat paling banyak terdapat pada Kecamatan Besuki yang mencapai 10,02% atau sebanyak 5.412 jiwa, dan yang paling sedikit terdapat pada Kecamatan Mlandingan yang hanya mencapai 3,30% atau sebanyak 1.784 jiwa. Untuk kepala keluarga miskin (ekstrem) yang telah tamat Perguruan Tinggi paling banyak terdapat pada Kecamatan Besuki yang mencapai 15,97% atau sebanyak 204 jiwa, dan yang paling sedikit terdapat pada Kecamatan Sumbermalang yang hanya mencapai 2,51% atau sebanyak

32 jiwa. Sedangkan untuk kepala keluarga miskin (ekstrem) yang tidak/ belum sekolah paling banyak terdapat pada Kecamatan Arjasa yang mencapai 13,48% atau sebanyak 3.318 jiwa, dan yang paling sedikit terdapat pada Kecamatan Situbondo yang hanya mencapai 2,63% atau sebanyak 648 jiwa. Untuk mengetahui persebaran kepala keluarga miskin (ekstrem) di Kabupaten Situbondo berdasarkan tingkat pendidikan secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 6 Persebaran Keluarga Miskin (Ekstrem) di Kabupaten Situbondo Berdasarkan Kecamatan dan Tingkat Pendidikan

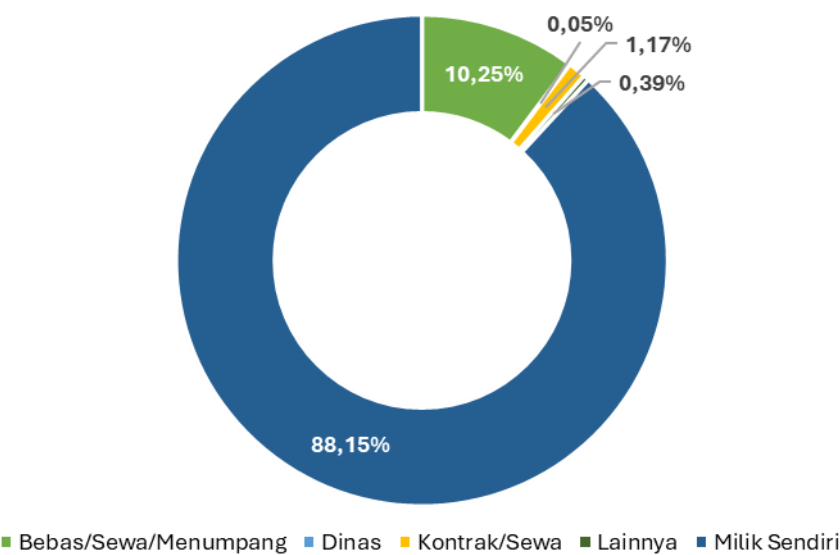
No	Kecamatan	Tingkat Pendidikan									
		Masih PT/akademi	Masih SD/ sederajat	Masih SLTA/ sederajat	Masih SLTP/ sederajat	Tamat PT/akademi	Tamat SD/ sederajat	Tamat SLTA/ sederajat	Tamat SLTP/ sederajat	Tidak tamat SD/ sederajat	Tidak/ belum sekolah
1	Arjasa	4,76%	6,81 %	3,32 %	8,28 %	3,92 %	7,37 %	3,33 %	4,40 %	9,13 %	13,48 %
2	Asembagus	6,35%	7,78 %	6,43 %	4,73 %	5,17 %	5,11 %	4,81 %	5,04 %	6,90 %	5,52%
3	Banyuglugur	3,17%	3,31 %	4,56 %	4,56 %	3,60 %	4,19 %	4,46 %	4,14 %	4,17 %	3,74%
4	Banyuputih	7,94%	7,59 %	6,22 %	6,93 %	6,03 %	7,87 %	5,02 %	7,18 %	3,90 %	6,14%
5	Besuki	20,63 %	5,06 %	11,62 %	9,12 %	15,97 %	10,02 %	15,86 %	14,26 %	4,10 %	7,94%
6	Bungatan	4,76%	6,42 %	6,43 %	7,26 %	4,62 %	4,40 %	4,88 %	4,78 %	4,98 %	4,83%
7	Jangkar	4,76%	12,65 %	4,77 %	9,63 %	4,39 %	6,71 %	4,07 %	5,87 %	8,84 %	9,52%
8	Jatibanteng	4,76%	4,09 %	3,94 %	4,05 %	3,68 %	3,94 %	3,05 %	3,95 %	8,63 %	5,07%
9	Kapongan	7,94%	7,59 %	5,60 %	5,74 %	5,64 %	7,34 %	5,13 %	5,38 %	5,72 %	5,86%
10	Kendit	1,59%	3,50 %	3,53 %	3,89 %	3,76 %	5,41 %	3,84 %	4,04 %	4,26 %	4,95%
11	Mangaran	6,35%	5,45 %	5,81 %	6,42 %	4,39 %	6,79 %	4,38 %	4,49 %	4,77 %	7,15%
12	Mlandingan	1,59%	7,78 %	5,19 %	3,89 %	6,42 %	3,30 %	3,80 %	4,31 %	6,44 %	3,58%
13	Panarukan	6,35%	4,86 %	10,79 %	6,93 %	7,52 %	6,53 %	10,68 %	9,00 %	4,41 %	3,96%
14	Panji	4,76%	4,67 %	8,09 %	7,77 %	10,42 %	8,02 %	10,83 %	8,77 %	5,34 %	7,03%
15	Situbondo	3,17%	3,50 %	5,39 %	2,53 %	6,89 %	3,72 %	8,97 %	5,84 %	2,33 %	2,63%
16	Suboh	9,52%	3,70 %	4,36 %	5,57 %	5,09 %	5,05 %	4,80 %	5,69 %	4,40 %	4,24%
17	Sumbermalang	1,59%	5,25 %	3,94 %	2,70 %	2,51 %	4,22 %	2,12 %	2,86 %	11,68 %	4,37%
Total		100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Sumber : Data P3KE Kabupaten Situbondo, 2024 (diolah)

3.8.4 Kondisi Kemiskinan Ekstrem Berdasarkan Kepemilikan Rumah, Jenis Atap dan Dinding Rumah, serta Jenis Lantai Rumah

Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian, dan juga sebagai sarana pembinaan keluarga. Rumah memiliki berbagai manfaat bagi penghuninya, di antaranya sebagai tempat berlindung, tempat berkumpul keluarga, tempat beraktivitas, identitas penghuni, tempat melepaskan lelah, tempat bergaul, tempat membina rasa kekeluargaan, serta tempat menyimpan barang berharga. Rumah sebagai bangunan merupakan bagian dari suatu permukiman yang utuh, dan tidak semata-mata merupakan tempat bernaung untuk melindungi diri dari segala bahaya, gangguan, dan pengaruh fisik belaka, melainkan juga merupakan tempat tinggal, tempat beristirahat setelah menjalani perjuangan hidup sehari-hari.

Kepemilikan rumah, jenis atap, dinding rumah, serta jenis lantai rumah keluarga miskin (ekstrem) di Kabupaten Situbondo memiliki kondisi yang beragam. Bila melihat pada status kepemilikan rumah, sebagian besar keluarga miskin (ekstrem) yaitu sebesar 88,15% atau sebanyak 122.546 keluarga telah memiliki rumah milik sendiri, sebanyak 10,25% atau 14.246 keluarga status kepemilikan rumahnya bebas/ sewa/ menumpang, sebanyak 1,17% atau 1.622 keluarga status kepemilikan rumahnya kontrak/ sewa, sebanyak 0,05% atau 74 keluarga status kepemilikan rumahnya menempati rumah dinas, dan sisanya sebanyak 0,39% atau 539 keluarga memiliki status kepemilikan rumah lainnya atau diluar kategori yang telah disebutkan.



Gambar 3. 76 Kondisi Kepemilikan Rumah Keluarga Miskin (Ekstrem) di Kabupaten Situbondo  
Sumber : Data P3KE Kabupaten Situbondo, 2024 (diolah)

Tabel 3. 7 Kondisi Kepemilikan Rumah Keluarga Miskin (Ekstrem) di Kabupaten Situbondo

No	Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga
1	Bebas/ Sewa/ Menumpang	14.246

No	Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga
2	Dinas	74
3	Kontrak/ Sewa	1.622
4	Milik Sendiri	122.546
5	Lainnya	539
Jumlah		139.027

Sumber : Data P3KE Kabupaten Situbondo, 2024 (diolah)

Melihat pada status kepemilikan rumah, jumlah keluarga miskin (ekstrem) di Kabupaten Situbondo yang banyak memiliki rumah dengan status rumah sendiri terdapat pada Kecamatan Besuki yaitu sebanyak 11.457 keluarga atau 9,35%, sedangkan yang paling sedikit terdapat pada Kecamatan Banyuglugur sebanyak 4.527 keluarga atau sebesar 3,69%. Untuk keluarga miskin (ekstrem) yang memiliki rumah dengan status bebas/ sewa/ menumpang paling banyak terdapat pada Kecamatan Besuki yaitu sebanyak 1.818 keluarga atau 12,76%, sedangkan yang paling sedikit terdapat pada Kecamatan Jangkar sebanyak 305 jiwa atau sebesar 2,14%. Untuk mengetahui persebaran keluarga miskin (ekstrem) di Kabupaten Situbondo berdasarkan kepemilikan rumah secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

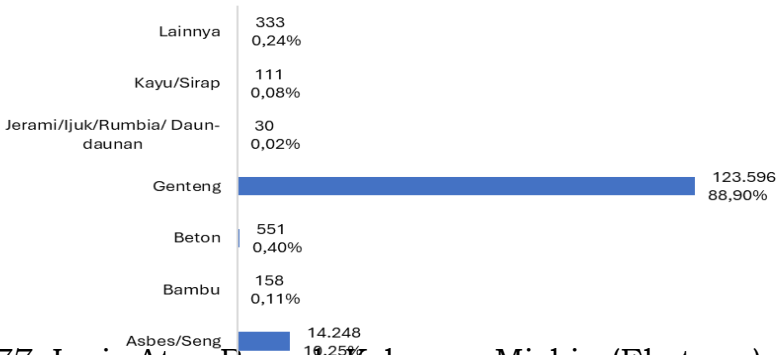
Tabel 3. 8 Kondisi Kepemilikan Rumah Keluarga Miskin (Ekstrem) di Kabupaten Situbondo Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Kepemilikan Rumah/ Keluarga				
		Bebas/ Sewa/ Menumpang	Dinas	Kontrak/ Sewa	Milik Sendiri	Lainnya
1	Arjasa	5,37%	1,35%	1,79%	8,27%	4,64%
2	Asembagus	2,89%	8,11%	5,80%	5,76%	5,75%
3	Banyuglugur	8,16%	2,70%	2,16%	3,69%	2,23%
4	Banyuputih	6,88%	0,00%	5,12%	6,38%	6,68%
5	Besuki	12,76%	1,35%	19,48%	9,35%	18,18%
6	Bungatan	3,62%	2,70%	1,60%	4,88%	3,53%
7	Jangkar	2,14%	0,00%	1,23%	7,87%	0,93%
8	Jatibanteng	4,14%	0,00%	0,06%	5,02%	2,23%
9	Kapongan	3,47%	1,35%	2,40%	6,63%	9,09%
10	Kendit	3,94%	8,11%	1,11%	4,89%	2,60%
11	Mangaran	4,78%	2,70%	1,29%	6,12%	1,48%
12	Mlandingan	4,99%	1,35%	0,62%	4,10%	1,48%
13	Panarukan	10,53%	45,95%	14,92%	5,85%	19,11%
14	Panji	7,94%	14,86%	22,63%	7,55%	16,33%
15	Situbondo	5,69%	8,11%	18,19%	3,83%	2,78%
16	Suboh	6,53%	1,35%	1,11%	4,70%	1,67%
17	Sumbermalang	6,18%	0,00%	0,49%	5,09%	1,30%

N o	Kecamatan	Kepemilikan Rumah/ Keluarga				
		Bebas/ Sewa/ Menumpang	Dinas	Kontra k/ Sewa	Milik Sendiri	Lainnya
	Total	100,00%	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Sumber : Data P3KE Kabupaten Situbondo, 2024 (diolah)

Kondisi atap rumah yang ditempati oleh keluarga miskin (ekstrem) di Kabupaten Situbondo sangat beragam, yaitu berupa asbes/ seng, bambu, beton, genteng, jerami/ ijuk/ rumbia/ daun-daunan, kayu/ sirap, dan lainnya. Namun rumah yang ditempati oleh mayoritas keluarga miskin (ekstrem) di Kabupaten Situbondo memiliki atap berupa genteng, yaitu sebanyak 123.596 keluarga atau sebesar 88,90%. Sedangkan rumah dengan atap berupa asbes/ seng terdapat pada rumah yang ditempati oleh 14.248 keluarga miskin atau sebesar 10,2589% dari keseluruhan keluarga miskin (ekstrem) di Kabupaten Situbondo. Untuk mengetahui secara lebih jelas terkait dengan persentase keluarga miskin (ekstrem) di Kabupaten Situbondo berdasarkan kondisi jenis atap rumah dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 3. 77 Jenis Atap Rumah Keluarga Miskin (Ekstrem) di Kabupaten Situbondo

Sumber : Data P3KE Kabupaten Situbondo, 2024 (diolah)

Melihat pada jenis atap yang terdapat pada rumah keluarga miskin (ekstrem) di kabupaten Situbondo dapat diketahui bahwa sebanyak 32,40% atau 45.051 rumah memiliki kondisi bagus/ kualitas tinggi, sebanyak 35.106 rumah atau sebesar 25,25% memiliki atap dengan kondisi bagus/ kualitas rendah. Sedangkan sisanya sebanyak 58.870 keluarga atau sebesar 42,34% tidak menjawab. Berikut disajikan data mengenai kualitas atap rumah keluarga miskin (ekstrem) di Kabupaten Situbondo berdasarkan masing-masing jenis atap yang dimiliki.

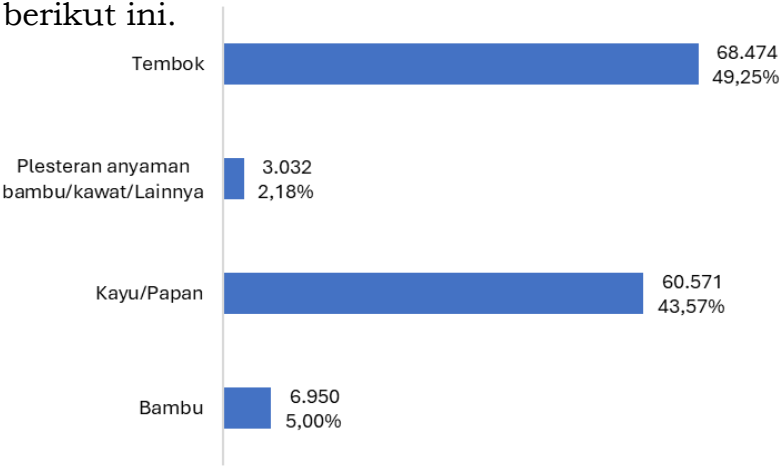
Tabel 3. 9 Jenis dan Kualitas Atap Rumah Keluarga Miskin (Ekstrem) di Kabupaten Situbondo

No	Jenis Atap	Kualitas Atap/ Keluarga			Jumlah
		Bagus/ Kualitas Rendah	Bagus/ Kualitas Tinggi	Tidak Menjawab	
1	Asbes/Seng	4.431	3.322	6.495	14.248
2	Bambu	62	47	49	158
3	Beton	38	107	406	551

No	Jenis Atap	Kualitas Atap/ Keluarga			Jumlah
4	Genteng	30.290	41.575	51.731	123.596
5	Jerami/ Ijuk/ Rumbia/ Daun-daunan	12	-	18	30
6	Kayu/ Sirap	34	-	77	111
7	Lainnya	239	-	94	333
Total		35.106	45.051	58.870	139.027
Persentase		25,25%	32,40%	42,34%	100,00%

Sumber : Data P3KE Kabupaten Situbondo, 2024 (diolah)

Kondisi dinding rumah yang ditempati oleh keluarga miskin (ekstrem) di Kabupaten Situbondo juga sangat beragam, yaitu berupa bambu, kayu/ papan, plesteran anyaman bambu/ kawat/ lainnya, serta tembok. Rumah yang ditempati oleh mayoritas keluarga miskin (ekstrem) di Kabupaten Situbondo memiliki dinding berupa tembok, yaitu sebanyak 68.474 keluarga atau sebesar 49,25%. Rumah dengan dinding berupa kayu/ papan terdapat pada rumah yang ditempati oleh 60.571 keluarga miskin atau sebesar 43,57%. Rumah dengan dinding berupa bambu terdapat pada rumah yang ditempati oleh 6.950 keluarga miskin atau sebesar 5,00%. Sedangkan rumah dengan dinding berupa plesteran anyaman bambu/ kawat/ lainnya terdapat pada rumah yang ditempati oleh 3.032 keluarga miskin atau sebesar 2,18% dari keseluruhan keluarga miskin (ekstrem) di Kabupaten Situbondo. Berikut disajikan data terkait dengan persentase keluarga miskin (ekstrem) di Kabupaten Situbondo berdasarkan kondisi jenis dinding rumah dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 3. 78 Jenis Dinding Rumah Keluarga Miskin (Ekstrem) di Kabupaten Situbondo  
Sumber : Data P3KE Kabupaten Situbondo, 2024 (diolah)

Melihat pada jenis dinding yang terdapat pada rumah keluarga miskin (ekstrem) di kabupaten Situbondo dapat diketahui bahwa sebanyak 31,07% atau 43.192 rumah memiliki kondisi bagus/ kualitas tinggi, sebanyak 36.965 rumah atau sebesar 26,59% memiliki atap dengan kondisi bagus/ kualitas rendah. Sedangkan sisanya sebanyak 58.870 keluarga atau sebesar 42,34% tidak menjawab. Berikut disajikan data mengenai kualitas dinding rumah

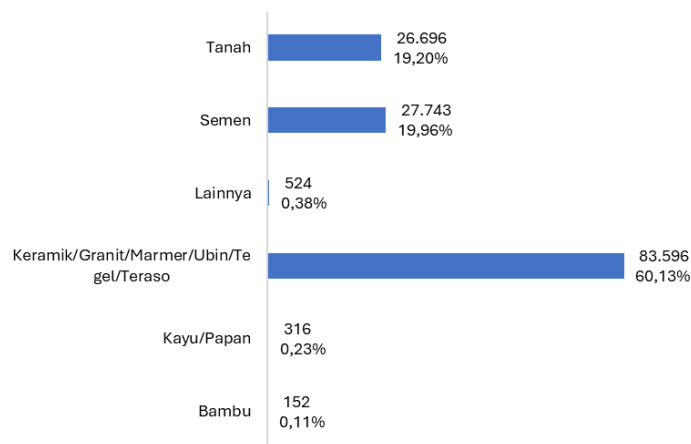
keluarga miskin (ekstrem) di Kabupaten Situbondo berdasarkan masing-masing jenis dinding yang dimiliki.

Tabel 3. 10 Jenis dan Kualitas Dinding Rumah Keluarga Miskin (Ekstrem) di Kabupaten Situbondo

No	Jenis Dinding	Kualitas Dinding/ Keluarga			Jumlah
		Bagus/ Kualitas Rendah	Bagus/ Kualitas Tinggi	Tidak Menjawab	
1	Bambu	3.645	499	2.806	6.950
2	Kayu/ Papan	19.588	13.824	27.159	60.571
3	Plesteran anyaman bambu/ kawat/ Lainnya	1.063	271	1.698	3.032
4	Tembok	12.669	28.598	27.207	68.474
Total		36.965	43.192	58.870	139.027
Persentase		26,59%	31,07%	42,34%	100,00%

Sumber : Data P3KE Kabupaten Situbondo, 2024 (diolah)

Kondisi lantai rumah yang ditempati oleh keluarga miskin (ekstrem) di Kabupaten Situbondo juga sangat beragam, yaitu berupa bambu, kayu/ papan, keramik/ granit/marmer/ ubin/ tegel/ teraso, semen, tanah, dan lainnya. Adapun rumah yang ditempati oleh sebanyak 83.596 keluarga atau sebesar 60,13% keluarga miskin (ekstrem) di Kabupaten Situbondo lantainya berupa keramik/ granit/ marmer/ ubin/ tegel/ teraso, rumah yang ditempati oleh sebanyak 27.743 keluarga atau sebesar 19,96% keluarga miskin (ekstrem) lantainya berupa semen. Rumah yang ditempati oleh sebanyak 26.696 keluarga atau sebesar 19,20% keluarga miskin (ekstrem) lantainya berupa tanah. Sedangkan sisanya berupa kayu/ papan, bambu, dan lainnya. Sehingga dengan demikian mayoritas keluarga miskin (ekstrem) di Kabupaten Situbondo telah menempati rumah dengan jenis lantai berupa keramik/ granit/ marmer/ ubin/ tegel/ teraso dan semen. Untuk mengetahui secara lebih jelas terkait dengan persentase keluarga miskin (ekstrem) di Kabupaten Situbondo berdasarkan kondisi jenis lantai rumah dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 3. 79 Jenis Lantai Rumah Keluarga Miskin (Ekstrem) di Kabupaten Situbondo  
Sumber : Data P3KE Kabupaten Situbondo, 2024 (diolah)

Melihat pada jenis lantai yang terdapat pada rumah keluarga miskin (ekstrem) di kabupaten Situbondo dapat diketahui bahwa sebanyak 28,36% atau 39.422 rumah memiliki kondisi bagus/ kualitas tinggi, sebanyak 40.735 rumah atau sebesar 29,30% memiliki lantai dengan kondisi bagus/ kualitas rendah. Sedangkan sisanya sebanyak 58.870 keluarga atau sebesar 42,34% tidak menjawab. Berikut disajikan data mengenai kualitas lantai rumah keluarga miskin (ekstrem) di Kabupaten Situbondo berdasarkan masing-masing jenis lantai yang dimiliki.

Tabel 3. 11 Jenis dan Kualitas Lantai Rumah Keluarga Miskin (Ekstrem) di Kabupaten Situbondo

No	Jenis Lantai	Kualitas Lantai/ Keluarga			Jumlah
		Bagus/ Kualitas Rendah	Bagus/ Kualitas Tinggi	Tidak Menjawab	
1	Bambu	110	10	32	152
2	Kayu/ Papan	107	110	99	316
3	Keramik/ Granit/Marmer/ Ubin/ Tegel/ Teraso	15.781	35.059	32.756	83.596
4	Semen	10.246	4.243	13.254	27.743
5	Tanah	14.135	-	12.561	26.696
6	Lainnya	356	-	168	524
Total		40.735	39.422	58.870	139.027
Persentase		29,30%	28,36%	42,34%	100,00%

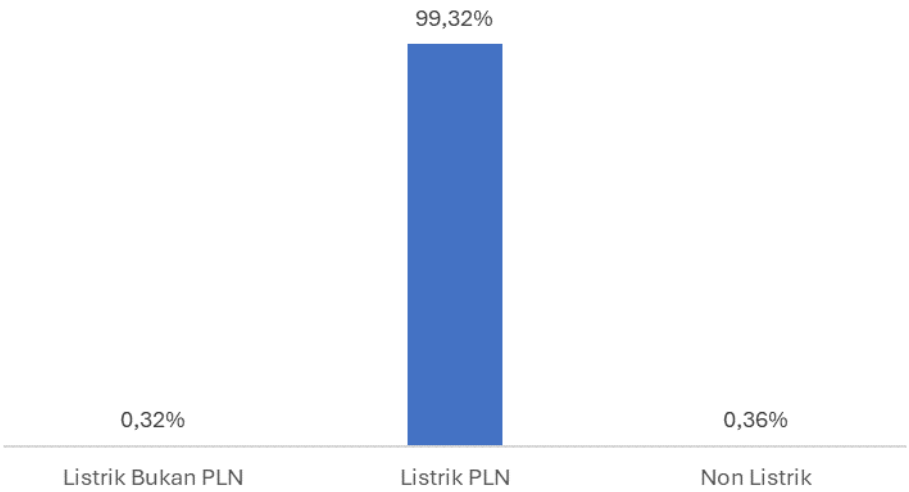
Sumber : Data P3KE Kabupaten Situbondo, 2024 (diolah)

3.8.5 Kondisi Kemiskinan Ekstrem Berdasarkan Sumber Penerangan, Bahan Bakar Memasak

Sumber penerangan dan bahan bakar merupakan kebutuhan penduduk dalam kehidupan setiap hari, dimana penerangan merupakan sumber cahaya yang menyinari suatu tempat / ruangan yang membantu manusia untuk melihat, bekerja, dan beraktivitas lainnya. Begitupun dengan bahan bakar yang digunakan oleh penduduk untuk memasak/ mengolah makanan dan minuman. Kebutuhan akan penerangan dan bahan bakar juga dirasakan oleh keluarga miskin (ekstrem) di Kabupaten Situbondo.

Untuk sumber penerangan saat ini yang digunakan oleh keluarga miskin (ekstrem) di Kabupaten Situbondo sangat beragam, yaitu : listrik PLN (Listrik yang diperoleh dari jaringan PLN), listrik bukan PLN (Listrik yang diperoleh bukan dari jaringan PLN), dan lainnya. Berdasarkan data yang diperoleh dapat diketahui bahwa sebagian besar yaitu sebanyak 138.082 keluarga atau 99,32% keluarga miskin (ekstrem) di Kabupaten Situbondo

telah menggunakan listrik yang berasal dari PLN. Selain itu sebanyak 450 keluarga atau 0,32% keluarga miskin (ekstrem) di Kabupaten Situbondo telah menggunakan listrik pribadi (Listrik bukan PLN). Sedangkan sisanya sebanyak 495 keluarga atau 10,35% keluarga miskin (ekstrem) di Kabupaten Situbondo belum menggunakan listrik (non listrik), dimana keberadaan keluarga miskin (ekstrem) yang belum menggunakan listrik (non listrik) tersebar pada masing-masing kecamatan dengan jumlah keluarga terbanyak terdapat di Kecamatan Arjasa yang mencapai 139 keluarga, Kecamatan Banyuputih sebanyak 50 keluarga, Kecamatan Jangkar sebanyak 41 keluarga, Kecamatan Mangaran sebanyak 37 keluarga, Kecamatan Sumbermalang sebanyak 33 keluarga, serta kecamatan lainnya yang berada dibawah 30 keluarga. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sumber penerangan mayoritas atau 99,64% keluarga miskin (ekstrem) di Kabupaten Situbondo telah menggunakan listrik. Berikut disajikan data terkait dengan sumber penerangan keluarga miskin (ekstrem) di Kabupaten Situbondo.



Gambar 3. 80 Sumber Penerangan Keluarga Miskin (Ekstrem) di Kabupaten Situbondo  
Sumber : Data P3KE Kabupaten Situbondo, 2024 (diolah)

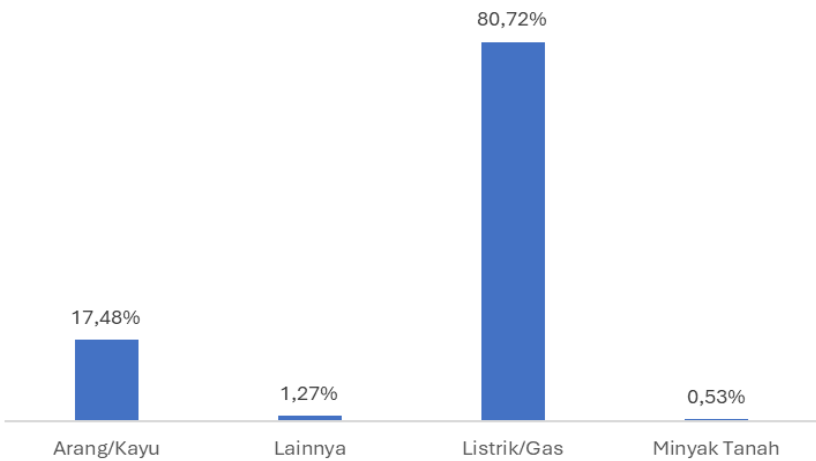
Bila melihat pada daya listrik yang terpasang untuk keseluruhan sumber penerangan dapat terlihat bahwa sebagian besar keluarga miskin (ekstrem) di Kabupaten Situbondo memiliki daya terpasang sebesar kurang dari sama dengan 900 watt ( $\leq 900$  watt), yaitu sebesar 78,48% atau sebanyak 109.110 keluarga. Sedangkan keluarga yang memiliki daya terpasang sebesar lebih dari 900 watt ( $> 900$  watt) sebesar 3,99% atau sebanyak 5.548 keluarga. Sedangkan sisanya sebanyak 17,53% atau 24.369 keluarga tidak memberikan jawaban. Untuk mengetahui secara lebih jelas terkait dengan Daya Listrik Terpasang pada masing-masing sumber penerangan keluarga miskin (ekstrem) di Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 12 Daya Listrik Terpasang Sumber Penerangan Keluarga Miskin (Ekstrem) di Kabupaten Situbondo

No	Sumber Penerangan	Daya Listrik Terpasang			Jumlah
		=< 900 watt	> 900 watt	Tidak Menjawab	
1	Listrik Bukan PLN	20	4	426	450
2	Listrik PLN	109.056	5.544	23.482	138.082
3	Non Listrik	34	0	461	495
Total		109.110	5.548	24.369	139.027
Persentase		78,48%	3,99%	17,53%	100,00%

Sumber : Data P3KE Kabupaten Situbondo, 2024 (diolah)

Bahan bakar yang digunakan untuk memasak oleh keluarga miskin (ekstrem) di Kabupaten Situbondo saat ini sangat beragam, yaitu berasal dari Listrik/ Gas, Arang/ Kayu, Minyak Tanah, dan Lainnya. Sebagian besar yaitu sebanyak 112.216 keluarga atau 80,72% keluarga miskin (ekstrem) di Kabupaten Situbondo telah menggunakan listrik/ gas sebagai bahan bakar untuk memasak. Selain itu sebanyak 24.302 keluarga atau 17,48% keluarga miskin (ekstrem) di Kabupaten Situbondo masih menggunakan arang/ kayu sebagai bahan bakar memasak. Sedangkan sebanyak 743 keluarga atau 0,53% keluarga miskin (ekstrem) di Kabupaten Situbondo masih menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar untuk memasak, dan sisanya sebanyak 1,27% keluarga miskin (ekstrem) di Kabupaten Situbondo atau sebanyak 1.766 keluarga menggunakan bahan bakar lainnya. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bahan bakar yang telah digunakan mayoritas penduduk miskin (ekstrem) di Kabupaten Situbondo untuk memasak adalah listrik/ gas. Berikut disajikan data terkait dengan jenis bahan bakar yang digunakan untuk memasak oleh keluarga miskin (ekstrem) di Kabupaten Situbondo.

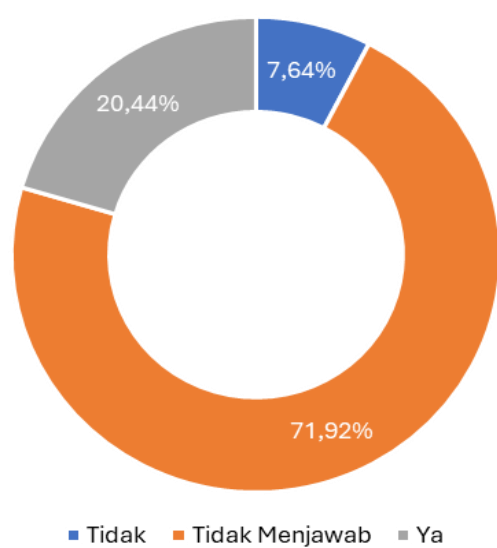


Gambar 3. 81 Bahan Bakar Memasak Keluarga Miskin (Ekstrem) di Kabupaten Situbondo

Sumber : Data P3KE Kabupaten Situbondo, 2024 (diolah)

3.8.6 Kondisi Kemiskinan Ekstrem Berdasarkan Kepemilikan Simpanan Uang/ Perhiasan/ Ternak/ Lainnya

Aset adalah sumber-sumber daya bernilai ekonomi milik pribadi/ perusahaan dan diharapkan bisa menghasilkan keuntungan di masa mendatang. Simpanan uang/ perhiasan/ ternak/ lainnya merupakan bagian dari aset yang dimiliki oleh penduduk, tak terkecuali penduduk miskin. Berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang telah diperoleh dapat diketahui bahwa penduduk miskin (ekstrem) di Kabupaten Situbondo tidak seluruhnya tidak memiliki aset, dari 139.027 keluarga sebanyak 28.413 keluarga atau sebesar 20,4417% telah memiliki aset berupa simpanan uang/ perhiasan/ ternak/ lainnya, sedangkan sebanyak 10.623 keluarga atau sebesar 7,64% tidak memiliki aset, dan sisanya sebanyak 99.991 keluarga atau sebesar 71,92% tidak memberikan jawaban. Aset merupakan salah satu hal yang penting untuk dimiliki oleh keluarga miskin (ekstrem), dimana kepemilikan aset pada dasarnya dapat digunakan oleh penduduk miskin (ekstrem) untuk motif berjaga-jaga, artinya keberadaan aset tersebut suatu saat dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya mendesak, selain itu keberadaan aset juga dapat digunakan untuk melakukan investasi dalam rangka meningkatkan nilai ekonomi dan meningkatkan pendapatan bagi keluarga miskin (ekstrem) di Kabupaten Situbondo.



Gambar 3. 82 Kepemilikan Simpanan Uang/ Perhiasan/ Ternak/ Lainnya Keluarga Miskin (Ekstrem) di Kabupaten Situbondo  
Sumber : Data P3KE Kabupaten Situbondo, 2024 (diolah)

Kepemilikan aset, seperti simpanan uang/ perhiasan/ ternak/ lainnya banyak dimiliki oleh keluarga miskin (ekstrem) di Kabupaten Situbondo, khususnya Kecamatan Arjasa, dimana dari 10.960 keluarga miskin (ekstrem) yang berada di kecamatan tersebut, sebanyak 51,78% nya atau 5.675 keluarga telah memiliki simpanan uang/ perhiasan/ ternak/ lainnya, sedangkan sisanya sebesar 12,25% atau 1.343 keluarga tidak memiliki

simpanan, dan sisanya sebanyak 3.942 keluarga atau sebesar 35,97% tidak menjawab. Hal ini berbeda dengan kondisi yang terdapat pada Kecamatan Sumbermalang, dimana dari keseluruhan keluarga miskin (ekstrem) yang berada di kecamatan tersebut yang mencapai 7.133 keluarga, hanya sebanyak 4,85% atau 346 keluarga yang telah memiliki simpanan uang/ perhiasan/ ternak/ lainnya, sedangkan sebesar 2,16% atau 154 keluarga miskin (ekstrem) tidak memiliki simpanan uang/ perhiasan/ ternak/ lainnya, dan sisanya sebanyak 6.633 keluarga atau sebesar 92,99% tidak menjawab. Untuk mengetahui persebaran keluarga miskin (ekstrem) di Kabupaten Situbondo berdasarkan kepemilikan simpanan uang/ perhiasan/ ternak/ lainnya pada masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 13 Kondisi Kepemilikan Simpanan Uang/ Perhiasan/ Ternak/ Lainnya Keluarga Miskin (Ekstrem) di Kabupaten Situbondo Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Kepemilikan Simpanan Uang/ Perhiasan/ Ternak/ Lainnya			Jumlah
		Ya	Tidak	Tidak Menjawab	
1	Arjasa	5.675	1.343	3.942	10.960
2	Asembagus	669	259	6.672	7.600
3	Banyuglugur	1.192	223	4.323	5.738
4	Banyuputih	1.208	268	7.439	8.915
5	Besuki	2.290	550	10.850	13.690
6	Bungatan	677	927	4.943	6.547
7	Jangkar	1.495	390	8.088	9.973
8	Jatibanteng	871	377	5.512	6.760
9	Kapongan	2.413	712	5.589	8.714
10	Kendit	1.106	609	4.873	6.588
11	Mangaran	787	272	7.156	8.215
12	Mlandingan	4.043	1.708	-	5.751
13	Panarukan	1.146	443	7.455	9.044
14	Panji	2.533	1.712	6.608	10.853
15	Situbondo	858	372	4.594	5.824
16	Suboh	1.104	304	5.314	6.722
17	Sumbermalang	346	154	6.633	7.133
Total		28.413	10.623	99.991	139.027

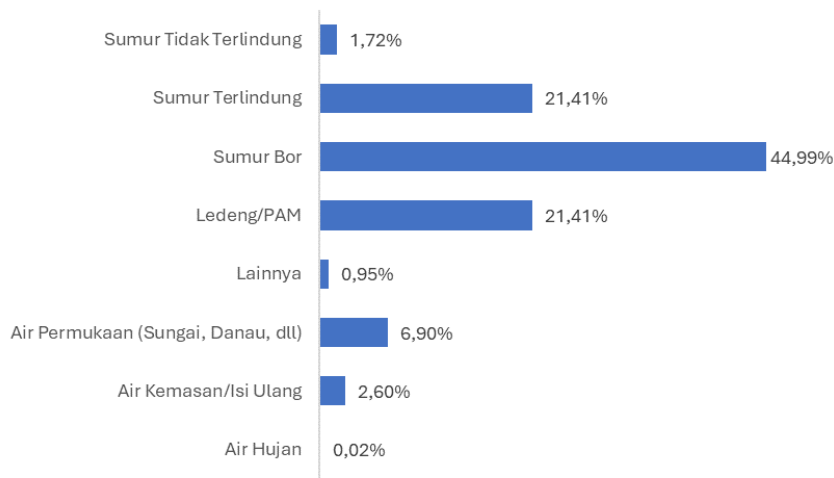
Sumber : Data P3KE Kabupaten Situbondo, 2024 (diolah)

3.8.7 Kondisi Kemiskinan Ekstrem Berdasarkan Sumber Air Minum dan Kepemilikan Fasilitas Buang Air

Air bersih merupakan kebutuhan dasar bagi manusia, sehingga ketersediaannya amatlah penting. Dalam keseharian air dimanfaatkan tidak hanya terbatas untuk keperluan rumah tangga, tetapi juga untuk fasilitas umum, sosial dan ekonomi. Kebutuhan air bersih terus meningkat seiring dengan perkembangan populasi manusia. Melalui pertumbuhan penduduk,

terjadi pergerakan dinamik dalam masyarakat baik dalam segi kepadatan, sosial maupun ekonomi, sehingga kebutuhan dan permintaan air bersih pun akan terus meningkat.

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, keluarga miskin (ekstrem) di Kabupaten Situbondo memerlukan air minum yang diperoleh dari berbagai sumber. Saat ini air minum yang digunakan oleh keluarga miskin (ekstrem) di Kabupaten Situbondo berasal dari Air Hujan, Air Kemasan/ Isi Ulang, Air Permukaan (Sungai, Danau, dll), Ledeng/ PAM, Sumur Bor, Sumur Terlindung, Sumur Tidak Terlindung, dan lainnya. Melihat pada data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dapat diperoleh informasi bahwa sebagian besar, yaitu sebanyak 62.549 keluarga atau 44,99% keluarga miskin (ekstrem) di Kabupaten Situbondo sumber air minumnya diperoleh dari sumur bor. Pada urutan selanjutnya, sebanyak 29.767 keluarga atau 21,41% keluarga miskin (ekstrem) di Kabupaten Situbondo sumber air minumnya diperoleh dari ledeng/ PAM. Sebanyak 29.766 keluarga atau 21,41% keluarga miskin (ekstrem) di Kabupaten Situbondo sumber air minumnya diperoleh dari sumur terlindung. Sebanyak 9.586 keluarga atau 6,90% keluarga miskin (ekstrem) di Kabupaten Situbondo sumber air minumnya diperoleh dari Air Permukaan (Sungai, Danau, dll). Sedangkan kurang dari 6% keluarga miskin (ekstrem) di Kabupaten Situbondo sumber air minumnya berasal dari Air Kemasan/ Isi Ulang, Sumur Tidak Terlindung, Air Hujan, dan lainnya. Sehingga dengan demikian terlihat bahwa mayoritas keluarga miskin (ekstrem) di Kabupaten Situbondo memperoleh sumber air minum berasal dari sumur bor, sumur terlindung dan ledeng/ PAM. Untuk mengetahui kondisi penggunaan sumber air minum keluarga miskin (ekstrem) di Kabupaten Situbondo secara keseluruhan dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 3. 83 Sumber Air Minum Keluarga Miskin (Ekstrem) di Kabupaten Situbondo

Sumber : Data P3KE Kabupaten Situbondo, 2024 (diolah)

Keberadaan keluarga miskin (ekstrem) di Kabupaten Situbondo dengan sumber air minum berasal dari sumur bor tersebar pada berbagai kecamatan, dimana kecamatan yang penduduk miskinnya paling banyak menggunakan sumber air minum dari sumur bor terdapat pada Kecamatan Kapongan dengan persentase sebesar 12,52% atau sebanyak 7.832 keluarga, sedangkan kecamatan yang penduduk miskinnya paling sedikit menggunakan sumber air

minum berasal dari sumur bor terdapat pada Kecamatan Sumbermalang dengan persentase sebesar 0,02% atau sebanyak 11 keluarga. Sedangkan keberadaan keluarga miskin (ekstrem) di Kabupaten Situbondo yang menggunakan sumber air minum dari ledeng/ PAM paling banyak terdapat pada Kecamatan Sumbermalang dengan persentase sebesar 13,55% atau sebanyak 4.032 keluarga, sedangkan kecamatan yang keluarga miskinnya paling sedikit menggunakan sumber air minum berasal dari ledeng/ PAM terdapat pada Kecamatan Bungatan yang hanya sebanyak 250 keluarga. Untuk mengetahui penggunaan sumber air minum keluarga miskin (ekstrem) pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Situbondo secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 14 Sumber Air Minum Keluarga Miskin (Ekstrem) di Kabupaten Situbondo Berdasarkan Kecamatan

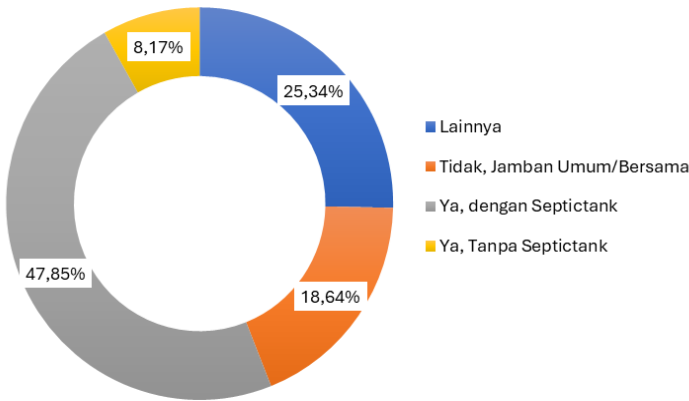
		Sumber Air Minum							
No	Kecamatan	Air							
		Air Hujan	Air Kemasaan/ Isi Ulang	Permukaan (Sungai, Danau, dll)	Lainnya	Ledeng/ PAM	Sumur Bor	Sumur Terlindung	Sumur Tidak Terlindung
1	Arjasa	4	134	1.718	122	546	5.298	2.852	286
2	Asembagus	0	1.174	203	15	1.876	1.280	2.964	88
3	Banyuglugur	0	84	600	14	818	2.929	1.054	239
4	Banyuputih	3	293	64	61	736	3.752	3.697	309
5	Besuki	3	121	44	187	967	7.832	4.408	128
6	Bungatan	1	131	473	138	250	2.863	2.593	98
7	Jangkar	3	85	678	46	2.010	5.805	1.149	197
8	Jatibanteng	1	30	2.086	155	2.109	575	1.438	366
9	Kapongan	0	31	94	72	464	7.319	686	48
10	Kendit	0	51	385	66	2.188	1.946	1.863	89
11	Mangaran	2	80	124	120	859	6.284	715	31
12	Mlandingan	5	58	718	117	1.236	3.022	551	44
13	Panarukan	1	274	152	103	3.141	4.384	941	48
14	Panji	8	614	38	48	3.176	5.236	1.504	229
15	Situbondo	0	417	6	12	3.548	1.101	707	33
16	Suboh	0	36	303	13	1.811	2.912	1.526	121
17	Sumbermalang	2	5	1.900	34	4.032	11	1.118	31
Total		33	3.618	9586	1.323	29.767	62.549	29.766	2.385

Sumber : Data P3KE Kabupaten Situbondo, 2024 (diolah)

Selain kebutuhan terkait dengan air bersih, dalam rangka menjaga hidup bersih dan sehat diperlukan adanya fasilitas buang air. Kepemilikan fasilitas buang air besar merupakan ketersediaan jamban/ kloset yang dapat digunakan oleh rumah tangga dan dirinci menjadi memiliki fasilitas buang air besar dan tidak memiliki fasilitas buang air besar. Bila melihat pada kondisi keluarga miskin (ekstrem) di Kabupaten Situbondo dapat diketahui bahwa

sebagian besar atau sebanyak 47,85% atau sebanyak 66.526 keluarga memiliki fasilitas buang air dengan saptic tank, dimana sebagian besar penduduk yang memiliki dan menggunakannya terdapat pada Kecamatan Besuki yang mencapai 11,54% atau sebanyak 7.674 keluarga, sedangkan penduduk yang paling sedikit menggunakannya terdapat pada Kecamatan Jatibanteng yang mencapai 2,18% atau sebanyak 1.453 keluarga. Selain memiliki fasilitas buang air dengan septictank, sebanyak 8,17% atau sebanyak 11.364 keluarga miskin (ekstrem) memiliki fasilitas buang air, tanpa septictank. Adapun keluarga miskin (ekstrem) di Kabupaten Situbondo yang banyak menggunakan fasilitas buang air, tanpa septictank terdapat pada Kecamatan Jangkar sebanyak 1.535 keluarga atau 13,51%, sedangkan penduduk yang paling sedikit menggunakan fasilitas buang air, tanpa septictank terdapat pada Kecamatan Mlandingan yang mencapai 1,06% atau sebanyak 121 keluarga. Selanjutnya dari keseluruhan keluarga miskin (ekstrem) di Kabupaten Situbondo, sebesar 18,64% atau sebanyak 25.908 keluarga memiliki fasilitas buang air melalui jamban umum/ bersama. Dimana kecamatan yang kondisinya paling banyak terdapat pada Kecamatan Sumbermalang yang mencapai 3.624 keluarga atau mencapai 13,99%, dan kecamatan yang kondisinya paling sedikit terdapat pada Kecamatan Situbondo yang mencapai 517 keluarga atau mencapai 2,00%. Sedangkan untuk lainnya tercatat sebanyak 25,34% atau sebanyak 35.229 keluarga.

Untuk mengetahui kondisi kepemilikan fasilitas buang air keluarga miskin (ekstrem) di Kabupaten Situbondo beserta persebarannya pada masing-masing kecamatan secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut ini.



Gambar 3. 84 Kepemilikan Fasilitas Buang Air Besar Keluarga Miskin (Ekstrem) di Kabupaten Situbondo  
Sumber : Data P3KE Kabupaten Situbondo, 2024 (diolah)

Tabel 3. 15 Kepemilikan Fasilitas Buang Air Besar Keluarga Miskin (Ekstrem) di Kabupaten Situbondo Berdasarkan Kecamatan

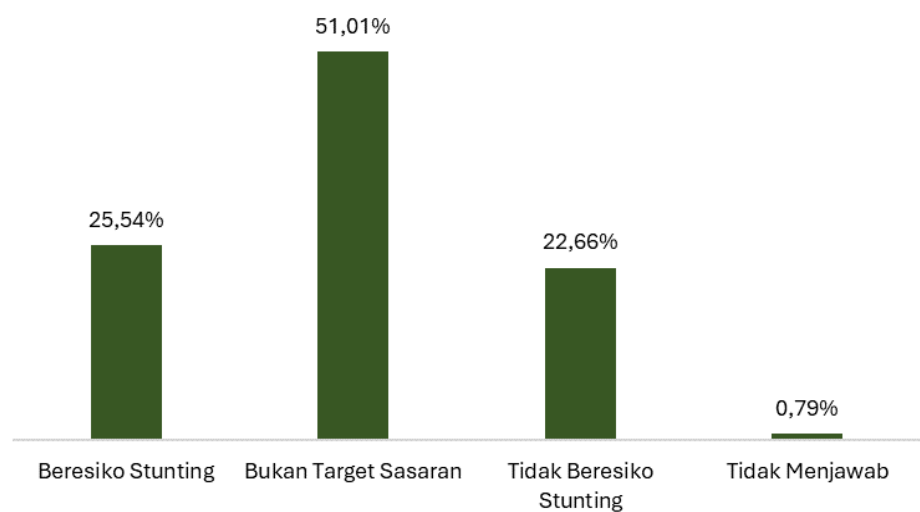
No	Kecamatan	Kepemilikan Fasilitas Buang Air Besar			
		Ya, dengan Septictank	Ya, Tanpa Septictank	Tidak, Jamban Umum/ Bersama	Lainnya
1	Arjasa	4.160	1.181	2.900	2.719
2	Asembagus	4.978	454	1.035	1.133
3	Banyuglugur	2.637	336	980	1.785

No	Kecamatan	Kepemilikan Fasilitas Buang Air Besar			
4	Banyuputih	4.869	935	1.456	1.655
5	Besuki	7.674	542	1.549	3.925
6	Bungatan	3.402	518	708	1.919
7	Jangkar	3.588	1.535	1.699	3.151
8	Jatibanteng	1.453	384	1.860	3.063
9	Kapongan	3.206	328	1.570	3.610
10	Kendit	2.838	646	1.082	2.022
11	Mangaran	4.085	1.281	669	2.180
12	Mlandingan	1.464	121	2.228	1.938
13	Panarukan	6.181	459	1.327	1.077
14	Panji	7.301	686	1.352	1.514
15	Situbondo	4.511	232	517	564
16	Suboh	2.589	381	1.352	2.400
17	Sumbermalang	1.590	1.345	3.624	574
<b>Total</b>		<b>66.526</b>	<b>11.364</b>	<b>25.908</b>	<b>35.229</b>

Sumber : Data P3KE Kabupaten Situbondo, 2024 (diolah)

### 3.8.8 Kondisi Kemiskinan Ekstrem Berdasarkan Resiko Stunting

Keluarga miskin ekstrem memiliki potensi stunting yang besar, dimana penyebab stunting adalah multifaktor dan multidimensional. Kegagalan tumbuh kembang pada janin dan balita pada seribu hari pertama kehidupan memang terpengaruh langsung akibat kekurangan gizi kronis. Akan tetapi di balik persoalan gizi itu, terdapat latar belakang sosial budaya politik yang memberikan kontribusi penting. Permasalahan stunting dan masalah kemiskinan terlebih kemiskinan ekstrem merupakan permasalahan serius dalam pembangunan sumber daya manusia. Dalam menanggulangi permasalahan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis dan komprehensif dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha sektor swasta, akademisi dan masyarakat luas. Bila melihat pada data P3KE yang telah dirilis dapat diketahui bahwa dari jumlah keluarga miskin (ekstrem) yang mencapai 139.027, sebanyak 25,54% atau sebanyak 35.511 keluarga beresiko stunting . Sedangkan sebanyak 31.502 keluarga atau sebesar 22,66% tidak beresiko stunting.



Gambar 3. 85 Resiko Stunting pada Keluarga Miskin (Ekstrem) di Kabupaten Situbondo  
Sumber : Data P3KE Kabupaten Situbondo, 2024 (diolah)

Selain itu sebanyak 70.921 keluarga atau sebesar 51,01% bukan menjadi target sasaran, dan sisanya sebanyak 0,79% atau sebanyak 1.093 keluarga tidak menjawab. Keluarga miskin (ekstrem) di Kabupaten Situbondo yang beresiko stunting tersebar di seluruh kecamatan, dimana rumah tangga beresiko stunting terbanyak terdapat pada Kecamatan Arjasa yang mencapai sebanyak 4.157 rumah tangga. Sedangkan rumah tangga beresiko stunting paling sedikit terdapat pada Kecamatan Situbondo yang mencapai sebanyak 661 rumah tangga. Untuk mengetahui jumlah keluarga miskin (ekstrem) yang memiliki resiko stunting pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 16 Resiko Stunting pada Keluarga Miskin (Ekstrem) di Kabupaten Situbondo Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Resiko Stunting			
		Beresiko Stunting	Bukan Target Sasaran	Tidak Beresiko Stunting	Tidak Menjawab
1	Arjasa	4.157	4.873	1.751	179
2	Asembagus	1.139	4.260	2.018	183
3	Banyuglugur	1.471	2.888	1.379	-
4	Banyuputih	2.231	4.279	2.405	-
5	Besuki	3.250	6.337	4.103	-
6	Bungatan	1.338	3.509	1.700	-
7	Jangkar	3.086	5.093	1.794	-
8	Jatibanteng	2.484	3.396	806	74
9	Kapongan	2.459	4.564	1.691	-
10	Kendit	1.653	3.559	1.376	-
11	Mangaran	1.423	4.478	2.242	72
12	Mlandingan	2.325	2.628	798	-
13	Panarukan	1.470	4.761	2.492	321
14	Panji	1.761	5.861	3.103	128

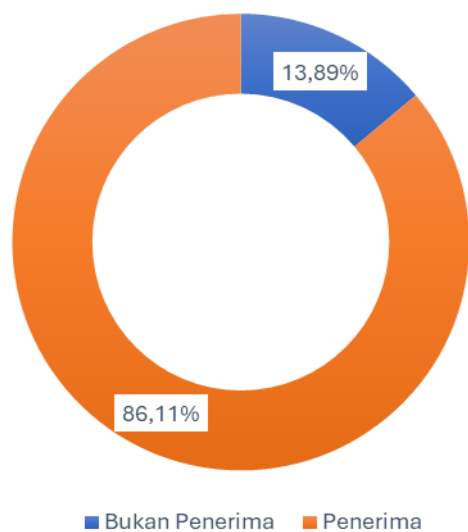
No	Kecamatan		Resiko Stunting		
15	Situbondo	661	3.396	1.767	-
16	Suboh	2.059	3.313	1.283	67
17	Sumbermalang	2.544	3.726	794	69
Total		35.511	70.921	31.502	1.093

Sumber : Data P3KE Kabupaten Situbondo, 2024 (diolah)

### 3.8.9 Kondisi Penerimaan Bantuan Bagi Keluarga Miskin (Ekstrem)

Pemerintah hingga telah menyiapkan sejumlah kebijakan guna mencapai target menekan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia menjadi nol persen. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah memastikan anggaran program pengentasan kemiskinan ekstrem betul-betul difokuskan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem. Selain menggeser sejumlah pos anggaran, pemerintah juga membolehkan keluarga miskin (ekstrem) menerima lebih dari satu jenis bantuan pemerintah. Harapannya, beragam bantuan yang diterima dapat membuat meningkatkan daya beli atau *purchasing power parities* sehingga melampaui garis kemiskinan sebesar USD 1,9 atau setara dengan Rp. 10.739/ orang/ hari atau Rp. 322.170/ orang/ bulan. Pemberian bantuan bagi keluarga miskin (ekstrem) telah dikeluarkan oleh pemerintah meliputi : BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), BST (Bantuan Sosial Tunai), PKH (Program Keluarga Harapan), SEMBAKO, Prakerja, KUR (Kredit Usaha Rakyat), dan CBP (Cadangan Beras Pemerintah). Dengan semakin banyaknya bantuan yang diberikan oleh pemerintah diharapkan penerima bantuan juga semakin merata, sehingga manfaat dari bantuan tersebut dapat dirasakan oleh seluruh penduduk miskin (ekstrem), terutama di Kabupaten Situbondo.

Melihat pada kondisi keluarga miskin (ekstrem) di Kabupaten Situbondo dapat diketahui bahwa dari jumlah keseluruhan keluarga miskin (ekstrem) yang mencapai 139.027 keluarga, ternyata sebanyak 86,11% atau 119.713 keluarga pernah/ telah menerima bantuan dari pemerintah, sedangkan sisanya sebanyak 13,89% atau 19.314 keluarga hingga saat ini belum pernah menerima bantuan dari pemerintah. Hal tersebut menunjukkan kondisi bahwa hingga saat ini masih banyak keluarga miskin (ekstrem) di Kabupaten Situbondo yang belum pernah menerima bantuan dari pemerintah. Sehingga kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian pemerintah, khususnya Pemerintah Kabupaten Situbondo agar pemerian bantuan dilakukan secara merata.



Gambar 3. 86 Jumlah Keluarga Miskin (Ekstrem) di Kabupaten Situbondo Berdasarkan Penerimaan Bantuan  
Sumber : Data P3KE Kabupaten Situbondo, 2024 (diolah)

Berdasarkan data keluarga miskin (ekstrem) yang telah menerima bantuan dari pemerintah, ternyata untuk masing-masing jenis bantuan telah mengcover jumlah keluarga miskin (ekstrem) yang beragam dan memungkinkan setiap keluarga menerima bantuan lebih dari satu jenis, dimana sebagian besar keluarga miskin yang menjadi Penerima CBP (Cadangan Beras Pemerintah) yang tercatat sebanyak 79.248 keluarga atau sebesar 57,00%. Selanjutnya sebanyak 45,37% atau sebanyak 63.075 keluarga menjadi Penerima BST (Bantuan Sosial Tunai), sebanyak 38,53% atau sebanyak 53.572 keluarga menjadi Penerima BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), sebanyak 34,34% atau sebanyak 47.738 keluarga menjadi Penerima SEMBAKO, sebanyak 31,75% atau sebanyak 44.136 keluarga menjadi Penerima KUR (Kredit Usaha Rakyat). Sedangkan untuk keluarga miskin (ekstrem) di Kabupaten Situbondo sebagai Penerima PKH (Program Keluarga Harapan) dan Penerima Prakerja masing-masing sebesar 18,92% atau sebanyak 26.304 keluarga dan sebesar 3,70% atau sebanyak 5.140 keluarga. Untuk mengetahui jenis bantuan yang diterima oleh keluarga miskin (ekstrem) di Kabupaten Situbondo maka secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 17 Jenis Bantuan yang Diterima oleh Keluarga Miskin (Ekstrem) di Kabupaten Situbondo

Keterangan	Jumlah Keluarga		Persentase	
	Bukan Penerima	Penerima	Bukan Penerima	Penerima
Penerima BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)	85.455	53.572	61,47%	38,53%
Penerima BST (Bantuan Sosial Tunai)	75.952	63.075	54,63%	45,37%
Penerima PKH (Program Keluarga Harapan)	112.723	26.304	81,08%	18,92%
Penerima SEMBAKO	91.289	47.738	65,66%	34,34%
Penerima Prakerja	133.887	5.140	96,30%	3,70%

Keterangan	Jumlah Keluarga		Persentase	
	Bukan Penerima	Penerima	Bukan Penerima	Penerima
Penerima KUR (Kredit Usaha Rakyat)	94.891	44.136	68,25%	31,75%
Penerima CBP (Cadangan Beras Pemerintah)	59.779	79.248	43,00%	57,00%

Sumber : Data P3KE Kabupaten Situbondo, 2024 (diolah)

Adapun persebaran keluarga miskin (ekstrem) berdasarkan jenis bantuan yang diterima untuk masing-masing kecamatan di Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 18 Jenis Bantuan yang Diterima oleh Keluarga Miskin (Ekstrem) di Kabupaten Situbondo Berdasarkan Kecamatan

Jenis Bantuan/ Jumlah Keluarga Penerima Bantuan								
No	Kecamatan	Penerima BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)	Penerima BST (Bantuan Sosial Tunai)	Penerima PKH (Program Keluarga Harapan)	Penerima a SEMBAK O	Penerima a Prakerja	Penerima KUR (Kredit Usaha Rakyat)	Penerima CBP (Cadangan Beras Pemerintah )
1	Arjasa	3.807	5.823	1.909	3.416	197	3.374	6.506
2	Asembagus	2.779	3.515	1.360	2.632	244	2.095	4.537
3	Banyuglugur	2.258	2.622	1.190	2.077	188	2.139	3.305
4	Banyuputih	2.797	3.810	1.457	2.451	324	3.126	4.626
5	Besuki	6.415	6.800	3.030	5.689	605	4.999	7.946
6	Bungatan	2.442	2.753	1.293	2.247	534	1.985	3.967
7	Jangkar	2.733	3.689	1.495	2.631	144	2.863	5.652
8	Jatibanteng	2.904	3.032	1.134	2.484	234	2.287	4.169
9	Kapongan	2.977	3.369	1.647	2.735	260	2.691	4.867
10	Kendit	2.920	3.024	1.256	2.540	256	1.863	3.695
11	Mangaran	3.071	4.157	1.556	2.641	217	2.662	4.868
12	Mlandingan	2.721	3.134	1.158	2.348	422	2.017	3.152
13	Panarukan	2.524	2.901	1.205	2.293	453	2.600	4.897
14	Panji	4.267	4.911	1.873	3.613	418	3.165	6.158
15	Situbondo	2.314	2.658	1.177	1.994	292	1.767	3.249
16	Suboh	3.287	3.411	1.731	2.905	228	2.557	3.941
17	Sumbermalang	3.356	3.466	1.833	3.042	124	1.946	3.713
Total		53.572	63.075	26.304	47.738	5.140	44.136	79.248

Sumber : Data P3KE Kabupaten Situbondo, 2024 (diolah)

Keberadaan keluarga miskin (ekstrem) di Kabupaten Situbondo bagi yang belum pernah menerima bantuan dari pemerintah persebarannya hampir merata pada setiap kecamatan di Kabupaten Situbondo, dimana Kecamatan Jangkar tercatat menjadi salah satu kecamatan yang keluarga miskin (ekstrim)nya masih banyak yang belum memperoleh bantuan dari pemerintah, yaitu sebanyak 1.846 keluarga atau mencapai 9,56%. Sedangkan

yang paling sedikit terdapat pada Kecamatan Mlandingan yang hanya mencapai 657 keluarga atau sebesar 3,40%. Untuk mengetahui secara lebih jelas terkait dengan persebaran keluarga miskin (ekstrem) di Kabupaten Situbondo bagi belum pernah menerima bantuan dari pemerintah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 19 Persebaran Keluarga Miskin (Ekstrem) di Kabupaten Situbondo yang Belum Pernah Menerima Bantuan

No	Kecamatan	Keluarga yang Belum Pernah Menerima Bantuan	
		Jumlah	Persentase
1	Arjasa	1.319	6,83%
2	Asembagus	972	5,03%
3	Banyuglugur	696	3,60%
4	Banyuputih	1.495	7,74%
5	Besuki	1.560	8,08%
6	Bungatan	891	4,61%
7	Jangkar	1.846	9,56%
8	Jatibanteng	803	4,16%
9	Kapongan	1.422	7,36%
10	Kendit	944	4,89%
11	Mangaran	959	4,97%
12	Mlandingan	657	3,40%
13	Panarukan	1.689	8,74%
14	Panji	1.522	7,88%
15	Situbondo	787	4,07%
16	Suboh	750	3,88%
17	Sumbermalang	1.002	5,19%
Total		19.314	100,00%

Sumber : Data P3KE Kabupaten Situbondo, 2024 (diolah)

## BAB IV

## PROGRAM PRIORITAS

## 4.1 ANALISIS AKAR MASALAH (DETERMINAN) KEMISKINAN

## 4.1.1. Analisis Sistem Dinamik

System Dynamics, dalam buku ini diterjemahkan dengan sistem dinamik, adalah metodologi pemodelan simulasi berbasis komputer, dikembangkan pertama kali oleh Jay Forrester dari MIT tahun 1950- an. Metode ini awalnya merupakan sebuah perangkat bagi para manajer untuk memahami dan menganalisis sistem-sistem kompleks dan dinamik. Dalam perkembangan berikutnya, metode ini banyak digunakan kalangan akademisi dari berbagai disiplin ilmu, seperti manajemen, ekonomi, sains, ekologi, psikologi, dan ilmu sejarah (Stermann, 2000; Sushil, 1993). Sistem dinamik terdiri atas dua kata, sistem dan dinamik. Kata sistem diartikan sebagai kumpulan bagian yang saling berinteraksi, berinterelasi, dan bergantung antarbagian-bagian sistem tersebut dalam rangka mempertahankan keberadaan dan fungsinya sebagai keseluruhan untuk mencapai suatu tujuan di dalam lingkungan yang kompleks (Trilestari dan Almamalik, 2008). Sedangkan kata dinamik mengandung implikasi adanya perubahan yang terus-menerus yang dilakukan oleh sistem-sistem yang dinamik. Dengan demikian, sistem-sistem yang dinamik merupakan sistem yang keadaannya tidak akan sama pada hari ini, kemarin, dan dengan yang mungkin akan terjadi pada esok hari (Powersim, 2003)

*A. Causal Loop Diagram*

*Causal Loop Diagram (CLD)* adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan hubungan sebab-akibat (causal relationships) antara berbagai variabel dalam suatu sistem. Diagram ini membantu memvisualisasikan bagaimana perubahan dalam satu variabel dapat mempengaruhi variabel lain, menciptakan umpan balik (feedback) yang memperkuat atau mengurangi efeknya.

Mencermati sistem sederhana yang telah dibuat, pengembangan selanjutnya dari sistem dinamis ialah menampilkan sistem kompleks. Fungsinya untuk menampilkan unsur-unsur (variabel) yang menyusun sistem sederhana dalam satu kesatuan yang kompleks. Sistem kompleks ini kemudian menjelaskan secara detail relasi dan keterkaitan masing-masing unsur penyusun. Penjelasan ini biasanya terkait dengan mekanisme dan derajat relasi yang ditentukan pada saat pembuatan sistem tersebut. Untuk lebih ringkasnya, relasi yang menghubungkan setiap unsur menunjukkan kekuatan sistem itu sendiri. Berikut sistem kompleks yang telah dibuat dan siap untuk di simulasikan.



masyarakat. Investasi khususnya di bidang pertanian, peternakan dan perikanan kelautan

Sub sistem ketiga yaitu terdiri atas hubungan kemiskinan dengan pemberdayaan, artinya semakin meningkat kemiskinan pemerintah akan melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan pelatihan untuk produksi pertanian, industri mikro, kecil dan menengah, dan perdagangan. Meningkatnya produksi unggulan meningkatkan pendapatan sehingga menurunkan angka kemiskinan. sub sistem kedelapan yaitu investasi daerah yang merupakan variabel konstan. Investasi daerah dapat meningkatkan total produksi karena menambahkan modal terhadap perputaran produksi termasuk juga berpengaruh hubungan dengan meningkatkan kebutuhan lapangan kerja.

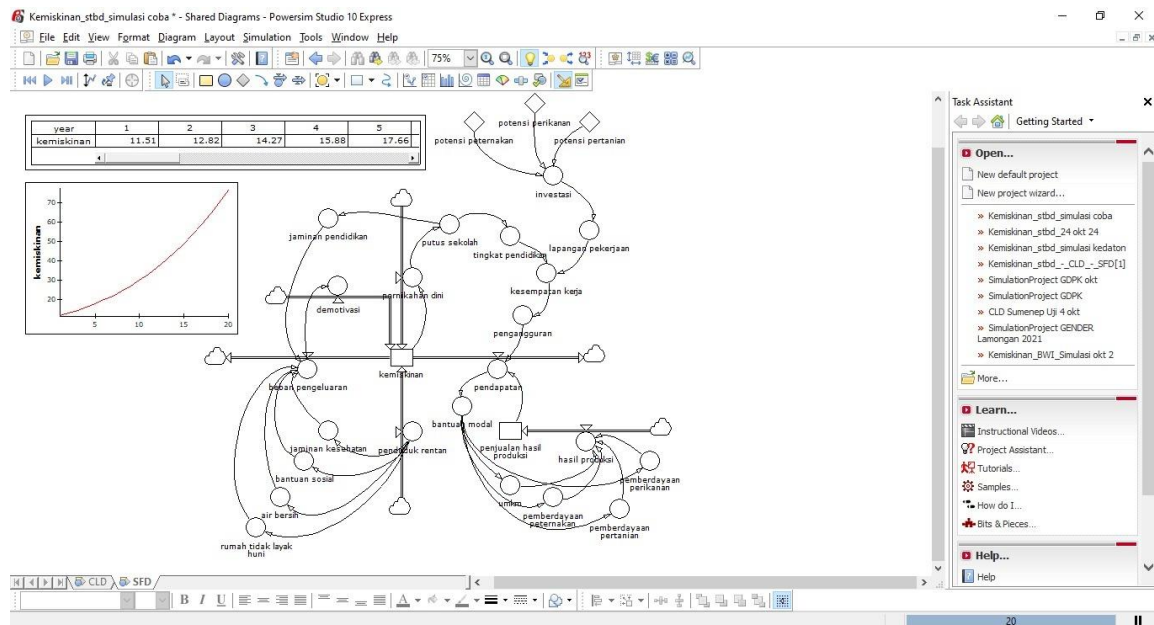
Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin merupakan proses dalam upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat, yang berarti meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. Dengan semakin banyaknya pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo, maka akan memacu masyarakat miskin untuk berusaha/ menjalankan kegiatan usaha dibidang Pertanian, UMKM, , mengingat ketiga usaha tersebut merupakan jenis usaha yang secara umum dapat diakses oleh masyarakat miskin, dan sekaligus menjadi potensi usaha yang terdapat di Kabupaten Situbondo. Berbekal dari kemampuan dan kemauan masyarakat miskin dalam menjalankan kegiatan ekonomi yang diperoleh dari kegiatan pemberdayaan, maka secara langsung akan memberikan pengaruh terhadap berkembangnya usaha yang dijalankan oleh masyarakat tersebut, yang ditandai dengan meningkatnya omzet usaha. Selain itu, berkembangnya usaha pertanian juga dapat mendukung meningkatnya ketersediaan pangan di Kabupaten Situbondo.

Setelah dibangun suatu sistem (*causal loop diagram*) maka dilakukan uji simulasi. dengan Model yang disusun menggunakan kerangka konseptual yang sama dengan model pada tahapan kedua, namun menggunakan bahasa yang berbeda. CLD yang dihasilkan pada langkah ini selanjutnya dikonversi ke model simulasi agar dapat dipahami secara lebih cepat untuk tujuan pengembangan model itu sendiri. Tahap simulasi ini dapat dilanjutkan pada tahap validasi model (model testing). Ada dua langkah dalam melakukan validasi, yaitu validasi terstruktur dan validasi kinerja. Validasi struktur digunakan untuk memvalidasi CLD yang dibuat, sedangkan validasi kinerja digunakan untuk validasi stok aliran atau model simulasi yang telah dibuat.

#### B. Model Simulasi *Stock Flow Diagram* (SFD)

Setelah pembuatan model *causal loop diagram* (CLD) dilakukan, langkah selanjutnya ialah melakukan simulasi dengan menggunakan *Stock & Flow Diagram* (SFD). SFD ini digunakan sebagai pengembangan dari CLD yang digambarkan dalam dua variabel, yakni variabel *stock* (level) dan *flow* (rate). SFD ini kemudian digunakan untuk merepresentasikan aktivitas pada suatu lingkaran umpan-balik (Coyle, 1996b; Eisler, 2015; M. R. K. Muluk, 2007). Sebagai penjabaran rinci dari CLD, SFD berikut sangat memperhatikan pengaruh waktu terhadap keterkaitan antar variabel, sehingga nantinya setiap

variabel mampu menunjukkan akumulasi untuk variabel level dan variabel yang menjadi laju aktivitas sistem pada setiap periode waktu yang ditentukan.



Dari gambar di atas terdapat satu *stock* pada simulasi SFD yang telah dilakukan yaitu kemiskinan. data yang dipergunakan untuk menguji dengan data persentase kemiskinan di tahun 2024 yaitu dengan nilai 11,52 terdapat 3 unsur *out flow* yaitu terkait pendapatan, beban pengeluaran, hasil produksi , Data yang digunakan dalam pendapatan yaitu Pendapatan perkapita. Pada inflow menggunakan unsur demotivasi, pernikahan dini, penduduk rentan. Dalam inflow dan outflow ada stock yang terhubung dari masing masing.

Pengaruh variabel yang mempunyai aliran keluar banyak yaitu pendapatan, dimana pendapatan mempengaruhi aliran keluar hasil produksi . Pendidikan dan kesehatan menggunakan data indikator yang disebutkan pada paragraph sebelumnya. Daya beli menggunakan data indikator indeks pengeluaran atau *purchasing power parity*.

### C. Interpretasi *Behaviour Over Time (BOT)* dan *Leverage* (Faktor Dominan)

Aspek paling penting dalam melakukan simulasi model dinamis guna menghasilkan model yang efektif untuk *real world*, maka perlu interpretasi perilaku dinamis (BOT) yang muncul. Analisis perilaku dinamis memungkinkan pengguna model untuk mengubah parameter sesuai dengan kebutuhan maupun keinginan. Secara konseptual pandangan mengenai hasil analisis perilaku dinamis dapat dicermati dengan melihat efektivitas partisipasi tiap elemen serta posisi mekanisme partisipasi aktual dalam *ladder of empowerment*.

Interpretasi dari *Behaviour Over Time (BOT)* berikut adalah dari simulasi model yang telah dilakukan. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Situbondo dalam intervensi pada empat tahun pertama didapatkan bahwa terjadi penurunan secara *exponential growth* apa bila model CLD dan SFD berikut dipergunakan dalam mekanisme BOT. penurunan terbesar terlihat pada kebijakan pemerintah yang mulai

meningkat pada tahun setelah intervensi. Kemudian dilanjutkan oleh penanggulangan kemiskinan akan mengalami penurunan setelah kurang lebih empat tahun masa intervensi, dan akan mencapai puncak serta bertahan secara teratur setelah empat tahun masa intervensi. Secara konseptual angka 1 pada garis perilaku dinamis menunjukkan kondisi awal sebelum intervensi dilakukan.

Pada tahap selanjutnya, sebagai upaya meningkatkan efektivitas model maka diperlukan faktor pengungkit dari tiap elemen dari model yang telah dibuat. Untuk mencari faktor pengungkit dalam simulasi dan BOT berikut dilakukan dengan uji *leverage*. Uji berikut mengambil posisi pada. Pada level atau *stock* penyelenggaraan urusan dilakukan intervensi pada setiap elemen dengan total intervensi pada 23 elemen. Pola intervensi ini dilihat dari nilai akhir intervensi pada *stock* keseluruhan, pola ini kemudian di intervensikan dengan waktu selama 1,5 tahun untuk semua elemen.

Pada tahap kelima yaitu menguji dan mendesain kebijakan yang dapat dilakukan setelah validasi model menampakkan hasilnya. Analisa sensitivitas digunakan sebagai awal dari proses pengujian dan perancangan kebijakan. Analisa ini dilakukan untuk mengetahui parameter mana yang paling sensitif terhadap kinerja sistem secara keseluruhan.

Pada tahap selanjutnya, sebagai upaya meningkatkan efektivitas model maka diperlukan faktor pengungkit dari tiap elemen dari model yang telah dibuat. Untuk mencari faktor pengungkit dalam simulasi dan BOT berikut dilakukan dengan uji *leverage*. Uji berikut mengambil posisi pada 1 *stock*, yakni angka kemiskinan Kabupaten Situbondo. Pada level atau *stock* angka kemiskinan dilakukan intervensi pada setiap elemen dengan total intervensi pada 19 elemen. Pola intervensi ini dilihat dari nilai akhir intervensi pada *stock* angka kemiskinan dengan nilai akhir dari elemen kesejahteraan yang bermacam-macam, pola ini kemudian di intervensikan dengan dikalikan 1,5 untuk semua elemen. Pada tabel berikut di tuangkan hasil gap nilai level jika intervensi di kalikan 1,5.

Hasil dari uji *leverage* ini menunjukkan ada enam elemen yang dapat menjadi *leverage* pada model berikut. Dari hasil uji sensitivitas bahwa yang paling memberikan dampak *leverage* yaitu:

no	unsur	tahun akhir	intervensi	hasil akhir	gap	leverage
1	pernikahan dini	17.66	1.5	15.24	2.42	3
2	putus sekolah	17.66	1.5	17.57	0.09	
3	tingkat pendidikan	17.66	1.5	17.20	0.46	4
4	kesempatan kerja	17.66	1.5	17.20	0.46	5
5	pengangguran	17.66	1.5	8.10	9.56	1
6	pendapatan	17.66	1.5	17.39	0.27	7
7	bantuan modal	17.66	1.5	17.62	0.04	
8	pemberdayaan pertanian	17.66	1.5	17.65	0.01	
9	pemberdayaan perikanan	17.66	1.5	17.57	0.09	
10	pemberdayaan peternakan	17.66	1.5	17.56	0.1	
11	umkm	17.66	1.5	17.56	0.1	
12	hasil produksi	17.66	1.5	17.52	0.14	
13	penjualan hasil produksi	17.66	1.5	17.28	0.38	6
14	penduduk rentan	17.66	1.5	17.55	0.11	
15	jaminan kesehatan	17.66	1.5	17.56	0.1	
16	bantuan sosial	17.66	1.5	17.55	0.11	
17	air bersih	17.66	1.5	17.54	0.12	
18	rumah layak huni	17.66	1.5	17.56	0.1	
19	beban pengeluaran	17.66	1.5	17.59	0.07	
20	demotivasi	17.66	1.5	10.51	7.15	2
21	jaminan pendidikan	17.66	1.5	17.51	0.15	
22	investasi	17.66	1.5	17.54	0.12	
23	lapangan pekerjaan	17.66	1.5	17.54	0.12	

Sumber: Data Diolah Tim Perumus, 2023

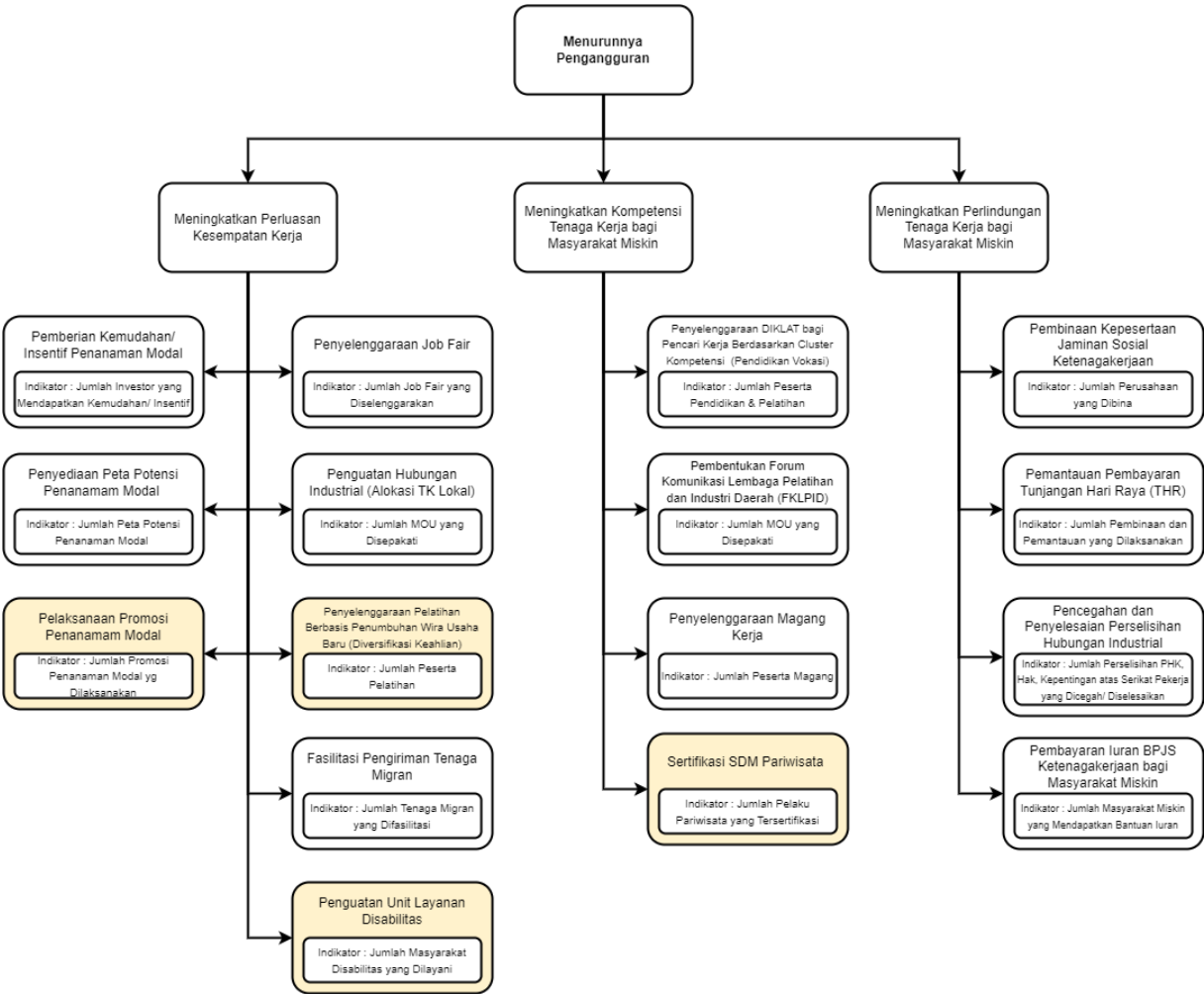
Langkah berikutnya adalah mendesain kebijakan dan menguji sistem dengan mekanisme simulasi perubahan yang potensial dilakukan. Pengujian ini kemudian dinilai dengan penilaian kualitatif. Langkah ini menentukan perilaku sistem yang dibuat daripada upaya prediksi semata.

#### 4.1.2. Prioritas Intervensi

##### A. Prioritas Target dan Intervensi Ketenagakerjaan

Pada Bab III telah di jelaskan analisis masalah kemiskinan di bidang ketenagakerjaan, terdapat dua indikator yaitu tingkat pengangguran terbuka dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Salah satu prioritaskan dalam menurunkan kemiskinan dengan meningkatkan tenaga kerja sektor formal. Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam upaya mencapai tujuan menurunnya tingkat pengangguran terbuka adalah:

1. Meningkatnya perluasan kesempatan kerja
2. Meningkatnya kompetensi tenaga kerja bagi masyarakat miskin
3. Meningkatnya perlindungan tenaga kerja bagi masyarakat miskin



Akar masalah yang menjadi prioritas utama intervensi dalam upaya menurunnya tingkat pengangguran adalah dengan meningkatkan akses angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Adapun program yang disiapkan :

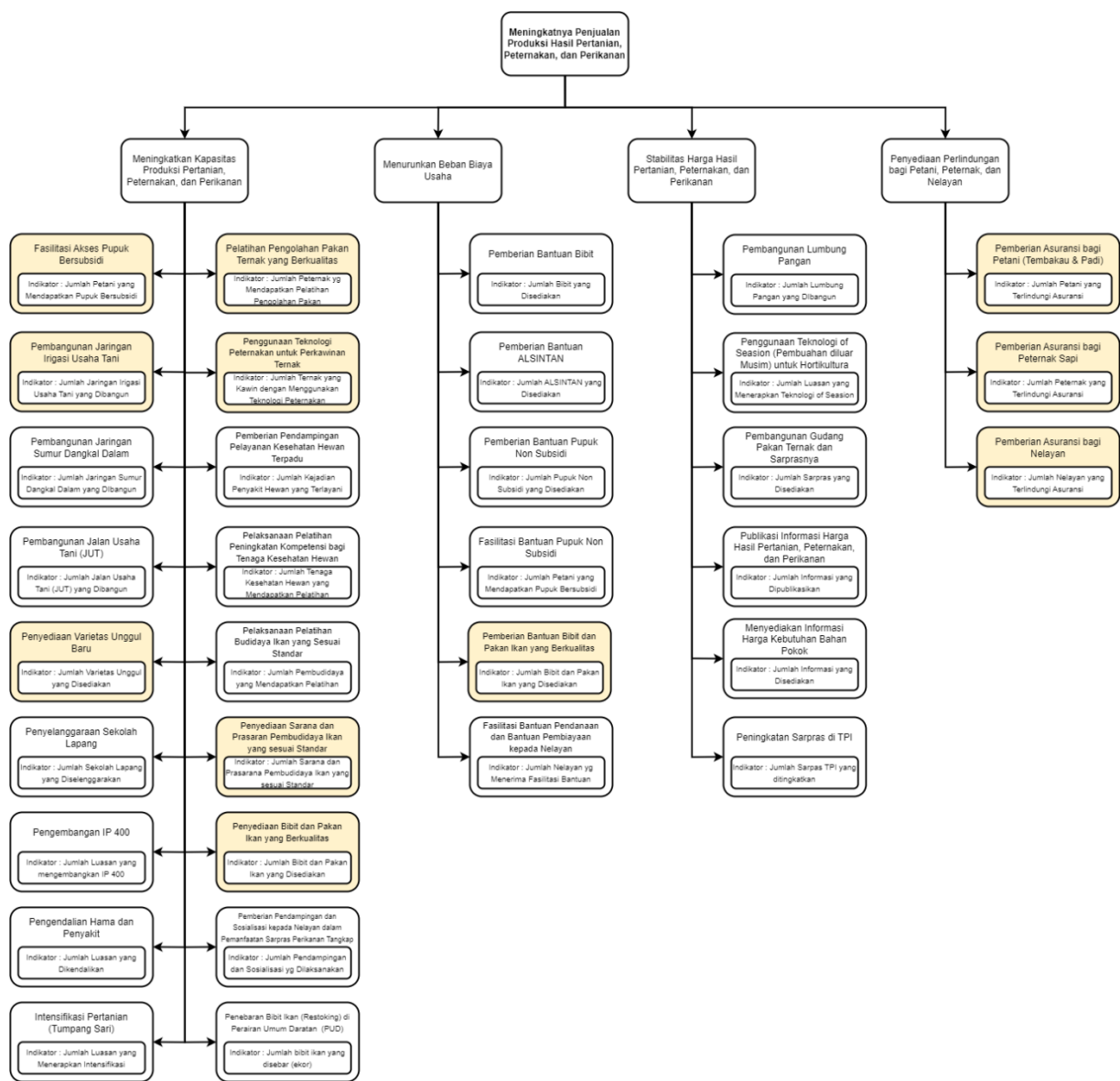
Sasaran	Prioritas Intervensi
Meningkatnya perluasan kesempatan kerja	Pemberian Kemudahan/ Insentif Penanaman Modal
	Penyediaan Peta Potensi Penanamam Modal
	Pelaksanaan Promosi Penanamam Modal
	Penyelenggaraan Job Fair
	Penguatan Hubungan Industrial (Alokasi TK Lokal)
	Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Penumbuhan Wira Usaha Baru (Diversifikasi Keahlian)
	Fasilitasi Pengiriman Tenaga Migran
	Penguatan Unit Layanan Disabilitas
Meningkatnya kompetnsi tenaga kerja bagi masyarakat miskin	Penyelenggaraan DIKLAT bagi Pencari Kerja Berdasarkan Cluster Kompetensi (Pendidikan Vokasi)
	Pembentukan Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dan Industri Daerah (FKLPID)
	Penyelenggaraan Magang Kerja
	Sertifikasi SDM Pariwisata

Sasaran	Prioritas Intervensi
Meningkatnya perlindungan tenaga kerja bagi masyarakat miskin	Pembinaan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
	Pemantauan Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR)
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
	Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Masyarakat Miskin

#### B. Prioritas Target dan Intervensi Pemberdayaan (Pertanian, Peternakan, dan Perikanan)

Pemberdayaan masyarakat berfokus pada peningkatan pendapatan masyarakat. Intervensi pemberdayaan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sehingga menciptakan ketahanan pangan, termasuk pendapatan dari petani, nelayan dan peternak. Semakin besar upaya pemerintah menciptakan pemberdayaan yang efektif dan berorientasi pada hasil penjualan yang meningkat maka masyarakat akan terbebas dari jerat kemiskinan. Tetapi pemberdayaan ini harus berfokus pada buruh tani dan petani yang mempunyai lahan terbatas. Upaya lain yang dilakukan berfokus pada stabilitas harga hasil pertanian, peternakan, dan perikanan. Stabilitas ini juga mempengaruhi konsumsi pangan masyarakat, semakin rendah harga maka masyarakat dapat mengakses pangan. Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam upaya mencapai tujuan Meningkatkan Penjualan Produksi Hasil Pertanian, Peternakan, dan Perikanan adalah:

1. Meningkatkan Kapasitas Produksi Pertanian, Peternakan, dan Perikanan
2. Menurunkan Beban Biaya Usaha
3. Stabilitas Harga Hasil Pertanian, Peternakan, dan Perikanan
4. Penyediaan Perlindungan bagi Petani, Peternak, dan Nelayan



Akar masalah yang menjadi prioritas utama intervensi dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan, produktivitas dan penjualan yang menghasilkan peningkatan pendapat. Adapun program yang disiapkan :

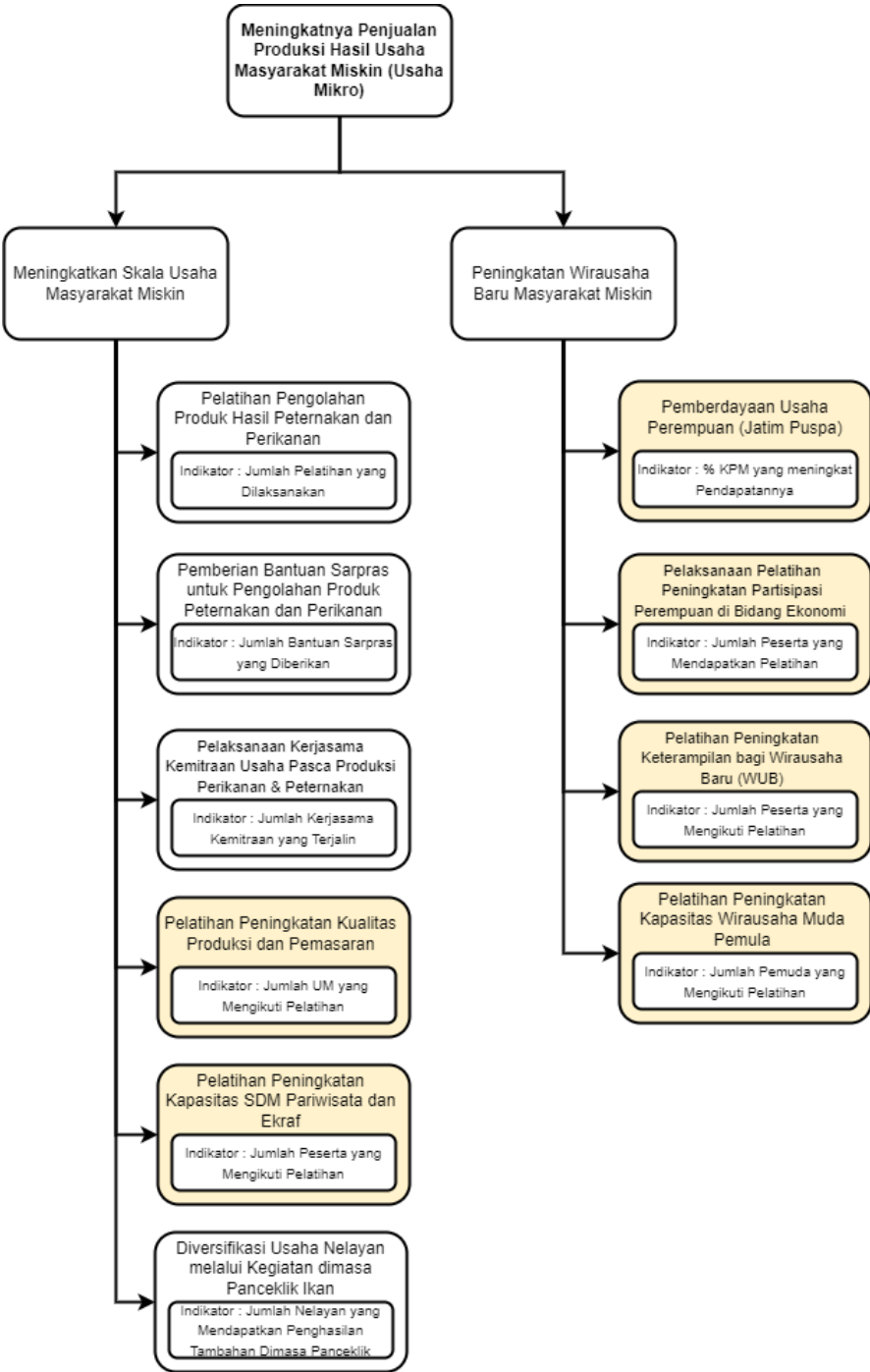
Sasaran	Prioritas Intervensi
Meningkatkan Kapasitas Produksi Pertanian, Peternakan, dan Perikanan	Fasilitasi Akses Pupuk Bersubsidi
	Pembangunan Jaringan Irigasi Usaha Tani
	Pembangunan Jaringan Sumur Dangkal Dalam
	Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT)
	Penyediaan Varietas Unggul Baru
	Penyelenggaraan Sekolah Lapang
	Pengembangan IP 400
	Pengendalian Hama dan Penyakit
	Intensifikasi Pertanian (Tumpang Sari)
	Pelatihan Pengolahan Pakan Ternak yang Berkualitas
	Penggunaan Teknologi Peternakan untuk Perkawinan Ternak
	Pemberian Pendampingan Pelayanan Kesehatan Hewan Terpadu
	Pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Kompetensi

Sasaran	Prioritas Intervensi
	bagi Tenaga Kesehatan Hewan
	Pelaksanaan Pelatihan Budidaya Ikan yang Sesuai Standar
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembudidaya Ikan yang sesuai Standar
	Penyediaan Bibit dan Pakan Ikan yang Berkualitas
	Pemberian Pendampingan dan Sosialisasi kepada Nelayan dalam Pemanfaatan Sarpras Perikanan Tangkap
	Penebaran Bibit Ikan (Restocking) di Perairan Umum Daratan (PUD)
Menurunkan Beban Biaya Usaha	Pemberian Bantuan Bibit
	Pemberian Bantuan ALSINTAN
	Pemberian Bantuan Pupuk Non Subsidi
	Fasilitasi Bantuan Pupuk Non Subsidi
	Pemberian Bantuan Bibit dan Pakan Ikan yang Berkualitas
	Fasilitasi Bantuan Pendanaan dan Bantuan Pembiayaan kepada Nelayan
Stabilitas Harga Hasil Pertanian, Peternakan, dan Perikanan	Pembangunan Lumbung Pangan
	Penggunaan Teknologi of Seasion (Pembuahan diluar Musim) untuk Hortikultura
	Pembangunan Gudang Pakan Ternak dan Sarprasnya
	Publikasi Informasi Harga Hasil Pertanian, Peternakan, dan Perikanan
	Menyediakan Informasi Harga Kebutuhan Bahan Pokok
	Peningkatan Sarpras di TPI
Penyediaan Perlindungan bagi Petani, Peternak, dan Nelayan	Pemberian Asuransi bagi Petani (Tembakau & Padi)
	Pemberian Asuransi bagi Peternak Sapi
	Pemberian Asuransi bagi Nelayan

### C. Prioritas Target dan Intervensi Peningkatan UMKM

Salah satu strategi nasional untuk menanggulangi kemiskinan yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat. Upaya efektif dalam meningkatkan pendapatan masyarakat ekonomi kelas bawah yaitu dengan meningkatkan penjualan produksi hasil usaha masyarakat miskin. Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam upaya mencapai tujuan Meningkatnya Penjualan Produksi Hasil Usaha Masyarakat Miskin (Usaha Mikro) adalah

1. Meningkatkan Skala Usaha Masyarakat Miskin
2. Peningkatan Wirausaha Baru Masyarakat Miskin



Akar masalah yang menjadi prioritas utama intervensi dalam upaya meningkatkan nilai tambah ekonomi . Adapun program yang disiapkan:

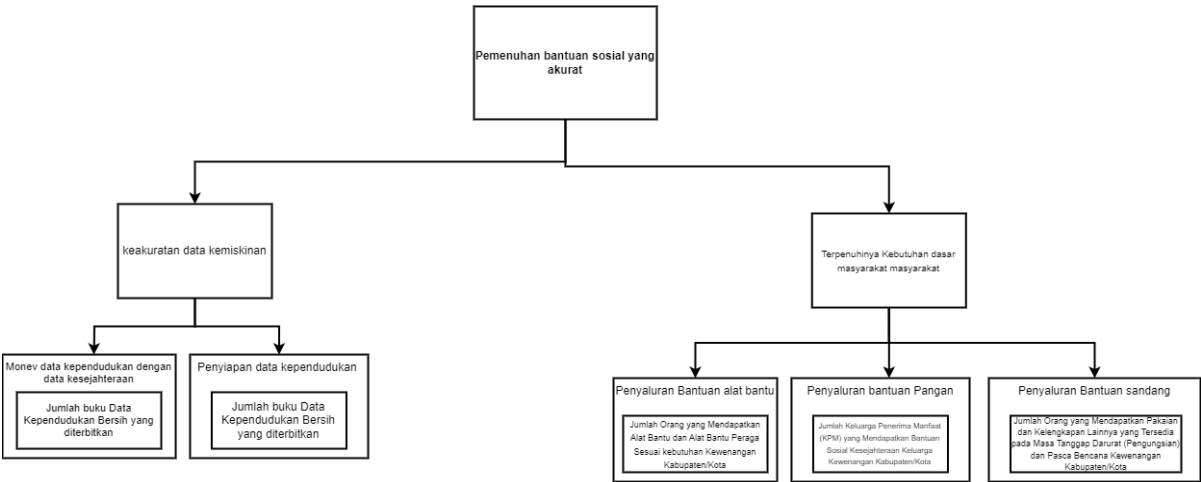
Sasaran	Prioritas Intervensi
Meningkatkan Skala Usaha Masyarakat Miskin	Pelatihan Pengolahan Produk Hasil Peternakan dan Perikanan
	Pemberian Bantuan Sarpras untuk Pengolahan Produk Peternakan dan Perikanan
	Pelaksanaan Kerjasama Kemitraan Usaha Pasca Produksi Perikanan & Peternakan
	Pelatihan Peningkatan Kualitas Produksi dan Pemasaran
	Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekraf
	Diversifikasi Usaha Nelayan melalui Kegiatan dimasa Panceklik Ikan

Peningkatan Wirausaha Baru Masyarakat Miskin	Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa)
	Pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Ekonomi
	Pelatihan Peningkatan Keterampilan bagi Wirausaha Baru (WUB)
	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Wirausaha Muda Pemula

D. Prioritas Target dan Intervensi bantuan Sosial

Bantuan Sosial merupakan strategi untuk mengurangi beban masyarakat miskin. Bantuan sosial (bansos) bertujuan untuk membantu masyarakat yang mengalami kerentanan ekonomi, dengan menyediakan dukungan finansial atau kebutuhan pokok. Bantuan sosial juga untuk meningkatkan kualitas hidup penerima dengan memberikan akses ke layanan sosial dan ekonomi. Dari hasil fgd yang dilakukan bahwa permasalahan besar ada pada data sosial yang tidak tepat sasaran. . Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam upaya mencapai tujuan pemenuhan bantuan sosial yang tepat dan akurat adalah

- 1. Keakuratan data kemiskinan;
- 2. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat.



Akar masalah yang menjadi prioritas utama intervensi dalam upaya meningkatkan bantuan sosial . Adapun program yang disiapkan:

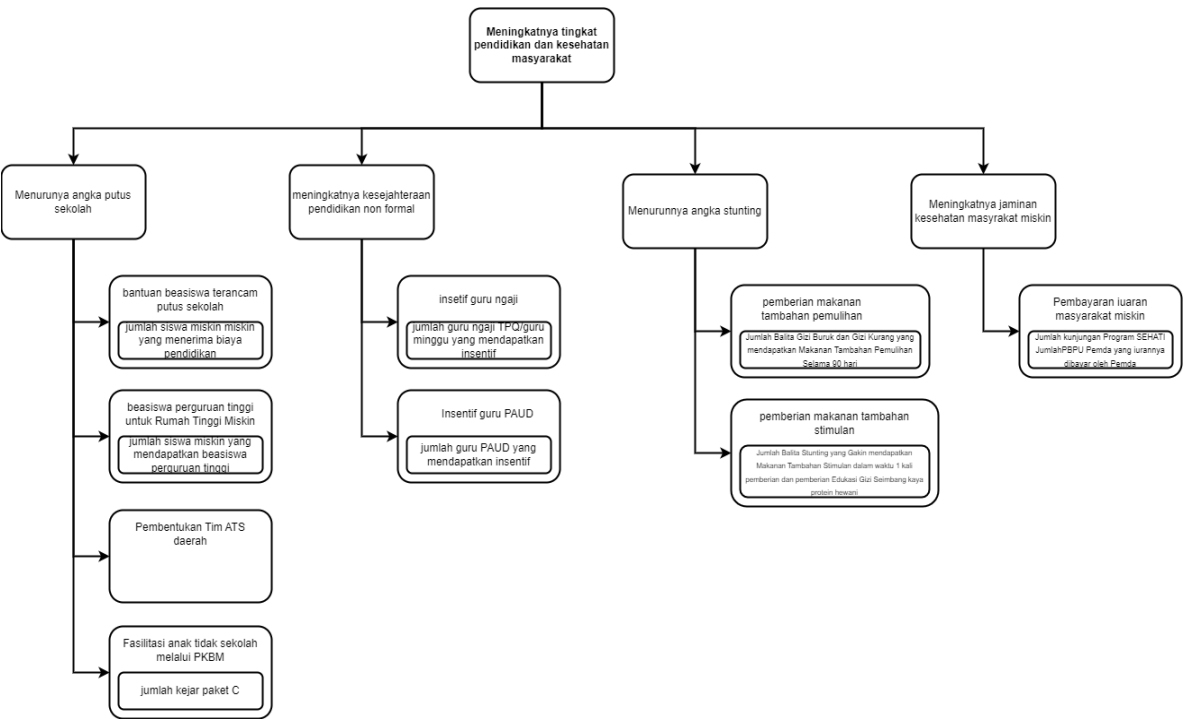
Sasaran	Prioritas Intervensi
Keakuratan data kemiskinan	Monev data kependudukan dengan data kesejahteraan masyarakat
	Penyiapan data kependudukan
Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat	Penyaluran Bantuan alat bantu
	Penyaluran bantuan Pangan
	Penyaluran Bantuan Sandang

E. Prioritas Target dan Intervensi Pendidikan dan Kesehatan

Pada Bab III telah di analisis masalah kemiskinan multidimensional, bahwa ada beberapa indikator yang menyebabkan faktor kemiskinan terutama pada stunting dan bantuan sosial terkait jaminan kesehatan.

Stunting sumenep termasuk perlu di optimalkan serta jaminan kesehatan. Pendidikan juga menjadi bagian penting untuk perlu dirubah. Pendidikan berfokus untuk meningkatkan tingkat pendidikan dan menurunkan angka putus sekolah. Untuk mempercepat upaya tersebut maka ditetapkan sasaran untuk mencapai tujuan tersebut adalah:

- 1. Menurunnya angka putus sekolah
- 2. Meningkatnya kesejahteraan tenaga pendidikan non formal
- 3. Menurunnya angka stunting
- 4. Meningkatnya jaminan kesehatan masyarakat



Akar masalah yang menjadi prioritas utama intervensi dalam upaya meningkatkan tingkat pendidikan dan kesehatan . Adapun program yang disiapkan:

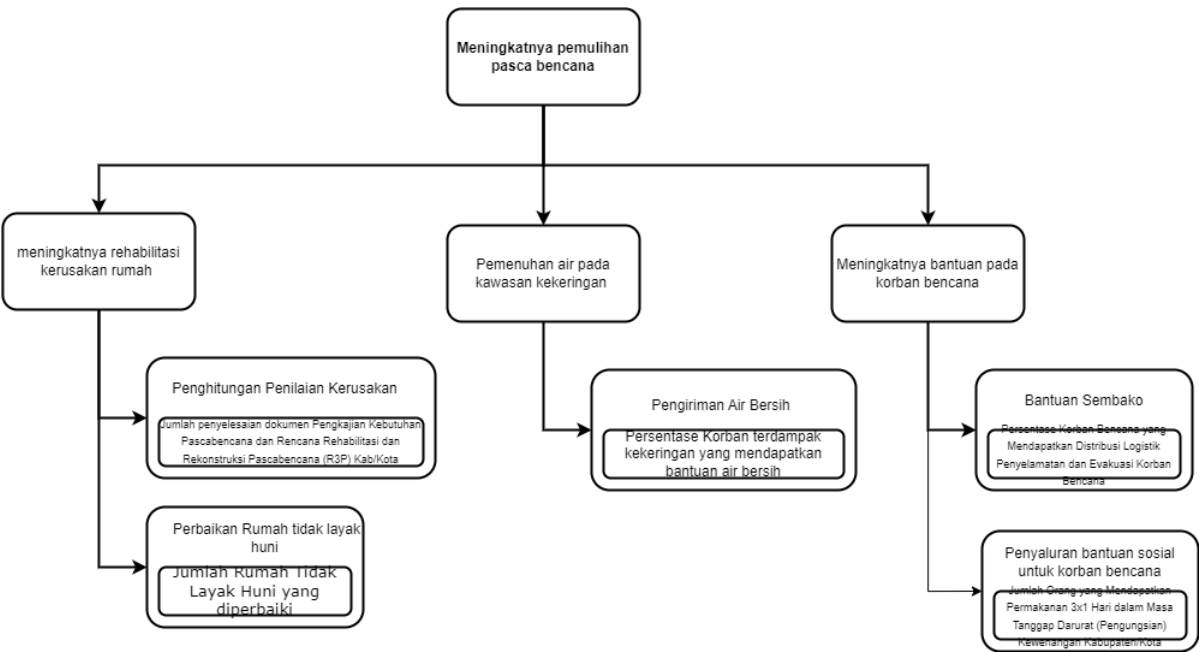
Sasaran	Prioritas Intervensi
Menurunnya angka putus sekolah	Bantuan beasiswa terancam putus sekolah
	beasiswa perguruan tinggi untuk Rumah Tinggi Miskin
	Pembentukan Tim ATS daerah
	Fasilitasi anak tidak sekolah melalui PKBM
Meningkatnya kesejahteraan tenaga pendidikan non formal	insetif guru ngaji
	Insetif guru PAUD
Menurunnya angka stunting	pemberian makanan tambahan pemulihan
	pemberian makanan tambahan stimulan
Meningkatnya jaminan kesehatan masyarakat	Pembayaran iuran masyarakat miskin

F. Prioritas Target dan Intervensi Kebencanaan

Bencana alam dapat secara signifikan menyebabkan atau memperparah kemiskinan karena dampak destruktif yang ditimbulkannya terhadap

berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama kelompok rentan. Untuk mempercepat upaya tersebut maka ditetapkan sasaran untuk mencapai tujuan tersebut adalah:

- 1. Meningkatnya rehabilitasi kerusakan rumah akibat bencana
- 2. Pemenuhan air pada kawasan kekeringan
- 3. Meningkatnya bantuan korban Bencana



Akar masalah yang menjadi prioritas utama intervensi dalam upaya meningkatnya pemulihan pasca bencana. Adapun program yang disiapkan:

Sasaran	Prioritas Intervensi
Meningkatnya rehabilitasi kerusakan rumah akibat bencana	Penghitungan Penilaian Kerusakan
	Perbaikan Rumah tidak layak huni
Pemenuhan air pada kawasan kekeringan	Pengiriman Air Bersih
Meningkatnya bantuan korban Bencana	Bantuan Sembako
	Penyaluran bantuan sosial untuk korban bencana

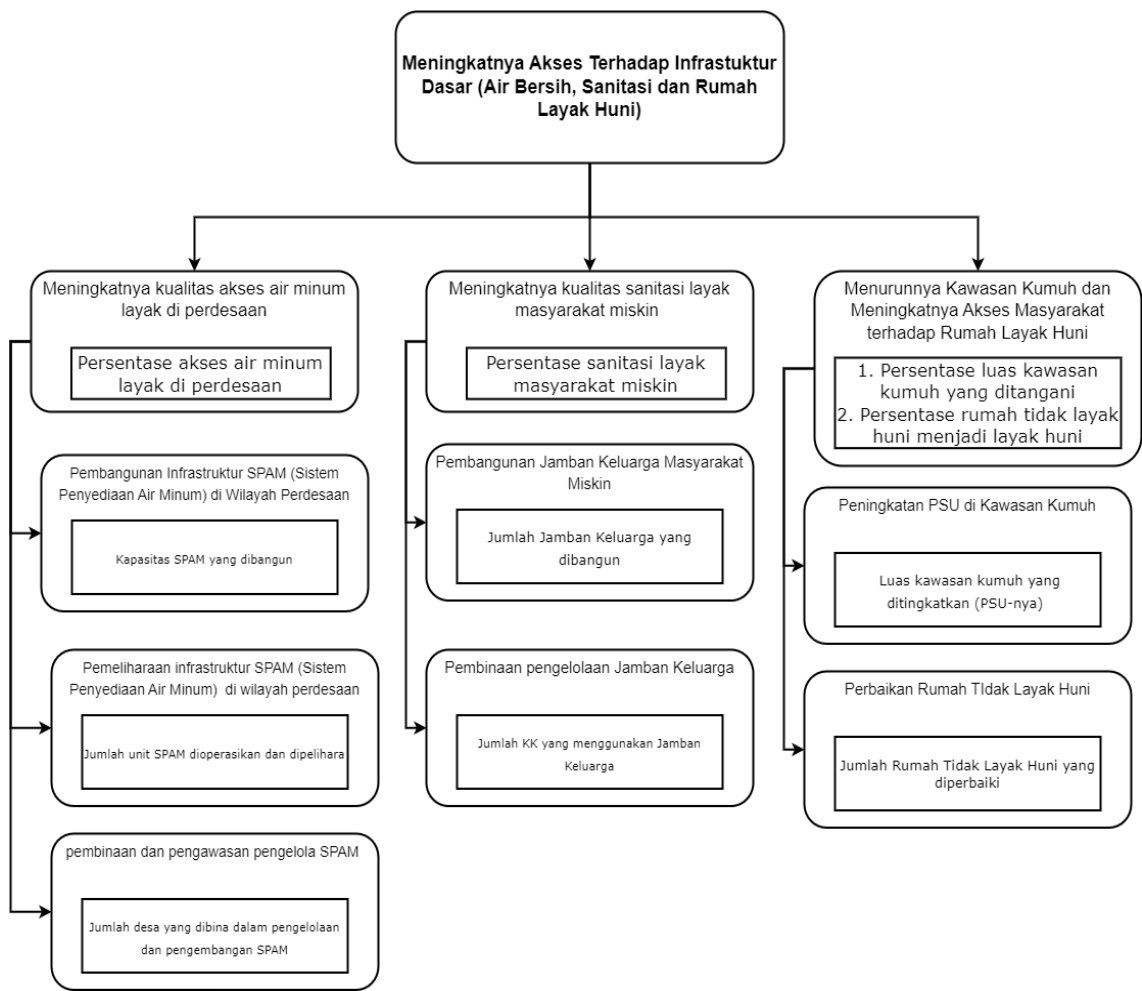
G. Prioritas Target dan Intervensi Infrastruktur Dasar (Air Bersih, Sanitasi dan Rumah Layak Huni)

Infrastruktur yang memadai membuka peluang ekonomi bagi masyarakat miskin dengan memudahkan akses air bersih, sanitasi dan rumah layak huni. Peningkatan infrastruktur menurunkan biaya hidup. Selain itu, akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak dapat meningkatkan kesehatan masyarakat yang pada akhirnya berkontribusi pada pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

Untuk mempercepat upaya tersebut maka ditetapkan sasaran untuk mencapai tujuan tersebut adalah:

- 1. Meningkatnya kualitas akses air minum layak di perdesaan
- 2. Meningkatnya kualitas sanitasi layak bagi masyarakat miskin

3. Menurunnya kawasan kumuh dan meningkatkakan akses masyarakat terhadap rumah layak huni



Akar masalah yang menjadi prioritas utama intervensi dalam upaya meningkatnya pemulihan pasca bencana. Adapun program yang disiapkan:

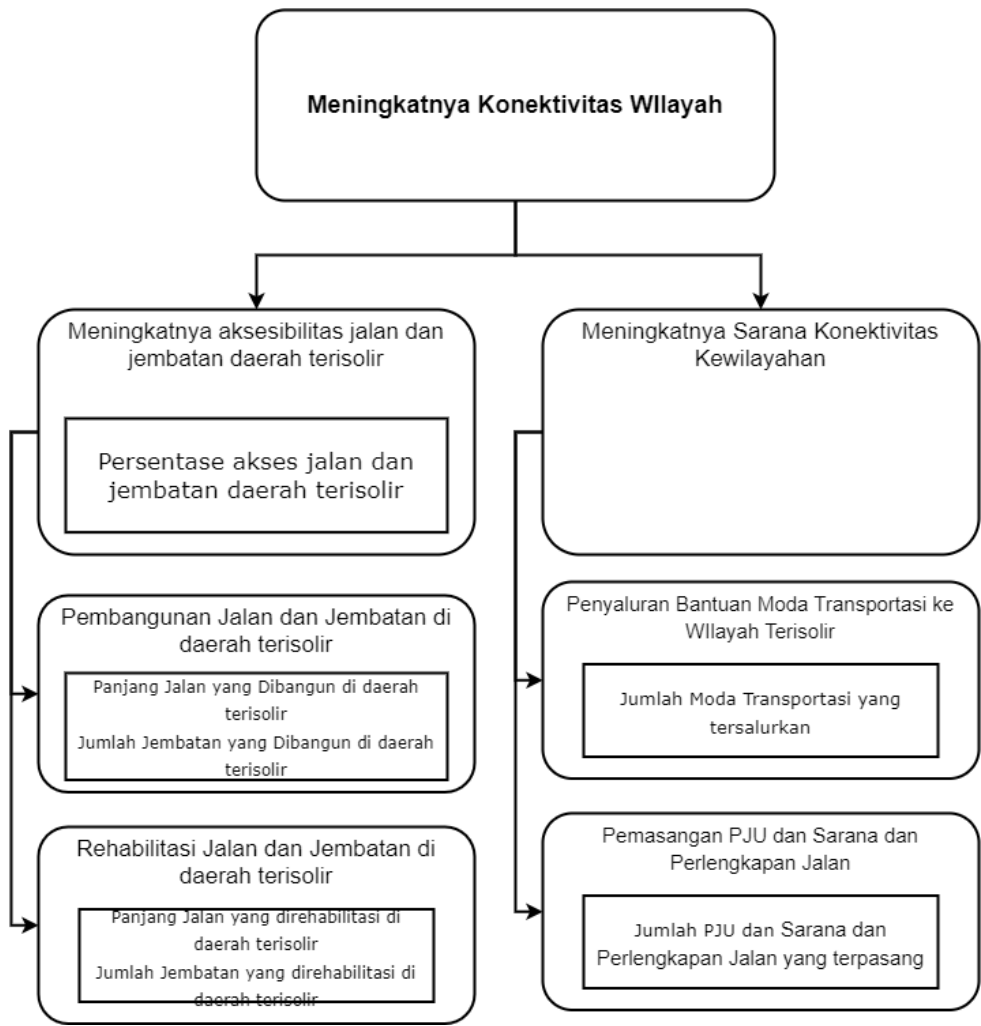
Sasaran	Prioritas Intervensi
Meningkatnya kualitas akses air minum layak di perdesaan	Pembangunan Infrastruktur SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) di Wilayah Perdesaan
	Pemeliharaan infrastruktur SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) di wilayah perdesaan
	pembinaan dan pengawasan pengelola SPAM
Meningkatnya kualitas sanitasi layak masyarakat miskin	Pembangunan Jamban Keluarga Masyarakat Miskin
	Pembinaan pengelolaan Jamban Keluarga
Menurunnya Kawasan Kumuh dan Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Rumah Layak Huni	Peningkatan PSU di Kawasan Kumuh
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

H. Prioritas Target dan Intervensi Konektivitas

Peningkatan infrastruktur juga mengurangi biaya transportasi dan distribusi, sehingga menurunkan biaya hidup. Meningkatkan konektivitas, baik fisik maupun digital, berperan krusial dalam menurunkan kemiskinan dengan memperluas akses masyarakat ke peluang ekonomi dan sosial. Konektivitas fisik melalui pembangunan infrastruktur transportasi yang lebih baik memungkinkan distribusi barang dan jasa yang lebih efisien, membuka pasar baru bagi produsen lokal, dan memudahkan mobilitas tenaga kerja. Dengan meningkatnya keterhubungan, masyarakat miskin dapat lebih mudah mengakses sumber daya, informasi, dan jaringan yang dapat mengangkat kondisi ekonomi mereka secara signifikan.

Untuk mempercepat upaya tersebut maka ditetapkan sasaran untuk mencapai tujuan tersebut adalah

- 1. Meningkatnya aksesibilitas jalan dan jembatan daerah terisolir
- 2. Meningkatnya Sarana Konektivitas Kewilayahan



Akar masalah yang menjadi prioritas utama intervensi dalam upaya meningkatnya konektivitas. Adapun program yang disiapkan:

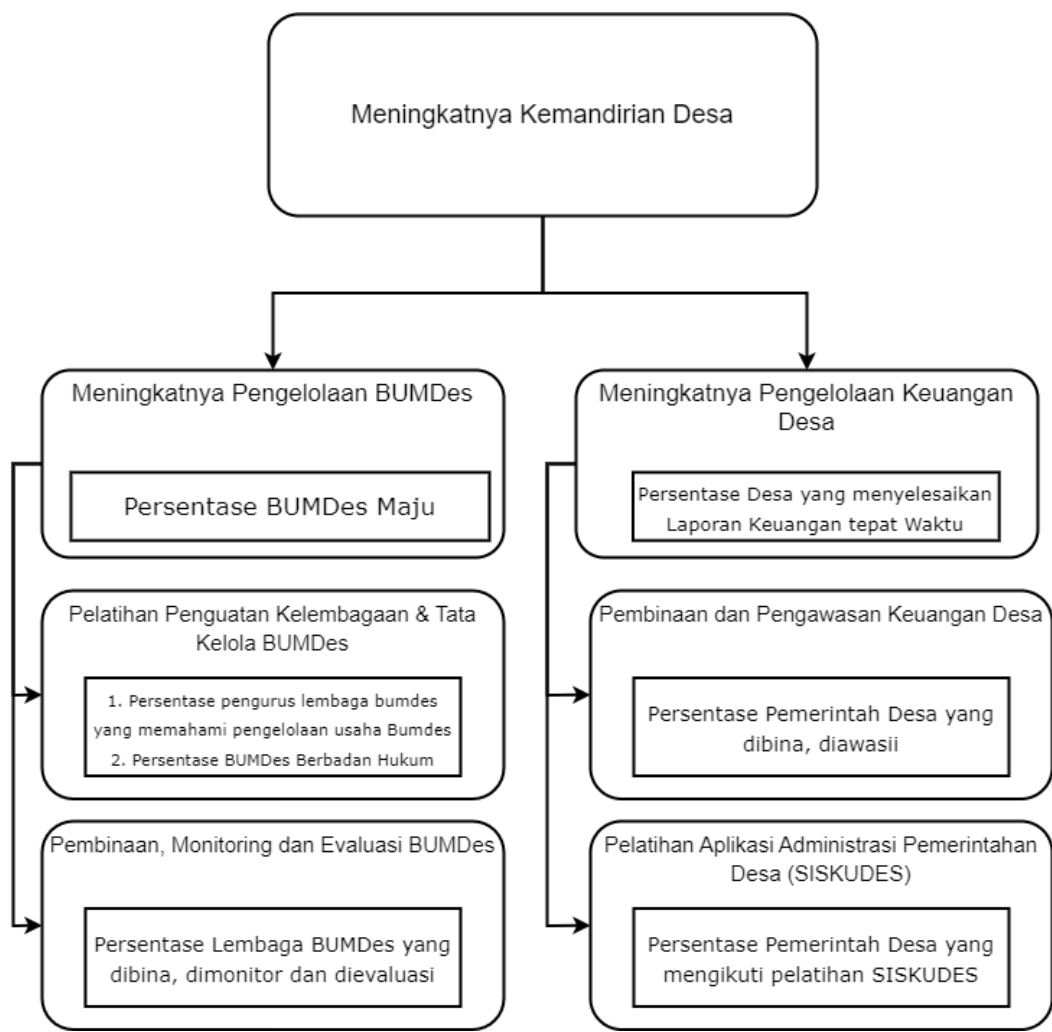
Sasaran	Prioritas Intervensi
Meningkatnya aksesibilitas jalan dan jembatan daerah terisolir	Pembangunan Jalan dan Jembatan di daerah terisolir
	Rehabilitasi Jalan dan Jembatan di daerah terisolir

Meningkatnya Sarana Konektivitas Kewilayahan	Penyaluran Bantuan Moda Transportasi ke Wilayah Terisolir
	Pemasangan PJU dan Sarana dan Perlengkapan Jalan

i. Prioritas Target dan Intervensi Kemandirian Desa

Kemandirian desa merupakan strategi penting dalam menurunkan kemiskinan dengan mengoptimalkan potensi lokal dan memberdayakan masyarakat setempat. Melalui pengelolaan sumber daya alam, pertanian, dan usaha mikro yang berbasis kearifan lokal, desa dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakatnya.

Untuk mempercepat upaya tersebut maka ditetapkan sasaran untuk mencapai tujuan tersebut adalah



Akar masalah yang menjadi prioritas utama intervensi dalam upaya meningkatnya konektivitas. Adapun program yang disiapkan:

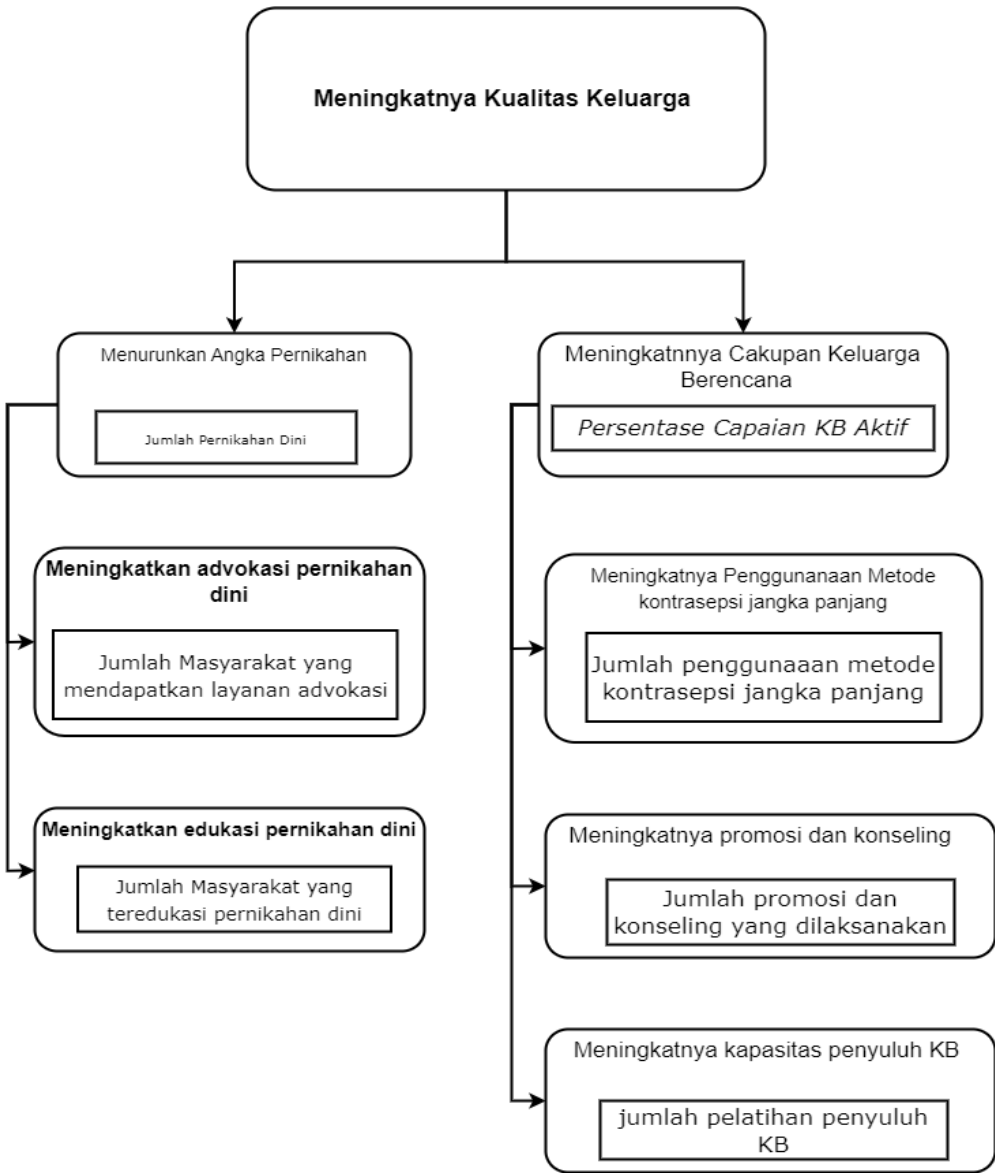
Sasaran	Prioritas Intervensi
Meningkatnya Pengelolaan BUMDes	Pelatihan Penguatan Kelembagaan & Tata Kelola BUMDes
	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi BUMDes

J. Prioritas Target dan Intervensi Ketahanan Keluarga

Meningkatkan ketahanan keluarga adalah kunci untuk menurunkan kemiskinan karena keluarga yang tangguh secara ekonomi dan sosial mampu mengatasi tantangan finansial dan krisis yang mungkin muncul. peningkatan ketahanan keluarga dapat mencegah terjadinya siklus kemiskinan antar-generasi dengan memastikan anak-anak mendapat asupan gizi yang cukup, pendidikan yang layak, dan lingkungan yang aman, yang pada akhirnya memperbesar peluang mereka untuk keluar dari kemiskinan.

Untuk mempercepat upaya tersebut maka ditetapkan sasaran untuk mencapai tujuan tersebut adalah

- 1. Menurunkan angka pernikahan dini
- 2. Meningkatnya cakupan keluarga berencana



Akar masalah yang menjadi prioritas utama intervensi dalam upaya meningkatnya konektivitas. Adapun program yang disiapkan:

Sasaran	Prioritas Intervensi
Meningkatnya aksesibilitas jalan dan jembatan daerah terisolir	Pembangunan Jalan dan Jembatan di daerah terisolir
	Rehabilitasi Jalan dan Jembatan di daerah terisolir

Meningkatnya Sarana Konektivitas Kewilayahan	Penyaluran Bantuan Moda Transportasi ke Wilayah Terisolir
	Pemasangan PJU dan Sarana dan Perlengkapan Jalan

## 4.2. ANALISIS KONDISI FISKAL

### 4.2.1 Analisis Kondisi Fiskal

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah untuk menggerakkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pembangunan dapat terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan penerimaan sumber-sumber pendapatan yang cukup untuk membiayai bidang-bidang pembangunan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan (*money follow program*). Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah maka pemerintah telah menetapkan seperangkat aturan yang menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan daerah diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Berbagai peraturan tersebut ditetapkan dengan tujuan agar pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab, adil, patut, dan bermanfaat, dimana fungsi keuangan daerah adalah untuk mengelola kekayaan daerah secara efektif dan efisien, serta mendistribusikan sumber daya regional untuk meningkatkan kesejahteraan.

Analisis pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kondisi dan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah, mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas : Pendapatan Daerah; Belanja Daerah; dan Pembiayaan Daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan, dimana pada Pasal 49 ayat (1) dinyatakan bahwa Belanja Daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sedangkan Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik

pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah meliputi Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Situbondo pada tahun 2019 hingga 2022 mengalami penurunan dengan rata-rata sebesar -1,78% dengan realisasi pendapatan pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.819.658.453.341,45, dan pada tahun 2022 menjadi Rp. 1.723.936.127.641,04. Penurunan tersebut terjadi dikarenakan adanya kondisi pandemi Covid-19 yang telah memberikan dampak terhadap penurunan pendapatan transfer pada tahun 2020 dan 2021. Selain itu, pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan ditahun 2022 yang mengalami penurunan. Selain itu, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah, Dana Desa, Pendapatan Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Hibah ditahun 2022 masih mengalami penurunan, pada tahun 2022 merupakan tahun pemulihan ekonomi pasca Covid-19. Pada tahun 2023 pendapatan daerah Kabupaten Situbondo mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp 1.815.035.360.718,99 dengan pertumbuhan sebesar 5,28%. Kenaikan pendapatan yang terjadi pada tahun 2023 disebabkan oleh meningkatnya hampir seluruh komponen pendapatan kecuali Dana Bagi Hasil dan Hibah. Sedangkan untuk belanja daerah pada tahun 2019 hingga 2023 mengalami perkembangan yang fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,25%, dimana pada tahun 2020 dan 2021 realisasi belanja daerah mengalami penurunan seiring dengan kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi. Pada tahun 2019 realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp. 1.821.889.974.701,86, sedangkan pada tahun 2021 realisasi belanja daerah menurun menjadi Rp. 1.652.272.988.543,26. Seiring dengan semakin membaiknya kondisi pasca Covid-19, realisasi belanja daerah pada tahun 2022 dan 2023 secara bertahap mengalami peningkatan menjadi Rp. 1.778.985.460.306,73 atau sebesar 7,67% di tahun 2022 dan menjadi Rp. 1.900.286.068.905,39 atau meningkat sebesar 6,82% di tahun 2023. Terjadinya peningkatan realisasi belanja daerah menunjukkan bahwa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam membiayai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik semakin besar, mengingat selain adanya rencana pembangunan yang tertunda akibat pandemi, pada tahun-tahun tersebut terdapat upaya stabilisasi kondisi sosial ekonomi yang dialami oleh masyarakat.

Berikut disajikan data mengenai perkembangan jumlah realisasi anggaran pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah Kabupaten Situbondo pada tahun 2019 hingga 2023.

Tabel 4. 1 Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Situbondo  
Tahun 2019 - 2023

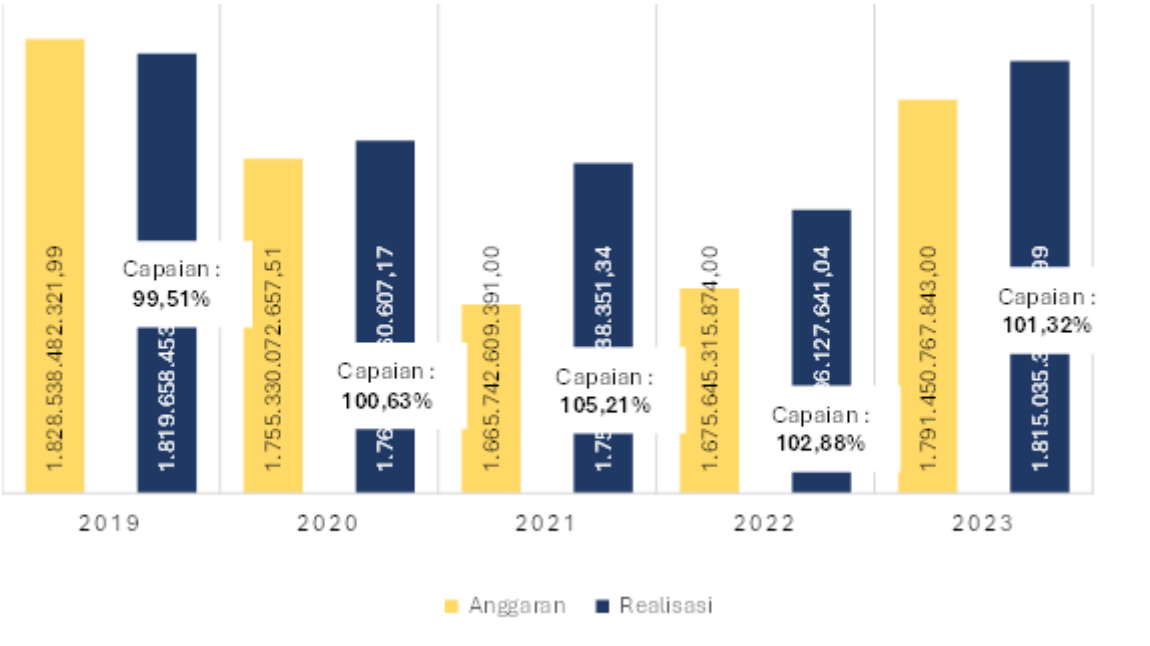
Keterangan	Jumlah Realisasi Anggaran (Rp)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pendapatan Daerah	1.819.658.453.341,45	1.766.329.560.607,17	1.752.515.838.351,34	1.723.936.127.641,04	1.815.035.360.718,99
Belanja Daerah	1.821.889.974.701,86	1.696.582.528.684,59	1.652.272.988.543,26	1.778.985.460.306,73	1.900.286.068.905,39

Keterangan	Jumlah Realisasi Anggaran (Rp)				
Pembiayaan Daerah :					
Penerimaan	145.116.726	141.915.456	274.013.502	374.251.043	258.178.454
Pembiayaan	.615,76	.376,76	.390,84	.253,47	.953,00
Pengeluaran				62.323.000	40.000.000
Pembiayaan	-	-	-	.000,00	.000,00

Sumber : BKAD Kabupaten Situbondo, 2024

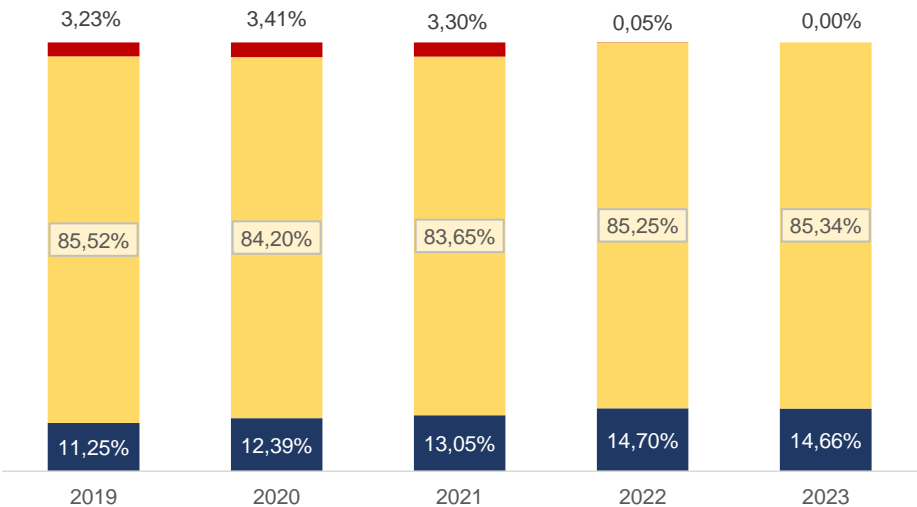
Untuk penerimaan pembiayaan daerah hingga tahun 2022 cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 42,49%, sehingga pada tahun 2022 nilai realisasi penerimaan pembiayaan meningkat menjadi Rp. 374.251.043.253,47 yang sebagian besar Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Sedangkan pada tahun 2023 penerimaan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Situbondo mengalami penurunan sebesar -31,01% sehingga menjadi Rp. 258.178.454.953,00 yang diperoleh dari SiLPA dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan selama 5 tahun terakhir hanya terealisasi pada tahun 2022 dan 2023, yaitu sebesar Rp. 62.323.000.000,00 dalam bentuk Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo dan Rp. 40.000.000.000,00 dalam bentuk Pembentukan Dana Cadangan.

XBila membandingkan realisasi pendapatan daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo yang telah disusun dapat diketahui bahwa tingkat realisasi pendapatan daerah selama 5 tahun terakhir rata-rata tercatat sebesar 101,91%. Pada tahun 2020 hingga 2023 tercatat realisasi pendapatan daerah telah melebihi target yang ditetapkan, sehingga tingkat capaiannya berada di atas 100%. Adapun capaian tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu mencapai 105,21%, dimana dengan anggaran pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 1.665.742.609.391,00, maka realisasi yang berhasil diperoleh sebesar Rp. 1.752.515.838.351,34. Hal tersebut disebabkan oleh adanya penetapan target yang lebih pesimis, mengingat pada tahun tersebut masih berada pada kondisi pandemi Covid-19. Sedangkan capaian terendah terjadi pada tahun 2019 yang mencapai 99,51%, dimana dengan anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 1.828.538.482.321,99, maka realisasi yang diperoleh sebesar Rp. 1.819.658.453.341,45. Berikut merupakan perkembangan capaian realisasi anggaran pendapatan daerah Kabupaten Situbondo pada tahun 2019 hingga 2023.



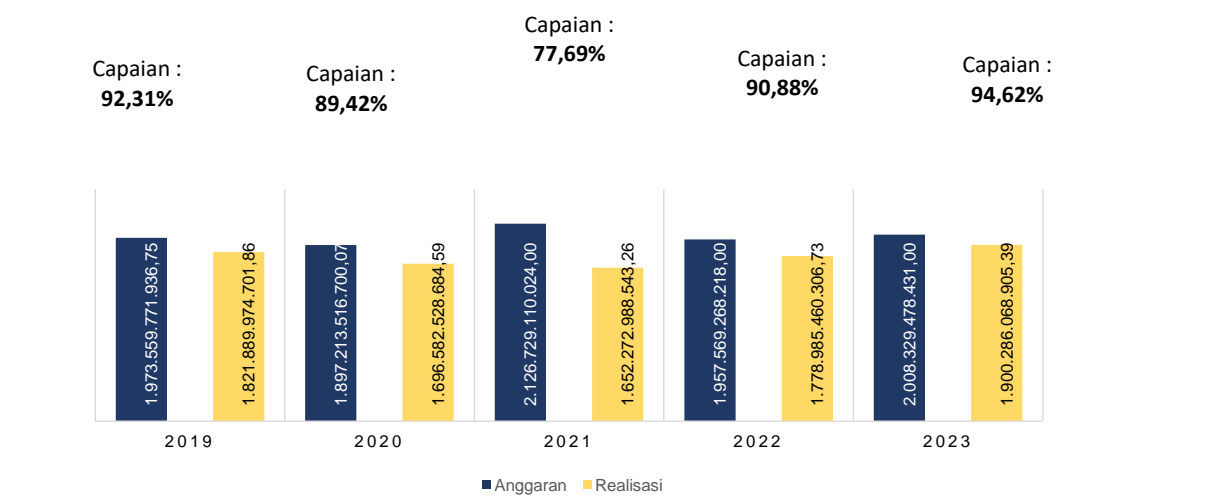
Gambar 4. 1 Capaian Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 - 2023  
Sumber : BKAD Kabupaten Situbondo, 2024

Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo saat ini bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer yang meliputi transfer dari pemerintah pusat maupun transfer dari provinsi dan daerah lain, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Bila melihat komposisinya sebagian besar pendapatan daerah Kabupaten Situbondo diperoleh dari Pendapatan Transfer yang dalam setiap tahunnya (tahun 2019 - 2023) memiliki rata-rata proporsi sebesar 84,79%. Sedangkan pada urutan selanjutnya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki rata-rata proporsi 13,21%, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan rata-rata proporsi sebesar 2,00%. Bila melihat strukturnya, proporsi Pendapatan Transfer cenderung menurun hingga tahun 2021 mencapai 83,65% yang dipengaruhi oleh penurunan realisasi Pendapatan Transfer, sedangkan disisi lain realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya dengan rata-rata pada tahun 2019 hingga 2023 sebesar 7,30%. Pada tahun 2022 dan 2023 proporsi Pendapatan Transfer meningkat hingga menjadi 85,25% pada tahun 2022 dan 85,34% pada tahun 2023. Terjadinya peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya realisasi Pendapatan Transfer, sementara realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah cenderung mengalami penurunan. Untuk mengetahui komposisi realisasi anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo pada tahun 2019 hingga 2023 dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Gambar 4. 2 Komposisi Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 - 2023  
Sumber : BKAD Kabupaten Situbondo, 2024 (diolah)

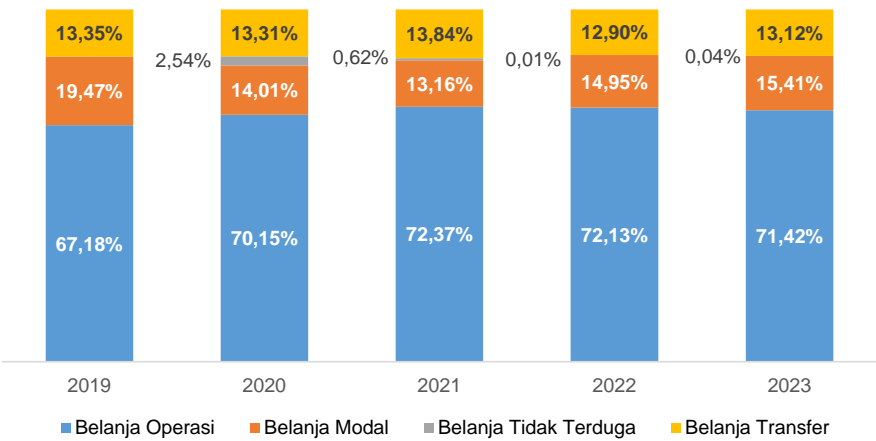
Pada sisi belanja daerah, bila membandingkan antara realisasi belanja daerah Kabupaten Situbondo dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah disusun dapat diketahui bahwa tingkat realisasi belanja daerah pada tahun 2019 hingga 2023 rata-rata memiliki tingkat capaian sebesar 88,99%. Pada tahun 2019 hingga 2023 tercatat bahwa tingkat capaian realisasi belanja daerah masih berada dibawah target yang ditetapkan (100%), namun cenderung mengalami peningkatan dalam 2 tahun terakhir, dimana pada tahun 2023 tingkat capaian realisasi belanja daerah sebesar 94,62%, dan tercatat memiliki nilai paling tinggi dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2023 dari jumlah anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp. 2.008.329.478.431,00, berhasil terealisasi sebesar Rp. 1.900.286.068.905,39. Hal tersebut disebabkan oleh adanya optimalisasi realisasi belanja daerah pasca pandemi Covid-19. Sedangkan capaian terendah terjadi pada tahun 2021 yang mencapai 77,69%, dimana dengan anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 2.126.729.110.024,00, maka jumlah belanja daerah yang terealisasi mencapai sebesar Rp. 1.652.272.988.543,26. Hal ini disebabkan oleh kondisi pandemi Covid-19. Berikut merupakan perkembangan capaian realisasi anggaran belanja daerah Kabupaten Situbondo pada tahun 2019 hingga 2023.



Gambar 4. 3 Capaian Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 - 2023  
Sumber : BKAD Kabupaten Situbondo, 2024

Belanja Daerah Kabupaten Situbondo terdiri dari berbagai jenis, yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, serta Belanja Transfer. Bila melihat strukturnya sebagian besar belanja daerah Kabupaten Situbondo dalam bentuk Belanja Operasi yang dalam setiap tahunnya (tahun 2019 - 2023) memiliki rata-rata proporsi sebesar 70,65%, dimana belanja tersebut lebih didominasi oleh Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Porsi belanja pegawai cenderung mengalami penurunan

hingga pada tahun 2023 sebesar 34,29%, dimana posisi pada tahun 2019 masih sebesar 42,18%. Penurunan porsi belanja pegawai diharapkan semakin menurun hingga berada dibawah 30% sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Berdasarkan regulasi tersebut, Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai Daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Dalam hal persentase belanja pegawai telah melebihi 30% sepertihalnya Kabupaten Situbondo, maka Pemerintah Kabupaten Situbondo harus menyesuaikan porsi belanja pegawai paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan, yaitu di tahun 2027. Untuk porsi belanja barang dan jasa dalam setiap tahun mengalami peningkatan sehingga pada tahun 2023 sebesar 30,44%. Selain belanja operasi, jenis belanja daerah lainnya yang memiliki porsi terbesar kedua adalah Belanja Modal yang memiliki rata-rata proporsi sebesar 15,40%, Belanja Transfer dengan rata-rata proporsi sebesar 13,30%, serta Belanja Tidak Terduga dengan rata-rata proporsi sebesar 0,64%. Untuk Belanja Modal dalam 2 tahun terakhir juga mengalami peningkatan dari 13,16% pada tahun 2021 menjadi 14,95% pada tahun 2022 dan 15,41% pada tahun 2023. Peningkatan belanja modal dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur di Kabupaten Situbondo semakin meningkat dalam rangka memperluas aksesibilitas dan mempermudah distribusi barang yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Situbondo berupaya menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga pada tahun 2027 diharapkan dapat mengalokasikan belanja infrastruktur sekurang kurangnya 40% di luar belanja bagi hasil dan/ atau transfer kepada Daerah dan/ atau desa. Untuk mengetahui komposisi realisasi anggaran Belanja Daerah Kabupaten Situbondo pada tahun 2019 hingga 2023 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

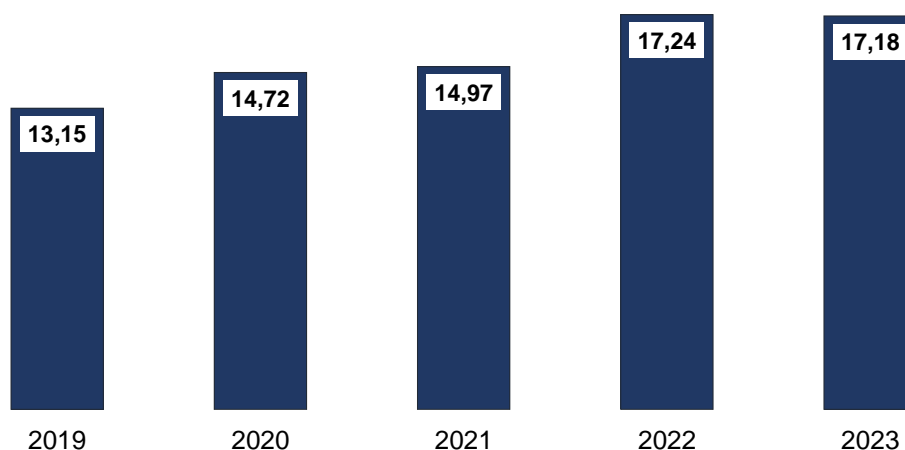


Gambar 4. 4 Komposisi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 - 2023  
Sumber : BKAD Kabupaten Situbondo, 2024 (diolah)

A. Kemandirian Fiskal

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mengharapkan pemerintah daerah memiliki kemandirian yang lebih besar dalam keuangan daerah. Namun, seiring dengan diterapkannya Kebijakan otonomi daerah yang telah dilaksanakan sejak tahun 2001 dan kebijakan desentralisasi fiskal sejak 2004, kemandirian daerah belum dapat terwujud sepenuhnya sampai saat ini. Hal tersebut dapat dilihat dari masih rendahnya derajat desentralisasi fiskal pemerintahan daerah di Indonesia. Kemandirian fiskal daerah menjadi hal yang penting dalam konteks otonomi daerah dan telah menjadi fokus perhatian dalam pembangunan ekonomi. Kemandirian fiskal daerah menjadi kunci penting untuk mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan dan memberdayakan potensi lokal. Saat ini, sebagian besar daerah di Indonesia sangat bergantung oleh kucuran dana dari Pemerintah Pusat, untuk itu perlu adanya intervensi pemerintah pusat melalui UU HKPD yang berperan dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Dalam hal ini, intervensi pemerintah pusat melalui UU HKPD tidak hanya bertujuan untuk mengontrol, tetapi juga untuk memberdayakan daerah agar dapat mengelola keuangannya dengan efektif. Kemandirian fiskal merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sendiri kegiatan Pemerintah Daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari Pemerintah Pusat. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam melakukan reviu kemandirian fiskal daerah adalah dengan menilai implementasi desentralisasi fiskal yang tercermin pada beberapa indikator, diantaranya hasil perhitungan atau nilai Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Drajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, serta Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (RKFD).

Tingkat kemandirian keuangan daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai rumah tangganya sendiri dengan mengandalkan penerimaan pajak daerah sebagai sumbernya tanpa bergantung kepada dana yang diberikan pemerintah pusat. Rasio kemandirian keuangan daerah dicerminkan oleh rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman. Berikut disajikan data perkembangan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo dalam waktu 5 tahun terakhir (2019 - 2023).



Gambar 4. 5 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo  
Tahun 2019 - 2023

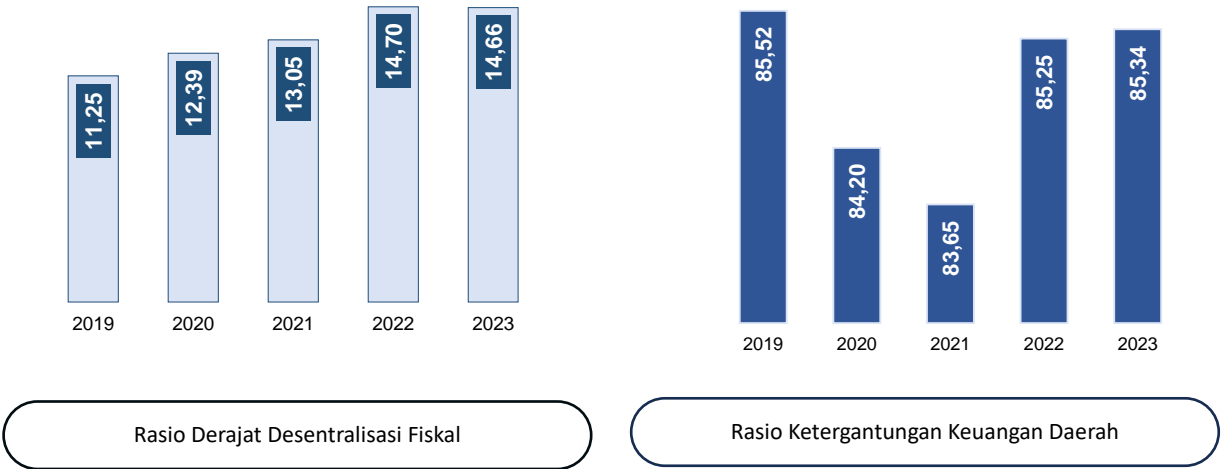
Sumber : BKAD Kabupaten Situbondo, 2024 (diolah)

Berdasarkan grafik di atas maka dapat diketahui bahwa nilai Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo pada tahun 2019 hingga tahun 2023 berada pada angka 13,15% hingga 17,24%, namun dalam 2 tahun terakhir nilainya memiliki kecenderungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019 hingga 2021, dimana pada tahun 2022 nilai rasionya mencapai 17,24% dan pada tahun 2023 sebesar 17,18%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Situbondo mengalami peningkatan. Bila angka tersebut disandingkan dengan tabel pola hubungan dan tingkat kemampuan daerah maka menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Kabupaten Situbondo dalam membiayai rumah tangganya selama 5 tahun (2019 - 2023) masih termasuk dalam kategori Sangat Rendah serta memiliki pola hubungan yang instruktif, karena berada pada range persentase kemandirian antara 0% hingga 25%. Pola hubungan yang instruktif menunjukkan bahwa peranan pemerintah pusat sangat dominan daripada kemandirian pemerintah daerah. Pemerintah Daerah belum mampu sepenuhnya melaksanakan otonomi daerah secara finansial. Kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Situbondo pada tahun 2019 hingga 2023 dari aspek kemandirian masih sangat rendah dan memiliki pola instruktif dalam membiayai urusan pemerintahan, pembangunan, dan layanan kepada masyarakat. Kondisi tersebut dikarenakan Pemerintah Kabupaten Situbondo masih sangat bergantung pada Pemerintah Pusat dalam hal keuangan melalui Transfer Dana Pemerintah Pusat. Hal ini sesuai dengan tingginya proporsi Pendapatan Transfer yang mendominasi besaran sumber pendapatan Kabupaten Situbondo yakni dengan rata-rata proporsi sebesar 84,79%. Untuk mencapai pola hubungan yang konsultatif, gap antara skor kemandirian Kabupaten Situbondo saat ini masih sangat jauh, sehingga peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tantangan untuk dapat meningkatkan kemandirian daerah.

Tingkat Desentralisasi Fiskal merupakan ukuran menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Rasio desentralisasi fiskal menunjukkan derajat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah. Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam keuangan daerah menunjukkan ukuran keberhasilan suatu daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Semakin tinggi PAD terhadap total penerimaan daerah, maka semakin tinggi kemampuan keuangan daerah dalam membiayai urusan pembangunan, pelayanan, dan pemerintahannya. Nilai Rasio Desentralisasi Fiskal Kabupaten Situbondo pada 5 tahun terakhir (2019 - 2023) berada pada angka 11,25% hingga 14,70%. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat desentralisasi fiskal pada tahun tersebut berada pada *range* persentase PAD terhadap Pendapatan yang termasuk dalam kategori Kurang, dimana berada pada interval 10,01% - 20,00%. Walaupun masih dalam kategori Kurang, nilai Desentralisasi Fiskal Kabupaten Situbondo cenderung mengalami peningkatan hingga pada tahun 2023 mencapai 14,66%. Hal tersebut menunjukkan adanya upaya peningkatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Situbondo, dimana rata-rata pertumbuhan selama 5 tahun terakhir mencapai 7,30%. Untuk itu kedepan diperlukan konsistensi usaha dalam peningkatan PAD secara lebih optimal, sehingga dapat meningkatkan kontibusinya dalam menjalankan fungsi desentralisasi yang lebih baik dalam sisi keuangan daerah.

Masih rendahnya Tingkat Desentralisasi Fiskal juga dapat terlihat pada tingginya ketergantungan keuangan daerah yang tercermin melalui Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah adalah ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktivitas pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan/ atau pemerintah provinsi.



Gambar 4. 6 Derajat Desentralisasi Fiskal dan Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 - 2023  
Sumber : BKAD Kabupaten Situbondo, 2024 (diolah)

Secara garis besar nilai Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo menunjukan tren yang masih tinggi pada setiap tahunnya, yaitu dengan kondisi pada tahun 2019 sebesar 85,52% kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 84,20%, dan terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2021 menjadi 83,65% yang merupakan angka terendah selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Akan tetapi pada tahun 2022 nilai ketergantungan daerah dapat kembali meningkat pada angka 85,25% serta tahun 2023 mengalami peningkatan sehingga mencapai 85,34%. Peningkatan ketergantungan keuangan daerah pada tahun tersebut disebabkan oleh meningkatnya realisasi pendapatan transfer, bahkan pertumbuhan yang dialami pada tahun 2023 masih lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Satu hal yang perlu menjadi perhatian adalah nilai Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo yang masih berada pada angka diatas 80,00% dan masih menunjukan tingkat ketergantungan yang sangat tinggi karena berada pada

persentase lebih dari 50% (> 50%). Sehingga diperlukan konsistensi optimalisasi PAD serta usaha pengurangan ketergantungan dana transfer dari Pemerintah Pusat maupun provinsi agar kedepannya rasio ketergantungan Pemerintah Kabupaten Situbondo dapat perlahan berubah menjadi “tinggi” ataupun “cukup”.

Terkait dengan tolok ukur kapasitas fiskal, dalam setiap tahunnya Menteri Keuangan telah melakukan perhitungan Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (RKFD) yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan terkait dengan Peta Kapasitas Fiskal Daerah. Rasio Kapasitas Fiskal Daerah merupakan gambaran dari kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja pegawai. Peta Kapasitas Fiskal Daerah dapat digunakan untuk pengusulan Pemerintah Daerah sebagai penerima hibah, penilaian atas usulan pinjaman daerah, penentuan besaran dana pendamping, jika dipersyaratkan, dan/ atau hal lain yang diatur secara khusus dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut disajikan data perkembangan Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (RKFD) Kabupaten Situbondo dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

Tabel 4. 2 Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (RKFD) Kabupaten Situbondo Tahun 2019 - 2023

Keterangan	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai RKFD Kabupaten Situbondo	0,740	0,815	0,937	1,439	1,323
Kategori Kapasitas Fiskal Daerah	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah Tahun 2019 - 2023

Berikut merupakan ketentuan penilaian dan kriteria Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (RKFD) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 84 Tahun 2023 yang terbagi dalam lima kriteria :

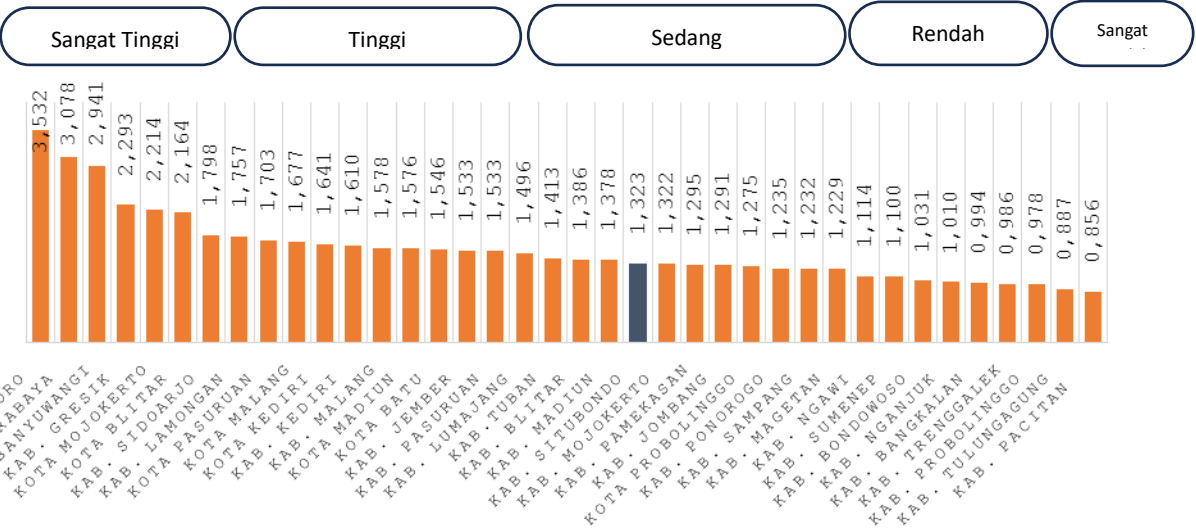
Tabel 4. 3 Kriteria Penilaian Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (RKFD) Berdasarkan PMK Nomor 84 Tahun 2023

Nilai RKFD	Kriteria
<b>RKFD &lt; 0,947</b>	Sangat Rendah
<b>0,947 ≤ RKFD &lt; 1,203</b>	Rendah
<b>1,203 ≤ RKFD &lt; 1,459</b>	Sedang
<b>1,459 ≤ RKFD &lt; 1,715</b>	Tinggi
<b>1,715 ≤ RKFD</b>	Sangat Tinggi

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2023

Berdasarkan data Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (RKFD) Kabupaten Situbondo yang tertera dalam grafik di atas menunjukkan bahwa pada tahun

2019 hingga 2023, Kabupaten Situbondo secara umum justru menempati rasio kapasitas fiskal yang cenderung masih rendah bila dibandingkan dengan sebagian besar daerah lain di Provinsi Jawa Timur. RKFD Kabupaten Situbondo pada tahun 2019 hingga 2023 memiliki *range* antara 0,740 hingga 1,439, artinya dalam kurun waktu 5 tahun *range* RKFD Kabupaten Situbondo memiliki kriteria rendah hingga sedang. Nilai yang muncul pada RKFD Kabupaten Situbondo tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan tren yang cenderung meningkat dengan capaian tertinggi pada tahun 2022, namun nilai rasio tersebut memiliki kriteria Rendah, mengingat interval untuk menentukan kategori dalam setiap tahunnya berbeda-beda. Dengan melihat pada kondisi tahun 2019 dapat diketahui bahwa nilai RKFD sebesar 0,740 dengan kriteria sedang, kemudian meningkat pada tahun 2020 hingga menjadi 0,815 dengan kriteria sedang. Sedangkan pada tahun 2021 terjadi peningkatan, dengan nilai yang muncul pada RKFD Kabupaten Situbondo sebesar 0,937 dengan kriteria sedang. Pada tahun 2022 nilai RKFD kembali meningkat mencapai nilai tertinggi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dengan kriteria rendah. Pada tahun 2023 nilai RKFD mengalami sedikit penurunan dari 1,439 menjadi 1,323, namun kriterianya mengalami peningkatan menjadi sedang.

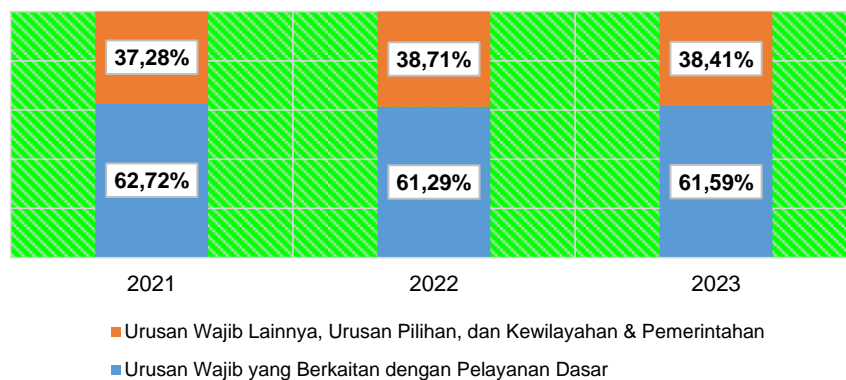


Gambar 4. 7 Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (RKFD) Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2023  
Sumber : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2023

Bila melihat pada nilai Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (RKFD) Kabupaten Situbondo dibandingkan dengan daerah lainnya di Provinsi Jawa Timur dapat diketahui bahwa posisi Kabupaten Situbondo pada tahun 2023 berada pada urutan ke 22 dari 38 kabupaten/ kota lainnya, dimana terdapat 21 daerah yang memiliki nilai RKFD lebih tinggi dengan kriteria Sangat Tinggi, Tinggi, dan Sedang. Adapun daerah yang memiliki nilai rasio tertinggi adalah Kabupaten Bojonegoro. Sedangkan sisanya sebanyak 16 daerah memiliki nilai rasio yang berada dibawahnya dengan kriteria Rendah dan Sangat Rendah, dimana daerah yang memiliki nilai rasio terendah adalah Kabupaten Pacitan.

Kemandirian fiskal pada dasarnya merupakan sebuah modal yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam mendukung pemenuhan/ peningkatan kebutuhan yang tercermin dalam belanja daerah. Pendanaan dalam Belanja Daerah dipergunakan untuk mendanai urusan pemerintahan

wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dipergunakan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan yang berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Bila melihat pada realisasi belanja daerah Kabupaten Situbondo selanjutnya dapat dilakukan pengelompokan belanja berdasarkan urusan yang dilaksanakan, dimana sebagian besar alokasi belanja digunakan untuk membiayai program/kegiatan pada urusan yang bersifat wajib dan berkaitan dengan pelayanan dasar, yang meliputi : urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, serta Sosial. Adapun rata-rata porsi belanja daerah yang dialokasikan pada urusan tersebut dalam 3 tahun terakhir (2021 - 2023) sebesar 61,87%. Sedangkan sisanya dialokasikan untuk membiayai urusan wajib lainnya, urusan pilihan, dan kewilayahan, serta urusan pemerintahan dengan rata-rata sebesar 38,13%.



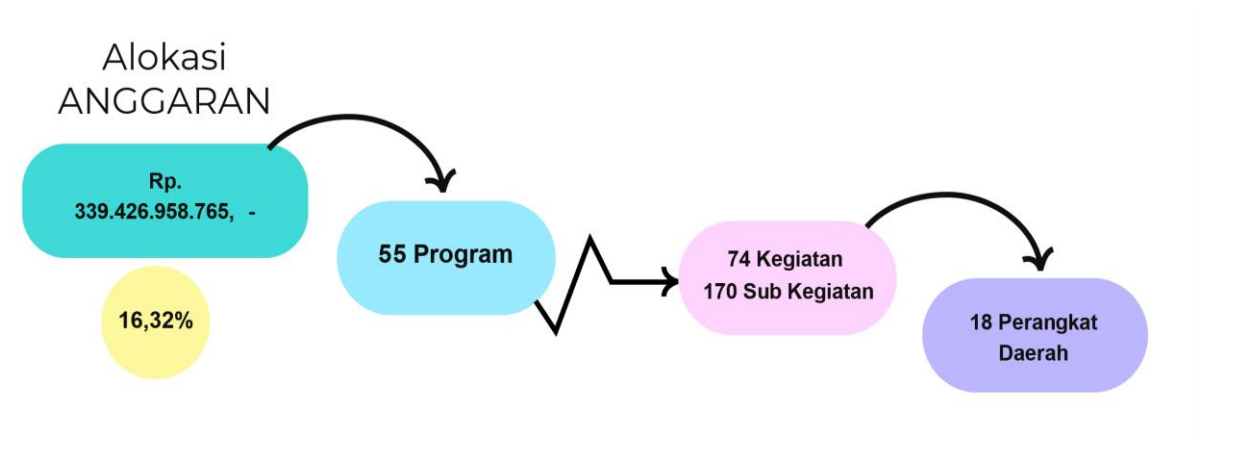
Gambar 4. 8 Realisasi Anggaran Kabupaten Situbondo Berdasarkan Kelompok Urusan Tahun 2021 - 2023

Sumber : BKAD Kabupaten Situbondo, 2024 (diolah)

Proporsi alokasi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dalam setiap tahunnya mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2022 mengalami penurunan dari 62,72% pada tahun 2021 menjadi 61,29% pada tahun 2022, dimana penurunan tersebut disebabkan oleh adanya penurunan realisasi pada urusan pendidikan dan perumahan dan kawasan permukiman. Sedangkan pada tahun 2023 proporsinya mengalami peningkatan menjadi 61,59% yang disebabkan oleh adanya peningkatan pada realisasi belanja pada urusan pendidikan, pekerjaan umum dan penataan ruang, serta ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Berkaitan dengan realisasi belanja terkait dengan pengentasan kemiskinan pada dasarnya tidak hanya terdapat pada urusan sosial yang pada tahun 2021 hingga 2023 memiliki proporsi rata-rata sebesar 0,69%, namun keberadaannya juga disupport oleh program/ kegiatan yang terdapat pada urusan terkait lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan dan kawasan permukiman, dan lainnya. Sepertihalnya terkait dengan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE), dimana PPKE merupakan program

pemerintah yang terpadu dan berkelanjutan untuk mengurangi kemiskinan ekstrem. Program ini dilakukan melalui kebijakan, program, dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pada APBD Tahun 2024 terkait dengan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 339.426.958.765,- atau mencapai 16,32% dari besar APBD Tahun 2024 yang mencapai Rp. 2.079.918.408.567,-. Dimana intervensi di Kabupaten Situbondo dilaksanakan melalui 55 program, 74 kegiatan, dan 170 sub kegiatan yang terdapat pada 18 Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.



Gambar 4. 9 Alokasi Anggaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2024  
Sumber : BAPPEDA Kabupaten Situbondo, 2024 (diolah)

Sebagian besar alokasi anggaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) Pemerintah Kabupaten Situbondo tahun 2024 terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan sebesar Rp. 136.969.356.235,00 yang terdistribusi pada 3 program, 6 kegiatan, dan 21 sub kegiatan. Sedangkan alokasi anggaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) paling kecil terdapat pada Dinas Perhubungan yang mencapai Rp. 75.000.000,00. Untuk mengetahui besar alokasi anggaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) Pemerintah Kabupaten Situbondo tahun 2024 untuk masing-masing Perangkat Daerah secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 4 Alokasi Anggaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	3	4	407.000.000,00
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	2	3	372.000.000,00
3	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan SDA	1	1	1	100.000.000,00
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3	5	12	212.404.096,00

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)
5	Dinas Kesehatan	1	2	26	52.687.842.277,00
6	Dinas Ketenagakerjaan	4	6	8	1.792.000.203,00
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	2	2	2	181.661.000,00
8	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	3	3	5	5.307.899.792,00
9	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	3	3	3	380.000.000,00
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	9	11	24	95.454.926.938,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3	3	7	6.894.500.000,00
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6	6	9	3.881.871.364,00
13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3	6	21	136.969.356.235,00
14	Dinas Perhubungan	1	1	1	75.000.000,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1	2	3	235.475.600,00
16	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	5	7	12	25.730.021.260,00
17	Dinas Peternakan dan Perikanan	4	6	10	820.000.000,00
18	Dinas Sosial	4	5	19	7.925.000.000,00
Jumlah		55	74	170	339.426.958.765,00

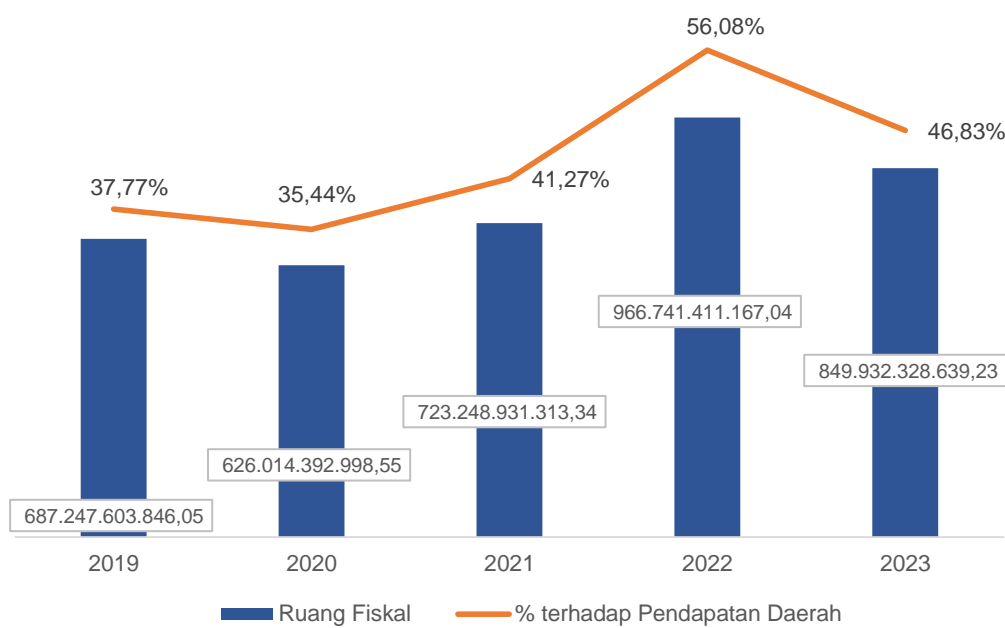
Sumber : BAPPEDA Kabupaten Situbondo, 2024 (diolah)

B. Keleluasaan Fiskal

Keleluasaan fiskal atau ruang fiskal adalah ruang dalam anggaran pemerintah untuk menyediakan sumber daya tanpa mengorbankan kestabilan ekonomi atau keuangan. Ruang Fiskal merupakan rasio yang menggambarkan besarnya pendapatan yang masih bebas digunakan oleh daerah untuk mendanai program/ kegiatan sesuai kebutuhannya. Penghitungan Ruang Fiskal diperoleh dengan mengurangi seluruh pendapatan dengan pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya (*earmarked*) dan belanja wajib seperti belanja pegawai dan bunga. Ruang fiskal (*fiscal space*) merupakan suatu konsep yang digunakan untuk mengukur fleksibilitas yang dimiliki pemerintah dalam mengalokasikan APBD bagi kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan. Ruang fiskal suatu daerah dapat diperoleh dengan menghitung total pendapatan daerah

dikurangi dengan pendapatan hibah, pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya yaitu Dana Alokasi Khusus, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Penyesuaian serta Dana Darurat, belanja yang sifatnya mengikat yaitu Belanja Pegawai dan Belanja Bunga (Hidayat, 2013).

Mendasarkan pada data realisasi keuangan daerah Kabupaten Situbondo selanjutnya dapat dilakukan perhitungan untuk mengetahui ruang fiskal. Pada tahun 2019 hingga 2023 perkembangan ruang fiskal di Kabupaten Situbondo mengalami kecenderungan yang meningkat. Pada tahun 2019 ruang fiskal Pemerintah Kabupaten Situbondo tercatat sebesar Rp. 687.247.603.846,05 atau sebesar 37,77% dari total realisasi pendapatan daerah. Sedangkan pada tahun 2020 ruang fiskal Kabupaten Situbondo mengalami penurunan menjadi sebesar Rp. 626.014.392.998,55 atau 35,44% dari total realisasi pendapatan daerah. Hal tersebut seiring dengan pandemi Covid-19, sehingga ruang fiskal yang ada pada tahun tersebut sangat terbatas. Pada tahun 2021 hingga 2022 ruang fiskal secara bertahap mengalami peningkatan sehingga menjadi Rp. 723.248.931.313,34 atau sebesar 41,27% dari total realisasi pendapatan daerah, sedangkan pada tahun 2023 sedikit mengalami penurunan menjadi Rp. 849.932.328.639,23 atau sebesar 46,83% dari total realisasi pendapatan daerah. Walaupun mengalami penurunan, posisi ruang fiskal Kabupaten Situbondo pada tahun 2023 masih lebih tinggi dibandingkan dengan posisi pada tahun 2019 dan 2021. Sehingga dengan demikian semakin besar ruang fiskal yang dimiliki suatu daerah maka akan semakin besar pula fleksibilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengalokasikan belanjanya pada kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas daerah, termasuk dalam rangka menurunkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Situbondo. Untuk mengetahui perkembangan ruang fiskal keuangan daerah Kabupaten Situbondo pada tahun 2019 hingga 2023 dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Gambar 4. 10 Ruang Fiskal Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 - 2023

Sumber : BKAD Kabupaten Situbondo, 2024 (diolah)

4.3 PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Intervensi	sub kegiatan Nomeklatur	Sasaran Penerima Manfaat	Indikator	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Instansi Terkait
				Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	
Pemberian Kemudahan/ Isentif Penanaman Modal	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Isentif dan Kemudahan Penanaman Modal	- Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) - Penanaman Modal Asing (PMA)	Jumlah dokumen terbit Kebijakan Kemudahan/ Isentif Penanaman Modal	1 Dokumen	Rp 86.130.282 ,00	1 Dokumen	Rp 110.000.00 0,00							Dinas Penanama n Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Fasilitasi/ Sosialisasi Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Isentif dan Kemudahan Penanaman Modal	- Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) - Penanaman Modal Asing (PMA) - Masyarakat sekitar perusahaan	Jumlah Investor yang menerima kemudahan/ insentif Penanaman Modal					30 Pelaku Usaha	Rp 110.000.00 0,00	30 Pelaku Usaha	Rp 110.000.00 0,00	30 Pelaku Usaha	Rp 110.000.00 0,00	Dinas Penanama n Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Penyediaan Peta Potensi Penanaman Modal	Penyusunan Peta Potensi Kabupaten Situbondo	- Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) - Penanaman Modal Asing (PMA) - Masyarakat Umum	Jumlah Peta Potensi Penanaman Modal	1 Wilayah	Rp 49.444.250 ,00	3 Wilayah	Rp 110.000.00 0,00	3 Wilayah	Rp 110.000.00 0,00	4 Wilayah	Rp 110.000.00 0,00	3 Wilayah	Rp 110.000.00 0,00	Dinas Penanama n Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	- UMKM - INVESTOR	Jumlah Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan	- 2 kali Pameran - 2 Media Radio	Rp.130.221 .000,00	- 2 kali Pameran - 2 Media Radio	Rp.143.243 .100,00	- 2 kali Pamera n - 2 Media Radio	Rp.157.567 .410,00	- 2 kali Pamera n - 2 Media Radio	Rp.173.324 .151,00	- 2 kali Pamera n - 2 Media Radio	Rp.190.656 .566,00	DPMPTSP Kabupaten Situbondo
Penyelenggara an Job Fair	Job Fair/Bursa Kerja	Masyarakat Miskin Usia Kerja	Jumlah Job Fair yang Diselenggarakan	1 Kali	125.000.00 0	1 Kali	143.750.00 0	1 Kali	165.312.50 0	2 kali	190.109.37 5	2 kali	218.625.78 1	Dinas Ketenagake rjaan
Penguatan Hubungan Industrial	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi	Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah MOU yang disepakati	2 MOU	50.000.000	2 MOU	57.500.000	2 MOU	66.125.000	2 MOU	76.043.750	2 MOU	87.450.313	Dinas Ketenagake rjaan

Intervensi	sub kegiatan Nomeklatur	Sasaran Penerima Manfaat	Indikator	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Instansi Terkait
				Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	
(Alokasi TK Lokal)	Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	dan Pekerja Migran Indonesia (PMI)												
Fasilitas Pengiriman Tenaga Migran			Jumlah Tenaga Kerja Migran Yang Difasilitasi	12 Orang		13 Orang		14 Orang		15 Orang		16 Orang		Dinas Ketenagake rjaan
Penyelenggara an Pelatihan Berbasis Penumbuhan Wira Usaha Baru (Diversifikasi Keahlian)	Perluasan Kesempatan Kerja	Masyarakat Miskin Usia Kerja	Jumlah Peserta Pelatihan	20 Orang	200.000.00 0	25 Orang	230.000.00 0	30 Orang	264.500.00 0	35 Orang	304.175.00 0	40 Orang	349.801.25 0	Dinas Ketenagake rjaan
Penguatan Unit Layanan Disabilitas	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Masyarakat Penyandang Disabilitas Usia Kerja	Jumlah Masyarakat Disabilitas yang Dilayani	25 Orang	25.000.000	27 Orang	28.750.000	29 Orang	33.062.500	31 Orang	38.021.875	33 Orang	43.725.156	Dinas Ketenagake rjaan
Penyelenggara an DIKLAT bagi Pencari Kerja Berdasarkan Cluster Kompetensi (Pendidikan Vokasi)	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Masyarakat Miskin Usia Kerja	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan	126 Orang	934.176.00 0	142 Orang	1.074.302. 400	158 Orang	1.235.447. 760	174 Orang	1.420.764. 924	190 Orang	1.633.879. 663	Dinas Ketenagake rjaan
Penyelenggara an Magang Kerja			Jumlah Peserta Magang	20 Orang		22 Orang		24 Orang		26 Orang		28 Orang		
Pembentukan Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dan Industrial Daerah (FKLPID)	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah MOU yang Disepakati	25 MOU	22.824.000	30 MOU	26.247.600	35 MOU	30.184.740	40 MOU	34.712.451	45 MOU	39.919.319	Dinas Ketenagake rjaan

Intervensi	sub kegiatan Nomeklatur	Sasaran Penerima Manfaat	Indikator	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Instansi Terkait
				Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	
Pembinaan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Tenaga Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang dibina	120 Perusahaan	150.000.000	130 Perusahaan	172.500.000	140 Perusahaan	198.375.000	150 Perusahaan	228.131.250	160 Perusahaan	262.350.938	Dinas Ketenagakerjaan
Pemantauan Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR)	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tenaga Kerja di Perusahaan	Jumlah Pembinaan dan Pemantauan yang dilaksanakan	5 kali	205.700.000	10 kali	236.555.000	15 kali	272.038.250	20 kali	312.843.988	25 kali	359.770.586	Dinas Ketenagakerjaan
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tenaga Kerja di Perusahaan	Jumlah Perselisihan PHK, Hak, Kepentingan atas Serikat Pekerja yang dicegah/diselesaikan	10 Kasus	37.300.000	15 Kasus	42.895.000	20 Kasus	49.329.250	25 Kasus	56.728.638	30 Kasus	65.237.933	Dinas Ketenagakerjaan
Pelatihan pengembangan wirausaha mula bagi pemuda	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha	pemuda di setiap kecamatan	Jumlah pemuda yang mengikuti Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda	20 pemuda	75.000.000	20 pemuda	80.000.000	30 pemuda	85.000.000	30 pemuda	90.000.000	40 pemuda	100.000.000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Intervensi	sub kegiatan Nomeklatur	Sasaran Penerima Manfaat	Indikator	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Instansi Terkait
				Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	
	pemula Tingkat Kabupaten/kota													
Sertifikasi Pelaku Pariwisata	Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS	pelaku usaha pariwisata/ SDM di lokasi Objek wisata Kabupaten Situbondo	Jumlah pelaku usaha yang tersertifikasi	15 orang	50.000.000	17 orang	70.000.000	19 orang	80.000.000	21 orang	90.000.000	25 orang	100.000.00 0	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Pelatihan pengemasan produk dan digital marketing	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	pelaku usaha kreatif di Kabupaten Situbondo	Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	40 orang	100.000.00 0	40 orang	110.000.00 0	40 orang	120.000.00 0	40 orang	130.000.00 0	50 orang	150.000.00 0	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Fasilitasi Akses Pupuk Bersubsidi	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Petani	Jumlah Petani yang mendapatkan pupuk bersubsidi	75207 Petani	125.000.00 0	75207 Petani	125.000.00 0	75207 Petani	125.000.00 0	75207 Petani	125.000.00 0	75207 Petani	125.000.00 0	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Intervensi	sub kegiatan Nomeklatur	Sasaran Penerima Manfaat	Indikator	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Instansi Terkait
				Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	
Pembangunan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kelompok Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang dibangun	12 Unit	2.150.030.000	12 Unit	2.150.030.000	12 Unit	2.150.030.000	12 Unit	2.150.030.000	12 Unit	2.150.030.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Pembangunan Jaringan Sumur Dangkal Dalam	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya & Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kelompok Tani	Jumlah Jaringan Sumur Dangkal Dalam yang dibangun	15 Unit	2.150.000.000	15 Unit	2.150.000.000	15 Unit	2.150.000.000	15 Unit	2.150.000.000	15 Unit	2.150.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT)	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kelompok Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani (JUT) yang dibangun	4 Unit	2.650.000.000	4 Unit	2.650.000.000	4 Unit	2.650.000.000	4 Unit	2.650.000.000	4 Unit	2.650.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Penyediaan Varietas Unggul Baru	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Petani	Jumlah Varietas Unggul Baru yang disediakan	125 Ton	1.250.000.000	125 Ton	1.250.000.000	125 Ton	1.250.000.000	125 Ton	1.250.000.000	125 Ton	1.250.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Penyelenggara an Sekolah Lapang	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten / Kota	Kelompok Tani	Jumlah Sekolah Lapang yang diselenggarakan	5 Unit	557.908.000	5 Unit	557.908.000	5 Unit	557.908.000	5 Unit	557.908.000	5 Unit	557.908.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Pengembangan IP 400	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Petani	Jumlah Luasan yang mengembangkan IP 400	3 Hektar	100.000.000	3 Hektar	100.000.000	3 Hektar	100.000.000	3 Hektar	100.000.000	3 Hektar	100.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Intervensi	sub kegiatan Nomeklatur	Sasaran Penerima Manfaat	Indikator	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Instansi Terkait
				Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	
Pengendalian Hama dan Penyakit	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Petani	Jumlah Luasan yang dikendalikan	50 Hektar	210.287.500	50 Hektar	210.287.500	50 Hektar	210.287.500	50 Hektar	210.287.500	50 Hektar	210.287.500	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Intensifikasi Pertanian (Tumpang Sari)	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Petani	Jumlah Luasan yang menerapkan intensifikasi	27 Hektar	450.000.000	27 Hektar	450.000.000	27 Hektar	450.000.000	27 Hektar	450.000.000	27 Hektar	450.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Pemberian Bantuan Bibit	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Petani	Jumlah Bibit yang disediakan	4100 Pohon	350.000.000	4100 Pohon	350.000.000	4100 Pohon	350.000.000	4100 Pohon	350.000.000	4100 Pohon	350.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Pemberian Bantuan Alsintan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Petani	Jumlah Alsintan yang disediakan	153 Unit	1.300.000.000	153 Unit	1.300.000.000	153 Unit	1.300.000.000	153 Unit	1.300.000.000	153 Unit	1.300.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Pemberian Bantuan Pupuk Non Subsidi	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Petani	Jumlah Pupuk Non Subsidi yang disediakan	20000 Petani	15.500.000.000	20000 Petani	15.500.000.000	20000 Petani	15.500.000.000	20000 Petani	15.500.000.000	20000 Petani	15.500.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Intervensi	sub kegiatan Nomeklatur	Sasaran Penerima Manfaat	Indikator	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Instansi Terkait
				Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	
Fasilitasi Bantuan Pupuk Non Subsidi	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Petani	Jumlah Petani yang mendapatkan Pupuk Bersubsidi		125.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Pembangunan Lumbung Pangan	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Petani	Jumlah Lumbung Pangan yang dibangun	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Penggunaan Teknologi of Seasion (Pembuahan diluar Musim) untuk Hortikultura	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Petani	Jumlah Luasan yang menerapkan teknologi of seasion	10 Hektar	-	10 Hektar	-	10 Hektar	-	10 Hektar	-	10 Hektar	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Pemberian Asuransi Bagi Petani (Tembakau & Padi)	-	-	Jumlah Petani yang terlindungi Asuransi	0 Petani	-	0 Petani	-	0 Petani	-	0 Petani	-	0 Petani	-	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Pelatihan Pengolahan Pakan yang Berkualitas	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Masyarakat Peternak	Jumlah Peternak yang mendapatkan pelatihan pengolahan pakan	3 Wilayah	28.000.000,00	3 Wilayah	40.000.000,00	3 Wilayah	60.000.000,00	3 Wilayah	700.000.000,00	3 Wilayah	80.000.000,00	DINAS PETERNAK AN DAN PERIKANAN
Penggunaan Teknologi Peternakan untuk Perkawinan Ternak	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Masyarakat Peternak	Jumlah Ternak yang kawin dengan menggunakan teknologi peternakan	0 Kecamatan	0,00	17 Kecamatan	0,00	17 Kecamatan	0,00	17 Kecamatan	0,00	17 Kecamatan	0,00	DINAS PETERNAK AN DAN PERIKANAN
Pemberian pendampingan pelayanan kesehatan hewan terpadu	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Masyarakat Peternak	Jumlah kejadian penyakit hewan yang terlayani	17 Kecamatan	50.373.563,00	17 Kecamatan	75.000.000,00	17 Kecamatan	85.000.000,00	17 Kecamatan	95.000.000,00	17 Kecamatan	105.000.000,00	DINAS PETERNAK AN DAN PERIKANAN

Intervensi	sub kegiatan Nomeklatur	Sasaran Penerima Manfaat	Indikator	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Instansi Terkait
				Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	
Pelaksanaan pelatihan peningkatan kompetensi bagi tenaga kesehatan hewan	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Petugas Medik dan Paramedik	Jumlah tenaga kesehatan hewan yang mendapatkan pelatihan	0 Puskesmas	0,00	7 Puskesmas	1.334.025.000,00	7 Puskesmas	1.334.025.000,00	7 Puskesmas	1.334.025.000,00	7 Puskesmas	1.334.025.000,00	DINAS PETERNAK AN DAN PERIKANAN
Pelaksanaan pelatihan budidaya ikan yang sesuai standar	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Pembudidaya	Jumlah pembudidaya yang mendapatkan pelatihan	10 Kelompok	50.000.000,00	10 Kelompok	65.000.000,00	10 Kelompok	75.000.000,00	10 Kelompok	85.000.000,00	10 Kelompok	95.000.000,00	DINAS PETERNAK AN DAN PERIKANAN
Penyediaan sarana dan prasarana pembudidaya ikan yang sesuai standar	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Pembudidaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembudidaya ikan yang sesuai standar	0 Kelompok	0,00	10 Kelompok	100.000.000,00	10 Kelompok	120.000.000,00	10 Kelompok	140.000.000,00	10 Kelompok	160.000.000,00	DINAS PETERNAK AN DAN PERIKANAN
Penyediaan bibit dan pakan ikan yang berkualitas	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Pembudidaya	Jumlah bibit dan pakan ikan yang disediakan	4 kelompok	200.000.000,00	6 kelompok	220.000.000,00	7 kelompok	240.000.000,00	8 kelompok	260.000.000,00	9 kelompok	280.000.000,00	DINAS PETERNAK AN DAN PERIKANAN
Pemberian bantuan bibit dan pakan ikan yang berkualitas	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Pembudidaya	Jumlah bibit dan pakan ikan yang disediakan	4 kelompok	200.000.000,00	6 kelompok	220.000.000,00	7 kelompok	240.000.000,00	8 kelompok	260.000.000,00	9 kelompok	280.000.000,00	DINAS PETERNAK AN DAN PERIKANAN
Pemberian Pendampingan dan Sosialisasi kepada nelayan dalam pemanfaatan sarana	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Nelayan laut	Jumlah pendampingan dan sosialisasi yang dilaksanakan	3 Wilayah	75.000.000,00	3 Wilayah	75.000.000,00	3 Wilayah	75.000.000,00	3 Wilayah	75.000.000,00	3 Wilayah	75.000.000,00	DINAS PETERNAK AN DAN PERIKANAN

Intervensi	sub kegiatan Nomeklatur	Sasaran Penerima Manfaat	Indikator	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Instansi Terkait
				Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	
perikanan tangkap														
Fasilitasi bantuan pendanaan dan bantuan pembiayaan kepada nelayan	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Nelayan laut	Jumlah Nelayan yang menerima Fasilitasi Bantuan	3 Wilayah	30.000.000,00	3 Wilayah	40.000.000,00	3 Wilayah	50.000.000,00	3 Wilayah	60.000.000,00	3 Wilayah	70.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
Pembangunan Gudang Pakan Ternak dan Sarprasnya	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Masyarakat Peternak	Jumlah Sarpras yang disediakan	0 Wilayah	0,00	3 Wilayah	200.000.000,00	3 Wilayah	200.000.000,00	3 Wilayah	200.000.000,00	3 Wilayah	200.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
Pemberian Asuransi bagi peternakn sapi	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Masyarakat Peternak	Jumlah peternak yang terlindungi asuransi	0 Kecamatan	0,00	17 Kecamatan	100.000.000,00	17 Kecamatan	100.000.000,00	17 Kecamatan	100.000.000,00	17 Kecamatan	100.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
Pemberian Asuransi bagi Nelayan	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Nelayan laut	Jumlah Nelayan yang terlindungi asuransi	0 Wilayah	0,00	3 Wilayah	100.000.000,00	3 Wilayah	150.000.000,00	3 Wilayah	175.000.000,00	3 Wilayah	200.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
Pelatihan pengolahan produk hasil peternakan dan perikanan	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	kelompok pengolah dan pemasar hasil peternakan dan perikanan	Jumlah pelatihan yang dilaksanakan	3 Wilayah	80.000.000,00	3 Wilayah	100.000.000,00	3 Wilayah	120.000.000,00	3 Wilayah	140.000.000,00	3 Wilayah	160.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Intervensi	sub kegiatan Nomeklatur	Sasaran Penerima Manfaat	Indikator	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Instansi Terkait
				Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	
Pemberian bantuan sarpras untuk pengolahan produk peternakan dan perikanan	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	kelompok pengolah dan pemasar hasil peternakan dan perikanan	Jumlah bantuan sarpras yang diberikan	0 Wilayah	0,00	3 Wilayah	80.000.001,00	3 Wilayah	100.000.000,00	3 Wilayah	120.000.000,00	3 Wilayah	140.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
Pelaksanaan kerjasama kemitraan usaha pasca produksi perikanan dan peternakan	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat pengolah dan pemasar hasil peternakan dan perikanan	Jumlah kerjasama kemitraan yang terjalin	0 Wilayah	0,00	3 Wilayah	80.000.002,00	3 Wilayah	100.000.000,00	3 Wilayah	120.000.000,00	3 Wilayah	140.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
penebaran bibit ikan (restocking) di Perairan Umum Daratan (PUD)	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	nelayan darat	jumlah bibit ikan yang disebar (ekor)	18000 ekor	50.000.000,00	21000 ekor	65.000.000,00	24000 ekor	80.000.000,00	27000 ekor	95.000.000,00	30000 ekor	105.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
peningkatan sarpras di TPI	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	menggerakkan roda ekonomi di wilayah pesisir - nelayan laut	Jumlah Sarpas TPI yang ditingkatkan	3 Unit	105.000.000,00	3 Unit	150.000.000,00	3 Unit	250.000.000,00	3 Unit	250.000.000,00	3 Unit	250.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
diversifikasi usaha nelayan melalui kegiatan dimasa panceklik ikan	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Nelayan Laut	Jumlah Nelayan yang mendapatkan penghasilan tambahan dimasa panceklik	3 Wilayah	0	3 Wilayah	120.000.000,00	3 Wilayah	140.000.000,00	3 Wilayah	160.000.000,00	3 Wilayah	180.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
Kebijakan Program Peningkatan Pendapatan	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta	Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidika	2 Lokus	Rp 42.221.394	3 Lokus	Rp 46.443.533	4 Lokus	51.087.887	5 Lokus	Rp 56.196.675	6 Lokus	Rp 61.816.343	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Intervensi	sub kegiatan Nomeklatur	Sasaran Penerima Manfaat	Indikator	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Instansi Terkait
				Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	
	Masyarakat													
	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Masyarakat	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	4 Layanan	Rp 133.528.60 0	4 Layanan	Rp 146.881.46 0	4 Layana n	Rp 161.569.60 6	4 Layana n	Rp 177.726.56 7	4 Layana n	Rp 195.499.22 3	Dinas Perpustaka an dan Kearsipan
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Masyarakat	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	500 Buku	Rp 74.379.900	550 Buku	Rp 81.817.890	600 Buku	Rp 89.999.679	650 Buku	Rp 98.999.647	700 Buku	Rp 108.899.61 2	Dinas Perpustaka an dan Kearsipan
	Pengembangan literasi berbasis inklusi sosial	Masyarakat	Jumlah perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	10 Perpusta kaan	Rp 53.223.400	12 Perpusta kaan	Rp 58.545.740	14 Perpust akaan	Rp 64.400.314	16 Perpust akaan	Rp 70.840.345	18 Perpust akaan	Rp 77.924.380	Dinas Perpustaka an dan Kearsipan
Meningkatkan Stabilitas Harga Hasil Pertanian Peternakan dan Perikanan	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Masyarakat	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	12 Dokumen	Rp128.350. 250	12 Dokumen	Rp141.185. 000	12 Dokum en	155.303.50 0	12 Dokum en	Rp170.833. 850	12 Dokum en	Rp187.917. 235	Dinas Kominfo
	Pelayanan Informasi Publik	Masyarakat	Jumlah Dokumen Kemitraan Komunikasi dengan	12 Dokumen	Rp53.185.0 00	12 Dokumen	Rp58.503.5 00	12 Dokum en	Rp64.353.8 50	12 Dokum en	Rp70.789.2 35	12 Dokum en	Rp77.868.1 59	Dinas Kominfo

Intervensi	sub kegiatan Nomeklatur	Sasaran Penerima Manfaat	Indikator	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Instansi Terkait
				Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	
			Komunitas Informasi Masyarakat											
	Pengelolaan media komunikasi publik	Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	Rp2.725.00 0.000	12 Dokumen	Rp2.725.00 0.000	12 Dokum en	Rp2.725.00 0.000	12 Dokum en	Rp2.725.00 0.000	12 Dokum en	Rp2.725.00 0.000	Dinas Kominfo
Menyediakan informasi Harga Kebutuhan Bahan Pokok	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Masyarakat dan Pelaku Usaha	Jumlah Informasi yang Disediakan	12 Laporan	110.000.00 0	12 Laporan	110.000.00 0	12 Lapora n	120.000.00 0	12 Lapora n	120.000.00 0	12 Lapora n	120.000.00 0	Dinas Koperasi, Perindustri an dan Perdaganga n
Menyediakan informasi Harga Kebutuhan Bahan Pokok	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Masyarakat	Jumlah Informasi yang Disediakan	20 Kali	390.000.00 0	20 Kali	390.000.00 0	20 Kali	400.000.00 0	20 Kali	400.000.00 0	20 Kali	400.000.00 0	Dinas Koperasi, Perindustri an dan Perdaganga n
Pelatihan Peningkatan Kualitas Produksi dan Pemasaran	Pengembangan Usaha Mikro	Usaha Mikro	Jumlah UM yang Mengikuti Pelatihan	100 Orang	300.000.00 0	100 Orang	300.000.00 0	150 Orang	350.000.00 0	150 Orang	350.000.00 0	200 Orang	400.000.00 0	Dinas Koperasi, Perindustri an dan Perdaganga n
Pelatihan Peningkatan Keterampilan bagi Wirausaha Baru	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Wirausaha Pemula atau Wirausaha Baru	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan	100 Orang	250.000.00 0	100 Orang	250.000.00 0	150 Orang	350.000.00 0	150 Orang	350.000.00 0	200 Orang	450.000.00 0	Dinas Koperasi, Perindustri an dan Perdaganga n

Intervensi	sub kegiatan Nomeklatur	Sasaran Penerima Manfaat	Indikator	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Instansi Terkait
				Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	
Penyaluran Bantuan alat bantu	Penyediaan Alat Bantu	masyarakat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	15	50000000	10	50000000	10	50000000	10	50000000	Dinas Sosial
Penyaluran bantuan Pangan	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	masyarakat	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15504	265000000 0	15000	300000000 0	15000	300000000 0	15000	300000000 0	15000	300000000 0	Dinas Sosial
Penyaluran Bantuan sandang	Penyediaan Sandang	masyarakat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	25	7500000	20	10000000	20	10000000	20	10000000	20	10000000	Dinas Sosial
Penyaluran bantuan sosial untuk korban bencana	Penyediaan Makanan	masyarakat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	60	25000000	100	50000000	100	50000000	100	50000000	100	50000000	Dinas Sosial

Intervensi	sub kegiatan Nomeklatur	Sasaran Penerima Manfaat	Indikator	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Instansi Terkait
				Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	
Penyaluran Bantuan wanita rawan sosial	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	masyarakat	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	20	100000000	20	100000000	20	100000000	20	100000000	Dinas Sosial
Data Perencanaan Bappeda berbasis penduduk sebagai dasar intervensi program penanggulangan kemiskinan (dengan sumber data: P3KE dan update kondisi riil di lapangan)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Penduduk Kategori Miskin dan Sangat Miskin di Kabupaten Situbondo	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	300.000.000	2 Laporan	315.000.000	2 Laporan	330.750.000	2 Laporan	347.287.500	2 Laporan	364.651.875	Badan Perencanaaan Pembangunan Daerah
Optimalisasi Koordinasi Sekretariat TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) Kabupaten Situbondo	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Penduduk Kategori Miskin dan Sangat Miskin di Kabupaten Situbondo	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	2 Laporan	244.200.786	2 Laporan	256.410.825	2 Laporan	269.231.366	2 Laporan	282.692.935	2 Laporan	296.827.582	Badan Perencanaaan Pembangunan Daerah

Intervensi	sub kegiatan Nomeklatur	Sasaran Penerima Manfaat	Indikator	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Instansi Terkait
				Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	
Pembayaran iuran masyarakat miskin	pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	Masyarakat miskin Kabupaten Situbonddo	Jumlah kunjungan Program SEHATI JumlahPBPU Pemda yang iurannya dibayar oleh Pemda	Sehati 90% PBPU Pemda 98%	Sehati Rp. 21.000.000 .000; PBPU Pemda Rp.43.717.094.400	Sehati 95% PBPU Pemda 98%	Sehati Rp. 22.000.000 .000; PBPU Pemda Rp.43.717.094.400	Sehati 100% PBPU Pemda 100%	Sehati Rp. 23.000.000 .000; PBPU Pemda Rp.45.902.949.000	Sehati 100% PBPU Pemda 100%	Sehati Rp. 24.000.000 .000; PBPU Pemda Rp.48.198.096.456	Sehati 100% PBPU Pemda 100%	Sehati Rp. 25.000.000 .000; PBPU Pemda Rp.50.608.001.278	Dinas Kesehatan
pemberian makanan tambahan pemulihan	pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	Balita Malnutrisi	Jumlah Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang yang mendapatkan Makanan Tambahan Pemulihan Selama 90 hari	100%	288.910.800	100%	303.356.000	100%	318.524.000	100%	334.450.000	100%	351.172.000	Dinas Kesehatan
pemberian makanan tambahan stimulan	pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	Balita Stunting Gakin	Jumlah Balita Stunting yang Gakin mendapatkan Makanan Tambahan Stimulan dalam waktu 1 kali pemberian dan pemberian Edukasi Gizi Seimbang kaya protein hewani	100%	209.141.000	100%	219.958.000	100%	230.577.000	100%	242.106.000	100%	254.212.000	Dinas Kesehatan
bantuan beasiswa terancam putus sekolah	Penyediaan Bantuan Operasional Peserta didik	siswa yang miskin	jumlah siswa miskin miskin yang menerima biaya pendidikan	250 anak	215.000.000	250 anak	215.000.000	250 anak	215.000.000	250 anak	215.000.000	250 anak	215.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
beasiswa perguruan tinggi untuk Rumah Tinggi Miskin	Penyediaan Bantuan Operasional Peserta didik	lulusan sma yang miskin	jumlah siswa miskin yang mendapatkan beasiswa perguruan tinggi	155 Mahasiswa	3.229.000.000	155 Mahasiswa	3.229.000.000	155 Mahasi swa	3.229.000.000	155 Mahasi swa	3.229.000.000	155 Mahasi swa	3.229.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Intervensi	sub kegiatan Nomeklatur	Sasaran Penerima Manfaat	Indikator	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Instansi Terkait
				Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	
Pembentukan Tim ATS daerah	sinergitas dan kordinasi bidang pemerintahan													Bappeda
Fasilitasi anak tidak sekolah melalui PKBM	Penyelenggaraan proses peserta didik	siswa kejar paket C	jumlah kejar paket C	2500 Peserta Didik	1.470.626.425	3500 Peserta Didik	2.250.000.000	3500 Peserta Didik	3.000.000.000	3500 Peserta Didik	4.500.000.000	3500 Peserta Didik	4.500.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
insentif guru ngaji	perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga pendidikan satuan pendidikan dasar, PAUD, dan Pendidikan formal/kesetaraan	guru ngaji TPQ/guru minggu	jumlah guru ngaji TPQ/guru minggu yang mendapatkan insentif	4861 Orang	9.722.000.000	4861 Orang	9.722.000.000	4861 Orang	9.722.000.000	4861 Orang	9.722.000.000	4861 Orang	9.722.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Insentif guru PAUD	perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga pendidikan satuan pendidikan dasar, PAUD, dan Pendidikan formal/kesetaraan	Guru KB dan Guru TK	jumlah guru PAUD yang mendapatkan insentif	1826 Orang	7.669.200.000	1826 Orang	7.669.200.000	1826 Orang	7.669.200.000	1826 Orang	7.669.200.000	1826 Orang	7.669.200.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyiapan Data	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Organisasi Perangkat Daerah, Kecamatan, dan Instansi Terkait	Jumlah buku Data Kependudukan Bersih yang diterbitkan	2	Rp 12.500.000	2	Rp 13.750.000	2	Rp 15.125.000	2	Rp 16.637.500	2	Rp 18.301.250	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Monev Data	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Instansi Terkait	Jumlah dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	27	Rp 10.000.000	27	Rp 11.000.000	27	Rp 12.100.000	27	Rp 13.310.000	27	Rp 14.641.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Intervensi	sub kegiatan Nomeklatur	Sasaran Penerima Manfaat	Indikator	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Instansi Terkait
				Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	
Penghitungan Penilaian Kerusakan	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Korban Terdampak Bencana	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	4 Dokumen	143.000.00 0									BPBD
Pengiriman Air Bersih	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Korban Terdampak Bencana	Persentase Korban terdampak kekeringan yang mendapatkan bantuan air bersih	100 Persen	80.000.000									BPBD
Pengiriman Air Bersih	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Korban Terdampak Bencana	Persentase Korban terdampak kekeringan yang mendapatkan bantuan air bersih	100 Persen	20.000.000									BPBD
Bantuan Sembako	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Korban Terdampak Bencana	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 Persen	126.573.60 0									BPBD
Pembangunan Infrastruktur SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) di Wilayah Perdesaan	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Rumah Tangga di kawasan perdesaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	0,075 Liter/Deti k	600.000.00 0,00	0,0825 Liter/Deti k	660.000.00 0,00	0,091 Liter/D etik	726.000.00 0,00	0,1 Liter/D etik	798.600.00 0,00	0,11 Liter/D etik	878.460.00 0,00	DPUPP

Intervensi	sub kegiatan Nomeklatur	Sasaran Penerima Manfaat	Indikator	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Instansi Terkait
				Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	
	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Rumah Tangga di kawasan perdesaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	1,43 Liter/Detik	8.490.000.000,00	1,57 Liter/Detik	9.339.000.000,00	1,73 Liter/Detik	10.272.900.000,00	1,9 Liter/Detik	11.300.190.000,00	2,09 Liter/Detik	12.430.209.000,00	DPUPP
Pemeliharaan infrastruktur SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) di wilayah perdesaan	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Rumah Tangga di kawasan perdesaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	3 Unit	350.000.000,00	3 Unit	385.000.000,00	3 Unit	423.500.000,00	3 Unit	465.850.000,00	4 Unit	512.435.000,00	DPUPP
Pembinaan pengelolaan dan pengembangan SPAM	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Kelompok masyarakat pengelola SPAM	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	30 Desa	150.000.000,00	33 Desa	165.000.000,00	36 Desa	181.500.000,00	39 Desa	199.650.000,00	43 Desa	219.615.000,00	DPUPP
Pembangunan Jamban Keluarga Masyarakat Miskin	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Rumah Tangga lokus stunting	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	1,39 M³/Hari	17.160.000.000,00	1,55 M³/Hari	19.044.833.500,00	1,7 M³/Hari	20.949.316.850,00	1,87 M³/Hari	23.044.248.535,00	2,06 M³/Hari	25.348.673.388,50	DPUPP
	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Rumah Tangga miskin ekstrim	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	267 Rumah Tangga	2.404.500.000,00	467 Rumah Tangga	4.211.240.000,00	514 Rumah Tangga	4.632.364.000,00	566 Rumah Tangga	5.095.600.400,00	622 Rumah Tangga	5.605.160.440,00	DPUPP
Pembinaan pengelolaan Jamban Keluarga	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Rumah Tangga lokus stunting	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	1,39 M³/Hari	17.160.000.000,00	1,55 M³/Hari	19.044.833.500,00	1,7 M³/Hari	20.949.316.850,00	1,87 M³/Hari	23.044.248.535,00	2,06 M³/Hari	25.348.673.388,50	DPUPP

Intervensi	sub kegiatan Nomeklatur	Sasaran Penerima Manfaat	Indikator	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Instansi Terkait
				Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	
	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Rumah Tangga miskin ekstrim	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	267 Rumah Tangga	2.404.500.000,00	467 Rumah Tangga	4.211.240.000,00	514 Rumah Tangga	4.632.364.000,00	566 Rumah Tangga	5.095.600.400,00	622 Rumah Tangga	5.605.160.440,00	DPUPP
Peningkatan PSU di Kawasan Kumuh	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Rumah Tangga di kawasan permukiman kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	0 Ha	0	3,4 Ha	3.410.000.000,00	3,75 Ha	3.751.000.000,00	4,12 Ha	4.126.100.000,00	4,53 Ha	4.538.710.000,00	DPUPP
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Rumah Tangga miskin ekstrim	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	688 Unit Rumah	10.320.000.000,00	880 Unit Rumah	13.200.000.000,00	880 Unit Rumah	13.200.000.000,00	880 Unit Rumah	13.200.000.000,00	880 Unit Rumah	13.200.000.000,00	DPUPP
Pembangunan Jalan dan Jembatan di daerah terisolir	Rekonstruksi Jalan	Masyarakat daerah terisolir	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	10 KM	11.250.000.000,00	10 KM	11.250.000.000,00	10 KM	11.250.000.000,00	10 KM	11.250.000.000,00	10 KM	11.250.000.000,00	DPUPP
Rehabilitasi Jalan dan Jembatan di daerah terisolir	Rehabilitasi Jalan	Masyarakat daerah terisolir	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	3,5 KM	4.200.000.000,00	3,5 KM	4.200.000.000,00	3,5 KM	4.200.000.000,00	3,5 KM	4.200.000.000,00	3,5 KM	4.200.000.000,00	DPUPP
	Rehabilitasi Jembatan	Masyarakat daerah terisolir	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	1 Jembatan	400.000.000,00	1 Jembatan	400.000.000,00	1 Jembatan	400.000.000,00	1 Jembatan	400.000.000,00	1 Jembatan	400.000.000,00	DPUPP

Intervensi	sub kegiatan Nomeklatur	Sasaran Penerima Manfaat	Indikator	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Instansi Terkait
				Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	
Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan, Meningkatkan aksesibilitas jalan, menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi angka laka dan tindak kriminalitas lainnya	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pengguna Jalan	Jumlah PJU yang terpasang di Kabupaten Situbondo	653 buah	12.454.216.516,00									Dinas Perhubungan
Meningkatkan aksesibilitas jalan, menciptakan lapangan kerja baru	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barangantar Kota dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kelompok Masyarakat yang terisolir	Jumlah Moda Transportasi yang diterima											Dinas Perhubungan
Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan, mengurangi angka laka dan tindak kriminalitas lainnya	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat Kabupaten Situbondo yang memanfaatkan pelayanan penyebrangan jangkar ke pulau madura	Jumlah Kendaraan yang mengangkut Masyarakat Mengikuti Balik Gratis	24 Kendaraan	300.000.000,00									Dinas Perhubungan
Pelatihan Penguatan Kelembagaan & Tata Kelola BUMDes		Pengurus BUMDes	Persentase pengurus lembaga bumdes yang memahami pengelolaan usaha Bumdes	15,15%	100.000.000	15,15%	100.000.000	15,15%	100.000.000	15,15%	100.000.000	15,15%	100.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Intervensi	sub kegiatan Nomeklatur	Sasaran Penerima Manfaat	Indikator	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Instansi Terkait
				Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	
		Lembaga BUMDes	Persentase BUMDes Berbadan Hukum	30,30%	30.000.000	37,87%	35.000.000	45,45%	40.000.000	53,03%	50.000.000	60,60%	55.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi BUMDes		Lembaga BUMDes	Persentase Lembaga BUMDes yang dibina, dimonitor dan dievaluasi	37,87%	35.000.000	37,87%	35.000.000	37,87%	35.000.000	37,87%	35.000.000	37,87%	35.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Perempuan Kepala Keluarga, disabilitas, Korban Kekerasan dan Masyarakat Miskin	Jumlah Peserta Pelatihan	28,6	230.355.029	28,6	1.737.935.039	29,4	1.798.701.998,41	30	1.859.882.338,49	30,2	1.921.878.416,44	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatkan Advokasi Pernikahan Dini	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	Calon Pengantin Dibawah Umur (19 Tahun)	Jumlah masyarakat yang mendapatkan layanan advokasi	300	16.200.000	250	16.200.000	200	16.200.000	150	16.200.000	100	16.200.000	

Intervensi	sub kegiatan Nomeklatur	Sasaran Penerima Manfaat	Indikator	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Instansi Terkait
				Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	Target	Pagu Anggaran	
Meningkatkan Edukasi Pernikahan Dini	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah Kabupaten/Kota	Disabilitas (PPDis), GOW (Gabungan Organisasi Wanita), PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga)	Jumlah peserta sosialisasi	200	105.260.000	250	120.000.000	300	140.000.000	300	140.000.000	350	150.000.000	
Meningkatnya Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	Pasangan Usia Subur (PUS)	Jumlah akseptor kesertaan ber KB	3.609	1.786.715.000,00	3.609	1.786.715.000,00	3.609	1.786.715.000,00	3.609	1.786.715.000,00	3.609	1.786.715.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatnya Promosi dan Konseling														
Meningkatnya kapasitas penyuluh KB														

## BAB V

### LOKASI PRIORITAS

Bagian ini secara khusus mernguraikan prioritas intervensi kemiskinan berbasis kewilayahan dengan dasar data Penysasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang dirilis oleh Pemerintah Pusat. Prioritas Intervensi kewilayan ini akan digambarkan dengan hasil pemetaan daerah-daerah dengan kerawanan tinggi pada bidang tertentu sehingga memiliki urgensi untuk diintervensi oleh Kebijakan penanggulangan kemiskinan. Intervensi penanggulangan kemiskinan berbasis kewilayahan di Kabupaten Situbondo ini bersifat krusial karena keberadaanya yang akan sejalan dan mendukung pada tujuan berikut:

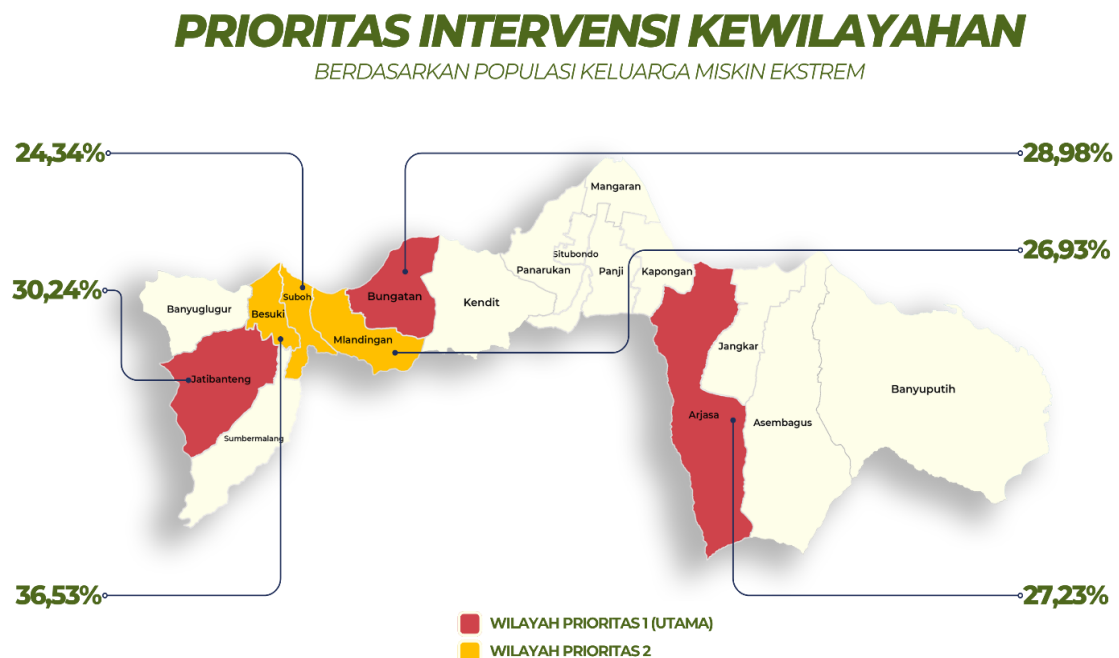
1. Mengatasi Kesenjangan Wilayah: Kemiskinan seringkali tidak merata di seluruh wilayah. Beberapa wilayah mungkin menghadapi tingkat kemiskinan yang lebih tinggi daripada yang lain. Intervensi berbasis kewilayahan membantu dalam mengurangi ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya dan peluang, dengan fokus pada daerah yang paling memerlukan.
2. Pemanfaatan Sumber Daya Lokal: Pendekatan ini memungkinkan penggunaan sumber daya lokal yang ada, termasuk potensi ekonomi dan sumber daya manusia. Ini dapat merangsang perkembangan ekonomi lokal dan menciptakan peluang kerja, yang pada gilirannya dapat membantu mengurangi kemiskinan.
3. Kontinuitas dan Keberlanjutan: Intervensi berbasis kewilayahan lebih mungkin menciptakan program-program yang berkelanjutan. Dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan, ada potensi lebih besar untuk pemeliharaan program setelah pendanaan asli telah berakhir.
4. Mengoptimalkan Hasil: Pendekatan ini memungkinkan penggunaan sumber daya secara lebih efisien. Dengan fokus pada daerah yang memerlukan bantuan paling mendesak, hasil dari intervensi dapat lebih optimal.

Adapun proses penentuan lokasi prioritas ini dilakukan dengan melakukan *overlaying* data kemiskinan ekstrem dengan sektor-sektor yang memiliki daya ungkit tinggi ke dalam peta kewilayahan Kabupaten Situbondo sehingga memunculkan beberapa wilayah prioritas Intervensi berdasarkan sektor-sektor yang dimaksud yaitu antara lain:

1. Wilayah dengan Penduduk Miskin Ekstrem Tinggi (Umum)
2. Wilayah dengan Penduduk Berisiko Stunting Tinggi
3. Wilayah dengan Masyarakat Miskin Usia Sekolah Tinggi
4. Wilayah dengan Populasi Penduduk Miskin Belum Bekerja Tinggi
5. Wilayah dengan Penduduk yang Tidak Mendapat Jaminan Sosial Tinggi
6. Wilayah dengan Keterbatasan Akses Pada Infrastruktur Dasar Tinggi (Sanitasi dan Air Minum Layak)

### 5.1 Prioritas Wilayah Bidang Kemiskinan Ekstrem

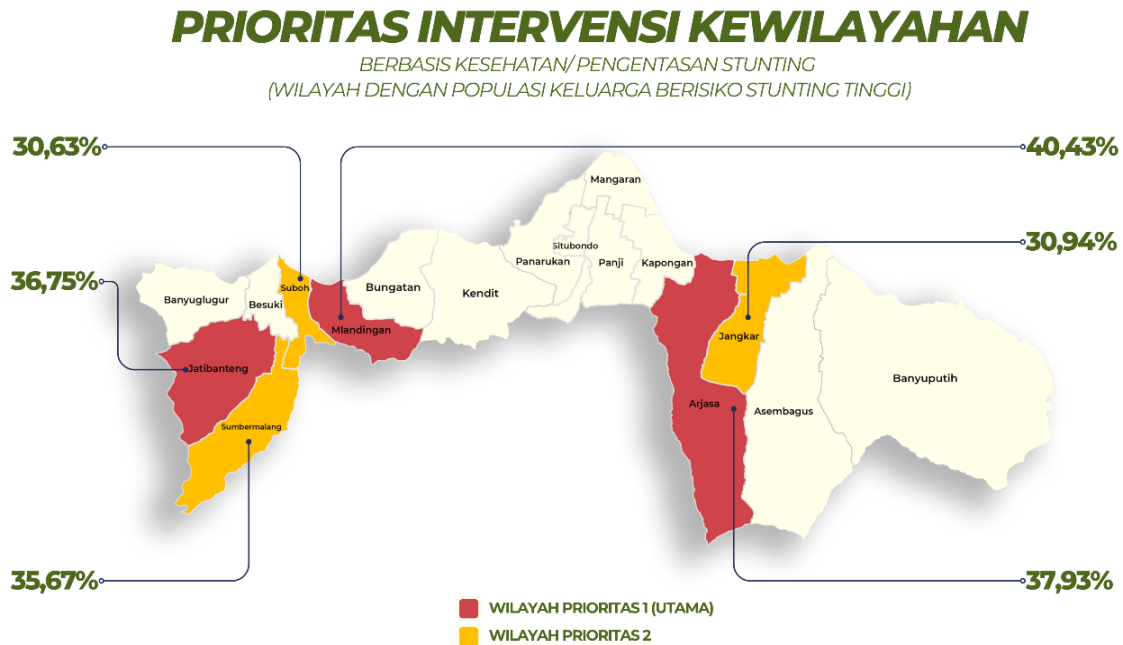
Berdasarkan data Penyesaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), secara umum terdapat 3 wilayah di Kabupaten Situbondo yang memiliki persentase keluarga dengan kemiskinan ekstrem yang tinggi (berada pada desil 1) yang menjadi prioritas utama dalam intervensi kewilayah bidang kemiskinan ekstrem, yaitu Kecamatan Jatibanteng, Bungatan, dan Arjasa, di mana tiga kecamatan tersebut ditandai dengan peta wilayah berwarna merah. Sedangkan, Kecamatan Mlandingan, Besuki dan Suboh yang diwarnai kuning pada peta merupakan Wilayah dengan persentase penduduk miskin ekstrem yang berada di peringkat 3 – 6 terbanyak di Kabupaten Situbondo dan ditempatkan sebagai prioritas 2 intervensi berdasarkan persentase penduduk miskin ekstrem.



### 5.2 Prioritas Wilayah Bidang Kesehatan

Kesehatan juga menjadi salah satu faktor yang memiliki daya ungkit besar dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Situbondo sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Secara spesifik, risiko kesehatan yang mengancam mayoritas keluarga miskin di Kabupaten Sibondo adalah stunting, kondisi di mana balita dari keluarga miskin mengalami gangguan pertumbuhan yang ditandai dengan berat badan dan tinggi yang kurang, sehingga mengancam kondisi kesehatannya di masa mendatang. Dengan kondisi tersebut, maka wilayah di Kabupaten Situbondo yang memiliki jumlah keluarga rentan stunting menjadi daerah

prioritas bidang kesehatan demi menjamin layanan kesehatan bagi rumah tangga miskin. Beberapa kecamatan yang termasuk dengan persentase keluarga rentang stunting yang tinggi yang menjadi wilayah prioritas adalah sebagai berikut:

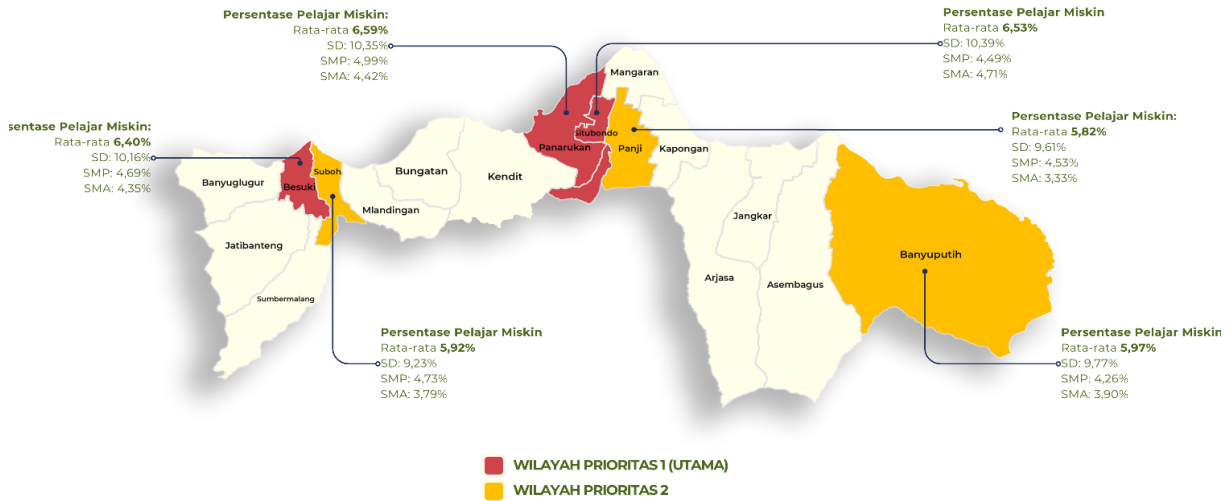


### 5.3 Prioritas Wilayah Bidang Pendidikan

Apabila mengacu pada hasil analisis pada bagian sebelumnya, sektor pendidikan juga menjadi salah satu faktor yang memiliki daya ungkit besar dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Situbondo. Berangkat dari fakta tersebut, beberapa wilayah di Kabupaten Situbondo yang memiliki persentase masyarakat miskin yang masih mengenyam pendidikan baik di tingkat SD, SMP maupun SMA menjadi daerah prioritas intervensi di bidang pendidikan. Hal ini menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan bagi masyarakat miskin Kabupaten Situbondo. Beberapa kecamatan yang termasuk dalam wilayah prioritas adalah sebagai berikut:

## PRIORITAS INTERVENSI KEWILAYAHAN

BERDASARKAN MAYORITAS PELAJAR MISKIN

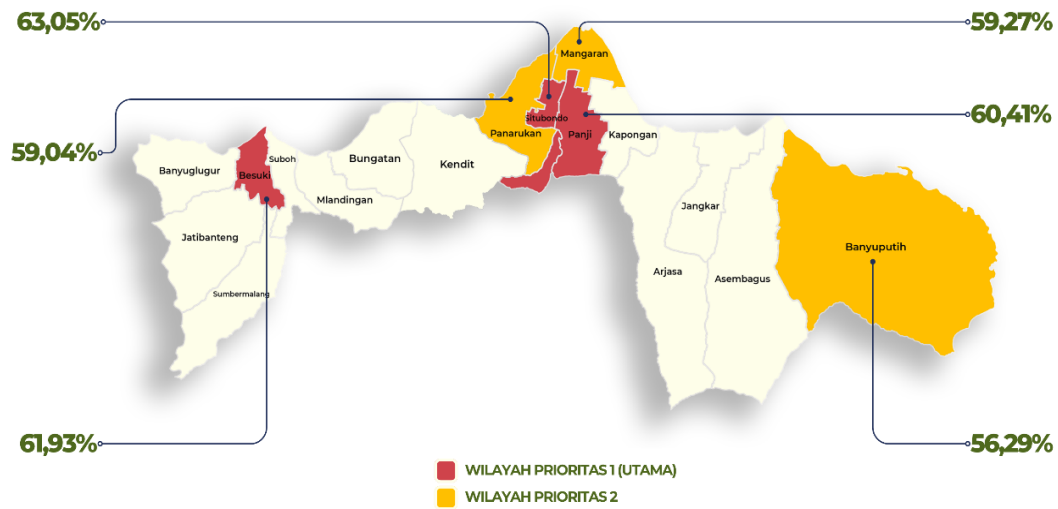


### 5.4 Prioritas Wilayah Bidang Ketenagakerjaan

Selain sektor kesehatan dan pendidikan, berdasarkan uji determinasi faktor pengungkit dalam penanggulangan kemiskinan yang telah dijabarkan dalam Bab sebelumnya, ketenagakerjaan juga menjadi salah satu faktor determinan. Hal ini juga didukung dengan kondisi di lapangan, di mana mayoritas masyarakat miskin di Kabupaten Situbondo masih didominasi oleh mereka yang belum bekerja. sehingga intervensi kewilayahan ini juga memprioritaskan wilayah-wilayah dengan mayoritas penduduk miskin yang belum memiliki pekerjaan atau belum bekerja sebagaimana yang tertuang dalam gambar berikut ini

## PRIORITAS INTERVENSI KEWILAYAHAN

BERBASIS INTERVENSI BIDANG KETENAGAKERJAAN



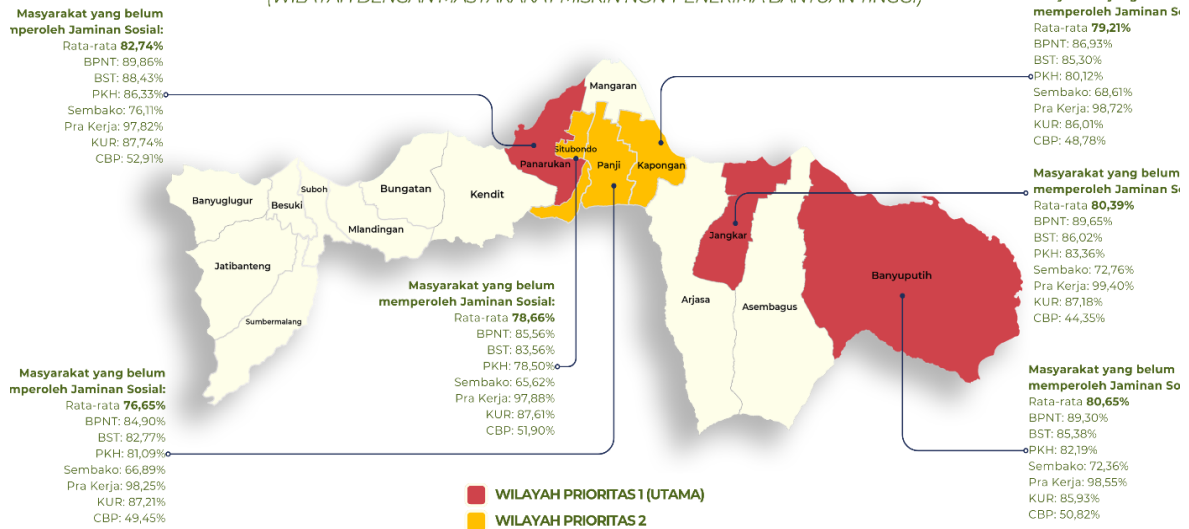
### 5.5 Prioritas Wilayah Bidang Bantuan/ Jaminan Sosial

Bantuan atau jaminan sosial juga dipandang sebagai salah satu sarana dalam penanggulangan kemiskinan. Ini dikarenakan keberadaannya yang mampu mengurangi beban pengeluaran dari penduduk miskin secara umum. Maka dari itu dalam prioritas kewilayah ini, daerah-daerah yang memiliki persentase penduduk miskin yang tidak terjamin atau terbantu oleh berbagai macam bantuan sosial tinggi, akan diprioritaskan dalam prioritas intervensi bidang perluasan jaminan sosial. Adapun kecamatan-kecamatan yang memiliki penduduk miskin yang tidak terjamin/ terbantu secara sosial adalah sebagai berikut

## PRIORITAS INTERVENSI KEWILAYAHAN

BERBASIS PERLUASAN JAMINAN SOSIAL

(WILAYAH DENGAN MASYARAKAT MISKIN NON-PENERIMA BANTUAN TINGGI)

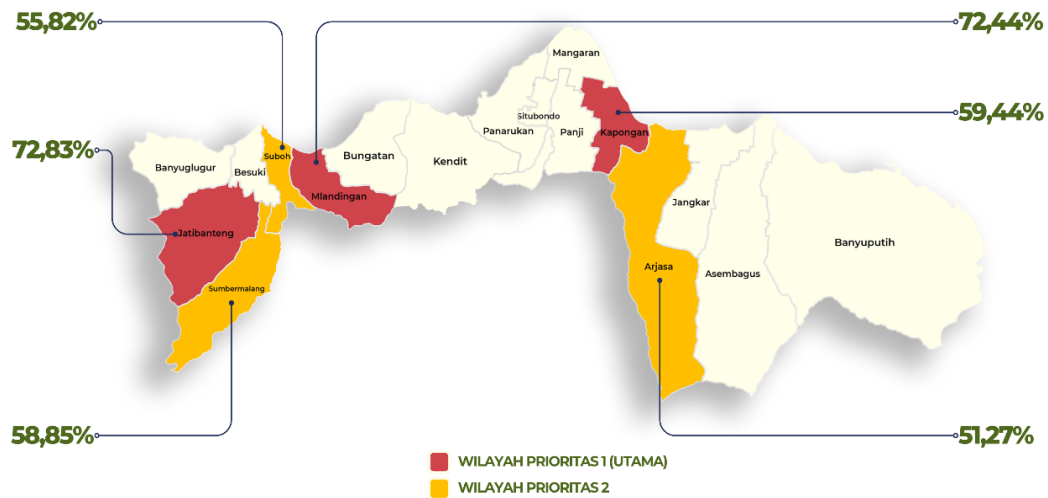


### 5.6 Prioritas Wilayah Bidang Infrastruktur Dasar

Akses pada sanitasi dan air minum yang layak juga merupakan faktor determinan dalam penanggulangan kemiskinan melalui skenario peningkatan kualitas hidup layak di Kabupaten Situbondo. Maka dari itu, wilayah dengan masyarakat miskin yang terhambat secara akses sanitasi dan air minum layak, menjadi prioritas intervensi bidang infrastruktur dasar. Adapun wilayah-wilayah yang memiliki persentase penduduk miskin dengan keterbatasan akses sanitasi layak tinggi adalah sebagai berikut

## PRIORITAS INTERVENSI KEWILAYAHAN

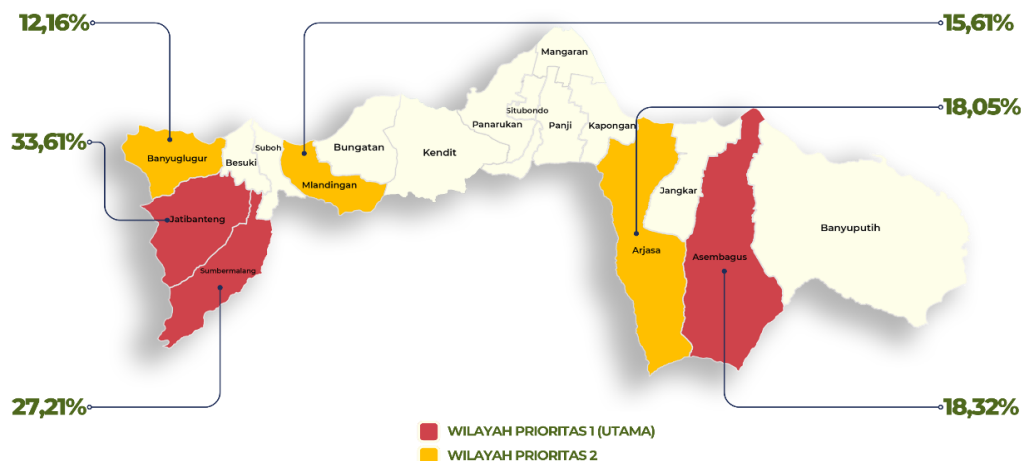
BERBASIS PENINGKATAN SANITASI LAYAK



Selain fokus pada intervensi berbasis peningkatan sanitasi layak, penanggulangan kemiskinan fokus bidang infrastruktur dasar di Situbondo juga diarahkan untuk memperluas akses air minum layak bagi penduduk miskin, sehingga wilayah-wilayah dengan penduduk miskin yang terbatas secara akses pada air minum layak, juga menjadi prioritas yaitu sebagai berikut:

## PRIORITAS INTERVENSI KEWILAYAHAN

BERBASIS PENINGKATAN AKSES AIR MINUM LAYAK



## BAB VI

### PENUTUP

Penyusunan RPKD Kabupten Situbondo Tahun 2025-2029 sangat penting sebagai perencanaan yang sistematis, terpadu dan komprehensif. Dalam pembahasannya telah terdapat pembahasan terkait dengan strategi, arah kebijakan, prioritas intervensi, prioritas wilayah hingga program, kegiatan dan sub-kegiatan. Oleh karena itu dalam pelaksanaan RPKD ini penting untuk mempertimbangkan beberapa hal berikut:

1. Koordinasi lintas sektor untuk memaksimalkan implementasi RPKD, sehingga perencanaan yang sistematis, terpadu dan komprehensif dapat terlaksana dalam penanggulangan kemiskinan.
2. Dalam perjalanannya, permasalahan data kemiskinan menjadi faktor paling dominan dalam menentukan sasaran penanggulangan kemiskinan. Sehingga penting adanya verifikasi dan sinkronisasi data.
3. Menentukan prioritas intervensi yang akan menjadi fokus utama dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan berdasarkan nilai determinan tertinggi. Menilik pada urutan nilai determinan, maka urutan prioritas adalah
  - a. Demotivasi
  - b. Pernikahan dini
  - c. Tingkat pendidikan
  - d. Kesempatan kerja
  - e. Penjualan hasil produksi pertanian, peternakan, dan perikanan
  - f. Modal
4. Memperkuat pencapaian SDG's tujuan Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Di Mana Pun untuk mendongkrak penutunan kemiskinan.

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI